NASIONALRE
Reinsurance

2021 | LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

MOVING to PROGRESS

© 2018 PT Reasuransi Nasional Indonesia

MOVING to PROGRESS

Tahun 2021 menjadi babak dimulainya pemulihan beberapa sektor bisnis seiring dengan pemulihan perekonomian baik global maupun nasional setelah terdampak dari pandemi yang terjadi dalam dua tahun terakhir, termasuk sektor bisnis NASIONAL RE. Pada tahun ini Perusahaan berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan namun terdapat kenaikan klaim pula sebagai imbas dari pandemi. Sebagai bagian dari upaya antisipasi dan mitigasi terhadap kemungkinan tingkat klaim yang meningkat di masa mendatang, di tahun ini Perusahaan meningkatkan cadangan klaimnya. Kebijakan strategis yang diambil tersebut menjadi bagian dari upaya Perusahaan untuk terus bergerak maju dan fokus tidak hanya untuk jangka pendek namun juga keberlanjutan Perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga ke depan Perusahaan akan mampu memulihkan kinerjanya dan menciptakan nilai lebih bagi seluruh pemangku kepentingan.

2021 marks as the starting year of several business sectors recovery in line with the recovery of the global and national economy after being affected by the pandemic that occurred in the last two years, including the NASIONAL RE business sector. This year the Company successfully recorded revenue growth but there was also an increase in claims as a result of the pandemic. As part of its efforts to anticipate and mitigate the possibility of increasing claim rates in the future, this year the Company increased its claim reserves. This strategic policy taken is part of the Company's efforts to keep moving to progress and focus not only on the short term but also on the Company's sustainability in the long term. So that in the future the Company will be able to recover its performance and create added values for all stakeholders.

Kesinambungan Tema
THEME CONTINUITY

Kesinambungan Tema 5 (lima) Tahun terakhir
THEME CONTINUITY IN THE LAST 5 (FIVE) YEARS

2017

Melanjutkan Performa untuk Memimpin Masa Depan

Continuing Performance to Lead the Future

2018

Memelihara Kemajuan Bergerak Menuju Fase Baru

Nurturing Progress Moving Towards New Phase

2019

25 Tahun Melayani Negeri

25 Years Serving The Country

2020

Pembenahan Internal untuk Memperkuat Fundamental yang Lebih Baik

Internal Improvement to Reinforce A Better Fundamental

MOVING to PROGRESS

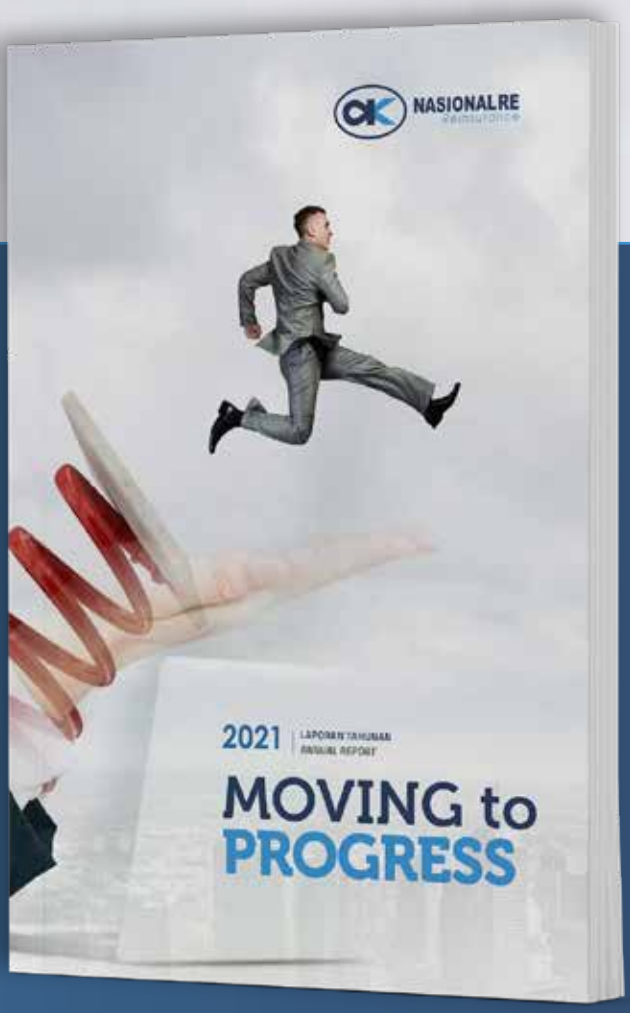

Tema *MOVING TO PROGRESS* menggambarkan strategi NASIONAL RE dalam mengantisipasi adanya risiko bisnis ke depan sehingga dapat mengamankan keberlanjutan bisnisnya dalam jangka panjang dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Tema ini berkesinambungan dengan tema laporan tahunan pada beberapa tahun terakhir.

The theme of MOVING TO PROGRESS describes NASIONAL RE's strategy in anticipating the future business risk to secure its business sustainability in the long term and deliver added values to all stakeholders. This theme shows a continuity with the annual report themes in the previous years.

Daftar Isi
TABLE OF CONTENT

4 Kesinambungan Tema
Theme Continuity

6 Daftar Isi
Table of Content

9 IKHTISAR UTAMA
MAIN HIGHLIGHTS

10 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

12 Rasio Keuangan
Financial Ratios

14 Proporsi Premi Bruto per COB
Gross Premium Proportion by COB

15 Perubahan Perusahaan yang Bersifat Signifikan
Significant Changes In The Company

17 LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

18 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Reports

26 Laporan Direksi
Board of Directors' Reports

35 PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

36 Informasi Perusahaan
Company Information

37 Riwayat Singkat
Brief History

39 Jejak Langkah
Milestones

44 Visi dan Misi
Vision and Mission

46 Nilai-Nilai
Values

47 Kegiatan Usaha
Line of Business

48 Produk dan Layanan
Product and Services

50 Struktur Organisasi
Organization Structure

52 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

54 Profil Dewan Komisaris
Profile of The Board of Commissioners

58 Direksi
Board of Directors

60 Profil Direksi
Profile of The Board of Directors

68 Kepala Divisi
Division Heads

69 Susunan Pejabat
Middle Management

74 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Structure and Composition of Shareholders

74 Informasi Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi, dan *Joint Ventures*
Information on Subsidiaries, Associated Companies and Joint Ventures

74 Struktur Grup
Group Structure

75 Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professions

75 Wilayah Operasi
Operational Area

77 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT'S DISCUSSION AND ANALYSIS

78 Tinjauan Ekonomi Makro Global dan Nasional
Global and National Macro economic Overview

79 Tinjauan Industri Asuransi dan Reasuransi
Insurance and Reinsurance Industry Overview

79 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment

81 Tinjauan Keuangan
Financial Overview

109 TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
BUSINESS SUPPORT OVERVIEW

110 Sumber Daya Manusia
Human Resources

123 Aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) dan Ketenagakerjaan
Occupational Health and Safety (K3) and Employment Aspects

127 Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)
Information & Communication Technology (ICT)

139 TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

140 Komitmen Perusahaan
The Company's Commitment

141 *Roadmap* Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Roadmap of Corporate Governance Implementation

141 Prinsip Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Principles

144 Pedoman dan Kebijakan GCG
GCG Guidelines and Policies

145 Tujuan Penerapan GCG
Objective of GCG Implementation

145 Struktur GCG
GCG Structure

147 Pemegang Saham
Shareholders

148 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

155 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

168 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of The Board of Commissioners

169 Direksi
Board of Directors

184 Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees Under The Board of Commissioners

194 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

197 Komite-Komite di Bawah Direksi
Committees Under The Board of Directors

205 Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
Internal Audit Unit (IAU)

209 Manajemen Risiko
Risk Management

228 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

233 Auditor Eksternal
External Auditors

233 Perkara Penting
Litigation

234 Kode Etik
Code Of Conduct

234 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

237 Keterbukaan Informasi
Information Disclosure

239 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

240 Komitmen dan Penerapan TJSL
CSR Commitment and Implementation

241 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Aspek Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility in Environmental Aspect

242 Tanggung Jawab Sosial Terhadap Nasabah
Social Responsibility to Customers

244 Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2021 PT Reasuransi Nasional Indonesia
Statement of The Board of Commissioners on Responsibility for the Annual Report 2021 of PT Reasuransi Nasional Indonesia

245 Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2021 PT Reasuransi Nasional Indonesia
Statement of The Board of Directors on Responsibility for the Annual Report 2021 of PT Reasuransi Nasional Indonesia

247 LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL REPORT

NASIONAL RE
Reinsurance

Ikhtisar Utama

Main Highlights

Ikhtisar Keuangan
FINANCIAL HIGHLIGHTS

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017
Premi Bruto / Gross Premium	7.632.036	6.452.238	6.939.795	6.101.002	5.613.401
Premi Retrosesi / Retrocession Premium	767.427	1.376.449	1.666.179	2.338.005	2.386.632
Premi Retensi Sendiri / Own Retention Premium	6.864.609	5.075.789	5.185.863	3.762.997	3.226.769
Klaim Bruto / Gross Claim	4.803.318	3.978.311	3.303.312	2.228.011	2.024.812
Beban Klaim / Claim Expenses	4.828.580	3.999.450	2.815.386	2.027.533	1.776.403
Beban Komisi Neto / Net Commission Expenses	1.898.667	1.544.602	1.546.637	1.281.039	964.841
Premi Neto / Net Premium	4.965.943	3.531.187	3.575.686	2.481.958	2.261.928
Hasil *Underwriting* / Underwriting Results	(1.078.798)	(716.330)	511.614	387.311	425.220
Hasil Investasi / Investment Results	265.011	194.857	226.890	134.681	190.051
Beban Usaha / Operating Expenses	167.124	169.089	204.442	176.655	179.411
Laba (Rugi) Sebelum Pajak dan Zakat / Earning (Loss) Before Tax and Zakat	(997.024)	(670.120)	532.189	344.323	437.976
Laba (Rugi) Setelah Pajak dan Zakat / Earning (Loss) After Tax and Zakat	(740.433)	(542.931)	408.567	280.006	377.949
Investasi / Investment	5.900.392	4.214.069	3.541.142	2.897.483	2.652.988
Aset / Assets	10.521.525	7.987.733	7.216.404	6.318.358	4.615.254
Cadangan Teknis / Technical Reserves	9.013.300	6.506.062	5.535.236	5.104.068	2.696.865
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan / Unearned Premium	4.047.600	2.661.250	2.814.131	2.225.996	1.392.452
Estimasi Klaim Retensi Sendiri / Estimated Own Retention Claim	4.965.700	3.844.814	2.721.105	2.878.072	1.304.413
Ekuitas / Equities	6.790	717.821	1.217.982	933.623	1.618.028
Modal Disetor / Paid Up Capital	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000

Premi Bruto / Gross Premium

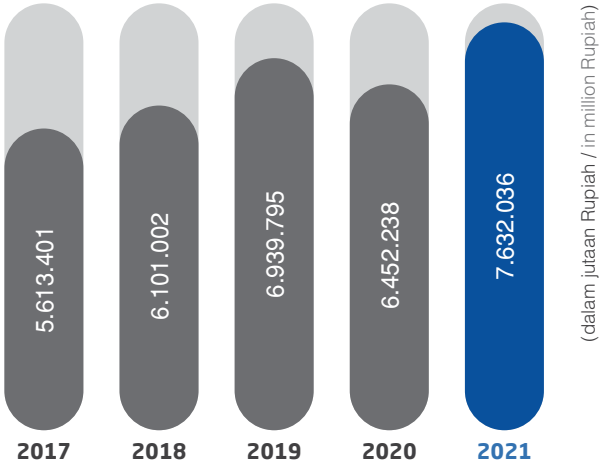

Hasil *Underwriting* / Underwriting Results

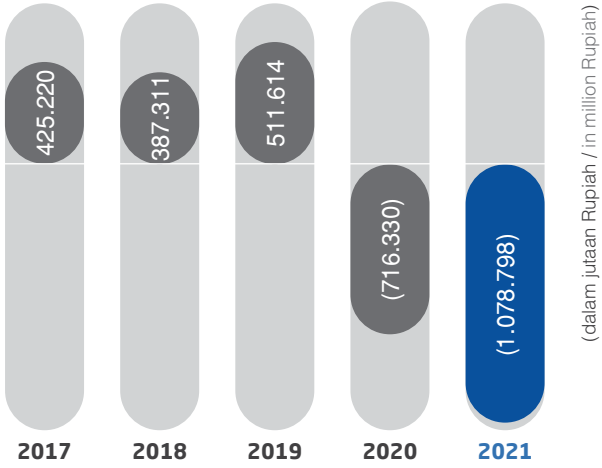

Hasil Investasi / Investment Results

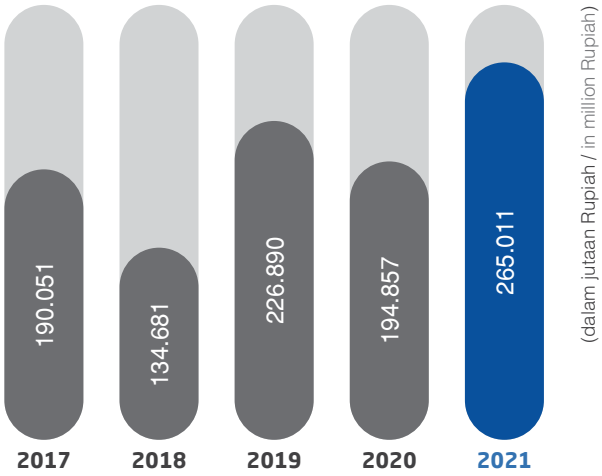

Laba (Rugi) Setelah Pajak dan Zakat / Earning (Loss) After Tax and Zakat

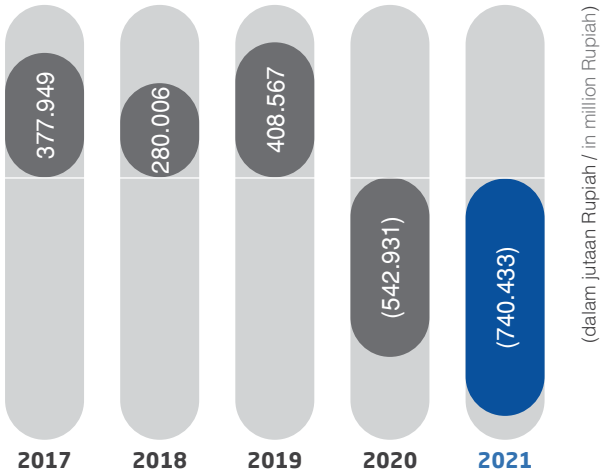

Aset / Assets

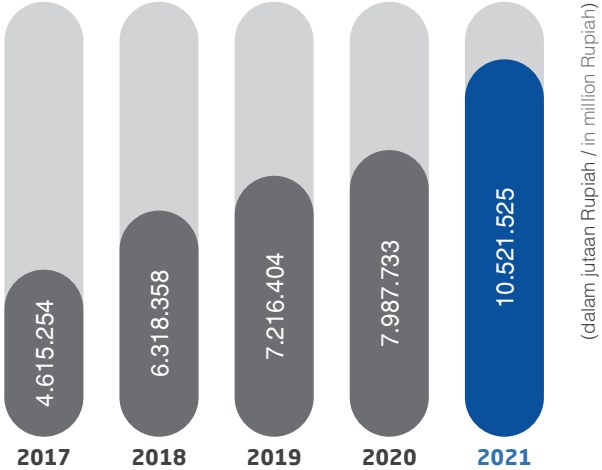

Ekuitas / Equities

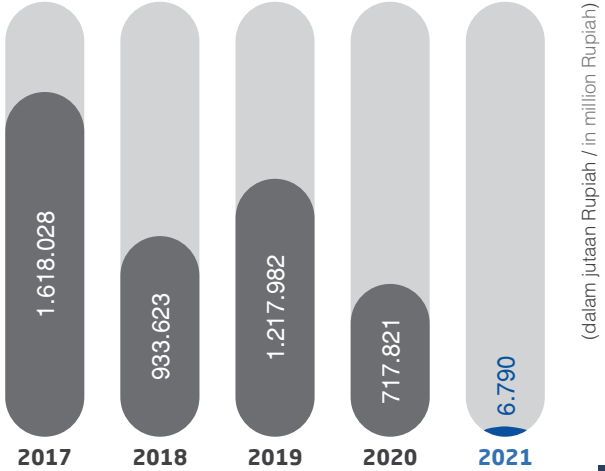

Rasio Keuangan
FINANCIAL RATIOS

(dalam persentase / in percentage)

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017
Rasio Laba atas Aset/ Return on Asset (ROA)	(10,77)	(8,83)	7,85	6,29	9,31
Rasio Laba atas Ekuitas/ Return on Equity (ROE)	(204,37)	(56,09)	37,98	21,95	24,89
Imbal Hasil atas Investasi/ Yield on Investment	5,57	5,44	7,60	5,20	7,73
Klaim Bruto/Premi Bruto / Gross Claim/ Gross Premium	62,94	61,66	47,60	36,52	36,07
Hasil *Underwriting*/Premi Bruto / Underwriting Results / Gross Premium	(14,48)	(11,58)	7,37	6,35	7,58
Likuiditas / Liquidities	104,17	101,79	114,56	110,65	149,59
Solvabilitas / Solvency	103,88	106,66	117,56	114,03	156,84
Beban Usaha/Premi Bruto / Operating Expenses/Gross Premium	2,19	2,62	2,95	2,90	3,20

Rasio Laba atas Aset (ROA)/
Return on Asset (ROA)

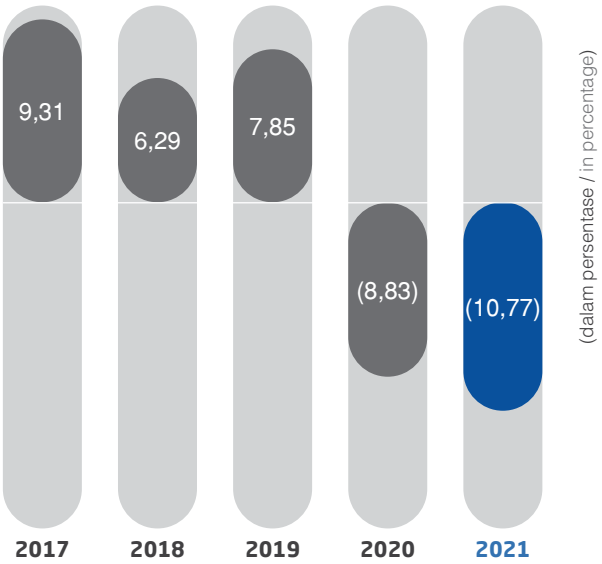

Rasio Laba atas Ekuitas/
Return on Equity (ROE)

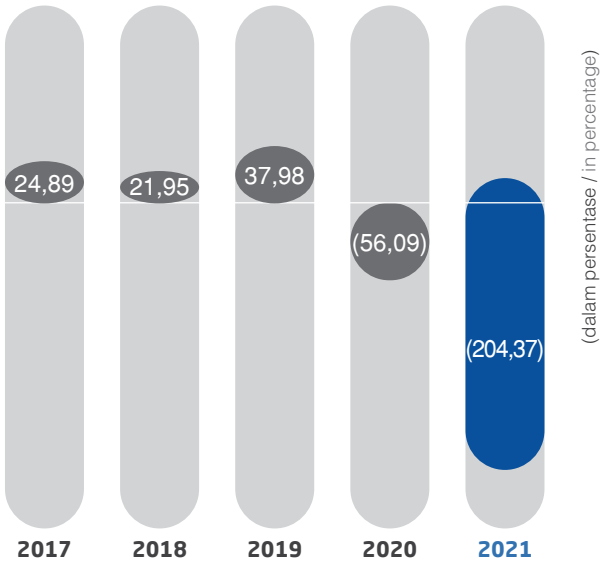

Imbal Hasil atas Investasi/Yield on Investment

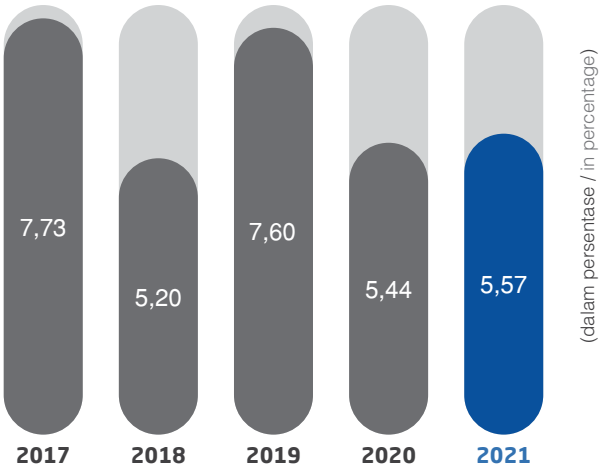

Klaim Bruto/Premi Bruto /Gross Claim/Gross Premium

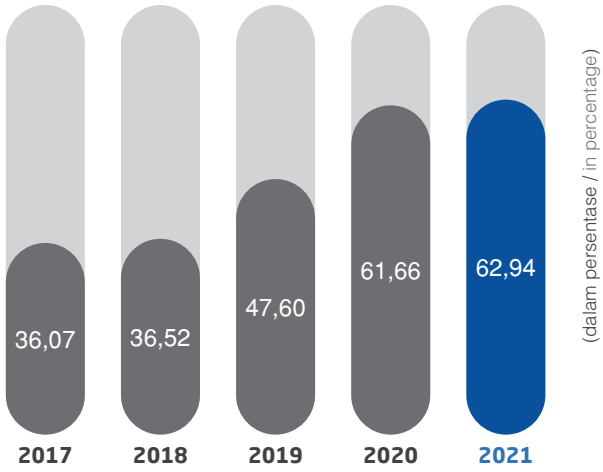

Likuiditas/Liquidities

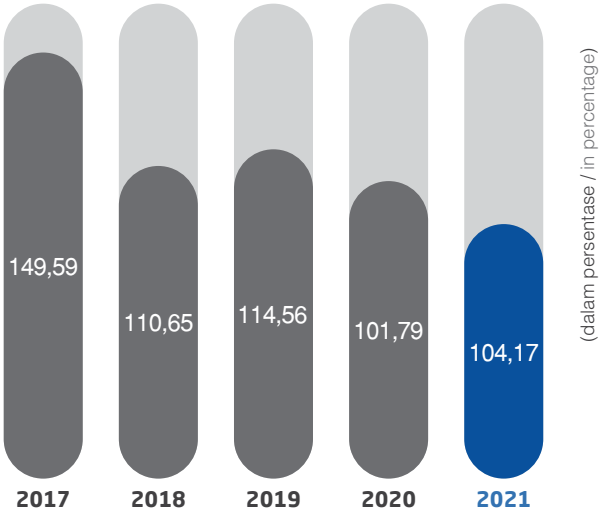

Solvabilitas/Solvency

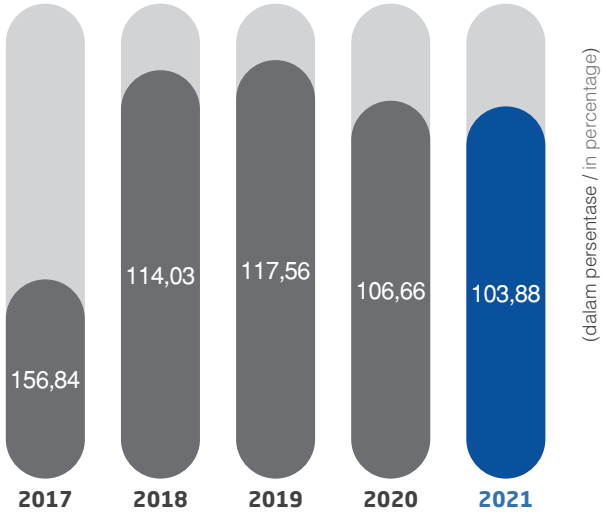

Proporsi Premi Bruto per COB

GROSS PREMIUM PROPORTION BY COB

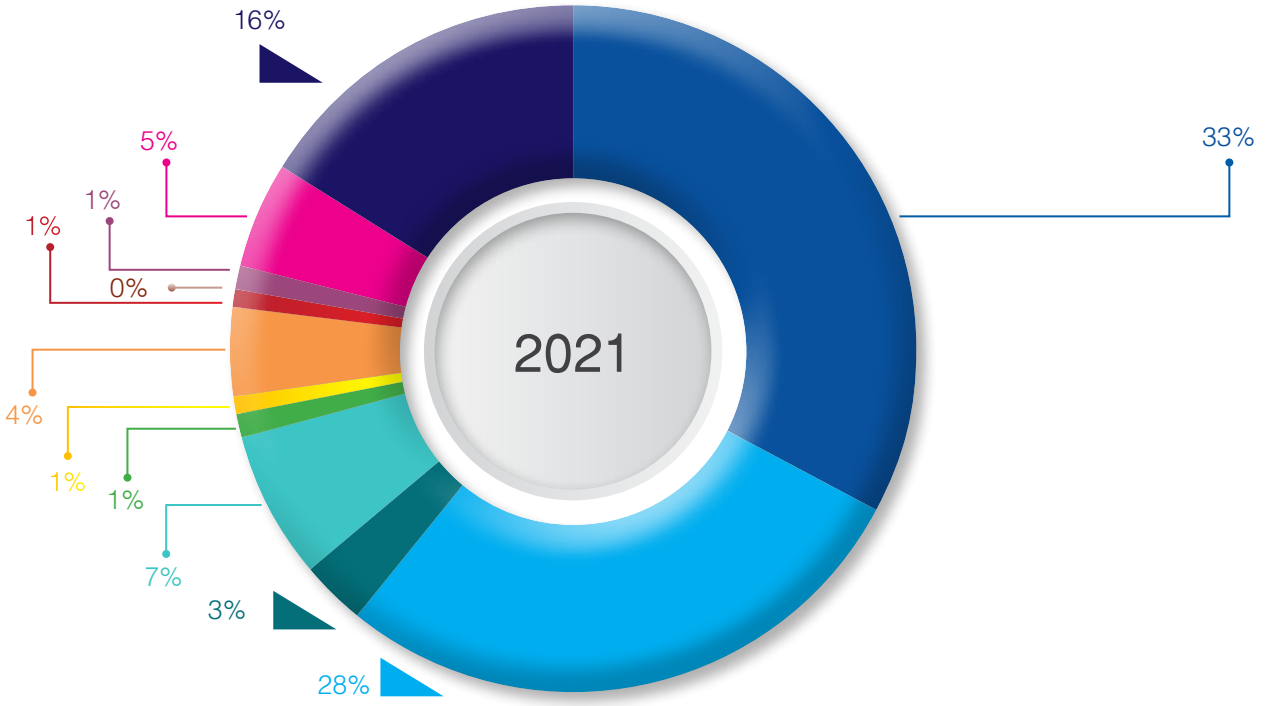

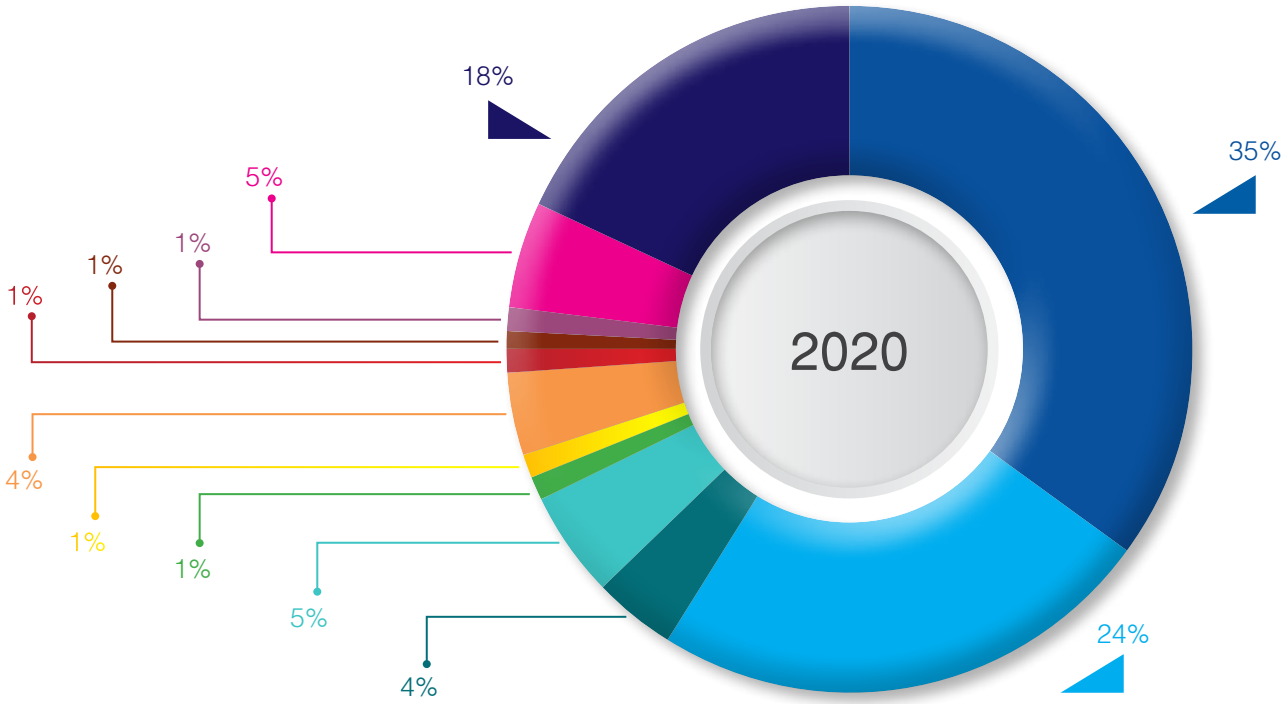

- Kebakaran/Fire
- Kredit dan Jaminan/Credit and Bond
- Rekayasa/Engineering
- Rangka kapal/Marine Hull
- Kendaraan bermotor/Motor Vehicle
- Energi/Energy
- Pengangkutan/Marine Cargo
- Kecelakaan diri dan tanggung gugat/ Personal Accident and Liabilities
- Satelit/Satellite
- Rangka pesawat/Aviation Hull
- Aneka/Miscellaneous
- Jiwa/Life

Perubahan Perusahaan yang Bersifat Signifikan

SIGNIFICANT CHANGES IN THE COMPANY

Pada tahun 2021, Perusahaan telah melakukan penerapan dini PSAK 74 yang merupakan adopsi dari *IFRS 17 Insurance Contract* yang akan berlaku efektif secara internasional pada 1 Januari 2023 dan di Indonesia pada 1 Januari 2025. Penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi akan membuat Laporan Keuangan perusahaan asuransi menjadi "berdaya banding" *(comparable)* dengan industri-industri lain seperti perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya karena PSAK 62: Kontrak Asuransi yang berlaku saat ini (adopsi dari IFRS 4) masih memungkinkan pelaporan yang bervariasi di setiap yurisdiksi/negara. Selain itu, PSAK 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan pendapatan dari kegiatan investasi sehingga seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) dari laporan keuangan, termasuk pemegang polis maupun investor, mendapatkan informasi yang transparan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi untuk produk perlindungan asuransi dengan fitur investasi.

Penerapan PSAK 74 tersebut mengakibatkan meningkatnya cadangan Perusahaan atas kewajibannya, sehingga hal tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

In 2021, the Company has implemented early PSAK 74, which is the adoption of IFRS 17 Insurance Contract which will become effective internationally on January 1, 2023 and in Indonesia on January 1, 2025. Implementation of PSAK 74: Insurance Contract will make the Financial Statements of insurance companies become "comparable" with other industries such as banking and other financial services companies because PSAK 62: Insurance Contracts currently in effect (adoption of IFRS 4) still allows reporting that varies in each jurisdiction/country. In addition, PSAK 74 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and income from investment activities so that all stakeholders (stakeholders) from financial statements, including policyholders and investors, obtain transparent information on the financial statements of companies that have insurance contracts for insurance protection products with investment features.

The adoption of PSAK 74 resulted in an increase in the Company's reserves for its obligations, so that it had a significant impact on the Company's financial performance for the year ended December 31, 2021.

NASIONAL RE
Reinsurance

Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS' REPORTS

Dr. Toto Pranoto, CRGP
Komisaris Utama
President Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, PT Reasuransi Nasional Indonesia untuk selanjutnya disebut "Perusahaan atau NASIONAL RE" tetap mampu memberikan yang terbaik di tengah kondisi yang cukup menantang di tahun 2021. Penerapan strategi yang tepat dan kerja sama yang solid antara Dewan Komisaris, Direksi dan para pemangku kepentingan lainnya telah membawa Perusahaan berada di jalur yang tepat menuju pemulihan kinerja Perusahaan.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami atas nama Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk tahun buku per 31 Desember 2021. Laporan ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari fungsi dan peranan Dewan Komisaris dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam hal transparansi informasi bagi seluruh pemangku kepentingan, serta sebagai bentuk akuntabilitas Dewan Komisaris.

Pandangan atas Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya

Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada *Key Performance Indicators* (KPI) yang setiap tahun menjadi bagian dari kontrak manajemen dengan pemegang saham. Selain itu, Dewan Komisaris juga menilai kinerja Direksi dengan melihat kondisi eksternal serta progres hasil penerapan kebijakan strategis yang dilakukan oleh Direksi selama tahun buku.

Melihat dampak yang berkepanjangan dari pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2021, Perusahaan merevisi target pendapatan preminya. Dengan upaya optimal Direksi, jajaran manajemen, serta seluruh karyawan, Perusahaan mampu membukukan pertumbuhan pendapatan premi 125,58% dari target yang ditetapkan dan juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,32% dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2020. Namun kenaikan pendapatan premi diiringi dengan kenaikan klaim yang mencapai 20,73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai imbas dari dampak Covid-19 yang mengakibatkan meningkatnya tingkat kematian dan kegagalan membayar kredit.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Praise be to the presence of God Almighty for His abundance of grace and blessings, PT Reasuransi Nasional Indonesia, hereinafter referred to as "the Company or NASIONAL RE" was still able to deliver the best in the midst of quite challenging conditions in 2021. Implementation of the right strategy and solid cooperation between the Board of Commissioners, the Board of Directors and other stakeholders has brought the Company on the right track towards the performance recovery of the Company.

On this auspicious occasion, please allow us to present a report on the implementation and responsibilities of the Board of Commissioners for the financial year as of December 31, 2021. This report is also an integral part of the function and role of the Board of Commissioners in implementing the principles of good corporate governance, particularly in terms of transparency of information for all stakeholders, as well as a form of accountability for the Board of Commissioners.

Views on the Performance of the Board of Directors and Basis of its Assessment

The Board of Directors' performance appraisal is based on Key Performance Indicators (KPI), which are annually part of the management contract with the shareholders. In addition, the Board of Commissioners also assesses the performance of the Board of Directors by considering the external conditions and the progress of strategic policies implementation carried out by the Board of Directors throughout the year.

Considering the prolonged impact of the Covid-19 pandemic that occurred in 2021, the Company revised its premium income target. With the optimal efforts of the Board of Directors, management, and all employees, the Company was able to record a premium income growth of 125.58% from the set target and also recorded a growth of 17.32% compared to the achievement in 2020. However, the increase in premium income was accompanied by an increase in claims, which reached 20.73% compared to the previous year as a result of the Covid-19 impact, which resulted in increased death rates and credit defaults.

Mengantisipasi tingginya tingkat klaim yang kemungkinan masih terjadi seiring perkembangan pandemi Covid-19, Perusahaan telah menambah cadangan klaim yang mengakibatkan angka pencapaian *underwriting* tercatat negatif. Hal tersebut turut mengakibatkan *Risk Based Capital* (RBC) dan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Perusahaan menjadi rendah dan berada di bawah ketentuan. Namun Perusahaan memastikan kemampuan arus kas Perusahaan dan pemenuhan kewajiban jangka pendek masih mencukupi.

Menyikapi hal tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan dan membawa ke arah yang lebih baik lagi, meskipun masih terdapat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan agar hasilnya dapat lebih optimal seperti penajaman visi dan orientasi bisnis Perusahaan serta meningkatkan profesionalisme kerja. Selain itu, Dewan Komisaris juga menilai bahwa upaya Direksi untuk menyusun langkah strategis dan penerapannya dalam rangka memulihkan kinerja Perusahaan telah tepat sehingga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan terutama mitra bisnis dapat terjaga.

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pemberian Nasihat oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait pengawasan pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Hal tersebut dilakukan melalui evaluasi kinerja bulanan untuk memantau dan mengukur efektivitas kebijakan strategis yang diambil Direksi. Evaluasi tersebut utamanya dilakukan pada rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Selain mengevaluasi kinerja bulanan, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris juga membahas beragam isu strategis, kendala dan upaya penyelesaian atas kendala yang dihadapi termasuk menyetujui dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sejalan dengan tahapan strategi dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Dalam setiap penyelenggaraan rapat, terdapat risalah rapat dan keputusan rapat dipantau serta dievaluasi progres tindak lanjutnya. Dewan Komisaris juga melaksanakan fungsi pengawasannya dengan mengevaluasi

Anticipating the high level of claims that may still occur aligns with the updates of Covid-19 pandemic, the Company has increased claims reserves, which resulted in negative underwriting achievement figures. This also resulted in the Company's low Risk Based Capital (RBC) and Investment Adequacy Ratio (RKI), which was below the required provision. However, the Company ensures that the Company's cash flow capability and fulfillment of short-term obligations are still sufficient.

In response to this, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities in managing the Company and leading it to a better direction, although there are still aspects that need to be improved to generate more optimal results, such as sharpening the vision and business orientation of the Company and improving work professionalism. In addition, the Board of Commissioners also considers that the efforts of the Board of Directors to formulate strategic actions and their implementation in order to restore the Company's performance have been appropriate in order to maintain the trust of all stakeholders, especially business partners.

Implementation of Supervisory and Advisory Activities by the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities related to the supervision of the management of the company by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors. This is taken through monthly performance evaluations to monitor and measure the effectiveness of strategic policies taken by the Board of Directors. The evaluation is mainly carried out at internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. In addition to evaluating monthly performance, at the meeting the Board of Commissioners also discussed various strategic issues, obstacles and efforts to resolve the obstacles faced, including approving and establishing the Company's Work Plan and Budget (RKAP) in line with the strategic stages in the Company's Long Term Plan (RJPP). In each meeting, there are minutes of meetings and meeting decisions are monitored and the follow-up progress is evaluated. The Board of Commissioners also carries out its supervisory

laporan dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta informasi lainnya dari pihak eksternal seperti pengaduan dari masyarakat, teguran dari regulator, kekhawatiran dari pemegang saham dan informasi lainnya yang berkembang melalui media sosial maupun digital.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat internal Dewan Komisaris dan 13 (tiga belas) Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dengan tingkat kehadiran rata-rata 100%. Keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan sejauh ini belum pernah ada keputusan rapat dengan *"dissenting opinion"*. Sampai dengan akhir 2021 hampir seluruh keputusan rapat telah selesai ditindaklanjuti.

Guna mempercepat proses pemulihan kinerja Perusahaan, dalam rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan saran dan nasihat antara lain sebagai berikut:

- Menjaga reputasi sehingga Perusahaan dapat menjaga kepercayaan dari mitra bisnis dengan tetap memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Perusahaan perlu memperbaiki dan meningkatkan sistem informasi, data statistik, SOP, yang dapat memetakan bisnis Perusahaan, dan mengaktifkan beberapa fungsi dari divisi-divisi yang saat ini belum optimal termasuk Fungsi Manajemen Risiko, Legal, dan komite-komite di bawah Direksi.
- Direksi agar melakukan mitigasi terhadap *Class of Business* (COB) dan *Source of Business* (SOB) yang memberikan kontribusi negatif dengan data statistik perusahaan dan Sistem Informasi yang mumpuni dan mendukung.
- Menerapkan *Prudent Underwriting* dan mengurangi *share* kepesertaan bahkan menghentikan bisnis yang benar-benar dipastikan berkontribusi negatif agar bisnis dapat menjadi lebih sehat, dan kepentingan seluruh pihak dapat terjaga.
- Segera membuat Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) baik secara organik maupun melakukan aksi korporasi sesuai arahan Pemegang Saham.

function by evaluating reports from the committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee, as well as other information from external parties such as complaints from the public, warnings from regulators, concerns from shareholders and other information received from social and digital media.

Throughout 2021, the Board of Commissioners has held 2 (two) internal meetings of the Board of Commissioners and 13 (thirteen) Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors with an average attendance rate of 100%. Meeting decisions are taken by deliberation for consensus and so far there has never been a meeting decision with a "dissenting opinion". By the end of 2021, almost all meeting decisions have been followed up.

In order to accelerate the process of recovering the Company's performance, in these meetings, the Board of Commissioners has provided suggestions and advice, including the following:

- Maintain reputation in order for the Company to maintain the trust of business partners and still fulfilling the rights and obligations in accordance to the applicable regulations at the same time.
- The Company needs to improve the information systems, statistical data, SOP, which can map the Company's business, and activate several functions of the Divisions that are currently not optimal, including the Risk Management Function, Legal and committees under the Board of Directors.
- The Board of Directors to mitigate Class of Business (COB) and Source of Business (SOB), which make a negative contribution based on the company's statistics and a capable and supportive Information System.
- Implement Prudent Underwriting and reduce participation share and even stop businesses that are absolutely contributing negatively in order to make the business become more soundness, and the interests of all parties can be maintained.
- Immediately make a Financial Restructuring Plan (RPK) both organically and take corporate actions according to the direction of the Shareholders.

- Melakukan efisiensi biaya dengan berpedoman kepada RKAP dan skala prioritas belanja modal dan pengeluaran biaya
- Melakukan koordinasi secara intensif dan melakukan kerja sama dengan *Indonesian Professional Reinsurer* (IPR) untuk membuat standar berbisnis yang sehat.

- Conduct cost efficiency by referring to the RKAP and the priority scale of capital expenditures and expenditures
- Intensive coordination and cooperation with Indonesian Professional Reinsurer (IPR) to establish sound business standards.

Pandangan Dewan Komisaris atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Mempertimbangkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, upaya perbaikan RBC yang terus dilakukan serta analisa profitabilitas bisnis inti, Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha yang disusun Direksi untuk tahun 2022 telah memenuhi harapan. Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan Direksi untuk terus melakukan mitigasi terhadap bisnis-bisnis dan sumber bisnis yang memberikan kontribusi negatif terhadap kinerjanya agar ke depan prospek usaha Perusahaan dapat dioptimalkan dengan pemulihan kinerja yang baik.

Selain itu, Perusahaan juga harus menjaga reputasinya untuk menghilangkan keraguan dan kekhawatiran dari pemangku kepentingan sebagai dampak dari pencapaian kinerja Perusahaan yang masih belum optimal. Perusahaan juga sebaiknya memantau perkembangan penyebaran virus Covid-19 termasuk *Varian of Concern* seperti Omicron dan menyiapkan langkah antisipasi apabila penyebaran tersebut berdampak pada pemulihan perekonomian, yang secara tidak langsung akan berimbas pula pada bisnis Perusahaan.

Views of the Board of Commissioners on the Business Prospects prepared by the Board of Directors

Taking into account the experience of previous years, ongoing efforts to improve RBC and analysis of the core business profitability, the Board of Commissioners considers that the business prospects prepared by the Board of Directors for 2022 have met the expectations. The Board of Commissioners always reminds the Board of Directors to always mitigate against businesses and business sources that contribute negatively to their performance so that in the future the Company's business prospects can be optimized with good performance recovery.

In addition, the Company must also maintain its reputation to eliminate doubts and concerns from stakeholders as a result of the achievement of the Company's performance, which was still not optimal. The Company should also monitor the development of the spread of the Covid-19 virus including Variants of Concern such as Omicron and prepare anticipatory steps if the spread has an impact on economic recovery, which will indirectly affect the Company's business.

Pandangan Dewan Komisaris atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Pada dasarnya, Dewan Komisaris menilai bahwa Perusahaan telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan *(Good Corporate Governance/GCG)* dengan baik. Semua organ GCG telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pedoman kerjanya masing-masing. Perusahaan juga mencatatkan tidak ada temuan atau laporan yang bersifat

Views of the Board of Commissioners on Good Corporate Governance Implementation

Basically, the Board of Commissioners considers that the Company has implemented Good Corporate Governance (GCG) well. All GCG organs have carried out their duties and responsibilities based on their respective work guidelines. The Company also recorded no findings or reports that were critical of the Company's image from the implementation

kritikal terhadap citra Perusahaan dari penerapan *Whistleblowing System* (WBS) di sepanjang tahun 2021, yang juga menjadi salah satu indikator bahwa Perusahaan telah menerapkan praktik tata kelola sesuai prinsip-prinsip GCG.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerapan GCG, Dewan Komisaris secara berkesinambungan melakukan komunikasi dengan Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai *counter part* Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan termasuk menelaah hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh SPI.

Untuk peningkatan ke depannya, Dewan Komisaris mendorong Perusahaan untuk melibatkan pihak ketiga independen dalam melakukan penilaian atau *assessment* penerapan GCG secara berkala. Perusahaan dapat melakukan perbaikan di *"area of improvement"* dari hasil penilaian tersebut yang selanjutnya dapat dimonitor secara rutin.

of the Whistleblowing System (WBS) throughout 2021, which was also an indicator that the Company has implemented governance practices in accordance with GCG principles.

As part of efforts to improve the implementation of GCG, the Board of Commissioners continuously communicates with the Internal Control Unit (SPI) as a counter part of the Audit Committee which assists the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, including reviewing the results of inspections carried out by SPI.

For future improvement, the Board of Commissioners encourages the Company to involve independent third parties in conducting periodic assessments of GCG implementation. The Company can make improvements in the "area of improvement" from the results of the assessment, which can then be monitored regularly.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris

Komite yang dibentuk dan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi ada 3, yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Ketua Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen yang seluruhnya mempunyai pengalaman panjang dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Komite. Sedangkan anggota-anggota komite ditunjuk dan diangkat dari tenaga-tenaga profesional dan juga memiliki latar belakang sebagaimana dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pelaksanaan tugas seluruh komite berpegang kepada piagam komite sehingga dalam pelaksanaan tugasnya terlaksana secara efektif, independen dan sangat membantu memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Views of the Board of Commissioners on the performance of the committees under the Board of Commissioners

There are 3 committees formed and assigned to assist the Board of Commissioners in carrying out the supervisory function and providing advice to the Board of Directors, namely the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Nomination and Remuneration Committee. The Chairman of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee is chaired by an Independent Commissioner who all has long experience in carrying out their duties as Committee Chairs. Meanwhile, the committees members are appointed and appointed from professional staff and also have the background as required by the Financial Services Authority (OJK). In carrying out their duties, all committees adhere to the committee charter so that in carrying out their duties they are carried out effectively, independently and are very helpful in providing input to the Board of Commissioners in supervising and providing advice to the Board of Directors.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dewan Komisaris menilai bahwa pengelolaan SDM Perusahaan telah berjalan optimal. Perusahaan hampir memenuhi kesiapan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Perusahaan juga sangat fokus dalam pelaksanaan program pengembangan kompetensi dan kapabilitas seluruh karyawannya melalui beragam program pelatihan. Selain itu, Perusahaan juga telah memenuhi kewajibannya dalam menjamin kesejahteraan karyawan salah satunya dengan pemberian asuransi kesehatan selain program BPJS.

Namun beberapa perbaikan dapat dilakukan oleh Perusahaan agar dapat meningkatkan pengelolaan SDM yang dimiliki. Perusahaan sebaiknya memantau optimalisasi SDM yang dimiliki agar sesuai dengan pertumbuhan kinerja Perusahaan, mempertimbangkan usia dari SDM yang dimiliki, penguatan sistem komputerisasi untuk beberapa bidang yang bersifat administratif, dan peningkatan *transfer of knowledge* melalui *sharing session* antara karyawan.

Views of the Board of Commissioners on Human Resources (HR) Management

The Board of Commissioners considers that the Company's HR management has been running optimally. The Company has almost fulfilled the readiness of the experts needed to support its business activities. The Company is also very focused on implementing competency and capability development programs for all its employees through various training programs. In addition, the Company has also fulfilled its obligations in ensuring the welfare of employees, one of which is by providing health insurance in addition to the BPJS program.

However, some improvements can be made by the Company in order to improve the management of its human resources. The Company should monitor the optimization of its human resources so that it is in line with the growth of the Company's performance, considering the age of its human resources, strengthening the computerized system for several administrative fields, and increasing the transfer of knowledge through sharing sessions among employees.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Di sepanjang tahun 2021, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris, sehingga susunan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Dr. Toto Pranoto, CRGP
Komisaris	: Vincentius Wilianto, FSAI, AAIJ
Komisaris Independen	: A. Yanti F. Parapat
Komisaris Independen	: Teddy Sastra, S.E., M.M., AMRP.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2021, there were some changes in the composition of the Board of Commissioners, so the composition as of December 31, 2021 is as follows:

President Commissioner	: Dr. Toto Pranoto, CRGP
Commissioner	: Vincentius Wilianto, FSAI, AAIJ
Independent Commissioner	: A. Yanti F. Parapat
Independent Commissioner	: Teddy Sastra, S.E., M.M., AMRP.

Apresiasi

Atas nama Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemangku kepentingan, terutama para mitra kerja Perusahaan. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi yang telah mampu menjalankan kepengurusan Perusahaan dengan baik di tahun 2021 serta seluruh karyawan yang telah memberikan kontribusinya secara optimal di tengah tantangan yang dihadapi. Dewan Komisaris sangat berharap, seluruh jajaran Perusahaan dapat segera merumuskan strategi pemulihan kinerja agar mampu membawa Perusahaan menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Appreciation

On behalf of the Board of Commissioners, we thank you for the trust that has been given by stakeholders, especially the Company's business partners. The Board of Commissioners also expresses its highest appreciation to the Board of Directors who has been able to carry out the management of the Company well in 2021 and all employees who have contributed optimally in the midst of the challenges faced. The Board of Commissioners sincerely hopes that all levels of the Company can immediately formulate a performance recovery strategy to be able in bringing the Company towards better growth.

Atas nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners
Jakarta, November 2022

Dr. Toto Pranoto, CRGP
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi
BOARD OF DIRECTORS' REPORTS

Sunarso, S.E., M.M., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP
Plt. Direktur Utama / Direktur Keuangan & SDM
Act. President Director / Finance & HR Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang berkat segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan, Perseroan dapat melewati tahun 2021 dengan capaian kinerja yang baik di tengah tantangan perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Atas nama Direksi, perkenankan kami untuk memaparkan hasil laporan kinerja Perseroan tahun 2021 yang menunjukkan semangat untuk terus bergerak maju dengan beragam pembenahan yang dilakukan menuju pemulihan kinerja Perseroan.

Dear Shareholders and Stakeholders,

All our praises and gratitude to the Almighty God for the blessings and mercy given, the Company was able to pass 2021 with good performance in the midst of economic challenges that have not yet fully recovered. On behalf of the Board of Directors, please allow us to present the results of the 2021 performance report which shows the spirit to keep moving to progress with several improvements taken towards the Company's performance recovery.

Kondisi Ekonomi Tahun 2021

Berdasarkan Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund, pertumbuhan ekonomi global mencatat *rebound* di angka 5,9% (yoy) pada 2021. Percepatan vaksinasi, berlanjutnya stimulus, dan kebijakan penanganan pandemi yang lebih terarah menjadi faktor pendorong pemulihan, setelah di tahun 2020 terkontraksi 3,1% (yoy).

Sejalan dengan pemulihan ekonomi global, perekonomian nasional juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,69% (yoy) di tahun 2021 dari negatif 2,07% di tahun 2020 (yoy). PDB per kapita Indonesia pada tahun 2021 tercatat meningkat menjadi Rp62,2 juta, lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi di tahun 2019 yaitu Rp59,3 juta. Pencapaian tersebut berhasil membawa Indonesia masuk kembali dalam klasifikasi negara berpenghasilan menengah atas *(upper middle-income country)*.

Pemulihan perekonomian yang berjalan turut mendorong perbaikan kinerja beberapa sektor industri termasuk asuransi namun belum berjalan optimal. Berdasarkan laporan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), industri asuransi umum di Indonesia mencatat penurunan klaim sebesar 14,7% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2020, namun terdapat beberapa lini bisnis yang mencatatkan adanya peningkatan klaim yakni lini bisnis *marine cargo, aviation, energy on shore, PA & health, suretyship* dan *miscellaneous*.

Economic Condition in 2021

Global economic growth recorded a rebound at 5.9% (yoy) in 2021. Accelerated vaccination, continued stimulus, and more focused policies on handling the pandemic were factors driving the recovery, after contracting 3.1% (yoy) in 2020.

In line with the global economic recovery, the national economy also recorded growth of 3.69% (yoy) in 2021 from negative 2.07% in 2020 (yoy). Indonesia's GDP per capita in 2021 was recorded to increase to Rp62.2 million, higher than the GDP per capita before the pandemic in 2019 which was Rp59.3 million. This achievement has succeeded in bringing Indonesia back into the classification of upper middle-income countries.

The ongoing economic recovery has contributed to the improvement in the performance of several industrial sectors including insurance, but this has not been running optimally. Based on the report from the Indonesian General Insurance Association (AAUI), the general insurance industry in Indonesia recorded a decrease in claims of 14.7% (yoy) compared to 2020, however there were several business lines that recorded an increase in claims, namely the marine cargo, aviation, energy on shore, PA & health, suretyship and miscellaneous.

Kinerja dan Tantangan Tahun 2021

Pada tahun 2021, Perseroan mencatatkan pertumbuhan Premi Bruto pada segmen reasuransi umum dan reasuransi jiwa masing-masing sebesar 21,35% dan 4,82% yang mendorong pertumbuhan Pendapatan Premi Bersih sebesar 17,32% di tahun 2021. Dari sisi posisi keuangan, jumlah aset, liabilitas, serta kas dan bank masing-masing meningkat sebesar 31,72%, 48,87%, dan 81,06% dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara jumlah ekuitas mengalami penurunan signifikan Rp711,03 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jika isu utama kinerja Perusahaan tahun 2020 adalah perubahan metode pencadangan dari *Loss Ratio* menjadi Triangular (Segitiga Klaim) dan perbedaan asumsi penghitungan cadangan klaim, di tahun 2021 ini yang menjadi isu utama adalah perbaikan perhitungan cadangan premi serta perubahan asumsi pelaporan klaim dalam perhitungan IBNR untuk asuransi kredit. Dampak dari penurunan kinerja tahun 2021 antara lain tidak terpenuhinya rasio tingkat kesehatan keuangan perusahaan di mana rasio RBC Perusahaan masih sebesar 11,18% atau masih jauh dari batas minimum yang dipersyaratkan yaitu 120%, Rasio Kecukupan Investasi (konvensional) sebesar 94,11% juga masih di bawah ketentuan serta ekuitas Perusahaan yang hanya sebesar Rp6,7 miliar.

Pada tahun 2021, Perseroan telah menggunakan triangulasi dalam melakukan penghitungan cadangan teknis menguatkan posisi perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban terhadap para mitra bisnis, namun penerapan tersebut menyebabkan penurunan laba perusahaan, sehingga kinerja perusahaan turun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut juga menjadi tantangan lain bagi Perseroan untuk meyakinkan para mitra bisnis bahwa perusahaan masih dalam kondisi yang kuat meskipun mencatatkan kerugian yang berpengaruh pada rasio keuangan *Risk Based Capital* (RBC) dan hasil pemeringkatan perusahaan.

Tantangan utama yang dihadapi Perseroan adalah seluruh jajaran berupaya keras meyakinkan para mitra bisnis bahwa Perusahaan masih dalam kondisi yang kuat di tengah terpaan kondisi buruk yang dicatat oleh Perusahaan

Performance and Challenges in 2021

In 2021, the Company recorded growth in gross premiums in the general reinsurance and life reinsurance segments of 21.35% and 4.82%, respectively, which has driven growth in net premium income of 17.32% in 2021. In terms of financial position, the total assets, liabilities, as well as cash and banks increased by 31.72%, 48.87% and 81.06% respectively compared to 2020. Meanwhile total equity decreased significantly Rp711.03 billion compared to the previous year.

If the main issue of the Company's performance in 2020 is the change in the reserve method from Loss Ratio to Triangular (Claim Triangle) and the difference in assumptions for calculating claim reserves, in 2021 the main issue will be improving the calculation of premium reserves and changing the assumptions for reporting claims in calculating IBNR for insurance credit. The impact of the decline in performance in 2021 includes not fulfilling the company's financial soundness ratio where the company's RBC ratio is still 11.18% or still far from the required minimum limit of 120%, the Investment Adequacy Ratio (conventional) is also 94.11% still under the provisions as well as the Company's equity of only Rp6.7 billion.

In 2021, the Company has used triangulation in calculating technical reserves to strengthen the company's position to settle obligations to business partners, but this application has resulted in a decrease in the company's profits, so that the company's performance has decreased compared to the previous year. This is also another challenge for the Company to convince its business partners that the company is still in strong condition despite recording losses, which affect the Risk Based Capital (RBC) financial ratios and the company's rating results.

The main challenge faced by the Company is that all levels of staff are working hard to convince business partners that the Company is still in a strong condition amidst the adverse conditions recorded by the Company based on the results

berdasarkan hasil audit laporan keuangan tahun 2021. Hubungan bisnis dengan para mitra yang sudah terjalin baik selama ini masih dapat memberikan kontribusi kepada NASIONAL RE sehingga meskipun pada tahun 2020 Perusahaan sudah mengalami kerugian.

Pencapaian target bisnis secara keseluruhan termasuk cukup baik, di mana terdapat 9 (sembilan) dari 13 (tiga belas) lini bisnis yang memberikan hasil positif setelah menggunakan metode triangulasi dalam penghitungan cadangan teknis. Di mana hal ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya, lebih banyak lini bisnis yang mengalami kerugian. Secara keseluruhan, Perseroan masih mencatatkan kondisi arus kas yang masih surplus, meskipun perusahaan mengalami peningkatan klaim dari para mitra bisnis yang lebih tinggi dibandingkan nilai klaim dari tahun-tahun sebelumnya.

Kendala yang dihadapi Perusahaan di tahun 2021 adalah dengan kondisi di mana laporan keuangan Perusahaan menunjukkan hasil yang minus pada tahun 2020 maka hal ini menyebabkan penurunan pada rasio keuangan *Risk Based Capital* (RBC) Perusahaan sehingga tidak memenuhi regulasi. Kondisi ini menyebabkan hasil pemeringkatan Perusahaan menjadi turun yang berdampak pada berkurangnya sesi bisnis dari para mitra *existing.* hal ini di sebabkan keraguan dari para mitra bisnis kepada Perusahaan atas kondisi keuangan Perusahaan, oleh karenanya manajemen dan *key person* Perusahaan berupaya keras meyakinkan para mitra bisnis bahwa meskipun secara pencatatan laporan keuangan kondisi Perusahaan tidak bagus, namun secara finansial masih tergolong baik.

Kebijakan Strategis Tahun 2021

Dengan melihat dinamika perkembangan bisnis baik dari sisi eksternal maupun internal, manajemen perusahaan sudah berupaya keras untuk melakukan perbaikan secara internal dengan melakukan berbagai strategi. Namun perusahaan tidak dapat mengatur sepenuhnya kondisi yang ada antara perusahaan asuransi selaku mitra bisnis NASIONAL RE dengan tertanggungnya, sebagaimana prinsip *"follow the fortune"*.

of the 2021 financial report audit. Business relationships with partners that have been good so far are still can contribute to NasionalRe so that even though in 2020 the Company has suffered a loss.

Achievement of business targets as a whole was quite good, where there were 9 (nine) out of 13 (thirteen) business lines that gave positive results after using the triangulation method in calculating technical reserves. Where this is inversely proportional to the achievements in the previous year, where more business lines experienced losses. Overall, the Company still recorded a cash flow condition that was still a surplus, even though the company experienced an increase in claims from business partners, which were higher than the value of claims from previous years.

The obstacle faced by the Company in 2021 is the condition in which the Company's financial statements show minus results in 2020, this causes a decrease in the Company's Risk Based Capital (RBC) financial ratio so that it does not comply with regulations. This condition caused the Company's rating to drop which resulted in reduced business sessions from existing partners. this was caused by doubts from business partners to the Company regarding the Company's financial condition, therefore the Company's management and key persons are trying hard to convince business partners that even though the recording of the Company's financial statements is not good, financially it is still quite good.

Strategic Policies in 2021

By looking at the dynamics of business development both externally and internally, the company's management has worked hard to make improvements internally by carrying out various strategies. However, the company cannot fully regulate the conditions that exist between the insurance company as a business partner of NASIONAL RE and the insured, as in the "follow the fortune" principle.

Aksi korporasi sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemegang Saham sesuai dengan Akta No.14 tahun 2021 tentang pinjaman subordinasi di mana dalam upaya membantu memperbaiki kondisi kesehatan Perusahaan dalam hal ini pemenuhan rasio RBC sebesar 120%, Pemegang Saham memberikan pinjaman subordinasi sebesar Rp1.020.000.000.000 (satu triliun dua puluh miliar rupiah) yang dilakukan pada bulan Juni 2021 dan bulan September 2021.

The corporate action has actually been carried out by the Shareholders in accordance with Deed No. 14 of 2021 concerning subordinated loans where in an effort to help improve the health condition of the Company, in this case the fulfillment of the RBC ratio of 120%, the Shareholders provide subordinated loans of IDR 1,020,000,000,000 (one trillion twenty billion rupiah) which will be carried out in June 2021 and September 2021.

Dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis, manajemen melakukan *brainstorming* dengan seluruh pihak terkait dan membentuk beberapa tim *task force* maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya. Direksi juga sudah merumuskan strategi dan kebijakan strategis yang paling *applicable*, namun dikarenakan dampak penghitungan cadangan yang signifikan maka strategi yang dijalankan tidak dapat serta merta membuat NASIONAL RE langsung bangkit dan berdiri tegak. Diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk bisa bangkit dari kondisi merugi saat ini. Seluruh strategi yang memungkinkan untuk dijalankan sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun kondisi yang sulit tersebut bisa bangkit secara lambat walau pasti.

In formulating strategies and strategic policies, management conducts brainstorming with all related parties and forms several task force teams and other interested parties. The Board of Directors has also formulated the most applicable strategies and strategic policies, but due to the significant impact of calculating reserves, the strategy implemented cannot immediately make NASIONAL RE increased and grew. It takes a long time to be able to rise from the current state of loss. All possible strategies to be implemented have been carried out as well as possible, but these difficult conditions can arise slowly but surely.

Pandangan atas Prospek Usaha

Prospek bisnis Perseroan ke depannya tentunya tidak terlepas dari perkembangan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Dengan serangkaian upaya antisipatif dan strategi pembenahan yang telah ditetapkan serta melihat kondisi keuangan Perseroan yang kuat baik dari sisi aset, pertumbuhan premi bruto, serta arus kas yang positif, maka Perseroan akan mampu meningkatkan kinerjanya ke depan. Selain itu, peran Perseroan di industri asuransi juga cukup signifikan dengan *market share* yang mencapai sekitar 25% hingga 30%. Dengan demikian, prospek bisnis Perseroan ke depannya masih sangat baik.

Outlook on Business Prospect

The Company's future business prospects are certainly inseparable from developments in external conditions that may affect the Company's performance. With a series of anticipatory efforts and corrective strategies that have been determined and given the Company's strong financial condition in terms of assets, gross premium growth, and positive cash flow, the Company will be able to improve its performance going forward. In addition, the Company's role in the insurance industry is also quite significant with a market share of around 25% to 30%. Thus, the future business prospects of the Company are still very good.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance/GCG)* yang dijalankan oleh Perseroan berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Setiap tahunnya, Perseroan senantiasa berupaya memperbaiki penerapan GCG, termasuk koordinasi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ GCG yakni RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama serta organ penunjang Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan organ penunjang Direksi yang terdiri dari Divisi Internal Audit, Sekretaris Perusahaan, serta Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Direksi memandang masih ada ruang untuk perbaikan ke depannya terutama yang berkaitan dengan proses bisnis, sehingga diharapkan Perseroan dapat mencatatkan kinerja yang lebih baik. Diharapkan kontribusi dari lini bisnis yang pada tahun sebelumnya sedikit yang memberikan hasil surplus, namun pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah lini bisnis yang memberikan hasil positif.

Good Corporate Governance Implementation

The implementation of good corporate governance (GCG) by the Company is based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Every year, the Company always strives to improve the implementation of GCG, including the coordination and implementation of the duties and responsibilities of each GCG organ, namely the GMS, the Board of Commissioners and the Board of Directors as main persons and the supporting organs of the Board of Commissioners which consist of the Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, Committee Risk Monitoring, and supporting organs for the Board of Directors consisting of the Internal Audit Division, Corporate Secretary, and the Compliance and Risk Management Division. The Board of Directors views that there is still room for improvement in the future, especially with regard to business processes, so it is expected that the Company can record better performance. The contributions from business lines in the previous year produced a slightly surplus, the increasing number of business lines in 2021 are expected to generate positive results.

Pelaksanaan Program CSR

Perseroan senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi yang positif kepada seluruh pemangku kepentingan melalui beberapa kegiatan CSR. Fokus utama kegiatan CSR yang dilakukan mencakup 4 (empat) aspek yakni lingkungan hidup, sosial dan kemasyarakatan, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta tanggung jawab terhadap konsumen. Pelaksanaan kegiatan CSR tersebut dilakukan agar terjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Perseroan dengan pemangku kepentingan serta Perseroan dapat tumbuh bersama dengan masyarakat di sekitarnya.

CSR Program Implementation

The Company always strives to make a positive contribution to all stakeholders through several CSR activities. The main focus of the CSR activities carried out covers 4 (four) aspects, namely the environment, social and community, employment, occupational health and safety, and responsibility to consumers. The implementation of these CSR activities is carried out so that a harmonious and synergistic relationship is established between the Company and stakeholders and the Company can grow together with the surrounding community.

Perubahan Komposisi Direksi

Di sepanjang tahun 2021, terdapat perubahan susunan Direksi di mana setelah adanya kekosongan personil untuk jabatan Direktur Utama yang terjadi sejak Agustus 2020, maka pada 11 Oktober 2021 posisi tersebut telah diisi oleh Achmad Sudiyar Dalimunthe yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Reasuransi Nasional Indonesia. Sehingga susunan Direksi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi, MBA, AAIK, AAK, AIIS
Direktur Operasi	: Erlan Risdiyanto, SE, ACII, AMII, CRMP, CRGP
Direktur Teknik	: Fitris Dinarwan, ST, MM, ACII, CRGP
Direktur Keuangan & SDM	: Sunarso, SE, MM, Ak, AAAIK, AIIS, CSA®, CA, CFP®, CRMP, CIHRM, CHRP

Changes in the Composition of the Board of Directors

Throughout 2021, there was a change in the composition of the Board of Directors where after there was a personnel vacancy for the position of President Director which occurred since August 2020, then on October 11 2021 the d position was filled by Achmad Sudiyar Dalimunthe who was appointed through the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia. So that the composition of the Board of Directors as of December 31, 2021 is as follows:

President Director	: Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi, MBA, AAIK, AAK, AIIS
Operations Director	: Erlan Risdiyanto, SE, ACII, AMII, CRMP, CRGP
Technical Director	: Fitris Dinarwan, ST, MM, ACII, CRGP
Finance Director & HR	: Sunarso, SE, MM, Ak, AAAIK, AIIS, CSA®, CA, CFP®, CRMP, CIHRM, CHRP

Apresiasi

Atas nama Direksi, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap karyawan atas kinerja, dedikasi dan loyalitasnya sehingga Perseroan dapat melewati tahun 2021 dengan baik. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Dewan Komisaris atas arahan dan dukungannya dalam menerapkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan.

Appreciation

On behalf of the Board of Directors, we would like to thank all employees for their performance, dedication and loyalty so that the Company can pass 2021 very well. We also express our appreciation to the Board of Commissioners for their direction and support in implementing the supervisory function on the management of the Company.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemegang saham, mitra kerja serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya kepada Perseroan di sepanjang tahun 2021. Besar harapan kami agar dukungan tersebut dapat terus berlanjut dalam proses transformasi Perseroan sehingga Perseroan optimis menyongsong masa depan.

We would like also to express our deepest gratitude to the shareholders, business partners and all stakeholders for their trust and support to the Company throughout 2021. We hope that this support can continue in the Company's transformation process so that the Company is ready to embrace the future with optimism.

Atas nama Direksi
On behalf of the Board of Directors
Jakarta, November 2022

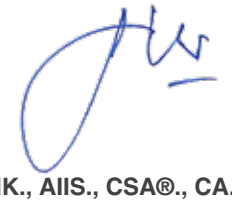

Sunarso, S.E., M.M., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP
Plt. Direktur Utama/Direktur Keuangan & SDM
Act. President Director/Finance & HR Director

NASIONAL RE
Reinsurance

Profil Perusahaan

Company Profile

Informasi Perusahaan
COMPANY INFORMATION

Nama Perusahaan Company Name	**PT Reasuransi Nasional Indonesia atau disingkat NASIONAL RE** PT Reasuransi Nasional Indonesia or abbreviated as NASIONAL RE
Bidang Usaha Line of Business	**Reasuransi** Reinsurance
Tanggal Pendirian Date of Establishment	**22 Agustus 1994** August 22, 1994
Landasan Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Nomor 129 tanggal 22 Agustus 1994 di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta H. Umaran Mansjur, S.H. No. 12 tanggal 08 Agustus 2008. Deed No. 129 dated August 22, 1994 drawn up before Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, which was amended by the Deed No. 12 dated August 8, 2008 by H. Umaran Mansjur, S.H.
Kepemilikan Ownership	PT Asuransi Kredit Indonesia : 99,9998% Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo: 0,0002%
Modal Dasar Authorized Capital	Rp1.800.000.000.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Miliar Rupiah) Rp1.800.000.000.000 (One Trillion and Eight Hundred Billion Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-in Capital	Rp538.000.000.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Rupiah) Rp538.000.000.000 (Five Hundred Thirty Eight Billion Rupiah)
Skala Organisasi Organization Scale	
Jumlah Aset Total Assets	Per 31 Desember 2021 As of December 31, 2021 Rp10,52 triliun / trillion
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Per 31 Desember 2021 As of December 31, 2021 Rp11,15 triliun / trillion
Jumlah Tenaga Kerja Total Employees	220 Karyawan per 31 Desember 2021 220 Employees as of December 31, 2021
Alamat Kantor Office Address	Jl. Cikini Raya No. 99, PO BOX 1618 JKP 10016, Jakarta, Indonesia, 10330
Telepon Phone	(62-21) 80642500
Surel E-mail	nasionalre@nasionalre.co.id
Situs Web Website	www.nasionalre.id
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Ignatius Nugroho Hardo, S.Pd., M.Si., CRMP.
Media Sosial Social media	LinkedIn : PT Reasuransi Nasional Indonesia Facebook : NasionalRe Twitter : @NasionalRe Instagram : @nasionalre Youtube : PT Reasuransi Nasional Indonesia

Riwayat Singkat
BRIEF HISTORY

PT Reasuransi Nasional Indonesia, atau disingkat NASIONAL RE, didirikan berdasarkan akta Nomor 129 tanggal 22 Agustus 1994 di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta H. Umaran Mansjur, S.H. No. 12 tanggal 08 Agustus 2008 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-68917.AH.01.02 tanggal 24 September 2008, dan perubahannya yang terakhir dengan Akta Notaris H. Bambang Suprianto, S.H., Sp.N., M.H. No. 53 tanggal 13 Juli 2015 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.03-0951082 tanggal 13 Juli 2015.

Pada awalnya, Perusahaan merupakan suatu unit setingkat bagian yang di kemudian hari berkembang menjadi divisi dari PT Asuransi Kredit Indonesia atau dikenal sebagai ASKRINDO, yang diberi nama Divisi Reasuransi Kerugian. Divisi ini berfungsi sebagai unit usaha *Professional Reinsurer*. Dengan demikian, walaupun secara *de jure* Perusahaan didirikan pada tahun 1994, namun secara *de facto* Perusahaan telah memulai usahanya sejak tahun 1971, yaitu sejak ASKRINDO mendapat izin untuk menjalankan usaha Reasuransi Kerugian sebagai bisnis penunjang di samping usaha Asuransi Kredit yang menjadi bisnis utamanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka ASKRINDO tidak diperkenankan beroperasi sebagai asuransi maupun reasuransi sekaligus, sehingga dilakukan pemisahan menjadi satu entitas tersendiri di mana Perusahaan (NASIONAL RE) yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1994 memperoleh izin operasi sebagai perusahaan reasuransi pada tahun 1995 berdasarkan dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/KMK.17/1995 tanggal 9 Januari 1995.

Pada tanggal 28 Oktober 2005, NASIONAL RE melebarkan sayap usahanya dengan memulai usaha Reasuransi Syariah. Langkah ini sejalan dengan pesatnya perkembangan perekonomian yang berazaskan syariah di Indonesia, termasuk asuransi syariah. Semakin berkembangnya asuransi syariah di Indonesia, tentunya memerlukan adanya reasuransi yang beroperasi pula berdasarkan syariah Islam, sehingga dapat diadakan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Penambahan bidang usaha

PT Reasuransi Nasional Indonesia, or abbreviated as NASIONAL RE, was established based on the Deed No. 129 dated August 22, 1994 drawn up before Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, which was amended by the Deed No. 12 dated August 8, 2008 by H. Umaran Mansjur, S.H. which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Decree No. AHU-68917.AH.01.02 dated September 24, 2008, and the last amendment was made by Deed of Notary H. Bambang Suprianto, S.H., Sp.N., M.H., No. 53 dated July 13, 2015 and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, according to Decree No. AHU-AH.01.03-0951082 dated July 13, 2015.

Initially, the Company was a department level unit and later developed into a division of PT Asuransi Kredit Indonesia, otherwise known as ASKRINDO, which was named the Loss Reinsurance Division. This division functions as a Professional Reinsurer business unit. Thus, although legally the Company was established in 1994, in fact the Company has started its business since 1971 since the receipt of the license for ASKRINDO to run the General Reinsurance business as a supporting business in addition to the Credit Insurance business which is its main business.

With the enactment of Law Number 2 of 1992 concerning Insurance Business, ASKRINDO is not allowed to operate as both insurance and reinsurance simultaneously. Therefore, a spin off was carried out and the reinsurance division became a separate entity, namely NASIONAL RE, which was formed on August 22, 1994 and obtained an operating license as a reinsurance company in 1995 based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27/KMK.17/1995 dated January 9, 1995.

On October 28, 2005, NASIONAL RE expanded its business by starting a Sharia Reinsurance business. This undertaking is in line with the rapid development of the sharia-based economy in Indonesia, including sharia insurance. The development of sharia insurance in Indonesia, of course, requires reinsurance that operates also based on Islamic sharia, so that mutually beneficial cooperation can be held between the two parties. The addition of the Sharia Reinsurance business sector based on the Extraordinary

Reasuransi Syariah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia disahkan dalam Akta Nomor 42 tanggal 10 Agustus 2005 di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti Sutjipto, S.H., di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-24079 HT.01.04.TH.2005 tanggal 31 Agustus 2005.

General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Reasuransi Nasional Indonesia was ratified in Deed Number 42 dated August 10, 2005 before Aulia Taufani, S.H., Substitute Notary Sutjipto, S.H., in Jakarta, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number C-24079 HT.01.04.TH.2005 dated August 31, 2005.

Sejak resmi berdiri, Perusahaan mencatat perkembangan yang cukup pesat dan berhasil membangun kepercayaan publik, sebagaimana yang terlihat dari berbagai penghargaan yang diterimanya.

Since it was officially established, the Company has recorded quite rapid growth and has succeeded in building public trust, as can be seen from the various awards it has received.

Perusahaan memasarkan berbagai produk reasuransi, antara lain Reasuransi Harta Benda, Kendaraan Bermotor, Rekayasa, Pengangkutan, Rangka Kapal, Rangka Pesawat, Kredit, Surety Bond, Satelit, Energi, Tanggung Gugat, Kecelakaan Diri, Aneka, serta Reasuransi Jiwa, baik untuk Reasuransi Konvensional maupun Reasuransi Syariah.

The Company provides various reinsurance products, including Reinsurance for Property, Motor Vehicles, Engineering, Transportation, Hull, Aircraft, Credit, Surety Bonds, Satellite, Energy, Liability, Personal Accidents, Miscellaneous, and Life Reinsurance, both for Conventional Reinsurance and Sharia Reinsurance.

Jejak Langkah
MILESTONES

1994

NASIONAL RE didirikan di Jakarta sebagai anak perusahaan dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) yang menjalankan usahanya dalam bidang Reasuransi, dengan Modal Dasar awal sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan Modal Disetor penuh sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).

NASIONAL RE is established in Jakarta as a subsidiary of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) engaging in the business of reinsurance, with the initial authorized capital of Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) and fully paid-up capital of Rp25,000,000,000 (twenty-five billion rupiah).

1999

Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO selaku Pemegang Saham Mayoritas sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) sehingga Modal Disetor Perusahaan menjadi Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sesuai Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 47 tanggal 10 November 1999, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: C-3388 HT.01.04 tanggal 21 Februari 2000.

Additional paid-up capital from ASKRINDO as Majority Shareholder, amounted to Rp25,000,000,000 (twenty-five billion rupiah) thus the Company's paid-up capital increased to Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah), according to the Notarial Deed of Sutjipto, S.H., No. 47 dated November 10, 1999, as ratified by the Decree of the Ministry of Justice of RI No. C-3388 HT.01.04 dated February 21, 2000.

2000

Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar dari Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sehingga Modal Disetor Perusahaan menjadi Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar rupiah) sesuai Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 37 tanggal 16 Juni 2000, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: C-00902 HT.01.04 tanggal 18 Januari 2003.

Additional paid-up capital from ASKRINDO amounted to Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah) thus the Company's fully paid capital became Rp65,000,000,000 (sixty-five billion rupiah) according to the Notarial Deed of Sutjipto, S.H., No. 37 dated June 16, 2000, as ratified by the Decree of Department of Justice No. C-00 902 HT.01.04 dated January 18, 2003.

2005

1. Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sehingga Modal Disetor dari sebelumnya Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar rupiah) menjadi Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sesuai Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 42 tanggal 10 Agustus 2005, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: C-24079 HT.01.04 Th 2005 tanggal 15 Agustus 2005.
2. Pada tanggal 28 Oktober 2005 NASIONAL RE memulai usaha Reasuransi Syariah, hal ini dilakukan untuk menampung bisnis reasuransi dengan prinsip syariah, di mana sesuai ketentuan bahwa setiap perusahaan asuransi syariah harus menempatkan reasuransinya pada perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Modal Disetor unit Reasuransi Syariah perusahaan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana disebutkan pada butir 1.

1. Additional paid-up capital from ASKRINDO amounted to Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah) so that the paid-up capital increased from previously Rp65,000,000,000 (sixty-five billion rupiah) to Rp75,000,000,000 (seventy five billion rupiah) in accordance with the Notarial Deed of Sutjipto, S.H., No. 42 dated August 10, 2005, with the approval of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-24079 HT.01.04 Th 2005 dated August 15, 2005.
2. On October 28, 2005, NASIONAL RE entered into Sharia Reinsurance business. This was done to accommodate the reinsurance business with Islamic principles, whereas in accordance with the provision that every sharia insurance company must put its reinsurance in its insurance company with sharia principles. Paid-in Capital of the Company's Sharia reinsurance unit amounted Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah) as mentioned in point 1.

2007

Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sehingga Modal Disetor NASIONAL RE dari sebelumnya Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) menjadi Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar rupiah), sesuai Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 108 tanggal 22 Februari 2007, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: W7-HT.01.04-4562 tanggal 15 Agustus 2007.

Additional paid-up capital from ASKRINDO amounted to Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah) so that the paid-up capital increased from previously Rp75,000,000,000 (seventy-five billion rupiah) become Rp85,000,000,000 (eighty-five billion rupiah) in accordance with the Notarial Deed of Sutjipto, S.H., No. 108 dated February 22, 2007, with the approval of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No.W 7-HT.01.04-4562 dated August 15, 2007.

2011

1. Peningkatan Modal Dasar Perusahaan dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah), sesuai Akta Notaris Umaran Mansjur, S.H., Nomor 9 tanggal 29 Juli 2011, dengan pengesahan Departemen Hukum & HAM RI Nomor AHU-53290.AH.01.02 tanggal 01 November 2011.
2. Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp53.000.000.000 (lima puluh tiga miliar rupiah), yang terdiri dari tanah dan gedung kantor Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta Pusat sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan pengalihan dana cadangan umum sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah), sehingga Modal Disetor menjadi sebesar Rp138.000.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar rupiah), sebagaimana dicatat dalam Akta Notaris Umaran Mansjur, S.H., Nomor 9 tanggal 29 Juli 2011, dengan pengesahan Departemen Hukum & HAM Nomor: AHU-53290.AH.01.02 tanggal 01 November 2011.
3. Tanggal 01 November 2011 PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh rating A- (A minus) dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

1. Change in the Company's authorized capital from Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) to Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah), by Notary Umaran Mansjur, S.H., No. 9 dated July 29, 2011, with the ratification of the Department of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-53290. AH.01.02 dated November 1, 2011.
2. Additional paid-up capital from ASKRINDO amounted to Rp53,000,000,000 (fifty three billion rupiah), in the form of land and office buildings on Jl. Cikini Raya No. 99 Central Jakarta, worth Rp35,000,000,000 (thirty five billion rupiah) and the transfer of general reserve funds amounting Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah), so that the paid-up capital became Rp138,000,000,000 (one hundred thirty-eight billion rupiah) from previously Rp85,000,000,000 (eighty-five billion rupiah), in accordance with Notarial Deed of Umaran Mansjur, S.H., No. 9 dated July 29, 2011, with the approval of the Department of Law & Human Rights No. AHU- 53290.AH.01.02 dated November 01, 2011.
3. On November 01, 2011, PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained A- (A minus) rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

2013

1. PT Reasuransi Nasional Indonesia meluncurkan layanan terbarunya berupa layanan reasuransi jiwa berbasis *web*, yaitu www.e-lifere.com pada tanggal 08 Februari 2013.
2. e-lifeRe mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai layanan asuransi jiwa pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang menggunakan layanan *web* pada tanggal 08 Februari 2013.
3. Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sehingga Modal Disetor menjadi Rp213.000.000.000 (dua ratus tiga belas miliar rupiah) sesuai Akta Notaris Hadijah, S.H., Nomor 9 tanggal 03 Mei 2013, dengan pengesahan Kementerian Hukum & HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-24996 tanggal 20 Juni 2013.
4. PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh rating A dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

1. PT Reasuransi Nasional Indonesia launched its newest web-based life reinsurance services, namely www.e-lifere.com on February 08, 2013.
2. e-lifeRe was awarded by the Indonesian Record Museum (MURI) as the first life insurance services in Indonesia, even in the world, to use web-based services on February 08, 2013.
3. Additional paid-up capital from ASKRINDO amounted to Rp75,000,000,000 (seventy-five billion rupiah) so that the paid-up capital became Rp213,000,000,000 (two hundred and thirteen billion rupiah) in accordance with Notarial Deed of Umaran Mansjur, S.H., No. 9 dated May 03, 2013, with the approval of the Department of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10–24996 dated June 20, 2013.
4. PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained an A rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO.

2014

1. Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) berupa *fresh money* sehingga Modal Disetor Perusahaan menjadi Rp363.000.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga miliar rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp213.000.000.000 (dua ratus tiga belas miliar rupiah) sesuai Akta Notaris Hadijah, S.H., Nomor 20 tanggal 13 Oktober 2014.
2. Tanggal 03 November 2014 PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh rating A (A) dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
3. Peningkatan Modal Dasar perusahaan dari Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah) menjadi Rp1.800.000.000.000 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah) sesuai Akta Notaris Bambang Suprianto, S.H., Nomor 72 tanggal 17 Desember 2014, dengan pengesahan Kementerian Hukum & HAM RI Nomor: AHU-13005.40.20.2014 tanggal 17 Desember 2014.
4. Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) berupa *fresh money* sehingga Modal Disetor menjadi Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar rupiah) dari sebelumnya Rp363.000.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga miliar rupiah) sesuai Akta Notaris Bambang Suprianto, S.H., Nomor 72 tanggal 17 Desember 2014, dengan pengesahan Kementerian Hukum & HAM RI Nomor: AHU-13005.40.20.2014 tanggal 17 Desember 2014.

1. Additional paid-up capital from ASKRINDO amounted to Rp150,000,000,000 (one hundred and fifty billion rupiah) in the form of fresh money so that the Company's paid-up capital became Rp363,000,000,000 (three hundred and sixty-three billion rupiah) from its previous Rp213,000,000,000 (two hundred thirteen billion rupiah), by the Deed of Notary Hadijah, S.H., No. 20 dated October 13, 2014.
2. On November 3, 2014, PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained an A(idn) rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
3. Additional authorized capital from previously Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah) to Rp1,800,000,000,000 (one trillion eight hundred billion rupiah), by the Deed of Notary Bambang Suprianto, S.H., No. 72 dated December 17, 2014, with the approval of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-13005.40.20.2014 dated December 17, 2014.
4. Additional paid-up capital from ASKRINDO amounted to Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) in the form of fresh money, so that the paid-up capital became Rp463,000,000,000 (four hundred and sixty-three billion rupiah) from Rp363.000.000.000 (three hundred and sixty three billion rupiah), by the Deed of Notary Bambang Suprianto, S.H., No. 72 dated December 17, 2014, with the approval of the Ministry of Law and Human rights No. AHU-13005.40.20.2014 December 17, 2014.

2015

1. Peningkatan Modal Dasar dari ASKRINDO menjadi sebesar Rp1.800.000.000.000 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah) sesuai Akta Notaris Bambang Suprianto, S.H., Sp.N., M.H., Nomor 53 tanggal 13 Juli 2015 yang disahkan oleh Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia dengan No. AHUAH.01.03-0951082 tanggal 13 Juli 2015.
2. Penambahan Modal Disetor menjadi sebesar Rp538.000.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan miliar rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar rupiah) sesuai Akta Notaris Bambang Suprianto, S.H., Sp.N., M.H., Nomor 53 tanggal 13 Juli 2015 yang disahkan oleh Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia dengan No. AHUAH. 01.03-0951082 tanggal 13 Juli 2015.
3. PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh *rating* AA-(idn)/BB-(int'l) dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia pada tanggal 17 November 2015.

1. Increase in authorized capital from ASKRINDO to become Rp1.800.000.000.000 (one trillion eight hundred billion rupiah) from the previous Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah) by the Deed of Notary Bambang Suprianto, S.H., Sp.N., M.H., Number 53 dated July 13, 2015 was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHUAH. 01.03-0951082 dated July 13, 2015.
2. Additional paid-up capital amounted to Rp538,000,000,000 (five hundred thirty-eight billion rupiah) from Rp463,000,000,000 (four hundred sixty-three billion rupiah) by the Deed of Notary Bambang Suprianto, S.H., Sp.N., M.H., Number 53 dated July 13, 2015 was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHUAH. 01.03- 0951082 dated July 13, 2015.
3. PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained the AA-(idn)/BB-(int'l) rating from Fitch Ratings Indonesia rating agency on November 17, 2015.

2016

PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh *rating* AA-(idn)/BB(int'l) dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia pada tanggal 1 November 2016.

PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained the AA-(idn)/BB(int'l) rating from Fitch Ratings Indonesia on November 1, 2016.

2017

PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh *rating* AA-(idn)/BB(int'l) dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2017.

PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained the AA-(idn)/BB(int'l) rating from Fitch Ratings Indonesia on October 16, 2017.

2018

1. Logo PT Reasuransi Nasional Indonesia mengalami perubahan sebagai suatu dinamika yang menggambarkan kesatuan dari grup induk perusahaan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia pada tanggal 18 Mei 2018.
2. PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh rating AA-(idn)/BB+(int'l) dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia pada tanggal 05 Oktober 2018.

1. The logo of PT Reasuransi Nasional Indonesia has changed as a dynamic representative unity of the parent company group, namely PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia on May 18, 2018.
2. PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained the AA-(idn)/BB+(int'l) rating from Fitch Ratings Indonesia on October 05, 2018.

2019

25 tahun perjalanan PT Reasuransi Nasional Indonesia memberikan layananan reasuransi kepada nasabah di Indonesia.

25 years of journey of PT Reasuransi Nasional Indonesia providing reinsurance service to our customers in Indonesia.

2021

Perusahaan meningkatkan cadangan klaim sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kemampuan dalam mengantisipasi risiko bisnis ke depan.

The Company increased claim reserves as part of its effort to strengthen the ability in anticipating future business risk.

Visi dan Misi
VISION AND MISSION

VISI
VISION

"Menjadi perusahaan reasuransi yang Tepercaya *(Trust)*, Tangguh *(Strength)* dan Terus tumbuh *(Growth)*."

"To become a most trusted, strong, and growing reinsurance company."

Penjelasan

Sebagai perusahaan yang mengelola risiko finansial dari mitra usaha, maka NASIONAL RE harus berusaha untuk menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dan bahkan tepercaya bagi para mitra usaha, terlebih dalam situasi dan kondisi global di mana kepercayaan sangat sulit ditemukan. Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari para mitra usaha, maka Perusahaan harus tangguh dalam banyak bidang, khususnya bidang finansial, teknologi informasi maupun sumber daya manusia. Dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari mitra usaha serta didukung oleh ketangguhan yang dimiliki Perusahaan, maka Perusahaan memiliki peluang yang besar untuk terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Explanation

As a company that manages the financial risks of the business partners, NASIONAL RE should strive to be a company that is trustworthy and reliable even for business partners, especially in the global circumstances in which trust is very hard to find. To obtain a high level of trust of the business partners, the company should be strong in many areas, particularly the area of finance, information technology, and human resources. With the high level of trust from business partners and supported by the resilience of the company, the company has a great opportunity to continue to grow from year to year.

Pernyataan Persetujuan atas Visi dan Misi Perusahaan

Rumusan Visi dan Misi tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan dari Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia, sesuai dengan SK No.72/KEP/DIR/IX/2019 tentang Penetapan MVVM *(Mission, Vision, Values, Meaning)* PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Statement of Approval of the Company's Vision and Mission

The aforementioned Vision and Mission formula have been approved by the Board of Directors of PT Reasuransi Nasional Indonesia, in accordance with SK No. 72/ KEP/DIR/IX/2019 regarding the Establishment of MVVM (Mission, Vision, Values, Meaning) of PT Reasuransi Nasional Indonesia.

MISI
MISSION

1. Memberikan pelayanan dan solusi reasuransi umum dan reasuransi jiwa, baik untuk produk konvensional maupun syariah.
2. Memberikan pelayanan kepada pasar Nasional, Regional, maupun Internasional.
3. Memberikan manfaat kepada mitra kerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan asuransi dan kapasitas asuransi nasional serta manfaat kepada *stakeholders* lainnya.

1. To provide services and solutions of general and life reinsurance, both for conventional and sharia products.
2. To provide services for the National, Regional and International markets.
3. To provide benefits to partners in improving the performance of insurance companies and capacity of national insurance as well as benefits to other stakeholders.

Penjelasan

Dengan menjadi perusahaan yang tepercaya, tangguh dan terus tumbuh, maka NASIONAL RE dapat membantu pemerintah dalam mengurangi defisit keuangan negara sebagai akibat dari terserapnya premi domestik kepada reasuradur dan retrosesioner di luar negeri. Dengan menjadi perusahaan yang semakin dipercaya, semakin tangguh dan semakin bertumbuh pesat, maka akan semakin besar pula kemampuan Perusahaan untuk menyerap kapasitas pertanggungan asuransi dalam negeri, sehingga semakin besar pula premi yang dapat diretensi sendiri oleh reasuradur lokal.

Explanation

By becoming the most trusted, strong, and growing company, NASIONAL RE could help the government reducing the national financial deficits as a result of the absorption of the domestic premium to foreign reinsurer and retrocessionaire. By becoming more credible, more resilient, and more rapidly growing company, the Company's ability to absorb the capacity of domestic insurance coverage to be greater, thus greater premium could be retained by local reinsurers.

Nilai-Nilai
VALUES

AKHLAK

HARMONIS Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Caring for each other and respecting differences.

LOYAL Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Dedicated and put the nation and country first.

NILAI-NILAI UTAMA
CORE VALUES

AKHLAK

KOMPETEN Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Continue to learn and develop capabilities.

ADAPTIF Adaptive

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
Continue to innovate and enthusiastic in moving or facing change.

AMANAH Trustworthy

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Hold fast to the trust given.

KOLABORATIF Collaborative

Membangun kerja sama yang sinergis.
Building a synergistic collaboration.

Kegiatan Usaha
LINE OF BUSINESS

Maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas, dengan memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian/ umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa;
b. Menerima reasuransi dalam bidang asuransi kerugian/ umum dan/atau asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui perantara *(broker)* reasuransi;
c. Melakukan retrosesi atau reasuransi butir 1 di atas kepada perusahaan asuransi dan/atau reasuransi secara langsung ataupun menyelenggarakan sebagian usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah.

The Company's business purpose and objective is to participate in implementing and supporting government policies and programs in the field of economy and national development in general, in particular the implementation of a high quality reinsurance business with strong competitiveness, as well as being a profitable business in order to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies, and providing reinsurance services against the risks faced by Insurance Companies, both conventional and sharia-based.

To achieve the above purpose and objectives, the Company carries out the following business activities:

a. Reinsurance business against risks faced by general insurance companies and or life insurance companies;
b. Reinsurance for general insurance and/or life insurance, either directly or through reinsurance brokers;
c. Retrocession or reinsurance of point 1 above to insurance and/or reinsurance companies, directly or through reinsurance brokers to conduct part of the reinsurance business under sharia principles by establishing a sharia unit.

Produk dan Layanan
PRODUCT AND SERVICES

PT Reasuransi Nasional Indonesia melakukan penutupan reasuransi, atau pertanggungan ulang, atas produk-produk asuransi dengan mekanisme fakultatif dan *treaty*. Fakultatif adalah pertanggungan ulang yang dilakukan atas dasar penawaran secara individual atau *case by case* dan tidak mengikat, sedangkan *Treaty* adalah pertanggungan ulang yang dilakukan atas dasar kesepakatan yang dilakukan pada awal tahun penutupan (mengikat).

a. Reasuransi Umum Konvensional
   Jenis-jenis produk reasuransi umum konvensional adalah *facultative reinsurance* dan *treaty reinsurance*. Adapun cabang-cabang asuransinya adalah sebagai berikut:
   1. Harta Benda
   2. Kendaraan Bermotor
   3. Pengangkutan
   4. Rangka Kapal
   5. Rangka Pesawat
   6. Satelit
   7. Energi
   8. Rekayasa
   9. Tanggung Gugat
   10. Kecelakaan Diri
   11. Kredit & Jaminan
   12. Aneka

b. Reasuransi Jiwa Konvensional
   NASIONAL RE juga menyediakan kapasitas reasuransi jiwa konvensional kepada perusahaan asuransi jiwa lokal untuk asuransi jiwa, kecelakaan diri dan kesehatan, baik perorangan (individu) maupun kelompok *(group)*. Pertanggungan reasuransi tersebut dapat dilakukan secara berdiri sendiri *(stand alone)* maupun sebagai tambahan *(rider)*.
   1. Reasuransi Jiwa
      a. *Medical*
      b. *Non-Medical*
      c. *Personal Accident*
      d. *Group*
      e. *Health*

PT National Reinsurance Indonesia provides underwriting for reinsurance of insurance products using Facultative and Treaty mechanism. Facultative is a reinsurance that is provided based on individual offer or case by case not binding, meanwhile, Treaty is a reinsurance that is provided based on advance agreement at beginning of the underwriting year (binding).

a. Conventional General Reinsurance
   Types of conventional general reinsurance products include facultative reinsurance and treaty reinsurance. The insurance branches are as follows:
   1. Property
   2. Motor Vehicles
   3. Marine Cargo
   4. Marine Hull
   5. Aviation
   6. Satellite
   7. Energy
   8. Engineering
   9. Liability
   10. Personal Accident
   11. Credit & Bonds
   12. Miscellaneous

b. Conventional Life Reinsurance
   NASIONAL RE also provides conventional life reinsurance capacity to local life insurance companies for life insurance, personal accident and health, both individuals and groups. The reinsurance coverage can be done independently (stand alone) or as an additional (rider).

   1. Life Reinsurance
      a. Medical
      b. Non-Medical
      c. Personal Accident
      d. Group
      e. Health

2. Reasuransi Kecelakaan Diri
   a. Meninggal dunia karena kecelakaan
   b. Cacat tetap karena kecelakaan
   c. Biaya perawatan di rumah sakit karena kecelakaan
3. Reasuransi Kesehatan
   a. Rawat Inap
   b. Rawat Jalan
   c. Reasuransi Syariah

   Dalam Reasuransi Syariah produk jasa yang ditawarkan sama dengan produk jasa Reasuransi Konvensional baik untuk Reasuransi Umum maupun Reasuransi Jiwa. Namun yang membedakan dengan Reasuransi Konvensional adalah adanya *risk sharing* di antara peserta, dan tidak ada pelimpahan risiko dari peserta kepada perusahaan asuransi, atau dari perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi. NASIONAL RE sebagai perusahaan Reasuransi dalam hal ini hanya sebagai operator atau pengelola dana peserta (tabarru) dan tidak ikut menanggung risiko.

2. Personal Accident Reinsurance
   a. Fatality due to an accident
   b. Permanent disability due to accident
   c. Medical costs due to accident
3. Health Reinsurance
   a. Inpatient
   b. Outpatient
   c. Sharia Reinsurance

   In Sharia Reinsurance the offered product services are the same as Conventional Reinsurance products for both General Reinsurance and Life Reinsurance. However, the difference of Conventional Reinsurance is the risk sharing among participants, and no risk transfer from participants to the insurance companies, or from insurance companies to reinsurance companies. As a Reinsurance company, in this case, NASIONAL RE only acts as an operator or fund manager for the participants (tabarru) and does not share the risk.

Struktur Organisasi

ORGANIZATION STRUCTURE

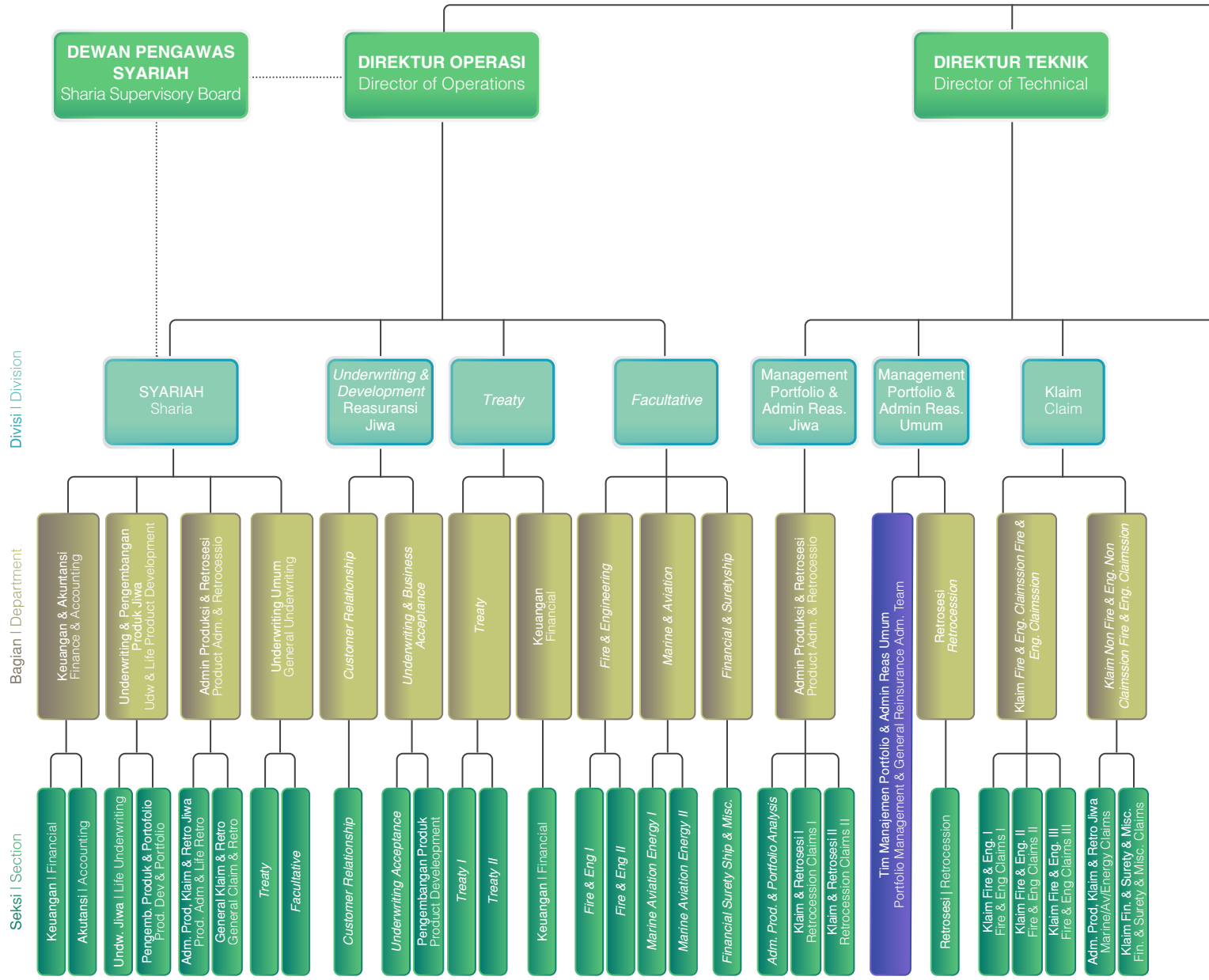

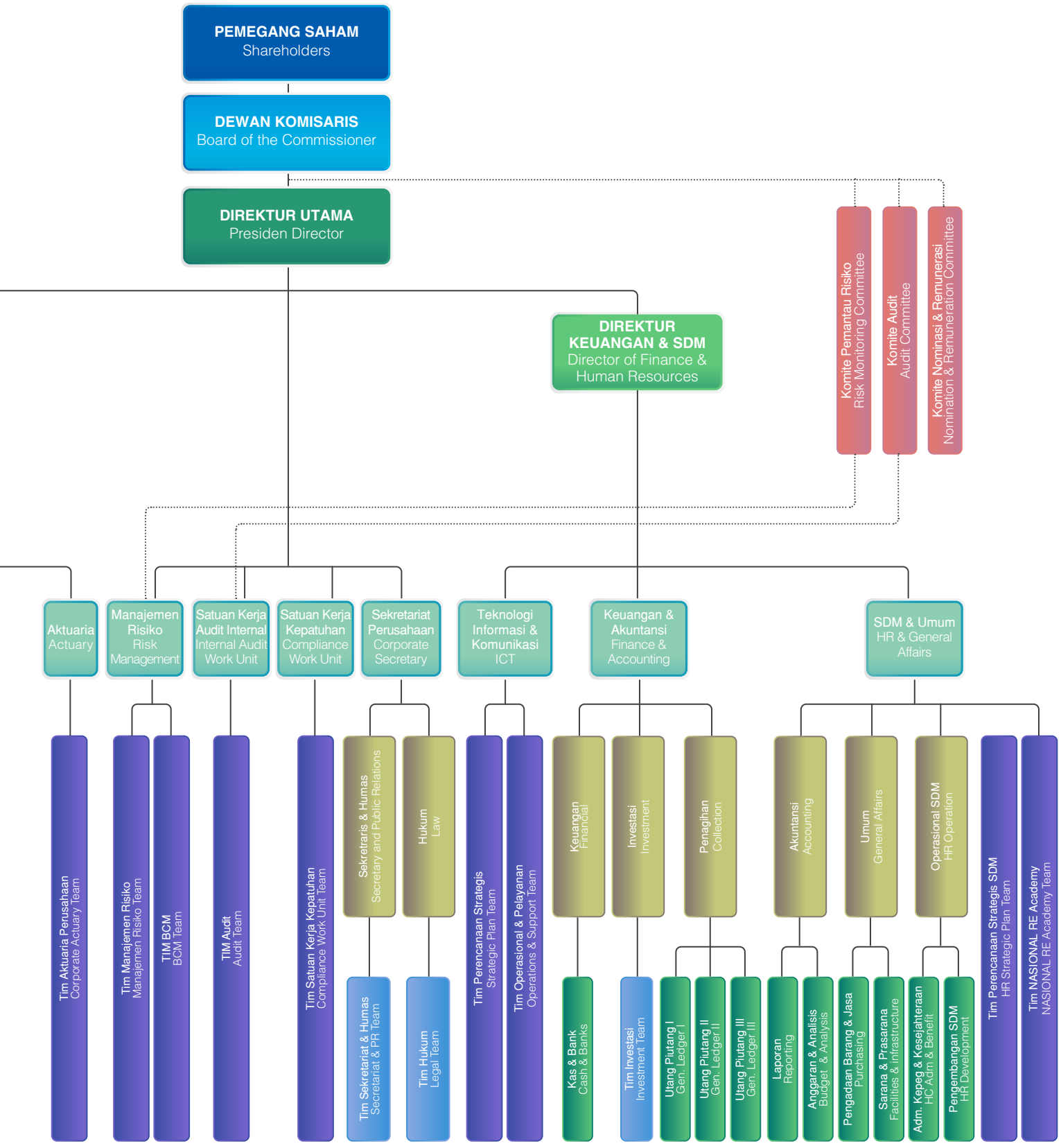
PEMEGANG SAHAM
Shareholders
DEWAN KOMISARIS
Board of the Commissioner
DIREKTUR UTAMA
Presiden Director
DIREKTUR KEUANGAN & SDM
Director of Finance & Human Resources
Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee
Komite Audit
Audit Committee
Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee
Aktuaria
Actuary
Manajemen Risiko
Risk Management
Satuan Kerja Audit Internal
Internal Audit Work Unit
Satuan Kerja Kepatuhan
Compliance Work Unit
Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretary
Teknologi Informasi & Komunikasi
ICT
Keuangan & Akuntansi
Finance & Accounting
SDM & Umum
HR & General Affairs
Tim Aktuaria Perusahaan
Corporate Actuary Team
Tim Manajemen Risiko
Manajemen Risiko Team
TIM BCM
BCM Team
TIM Audit
Audit Team
Tim Satuan Kerja Kepatuhan
Compliance Work Unit Team
Sekretariris & Humas
Secretary and Public Relations
Hukum
Law
Tim Sekretariat & Humas
Secretariat & PR Team
Tim Hukum
Legal Team
Tim Perencanaan Strategis
Strategic Plan Team
Tim Operasional & Pelayanan
Operations & Support Team
Keuangan
Financial
Investasi
Investment
Penagihan
Collection
Kas & Bank
Cash & Banks
Tim Investasi
Investment Team
Utang Piutang I
Gen. Ledger I
Utang Piutang II
Gen. Ledger II
Utang Piutang III
Gen. Ledger III
Akuntansi
Accounting
Umum
General Affairs
Operasional SDM
HR Operation
Laporan
Reporting
Anggaran & Analisis
Budget & Analysis
Pengadaan Barang & Jasa
Purchasing
Sarana & Prasarana
Facilities & Infrastructure
Adm. Kepeg & Kesejahteraan
HC Adm & Benefit
Pengembangan SDM
HR Development
Tim Perencanaan Strategis SDM
HR Strategic Plan Team
Tim NASIONAL RE Academy
NASIONAL RE Academy Team

Dewan Komisaris
BOARD OF COMMISSIONERS

Pada tahun 2021 terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1 Januari - 16 Juni 2021

Komisaris Utama	: Dr. Toto Pranoto CRGP
Komisaris	: Dwi Agus Sumarsono
Komisaris Independen	: Raymond Buisson

16 Juni - 31 Desember 2021

Komisaris Utama	: Dr. Toto Pranoto CRGP
Komisaris	: Vincentius Willianto, FSAI., AAIJ.
Komisaris Independen	: A. Yanti F. Parapat
Komisaris Independen	: Teddy Sastra, S.E., M.M., AM

In 2021, there were some changes in the composition of the Board of Commissioners as follows:

January 1 - June 16, 2021

President Commissioner	: Dr. Toto Pranoto CRGP
Commissioner	: Dwi Agus Sumarsono
Independent Commissioner	: Raymond Buisson

June 16 - December 31, 2021

President Commissioner	: Dr. Toto Pranoto CRGP
Commissioner	: Vincentius Willianto, FSAI., AAIJ
Independent Commissioner	: A. Yanti F. Parapat
Independent Commissioner	: Teddy Sastra, S.E., M.M., AM

Vincentius Willianto, FSAI., AAIJ
Komisaris
Commissioner

Dr. Toto Pranoto CRGP
Komisaris Utama
President Commissioner

A. Yanti F. Parapat
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Teddy Sastra, S.E., M.M., AM
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Profil Dewan Komisaris

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dr. Toto Pranoto, CRGP
Komisaris Utama
President Commissioner

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia. Lahir di Bandung 17 Mei 1966. Domisili di Jakarta.

Pendidikan
Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1993 jurusan Akuntansi. Mendapatkan gelar *Magister* Manajemen dari *Program Magister* Manajemen Universitas Indonesia tahun 1999 dengan major Finance. Meraih gelar Doktor dalam bidang *Public Policy & Administration*, Universitas Indonesia tahun 2011.

Pengalaman Kerja
Saat ini juga menjabat sebagai *Managing Director* LM FEB UI (2009-Sekarang) dan Anggota Komite Infrastruktur KEIN sejak 2017.

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan sejak tahun 2017 berdasarkan RUPSLB Tanggal 19 Desember 2017.

Pelatihan
Pada tahun 2021, beliau mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:
1. Webinar: *Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond-Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday*, yang diselenggarakan oleh AAUI.
2. Webinar *Series Enhancing Your ERM* – 'Bagaimana mewujudkan Model Penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi (ERM) dan Bagaimana Mengukur *"Creating Value"* pada penerapan ERM?', yang diselenggarakan oleh *GRC Management*.
3. *Master Class Program Series XXI "Competitive Strategy in a Changing Business Environment (Surfing the Wave of Pandemic & Disruptions)"*, yang diselenggarakan oleh LSPMR.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun pemegang saham pengendali Perusahaan.

Personal Data
Indonesian citizens. Born in Bandung May 17, 1966. Domiciled in Jakarta.

Educational Background
He earned his Bachelor's degree in 1993 from the University of Indonesia, Faculty of Economics, majoring in Accounting. And his Master of Management degree from the Master of Management Program, University of Indonesia in 1999 majoring in Finance. He holds a Doctorate degree in Public Policy & Administration, from the University of Indonesia in 2011.

Work Experience
He currently also serves as Managing Director of LM FEB UI (2009-Present) and Member of the KEIN Infrastructure Committee since 2017.

Position History in The Company
He serves as the Company's President Commissioner since 2017 based on the EGMS on December 19, 2017.

Training
In 2021, he participated in training and competency development as follows:
1. Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond-Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday, organized by AAUI.
2. Webinar Series Enhancing Your ERM – 'How to realize an integrated Risk Management Implementation Model (ERM) and How to Measure "Creating Value" in ERM implementation?', organized by GRC Management.
3. Master Class Program Series XXI "Competitive Strategy in a Changing Business Environment (Surfing the Wave of Pandemic & Disruptions)", organized by LSPMR.

Affiliated Relationships
He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the controlling shareholder of the Company.

Vincentius Wilianto, FSAI., AAIJ.
Komisaris
Commissioner

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia. Lahir di Cirebon 1 Februari 1969. Domisili di Jakarta.

Pendidikan
Meraih gelar Sarjana Matematika dari ITB tahun 1992, Master Aktuaria dari Universitas Macquarie, Sydney, Australia, tahun 1997.

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak tahun 2021 berdasarkan RUPSLB tanggal 16 Juni 2021.

Pelatihan
Pada tahun 2021, beliau mengikuti kegiatan pelatihan webinar: Indonesia *Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday*, yang diselenggarakan oleh AAUI.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun pemegang saham pengendali Perusahaan.

Personal Data
Indonesian citizens. Born in Cirebon February 1, 1969. Domiciled in Jakarta.

Educational Background
He holds a Bachelor's Degree in Mathematics from ITB in 1992, Master of Actuarial from the University of Macquarie, Sydney, Australia, in 1997.

Position History in The Company
He serves as Commissioner of the Company since 2021 based on the EGMS dated June 16, 2021.

Training
In 2021, he attended the training program of webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday, organized by AAUI.

Affiliated Relationships
He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the controlling shareholder of the Company.

A. Yanti F. Parapat
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia. Lahir di Tebing Tinggi 17 Februari 1966. Domisili di Jakarta.

Pendidikan
Mengikuti pendidikan *Executive Secretarial Studies* di The Spanish American Institute, 1986.

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak tahun 2021 berdasarkan RUPSLB tanggal 16 Juni 2021.

Pelatihan
Pada tahun 2021, beliau mengikuti kegiatan pelatihan sebagai berikut:
1. Webinar: *Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday*, yang diselenggarakan oleh AAUI.
2. *Virtual* Seminar Internasional AAMAI: *Global Talents Trends in Insurance Industry: The Future of Work*, yang diselenggarakan oleh AAMAI.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun pemegang saham pengendali Perusahaan.

Personal Data
Indonesian citizens. Born in Tebing Tinggi February 17, 1966. Domiciled in Jakarta.

Educational Background
She attended Executive Secretarial Studies at the Spanish American Institute in 1986.

Position History in The Company
She serves as Independent Commissioner of the Company since 2021 based on the EGMS on June 16, 2021.

Training
In 2021, She participated in the training as follows:

1. Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday, organized by AAUI.
2. Virtual International Seminar AAMAI: Global Talents Trends in Insurance Industry: The Future of Work, organized by AAMAI.

Affiliated Relationships
She has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the controlling shareholder of the Company.

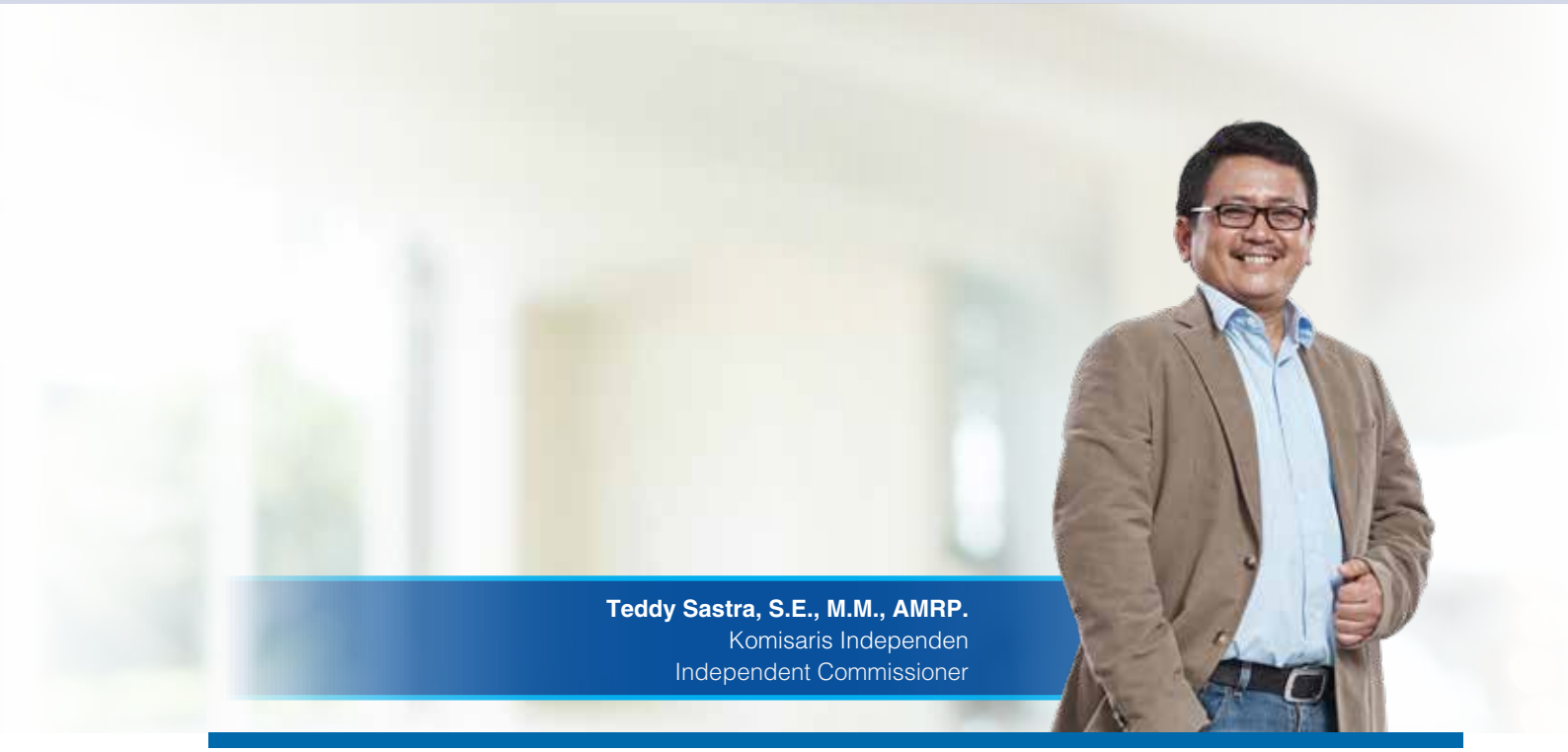

Teddy Sastra, S.E., M.M., AMRP.
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia. Lahir di Karawang 5 Januari 1966. Domisili di Bekasi.

Pendidikan
Meraih gelar Sarjana bidang Manajemen Keuangan dari STIE Jakarta tahun 2001, Magister Manajemen dari STIE PBM tahun 2018.

Riwayat Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak tahun 2021 berdasarkan RUPSLB tanggal 16 Juni 2021.

Pelatihan
Pada tahun 2021, beliau mengikuti kegiatan pelatihan sebagai berikut:
1. Webinar: *Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday*, yang diselenggarakan oleh AAUI.
2. *Virtual* Seminar Internasional AAMAI: *Global Talents Trends in Insurance Industry: The Future of Work*, yang diselenggarakan oleh AAMAI.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun pemegang saham pengendali Perusahaan.

Personal Data
Indonesian citizens. Born in Karawang January 5, 1966. Domiciled in Bekasi.

Educational Background
He holds a Bachelor's Degree in Financial Management from STIE Jakarta in 2001, Master of Management from STIE PBM in 2018.

Position History in The Company
He serves as Independent Commissioner of the Company since 2021 based on the EGMS dated June 16, 2021.

Training
In 2021, he attended the training as follows:

1. Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday, organized by AAUI.
2. Virtual International Seminar AAMAI: Global Talents Trends in Insurance Industry: The Future of Work, organized by AAMAI.

Affiliated Relationships
He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the controlling shareholder of the Company.

Direksi
BOARD OF DIRECTORS

Pada tahun 2021 terdapat perubahan susunan Direksi sebagai berikut:

1 Januari - 11 Oktober 2021

Plt. Direktur Utama	: Sunarso, S.E., M.M., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®, CRMP., CIHRM., CHRP.
Direktur Operasi	: Erlan Risdiyanto, S.E., ACII., AMII., CRMP., CRGP.
Direktur Keuangan & SDM	: Sunarso, SE., MM., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP.
Direktur Teknik	: Fitris Dinarwan, ST, MM, ACII, CRGP

11 Oktober - 31 Desember 2021

Direktur Utama	: Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi., MBA., AAIK., AAK., AIIS.
Direktur Operasi	: Erlan Risdiyanto, S.E., ACII., AMII., CEMP., CRGP.
Direktur Keuangan & SDM	: Sunarso, S.E., M.M., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP.
Direktur Teknik	: Fitris Dinarwan, S.T., M.M., ACII., CRGP.

In 2021 there were some changes int he composition of the Board of Directors as follows:

January 1 - October 11, 2021

Act. President Director	: Sunarso, S.E., M.M., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP
Operations Director	: Erlan Risdiyanto., SE., ACII., AMII, CRMP., CRGP
Finance & HR Director	: Sunarso, SE., MM., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP.
Technical Director	: Fitris Dinarwan, ST, MM, ACII, CRGP

October 11 - December 31, 2021

President Director	: Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi., MBA., AAIK., AAK., AIIS.
Operations Director	: Erlan Risdiyanto, S.E., ACII., AMII., CEMP., CRGP.
Finance & HR Director	: Sunarso, S.E., M.M., Ak., AAAIK., AIIS., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP
Technical Director	: Fitris Dinarwan, ST, MM, ACII, CRGP

Erlan Risdiyanto, S.E., ACII., AMII., CEMP., CRGP.
Direktur Operasi
Operations Director

Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi., MBA., AAIK., AAK., AIIS.
Direktur Utama
President Director

Sunarso, S.E., M.M., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP.
Direktur Keuangan & SDM
Finance & HR Director

Fitris Dinarwan, S.T., M.M., ACII., CRGP.
Direktur Teknik
Technical Director

Profil Direksi

PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi., MBA., AAIK., AAK., AIIS.
Direktur Utama
President Director

Data Pribadi
Warga negara Indonesia, lahir di Kota Probolinggo tanggal 14 Oktober 1973.

Pendidikan
Beliau menjalani masa pendidikan di Kota Malang. Meraih gelar Sarjana Perikanan dari Universitas Brawijaya tahun 1997 dan gelar *Master of Business Administration* dari Universitas Gadjah Mada tahun 2009, dan kini tengah mengambil program Doktoral di Universitas Brawijaya.

Pengalaman Kerja
Mengawali karir di industri asuransi sejak tahun 1999 hingga 2012 di Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 dari *Management Trainee*, Instruktur, Manajer Teknik, Kepala Cabang hingga Kepala Divisi Teknik. Selanjutnya menjadi Kepala Divisi Teknik Asuransi Jasa Tania (2012 s.d 2015), Direktur Operasional Asuransi Sarana Lindung Upaya (2015 s.d 2017), Penasihat Teknis Komite Pengembangan Produk Asuransi Binagriya Upakara (2017). Tahun 2017 s.d 2021 sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada dua periode kepengurusan, sekaligus Direktur Eksekutif Dewan Asuransi Indonesia (DAI) (2018 s.d 2021).

Sejak 11 Oktober 2021 ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia. Selain itu, beliau juga menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) tahun 2012 s.d 2015, dan dosen tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti sejak tahun 2012 hingga sekarang. Saat ini di kepengurusan

Personal Data
Indonesian citizen, born in Probolinggo on October 14, 1973.

Educational Background
He pursued his education in Malang. He holds a Bachelor's Degree in Fisheries from the University of Brawijaya in 1997 and Master of Business Administration Degree from the University of Gajah Mada in 2009, and he is currently pursuing a Doctoral Degree at the University of Brawijaya.

Work Experience
Started his career in the insurance industry from 1999 to 2012 at Bumiputeramuda General Insurance 1967, started from the level of Management Trainees, Instructors, Technical Manager, Heads of Branch Office to Head of the Technical Division. Subsequently, he served as the Head of the Technical Division at Jasa Tania Insurance (2012 to 2015), Operational Director of Asuransi Sarana Lindung Upaya (2015 to 2017), Technical Advisor to Product Development Committee at Binagriya Upakara Insurance (2017). From 2017 to 2021 served as Executive Director of the Indonesian General Insurance Association (AAUI) for two management periods, as well as Executive Director of the Indonesian Insurance Council (DAI) (2018 to 2021).

Since October 11, 2021, he has been appointed as the President Director of PT Indonesian National Reinsurance. In addition, he is also a Lecturer in Insurance Knowledge at at the College of Insurance and Risk Management (STIMRA) from 2012 to 2015, and permanent lecturer at the College of Insurance Management (STMA) Trisakti since 2012 until now.

AAUI menjabat sebagai Wakil Ketua AAUI untuk Bidang *Information & Applied Technology*.

Pelatihan

Pada tahun 2021, beliau mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

1. *Indonesia Fintech Summit 2021*, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), AFTECH, AFSI dan AFPI.
2. Pembicara FGD Digitalisasi di Asuransi Kesehatan: Transformasi Digital di Asuransi Kesehatan, Masalah & Pemecahannya, yang diselenggarakan oleh Media Asuransi.
3. FGD IFRS *Insurance Contract*/PSAK 74 Kontrak Asuransi, yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali Perusahaan.

Currently in the management of AAUI, he serves as Deputy Chair of AAUI for Information & Applied Technology.

Training

In 2021, he participated in training and competency development activities as follows:

1. Indonesia Fintech Summit 2021, organized by Bank Indonesia (BI), Financial Services Authority (OJK), AFTECH, AFSI and AFPI.
2. FGD Speaker on Digitalization in Health Insurance: Digital Transformation in Health Insurance, Problems & Solutions, organized by Media Asuransi.
3. FGD IFRS Insurance Contract/PSAK 74 Insurance Contracts, organized by the Financial Services Authority (OJK).

Affiliated Relationships

He has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or the controlling shareholder of the Company.

Erlan Risdiyanto, S.E., ACII., AMII., CRMP., CRGP.
Direktur Operasi
Operations Director

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia, Lahir di Yogyakarta tanggal 23 Juni 1972. Domisili di Jakarta.

Pendidikan

Beliau meraih gelar sarjana (S1) dari Universitas Nasional, Jakarta pada tahun 1996.

Pengalaman Kerja

Beliau mengawali karir sebagai Pegawai Pelaksana Bagian *Fire & Engineering* Divisi *Underwriting Facultative* di PT Reasuransi Nasional Indonesia pada tahun 2000 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi *Underwriting Treaty & Retrocession* pada tahun 2017.

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Operasi PT Reasuransi Nasional Indonesia sejak 9 Oktober 2017 sampai dengan saat ini berdasarkan RUPSLB tanggal 9 Oktober 2017.

Pelatihan

Pada tahun 2021, beliau mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

1. Sosialisasi POJK 28/2020 dan SE-OJK 1/2021 TKS Asuransi, yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. CEO *Gathering* AAUI 2021 yang diselenggarakan oleh AAUI.

Personal Data

Indonesian citizen, born in Yogyakarta on June 23, 1972. Domiciled in Jakarta.

Educational Background

He earned bachelor's degree (S1) from Universitas Nasional, Jakarta in 1996.

Work Experience

He started his career as an Executive in the Fire & Engineering Department of the Underwriting Facultative Division at PT Reasuransi Nasional Indonesia in 2000 with last position as the Head of the Underwriting Treaty & Retrocession Division in 2017.

Position History in The Company

He serves as Director of Operations of PT Reasuransi Nasional Indonesia since October 9, 2017 until now based on the EGMS on October 9, 2017.

Training

In 2021, he participated in training and competency development activities as follows:

1. Socialization of POJK 28/2020 and SE-OJK 1/2021 TKS Insurance, organized by the Financial Services Authority (OJK).
2. CEO Gathering AAUI 2021, organized by AAUI.

3. *7th AAUI International Insurance (Virtual)* Seminar - *Catastrophe Management - Harnessing Local and Global Insurance Industry*, yang diselenggarakan oleh AAUI.
4. Webinar *Leadership* Dalam Masa Pandemi, yang diselenggarakan oleh LSMPR.
5. *Focus Group Disscussion* (FGD) Implementasi Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah
6. *CEO Gathering AAJI 2021*, yang diselenggarakan oleh AAJI
7. *Master Class Program Series XXI "Competitive Strategy in a Changing Business Environment (Surfing the Wave of Pandemic & Disruptions)"*, yang diselenggarakan oleh LSPMR.
8. *Workshop Spin Off* dan Manajemen Risiko dalam Penerapan *Spin-off* Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali Perusahaan.

3. 7th AAUI International Insurance (Virtual) Seminar - Catastrophe Management - Harnessing Local and Global Insurance Industry, organized by AAUI.
4. Leadership Webinar During a Pandemic, organized by LSMPR.
5. Focus Group Discussion (FGD) Implementation of Aceh Qanun Islamic Financial Institutions
6. CEO Gathering AAJI 2021, organized by AAJI
7. Master Class Program Series XXI "Competitive Strategy in a Changing Business Environment (Surfing the Wave of Pandemic & Disruptions)", organized by LSPMR.
8. Workshop on Spin Off and Risk Management in the Implementation of Spin-off for Insurance Companies and Reinsurance Companies, organized by the Financial Services Authority (OJK).

Affiliated Relationships

He has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or the controlling shareholder of the Company.

Fitris Dinarwan, S.T., M.M., ACII., CRGP.
Direktur Teknik
Technical Director

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta tanggal 13 Januari 1975. Domisili di Jakarta.

Pendidikan
Beliau meraih gelar sarjana (S1) dari Institut Teknologi Bandung tahun 1998, dan gelar (S2) dari Universitas Indonesia.

Pengalaman Kerja
Beliau mengawali karier industri Asuransi sebagai *Management Trainee* di PT Reasuransi International Indonesia tahun (1999 – 2000), dan diangkat menjadi Kepala Divisi *Treaty General Insurance* tahun (2014 – 2017).

Riwayat Penunjukan
Bergabung dan bertugas di PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Direktur Teknik sejak 9 Oktober 2017 sampai dengan saat ini berdasarkan RUPSLB tanggal 09 Oktober 2017.

Pelatihan
Pada tahun 2021, beliau mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:
1. *Workshop Actuary From Zero*, yang diselenggarakan oleh Nityasa Niscita Solusi.
2. *Webinar Actuary: How to quickly perform data cleansing, How to calculate provision for adverse deviation, How to perform early identification of fraudulent claim*, yang diselenggarakan oleh IFG - NATIONAL RE - Munich Re.
3. *Webinar Leadership* Dalam Masa Pandemi, yang diselenggarakan oleh PT Kubik Kreasi Sisilain.
4. *The Digital Consumers in Indonesia: What do we know,* yang diselenggarakan ole Swiss Re.

Personal Data
Indonesian citizen, born in Jakarta on January 13, 1975. Domiciled in Jakarta.

Educational Background
He earned his Bachelor's Degree from Bandung Institute of Technology in 1998, and Master's Degree from the University of Indonesia.

Work Experience
He started his career in the Insurance industry as a Management Trainee at PT Reasuransi International Indonesia (1999 – 2000), and was appointed as the Head of the General Insurance Treaty Division in (2014 – 2017).

Position History in The Company
Joined and serves at PT Reasuransi Nasional Indonesia as Technical Director since October 9, 2017 until now based on the EGMS on October 9, 2017.

Training
In 2021, he participated in training and competency development activities as follows:
1. Actuary From Zero Workshop, organized by Nityasa Niscita Solusi.
2. Webinar Actuary: How to quickly perform data cleansing, How to calculate provision for adverse deviation, How to perform early identification of fraudulent claims, organized by IFG - NATIONAL RE - Munich Re.
3. Leadership Webinar During a Pandemic, organized by PT Kubik Kreasi Sisilain.
4. The Digital Consumers in Indonesia: What do we know, organized by Swiss Re.

5. Webinar KSAK *"Handling Surety Claims Recovery & Growth Strategy in Bank Guarantee Insurance"*, yang diselenggarakan ole KSAK.
6. *CEO Gathering AAUI 2021*, yang diselenggarakan oleh AAUI.
7. *Webinar Actuary: Techniques on How to do Optimal Clustering for premium pricing*, yang diselenggarakan oleh IFG - NASIONAL RE - ARB Singapore.
8. Undangan mengajar, tema webinar: Pencegahan penyuapan melalui penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001 dan Pemaparan SE KPK tentang pengendalian Gratifikasi terkait industri Jasa Keuangan, yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Webinar KABMN, yang diselenggarakan oleh Munich Re.
10. *Ruschlikon Webinar: Introduction to Ruschlikon - Asia Pacific Region*, yang diselenggarakan oleh Swiss Re.
11. Webinar Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan waspada Investasi Ilegal di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
12. *OJK Virtual Innovation Day 2021*, yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
13. Webinar "*Risk Awareness* Dalam Rangka Peningkatan Kinerja", yang diselenggarakan oleh PT Askrindo.
14. *Workshop Review & Modify* Cadangan Teknis, yang diselenggarakan oleh AAUI.
15. Webinar "Membangun Budaya Antisuap Melalui Implementasi SMAP", yang diselenggarakan oleh IFG.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali Perusahaan.

5. KSAK Webinar "Handling Surety Claims Recovery & Growth Strategy in Bank Guarantee Insurance", organized by KSAK.
6. CEO Gathering AAUI 2021, organized by AAUI.
7. Webinar Actuary: Techniques on How to do Optimal Clustering for premium pricing, organized by IFG - NASIONAL RE - ARB Singapore.
8. Invitation to teach, webinar theme: Prevention of bribery through the application of an ISO 37001-based anti-bribery management system (SMAP) and Presentation of the KPK SE on Gratification control related to the Financial Services industry, organized by the Financial Services Authority (OJK).
9. KABMN webinar, hosted by Munich Re.
10. Ruschlikon Webinar: Introduction to Ruschlikon - Asia Pacific Region, hosted by Swiss Re.
11. Webinar on the Development of Digital Financial Innovation and Beware of Illegal Investments in Indonesia, organized by the Financial Services Authority (OJK).
12. OJK Virtual Innovation Day 2021, organized by the Financial Services Authority (OJK).
13. Webinar "Risk Awareness in the Context of Improved Performance", organized by PT Askrindo.
14. Workshop Review & Modify Technical Reserves, organized by AAUI.
15. Webinar "Building Anti-Bribery Culture Through SMAP Implementation", organized by IFG.

Affiliated Relationships

He has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or the controlling shareholder of the Company.

Sunarso, S.E., M.M., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP
Direktur Keuangan & SDM
Finance & HR Director

Data Pribadi
Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 11 Juli 1970. Domisili di Jakarta.

Pendidikan
Beliau meraih gelar Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1994 dan meraih gelar Program Magister (S2) Studi Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Institut Program Wiraswasta Indonesia (STIE IPWI) Jakarta pada tahun 2001.

Pengalaman Kerja
Beliau mengawali karir industri Asuransi di PT Asuransi Raya pada tahun 1994, dan tahun 1995 mulai bergabung dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Pegawai Pelaksana. Pada tahun 2011 dipercaya sebagai Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi, dan pada tahun 2018 menjadi Kepala Divisi SDM & Umum hingga diangkat sebagai Direktur Keuangan & SDM dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia pada tanggal 17 Januari 2019 berdasarkan RUPSLB tanggal 17 Januari 2019.

Pelatihan
Pada tahun 2021, beliau mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:
1. Diskusi Manajemen dengan topik Menyelamatkan Garuda, secara *online*, yang diselenggarakan oleh Intipesan.
2. *Workshop Internal Control - COSO 2017 & Business Judgement Rule* (BJR), yang diselenggarakan oleh PT Asia Strategi Konsulting.

Personal Data
Indonesian citizen, born in Jakarta on July 11, 1970. Domiciled in Jakarta.

Educational Background
He earned his Bachelor's Degree in Accounting from the University of Trisakti, Jakarta in 1994 and Master's Degree in Management Studies from the College of Economics at the Indonesian Entrepreneurial Program Institute (STIE IPWI) Jakarta in 2001.

Work Experience
He started his career in the Insurance industry at PT Asuransi Raya in 1994, and in 1995 he joined PT Reasuransi Nasional Indonesia as an Executive Officer. In 2011 he was appointed as the Head of Finance & Accounting Division, and in 2018 served as the Head of HR & General Affairs Division until appointed as Director of Finance & HR at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Reasuransi Nasional Indonesia on January 17, 2019 based on the EGMS dated January 17, 2019.

Training
In 2021, he attended a number of training and competency development activities as follows:
1. Management Discussion on the topic of Saving Garuda, online, organized by Intipesan.
2. Workshop on Internal Control - COSO 2017 & Business Judgment Rule (BJR), organized by PT Asia Strategi Konsulting.

3. *Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond-Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday*, yang diselenggarakan ole AAUI.
4. Undangan Refleksi Setahun AKHLAK BUMN dan Penganugerahan AKHLAK *Award*, secara *online*, yang diselenggarakan oleh PT ACT Consulting.
5. *Webinar Leadership* Dalam Masa Pandemi, yang diselenggarakan oleh PT Kubik Kreasi Sisilain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali Perusahaan.

3. Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond-Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday, organized by AAUI.
4. Invitation for a Year's Reflection on SOE AKHLAK and the AKHLAK Award, online, organized by PT ACT Consulting.
5. Leadership Webinar During a Pandemic, organized by PT Kubik Kreasi Sisilain.

Affiliated Relationships

He has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or the controlling shareholder of the Company.

Kepala Divisi
DIVISION HEADS

No.	Nama Name	Jabatan Position
Kepala Divisi **Divison Heads**		
1.	FARIED SUSANTO, S.E., M.M., AAAIJ., FSAI., AIIS., CRMP.	Kepala Divisi Aktuaria Head of Actuarial Division
2.	HUSNUL KHULUQ, S.Pd., M.Si., Dip CII., AMII	Kepala Divisi *Facultative* Head of Facultative Division
3.	SULIS PAHALAWIAN, SE., CRMO	Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi Head of Finance & Accounting Division
4.	ARI PRIASTO, SE., IPGDI, CRMP	Kepala Divisi Klaim & Retrosesi Head of Claim & Retrocession Divison
5.	SHANTI NAROLITA SARI, SE., AAIJ, AIIS , CRMP	Kepala Divisi *Management* Portofolio & Adminstrasi Reas Jiwa Head of Portofolio Management & Life Reinsurance Administration Division
6.	CHRISTOP MARHASAK, ST., SE., MM.,AMII, AAIK, ICPU, CRMO	Kepala Divisi *Management* Portfolio & Administration Reasuransi Umum Head of Portfolio Management & General Reinsurance Administration Division
7.	TEGUH TJAHJONO, SE., AAAIK ,CRMP, CIHRM	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division
8.	SUKMO PRAYOGO, B.Bus, ANZIIF (Fellow)CIP, AIIS ,CRGP, CRMP, CHRP	Kepala Divisi SDM & Umum Head of HR & General Division
9.	IGNATIUS NUGROHO HARDO, S.Pd., M.Si., CRMP	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Head of Corporate Secretary
10.	R. DJOKO SLAMET PRASETIYO, SE., AMII, AIIS, CRMO, ANZIIF (Snr ASSOC) CIP, CRGP	Kepala Divisi Syariah Head of Sharia Division
11.	ADAM KURNIAWAN, S. Kom., ACII, AMII, FIIS ,CRMP, CITPE, CDSM	Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Head of Information Technology & Communication Division
12.	NYOMAN ANGGARA S., SE., CRMO ,CRGP	Kepala Divisi *Treaty* Head of Treaty Division
13.	dr. KIKI ODITYA GUNAWARDHANA, CWM	Kepala Divisi *Underwriting* & *Development* Reas Jiwa Head of Underwriting & Development Life Reasurance Division
14.	SETYO AJI NUGROHO, SE., MM., Ak., AAAIJ ,CSA, CRMO, CRGP, PIA	Kepala Satuan Kerja Audit Internal Head of Internal Audit Division
15.	CENDEKIAWAN, SH., CRMP, CRGP	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Head of Compliance Division

Susunan Pejabat
MIDDLE MANAGEMENT

No.	Nama Name	Jabatan Position
Staff Ahli Direksi **Board of Directors Expert Staff**		
1.	AGUS SUPRIADI, SH., MM., AAAIK, QIP, AIIS, CRMP, CRGP	Staff Ahli Direksi Board of Directors Expert Staff
2.	BAGDJA HERMAWAN, SH., MM., CRGP	Staff Ahli Direksi Board of Directors Expert Staff
Kepala Bagian **Department Heads**		
1.	MISBAHUDDIN, SE., CRMO	Kepala Bagian Admin Produksi & Retrosesi Reas Syariah Unit Head of Production Administration & Retroccesion Reinsurance of Sharia
2.	INDRA PERMANA, SE., AMII, ANZIIF (Snr Assoc) CIP ,CRMO	Kepala Bagian Administrasi Produksi, Klaim & Retrosesi Unit Head of Production Administration, Claim & Retroccesion
3.	MASYHAR HISYAM WISANANDA , S.Si., AIIS., FSAI., CRMO	Kepala Bagian Aktuaris Perusahaan Unit Head of Actuary
4.	HERU SUKOCO, SE., AAAIK	Kepala Bagian Akuntansi Unit Head of Accounting
5.	MULKAN LUBIS, SE, AAIK ,CRMP, ICLi.U, AMRP	Kepala Bagian BCM Unit Head of BCM
6.	M. ZULFIKRI DAULAY, SE	Kepala Bagian *Financial & Suretyship* Unit Head of Financial & Suretyship
7.	I MADE DARMAWAN. S. Kom., CRMO	Kepala Bagian Fire & Engineering Unit Head of Fire & Engineering
8.	HARIS WIBISONO, SE., WMI., WPPE., CRMO	Kepala Bagian Investasi Unit Head of Investment
9.	ANDRY SULISTIO NUGROHO, SE, M.Si, CSA., CRMO	Kepala Bagian Keuangan Unit Head of Finance
10.	KURNIAWAN YULI ASMORO, SE., Ak., M.Si., CA., CRMO	Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi Syariah Unit Head of Finance & Accounting of Sharia
11.	ELISMAN HALOMOAN T., SE., AAAIK., CRMO	Kepala Bagian Klaim *Fire & Engineering* Unit Head of Claim Fire & Engineering
12.	I WAYAN ARTAGIRI, SE., CRMO	Kepala Bagian Klaim *Non Fire & Engineering* Unit Head of Claim Non Fire & Engineering
13.	DAVID NURVANIDA, S.Si., AMII, AAIK, ACII, AIIS , ANZIIF (Snr Assoc) CIP	Kepala Bagian *Management Portfolio & Administration* Reasuransi Umum Unit Head of Management Portfolio & Administration Reinsurance General
14.	ELY AGUSTINUS MAWUNTU, SE., CRMO	Kepala Bagian *Management Portfolio & Administration* Reasuransi Umum Unit Head of Management Portfolio & Administration Reinsurance General
15.	STEVEN DANIEL PARDEDE , S.Sos	Kepala Bagian *Marine & Aviation* Unit Head of Marine & Aviation
16.	DEA RAMDHANI, S.Si., CRMP	Kepala Bagian Manajemen Risiko Unit Head of Risk Management

No.	Nama Name	Jabatan Position
17.	DANAN SATRIA JANTI, SE., CRMO	Kepala Bagian NASIONAL RE Academy Unit Head of NASIONAL RE Academy
18.	DRI HASKORO, S.Kom	Kepala Bagian Operasional & Pelayanan TIK Unit Head of Operational & IT and Communication Services
19.	ANGGA PERMADI, ST., CHRP	Kepala Bagian Operasional SDM Unit Head of Operational HR
20.	SRI UTAMI, SE., AAAIK	Kepala Bagian Penagihan Unit Head of Collection
21.	ALI IMRAN, S. Kom., CRMO., CICPE	Kepala Bagian Perencanaan Strategis Unit Head of Strategic Plan
22.	WILFRID GM. TAMPUBOLON. SE	Kepala Bagian Satuan Kerja Kepatuhan Unit Head of Compliance
23.	LUCKY ARYANTO, SE., CRMO	Kepala Bagian Sekretariat & Humas Unit Head of Secretary & Public relation
24.	DONNY IRWANDI PUTRA , SE.As, AAAIK	Kepala Bagian *Treaty* Unit Head of Treaty
25.	EDDY SARWONO. SE	Kepala Bagian Umum Unit Head of General Affair
26.	DANIA VIRJIYANTI, SE., AAAIJ., AAK., CRMO	Kepala Bagian *Underwriting & Business Acceptance* Unit Head of Underwriting & Business Acceptance
27.	TUTY HIKMAWATY CHOLID. SE. M.A, AAAIJ, AAAIK., AAIS., AAAK., CRMO	Kepala Bagian *Underwriting* & Pengembangan Produksi Jiwa Syariah Unit Head of Underwriting & developmnet Life Production of Sharia
28.	OKY NIRWANA MULYA, SE., AAAIK, ICMar.U, ICCA., CRMO	Kepala Bagian Underwriting Umum Reas Syariah Unit Head of General Underwriting Reinsurance of Sharia
29.	DEWI ROSEMASARI. SE. MM. AK, QIA, CA., CRMO	Senior Auditor Senior Auditor
30.	WINDI WIJAYA. S. IP, AAAIJ	Senior Auditor Senior Auditor
Kepala Seksi **Section Heads**		
1.	PANGESTI DWI PUTRA ,S.E.I	Kepala Seksi Adm. Produksi & Portfolio Analysis Section Head of Product Administration & Portfolio Analysis
2.	PUTU SUMARDIANI, SE	Kepala Seksi Administrasi Kepegawaian & Kesejahteraan Section Head of HR Administration & Welfare
3.	ARIE PRASETYO, SE., AAAIK., CRMO	Kepala Seksi Administrasi Klaim Section Head of Claim Administration
4.	INDRI ANGELIA S.Si., ASAI.	Kepala Seksi Aktuaris Perusahaan Section Head of Actuary
5.	ATI SAMHATI, SE., M.M., CRMO	Kepala Seksi Akuntansi Syariah Section Head of Accounting of Sharia
6.	ACHMAD LUTFI S.M.B., M.Ak.	Kepala Seksi Anggaran & Analisis Laporan Section Head of Budget & Report Analysis

No.	Nama Name	Jabatan Position
7.	Y. HERMAWAN WIDIYANTO, SE.	Kepala Seksi *Business Continuity Management* (BCM) Section Head of Business Continuity Management (BCM)
8.	SUKMASARI ESTU PAWESTRI, SE.As., AAK, AAAIJ	Kepala Seksi Customer Relationship Section Head of Customer Relationship
9.	YUS GUMILAR, SE	Kepala Seksi Financial Section Head of Financial
10.	JESSICA ANASTASIA , S.Kom	Kepala Seksi Financial, Suretyship, Miscellaneous Section Head of Financial, Suretyship, Miscellaneous
11.	JANSEN KAMEDANSEN SIREGAR, S.E,.As	Kepala Seksi Fire & Engineering I Section Head of Fire & Engineering 1st
12.	BRYAN ANDREAS RATU , S.Sos	Kepala Seksi Fire & Engineering II Section Head of Fire & Engineering 2nd
13.	RICHAD ALAMSYAH, SE, M.Ak, CSA	Kepala Seksi Investasi Section Head of Investment
14.	SRININGSIH, SE	Kepala Seksi Kas & Bank Section Head of Cash & Bank
15.	NANI RATNASARI, SE., CSA	Kepala Seksi Keuangan Syariah Section Head of Finance of Sharia
16.	FAJAR TAUFIK PUTRANTO , SE.As	Kepala Seksi Klaim & Retrosesi I Section Head of Claim & Retroccesion 1st
17.	SAPTO DEWO , SE.As	Kepala Seksi Klaim & Retrosesi II Section Head of Claim & Retroccesion 2nd
18.	ASNIAR SIANIPAR, SE	Kepala Seksi Klaim *Financial Surety & Miscellenaous* Section Head of Claim Financial Surety & Miscellenaous
19.	ENDANG SULIASWATI , A.Md.As.K.	Kepala Seksi Klaim Fire & Engineeringi I Section Head of Claim Fire & Engineeringi 1st
20.	DINI MUSTIKASARI, SE	Kepala Seksi Klaim Fire & Engineeringi II Section Head of Claim Fire & Engineeringi 2nd
21.	WAHYU KURNIAWAN, SE	Kepala Seksi Klaim Marine/Aviation/Energy Section Head of Claim Marine/Aviation/Energy
22.	FITRI WIYANI, SE., AAIJ , AAAK, CHIA, FIIS	Kepala Seksi Klaim Syariah Section Head of Claim of Sharia
23.	RAHMAT AKBAR SIMAMORA, S.A., CRMO	Kepala Seksi Laporan Section Head of Reporting
24.	LINA MARLINA, SE.	Kepala Seksi Management Portfolio & Administration Reasuransi Umum Section Head of Management Portfolio & General Reinsurance Administration
25.	NURFITRIANA SARI , SE.As., CRMO	Kepala Seksi Management Portfolio & Administration Reasuransi Umum Section Head of Management Portfolio & General Reinsurance Administration
26.	GITA ANYNDA OCTAVIANNA , SH	Kepala Seksi Marine/Aviation/Energy I Section Head of Marine/Aviation/Energy 1st
27.	DIDIK KOSMARIYONO, SE. , SE.As	Kepala Seksi Marine/Aviation/Energy II Section Head of Marine/Aviation/Energy 2nd

No.	Nama Name	Jabatan Position
28.	INDRAWATI. SE	Kepala Seksi NASIONAL RE Academy Section Head of NASIONAL RE Academy
29.	RITHA MAGDALENA S., SE	Kepala Seksi NASIONAL RE Academy Section Head of NASIONAL RE Academy
30.	ACHMAD HARIR, S.Kom, CDSM	Kepala Seksi Operasional & Pelayanan Section Head of Operational & Service
31.	ARIE WIBOWO, S.Kom	Kepala Seksi Operasional & Pelayanan Section Head of Operational & Service
32.	ADI SETIAWAN, SE	Kepala Seksi Pengadaan Barang & Jasa Section Head of Procurement
33.	MARLINA SARI, SE, AAAIJ	Kepala Seksi Pengembangan Produk Section Head of Product Development
34.	INDRA RYAN UTAMA WIRAWAN , SE	Kepala Seksi Pengembangan Produk & Portfolio Syariah Section Head of Product Development & Portfolio of Sharia
35.	NUR EPRIL LISTIATUN, A.Md	Kepala Seksi Pengembangan SDM Section Head of HR Development
36.	MUHAMMAD SAHAL, S.Kom	Kepala Seksi Perencanaan Strategis Section Head of Strategic Plan
37.	BAMBANG SETIAWAN, SE., MM., CHRP., CRMO	Kepala Seksi Perencanaan Strategis SDM Section Head of HR Strategic Plan
38.	MUHAMMAD LUDDY RAMADHAN , S.I.K	Kepala Seksi Retrosesi Section Head of Retroccesion
39.	KRISPATI ALAMSYAH. SE	Kepala Seksi Sarana & Prasarana Section Head of Facilities
40.	INDRI SEPTIANI MASHURI, SE., CGP., CRMO	Kepala Seksi Satuan Kerja Kepatuhan Section Head of Compliance
41.	HENDRIKA MARGIE DOGU. SE	Kepala Seksi Sekretariat & Humas Section Head of Secretary & Public Relation
42.	JESSYCA KUMALA DEWI , SE	Kepala Seksi Sekretariat & Humas Section Head of Secretary & Public Relation
43.	NI LUH APRIYANTI DEWI. SE	Kepala Seksi Sekretariat & Humas Section Head of Secretary & Public Relation
44.	SARI AMALIA , S.Ikom	Kepala Seksi Sekretariat & Humas Section Head of Secretary & Public Relation
45.	SONNY DWI HARSONO , SE.As	Kepala Seksi Treaty I Section Head of Treaty 1st
46.	JUSTIAN SETHIO HANDOYO , SE	Kepala Seksi Treaty II Section Head of Treaty 2nd

No.	Nama Name	Jabatan Position
47.	dr WENNY YULIANITA, AAAK	Kepala Seksi Underwriting Acceptance Section Head of Underwriting Acceptance
48.	dr. DIAN INDRIASARI, AAAK, AAAIJ, AIIS	Kepala Seksi Underwriting/Klaim Jiwa Syariah-Facultative Section Head of Underwriting/Life Claim of Sharia-Facultative
49.	HIDAYAT, SE., AAAIJ, AIIS	Kepala Seksi Underwriting/Klaim Jiwa Syariah-Facultative Section Head of Underwriting/Life Claim of Sharia-Facultative
50.	RAHMA DHANI R. M., SE	Kepala Seksi Utang Piutang I Section Head of Collection 1st
51.	WIBI SURYO NUGROHO S.AP	Kepala Seksi Utang Piutang II Section Head of Collection 2nd
52.	WIEKE DESIANA SAID, A.Md	Kepala Seksi Utang Piutang III Section Head of Collection 3rd
53.	JULI HARIANTO SILAEN, SH., CRMO.	Kepala Seksi Hukum Section Head of Legal
54.	ANINDITA INDERAKASIH , SE	Kepala Seksi *Underwriting Facultative* Retrosesi Umum Section Head of General Underwriting Facultative Retroccesion
55.	ARIE SETIABUDI S.E., AK., CA	*Auditor*
56.	HERAWATI S. MANALU, SE	*Auditor*
57.	LISDAWATI BERLIANA, SE	*Auditor*

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Komposisi pemegang saham PT Reasuransi Nasional Indonesia per 31 Desember 2021:

Composition of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia as of December 31, 2021:

No.	Pemegang Saham Shareholders	Persentase Kepemilikan Saham Share Ownership Percentage
1.	PT Asuransi Kredit Indonesia	99,9998%
2.	Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA)	0,0002%

Informasi Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi, dan *Joint Ventures*
INFORMATION ON SUBSIDIARIES, ASSOCIATED COMPANIES AND JOINT VENTURES

Per 31 Desember 2021, Perusahaan tidak memiliki anak perusahaan maupun perusahaan asosiasi dan/atau *Joint Ventures.*

As of December 31, 2021, the Company has no subsidiaries, associated companies, and/or Joint Ventures.

Struktur Grup
GROUP STRUCTURE

Struktur grup PT Reasuransi Nasional Indonesia per 31 Desember 2021:

Group structure of PT Reasuransi Nasional Indonesia as of December 31, 2021:

Lembaga dan Profesi Penunjang
SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

Nama dan Alamat Lembaga Name and Address of Institutions		Jasa yang Diberikan Services Provided
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) WTC 3 Jl. Jend Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - Indonesia Telp.: (021) 50992901 / 31192901, Fax.: (021) 52905555 / 529050	Audit Umum Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kantor Akuntan Publik tidak memberikan jasa lain selain jasa audit. General Audit on Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021. The Public Accounting Firm did not provide other services than the audit service.
Retainer/Konsultan Hukum Retainer/Legal Consultant	Haullussy Richard & Partners Graha Mandiri (d.h. Bumi Daya Plaza) Lantai 17, Jl. Imam Bonjol No.61, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Telp.: (021) 3155707	Jasa Retainer dan Konsultasi Hukum. Retainer Services and Legal Counselling.
Notaris Notary	Bambang Suprianto, S.H., Sp.N., M.H. Jl. Dewi Sartika, Jl. H. Abdul Hamid No.323B, RW.4, Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630 Telp.: (021) 80885841	Pengesahan akta hukum Perusahaan untuk tahun buku 2021. Ratification of the Company's legal deed for the fi nancial year 2021.

Wilayah Operasi
OPERATIONAL AREA

Dalam menjalankan operasinya dan sesuai kebutuhannya, NASIONAL RE tidak membuka kantor cabang atau jaringan. Lokasi kantor pusat Perusahaan berada di Jakarta, dengan alamat sebagai berikut:

In running its operations and based on the Company's needs, NASIONAL RE does not open branch offices or networks. The Company's head office location is in Jakarta, with the following address:

NASIONALRE Reinsurance

Kantor Pusat PT Reasuransi Nasional Indonesia
(NASIONAL RE)
Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta, Indonesia 10330

NASIONAL RE
Reinsurance

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION AND ANALYSIS

Tinjauan Ekonomi Makro Global dan Nasional

GLOBAL AND NATIONAL MACRO ECONOMIC OVERVIEW

Dampak dari pandemi Covid-19 terparah di beberapa negara adalah diberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan manusia dan bahkan pemberlakuan *lockdown* di negara masing-masing. Pembatasan kegiatan ini bertujuan untuk menghentikan dan menghambat potensi penyebaran virus agar tidak menyebar secara masif, namun pemberlakuan kebijakan ini mempunyai dampak pada melemahnya kinerja ekonomi. Pembatasan kegiatan yang dilakukan telah menghentikan kegiatan ekonomi masyarakat dan menghambat kegiatan produksi dan distribusi barang. Kegiatan ekonomi yang terbatas tidak hanya pada kegiatan di dalam negeri tetapi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan luar negeri seperti ekspor dan impor. Akibatnya, terjadi penurunan kinerja ekonomi yang diindikasikan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi atau bahkan sampai kontraksi ekonomi dalam 2 (dua) tahun terakhir.

The worst impact of the Covid-19 pandemic in several countries is the enactment of policies to limit human activities and even the implementation of lockdowns in their respective countries. This activity restriction aims to stop and inhibit the potential spread of the virus so that it does not spread massively, but the implementation of this policy has an impact on weakening economic performance. The restrictions on activities that have been carried out have stopped the economic activities of the community and hampered the production and distribution of goods. Economic activities are limited not only to domestic activities but also to foreign-related economic activities such as exports and imports. As a result, there has been a decline in economic performance as indicated by a slowdown in economic growth or even economic contraction in the last 2 (two) years.

Pada tahun 2021, pemulihan perekonomian baik global dan nasional mulai berjalan. Hal tersebut didukung oleh meredanya penyebaran Covid-19 dan akselerasi distribusi vaksinasi. Perekonomian global menunjukkan *rebound* yang cukup kuat yakni 5,5% (yoy) di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat terkoreksi 4,9% (yoy).

In 2021, both global and national economic recovery will begin. This is supported by the easing of the spread of Covid-19 and acceleration of vaccination distribution. The global economy showed a fairly strong rebound of 5.5% (yoy) in 2021 compared to the previous year, which recorded a correction of 4.9% (yoy).

Sejalan dengan perbaikan perekonomian global, perekonomian Indonesia juga mulai menunjukkan proses pemulihan. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh pihak termasuk masyarakat telah berhasil mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 3,69% (yoy) di tahun 2021. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp62,2 juta, bahkan lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yakni sebesar Rp59,3 juta di tahun 2019.

In line with the improvement in the global economy, the Indonesian economy is also starting to show a recovery process. Efforts to control the Covid-19 pandemic carried out by the Government together with all parties including the community have succeeded in driving Indonesia's economic growth by 3.69% (yoy) in 2021. With this growth rate, Indonesia's GDP per capital increased to Rp62.2 million, even more higher than the GDP per capita before the pandemic, which was Rp59.3 million in 2019.

Tinjauan Industri Asuransi dan Reasuransi
INSURANCE AND REINSURANCE INDUSTRY OVERVIEW

Pemulihan juga mulai berjalan di industri asuransi meskipun belum optimal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penghimpunan premi asuransi jiwa tumbuh positif sepanjang 2021, sedangkan kinerja industri asuransi umum dan reasuransi masih terkoreksi. Premi yang dihimpun industri asuransi jiwa mencapai Rp184,32 triliun sepanjang 2021. Realisasi ini tumbuh 7,21% dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya sebesar Rp171,93 triliun. Sementara itu, OJK mencatat penghimpunan premi industri asuransi umum dan reasuransi hanya mencapai Rp100,1 triliun sepanjang 2021. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 3,76% dibandingkan capaian pada 2020 yang mencapai Rp104,1 triliun.

Recovery is also starting to run in the insurance industry although it is not yet optimal. The Financial Services Authority (OJK) noted that the collection of life insurance premiums grew positively throughout 2021, while the performance of the general insurance and reinsurance industries was still corrected. The premium collected by the life insurance industry will reach Rp184.32 trillion throughout 2021. This realization grew 7.21% compared to the realization in the previous year of Rp171.93 trillion. Meanwhile, OJK noted that the collection of general insurance and reinsurance industry premiums only reached Rp100.1 trillion throughout 2021. This achievement decreased by 3.76% compared to the achievement in 2020, which reached Rp104.1 trillion.

Dari sisi permodalan, kedua industri asuransi tersebut memiliki rasio solvabilitas yang cukup solid. RBC industri asuransi jiwa dan asuransi umum sama-sama terjaga di atas *treshold*, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. OJK mencatat *Risk based capital* (RBC) industri asuransi jiwa di 2021 berada di level 539,8%, lebih tinggi dibandingkan posisi di 2020 yang mencapai 528,6%.

In terms of capital, the two insurance industries have a fairly solid solvency ratio. The RBC of the life insurance industry and general insurance were both maintained above the threshold, well above the regulatory threshold of 120%. OJK noted that the risk-based capital (RBC) of the life insurance industry in 2021 will be at the level of 539.8%, higher than the position in 2020 which reached 528.6%.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Segmen bisnis adalah bagian-bagian operasi bisnis perusahaan yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Selain segmen Syariah, Perusahaan juga memiliki segmen Reasuransi Umum dan segmen Reasuransi Jiwa.

A business segment is a separately identifiable part of a company's business operations. In addition to the Sharia segment, the Company also has General Reinsurance segment and Life Reinsurance segment.

Pada tahun 2021, segmen bisnis Reasuransi Umum masih memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan premi bruto Perusahaan secara keseluruhan, yakni sebesar 83,58% dari total Pendapatan Premi Bruto Perusahaan, khususnya untuk bisnis konvensional. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, yang tercatat sebesar 81,47%.

In 2021, General Reinsurance business segment still gave the largest contribution to the Company's gross premium income as a whole, amounting to 83.58% of the Company's total Gross Premium Income, especially for conventional businesses. This figure has increased compared to 2020, which was recorded at 81.47%.

Sementara itu, Pendapatan Premi Bruto segmen Reasuransi Jiwa tahun 2021 menyumbang 16,42% dari total Pendapatan Premi Bruto untuk bisnis konvensional. Angka ini menurun

Meanwhile, the Gross Premium Income for the Life Reinsurance segment in 2021 contributed 16.42% of the total Gross Premium Income for conventional businesses.

dibandingkan persentase kontribusi tahun 2020, yakni 18,53%%.

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatat peningkatan Pendapatan Premi Bruto pada segmen reasuransi umum, yakni sebesar 21,35% dari Rp5,26 triliun di tahun 2020 menjadi Rp6,38 triliun di tahun 2021. Segmen reasuransi jiwa juga mencatat peningkatan Pendapatan Premi Bruto sebesar 4,82% dari Rp1,20 triliun di tahun 2020 menjadi Rp1,25 triliun di tahun 2021.

Bila diurai lebih lanjut pendapatan premi bruto untuk segmen Reasuransi Umum dan Reasuransi Jiwa dapat dilihat pada tabel berikut:

This figure decreased compared to the percentage of contributions in 2020, which was 18.53%.

In 2021, the Company recorded an increase in Gross Premium Income in the general reinsurance segment, which was 21.35% from Rp5.26 trillion in 2020 to Rp6.38 trillion in 2021. The life reinsurance segment also recorded an increase in Gross Premium Income by 4.82% from Rp1.20 trillion in 2020 to Rp1.25 trillion in 2021.

A further description on gross premium income for the General Reinsurance and Life Reinsurance segments can be seen in the following table:

Proporsi *Gross Premium* Per *Class of Business* (COB)

Proportion of Gross Premium by Class of Business

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Class of Business	Realisasi Realization 2021	Persentase Percentage 2021	Realisasi Realization 2020	Persentase Percentage 2020
Kebakaran Fire	2.478.175	32,47	2.273.716	35,24
Kredit dan Jaminan Credit and Bonds	2.119.038	27,77	1.546.433	23,97
Rekayasa Engineering	257.737	3,38	252.099	3,91
Rangka Kapal Marine Hull	494.508	6,48	348.267	5,40
Kendaraan Bermotor Vehicle	103.301	1,35	62.515	0,97
Energi Energy	43.685	0,57	50.291	0,78
Pengangkutan Cargo	305.356	4,00	271.315	4,20
Kecelakaan diri dan tanggung gugat Personal Accident and Liability	111.509	1,46	58.310	0,90
Satelit Satellite	22.490	0,29	34.901	0,54
Rangka Pesawat Aviation Hull	66.717	0,87	38.662	0,60
Aneka Miscellaneous	376.074	4,93	319.938	4,96
Jiwa Life	1.253.446	16,42	1.195.791	15,82

Tinjauan Keuangan
FINANCIAL OVERVIEW

Seluruh uraian, analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan Perusahaan ini telah disajikan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan di Indonesia, kecuali dinyatakan lain.

All descriptions, analyzes and discussions regarding the Company's financial performance have been presented in accordance with the rules stipulated in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) of Indonesia and the Guidelines for Accounting and Reporting in Indonesia, unless otherwise stated.

Tinjauan keuangan ini disusun berdasarkan laporan posisi keuangan NASIONAL RE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 9 September 2022, dengan pendapat bahwa laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

This financial review has been prepared based on NASIONAL RE statement of financial position for the years ended December 31, 2021 and December 31, 2020, which has been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners in accordance with the Independent Auditor's Report dated September 9, 2022, with the opinion that the Company's financial statements have been presented fairly, in all material respects.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Perusahaan mencatat peningkatan Jumlah Pendapatan Premi Bersih sebesar 17,32%, dari Rp4,83 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp5,67 triliun pada tahun 2021. Namun Perusahaan membukukan peningkatan Rugi Bersih sebesar 36,38% dari Rp542,93 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp740,43 miliar pada tahun 2021.

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

The Company recorded a decrease in Total Net Premium Income by 17.32%, from Rp4.83 trillion in 2020 to Rp5.67 trillion in 2021. However, the Company recorded an increase in Net Loss of 36.38% from Rp542.93 billion in 2020 to Rp740.43 billion in 2021.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Keterangan Description	2021	2020	Perubahan Change	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Underwriting Underwriting Income				
Pendapatan Premi **Premium Income**				
Premi Reasuransi Bruto Gross Reinsurance Premiums	7.632.036	6.452.238	1.179.798	18,29
Premi Retrosesi Retrocession Premiums	(767.427)	(1.376.449)	609.022	44,25
Kenaikan Cadangan atas Premi yang Belum Merupakan Pendapatan Increase in Unearned Premium Reserves	(1.198.411)	(245.929)	(952.482)	(387,30)
Jumlah Pendapatan Premi – Bersih Total Premium Income – Net	5.666.198	4.829.860	836.338	17,32

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Keterangan Description	2021	2020	Perubahan Change	Persentase Percentage (%)
Beban Underwriting Underwriting Expenses				
Beban Klaim **Claim Expenses**				
Klaim Reasuransi Bruto Gross Reinsurance Claims	4.803.318	3.978.311	825.007	20,74
Klaim Retrosesi Retrocession Claims	(582.226)	(802.597)	220.371	27,46
Kenaikan Estimasi Klaim Retensi Sendiri Increase in Estimated Own Retention Claims	607.488	823.736	(216.248)	(26,25)
Jumlah Beban Klaim Total Claim Expenses	4.828.580	3.999.450	829.130	20,73
Beban Komisi - bersih Commissions Expenses - net	1.898.667	1.544.602	354.065	22,92
Beban *Underwriting* Lain - bersih Other Underwriting Expenses - net	17.749	2.138	15.611	730,17
Jumlah Beban *Underwriting* Total Underwriting Expenses	6.744.996	5.546.190	1.198.806	21,61
Hasil *Underwriting* Underwriting Result	(1.078.798)	(716.330)	(362.468)	(50,60)
Pendapatan Investasi - bersih Investment Income - net	265.011	194.857	70.154	36,00
Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Income	(813.787)	(521.473)	(292.314)	(56,06)
Beban Usaha Operating Expenses				
Beban Pemasaran Marketing Expense	655	410	245	59,76
Beban Umum dan Administrasi General and Administration Expense	166.469	168.679	(2.210)	(1,31)
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expense	167.124	169.089	(1.965)	(1,16)
Laba Usaha Operating Profit	(980.911)	(690.562)	(290.349)	(42,05)
Penghasilan (Beban) Lain-Lain - bersih Other Income (Expenses) - Net	(16.113)	20.442	(36.555)	(178,82)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan dan Zakat Profit Before Income Tax and Zakat	(997.024)	(670.120)	(326.904)	(48,78)
Zakat Zakat	(578)	(943)	365	38,71
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	(967.602)	(671.063)	(296.539)	(44,19)

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Keterangan Description	2021	2020	Perubahan Change	Persentase Percentage (%)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefits (Expense)	257.169	128.132	129.037	100,71
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit for The Year	(740.433)	(542.931)	(197.502)	(36,38)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Incomes (Expense)				
Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi Items that Will Be Reclassified to Profit or Loss				
Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi atas Investasi Tersedia Untuk Dijual Unrealised Gain on Available-for-Sale Investment	36.009	53.137	(17.128)	(32,23)
Efek Pajak Terkait Related Tax Effect	(6.322)	(4.970)	(1.352)	(27,20)
Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi Items that Will Not Be Reclassified to Profit or Loss				
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Remeasurement of Employment Benefits	(365)	(6.746)	6.381	94,59
Efek Pajak Terkait Related Tax Effects	80	1.349	(1.269)	(94,07)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan, setelah pajak Other Comprehensive Income (Expenses) for the Year, after tax	(29.402)	42.770	(43.055)	(100,67)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN **TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR**	**(711.031)**	**(500.161)**	**(210.870)**	**(42,16)**

Pendapatan Premi-Bersih

Pada tahun 2021, Perusahaan membukukan pertumbuhan Pendapatan Premi Bersih sebesar 17,32% atau Rp836,34 miliar dari Rp4,83 triliun di tahun 2020 menjadi Rp5,67 triliun.

Pertumbuhan pendapatan premi bersih tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan premi reasuransi bruto yang meningkat di tahun 2021.

Premium Income-Net

In 2021, the Company recorded a growth in Net Premium Income of 17.32% or Rp.836.34 billion from Rp4.83 trillion in 2020 to Rp5.67 trillion.

The growth in net premium income was contributed by the growth in gross reinsurance premiums, which increased in 2021.

Premi Reasuransi Bruto

Premi Reasuransi Bruto pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp7,63 triliun, meningkat 18,29% atau Rp1,18 triliun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp6,45 triliun.

Pertumbuhan tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan segmen bisnis Reasuransi Umum yang tercatat meningkat 21,35% dari Rp5,26 triliun di tahun 2020 menjadi Rp6,38 triliun di tahun 2021.

Rincian realisasi capaian Premi Reasuransi Bruto per *Class of Business* (COB) tahun 2020 dan 2021 dijelaskan dalam tabel berikut:

Gross Reinsurance Premiums

Gross Reinsurance Premium in 2021 was recorded at Rp7.63 trillion, an increase of 18.29% or Rp1.18 trillion from the previous year, which was recorded at Rp6.45 trillion.

This growth was contributed by the growth of the General Reinsurance business segment, which recorded an increase of 21.35% from Rp5.26 trillion in 2020 to Rp6.38 trillion in 2021.

The details of the realization of Gross Reinsurance Premiums per Class of Business (COB) in 2020 and 2021 are explained in the following table:

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Class of Business	2021	Persentase Percentage 2021	2020	Persentase Percentage 2020
Kebakaran Fire	2.478.175	32,47	2.273.716	35,24
Kredit dan Jaminan Credit and Bonds	2.119.038	27,77	1.546.433	23,97
Rekayasa Engineering	257.737	3,38	252.099	3,91
Rangka Kapal Marine Hull	494.508	6,48	348.267	5,40
Kendaraan Bermotor Vehicle	103.301	1,35	62.515	0,97
Energi Energy	43.685	0,57	50.291	0,78
Pengangkutan Cargo	305.356	4,00	271.315	4,20
Kecelakaan diri dan tanggung gugat Personal Accident and Liability	111.509	1,46	58.310	0,90
Satelit Satellite	22.490	0,29	34.901	0,54
Rangka Pesawat Aviation Hull	66.717	0,87	38.662	0,60
Aneka Miscellaneous	376.074	4,93	319.938	4,96
Jiwa Life	1.253.446	16,42	1.195.791	15,82
Jumlah Total	**7.632.036**	**100,00**	**6.452.238**	**100,00**

Sedangkan untuk realisasi pertumbuhan Premi Reasuransi Bruto per *Class of Business* (COB) tahun 2020 dan 2021 dijelaskan dalam tabel berikut:

Meanwhile, the realization of Gross Reinsurance Premium growth per Class of Business (COB) in 2020 and 2021 is explained in the following table:

Class of Business	2021	2020	Pertumbuhan Growth (%)
Kebakaran Fire	2.478.175	2.273.716	8,99
Kredit dan Jaminan Credit and Bonds	2.119.038	1.546.433	37,03
Rekayasa Engineering	257.737	252.099	2,24
Rangka Kapal Marine Hull	494.508	348.267	41,99
Kendaraan Bermotor Vehicle	103.301	62.515	65,24
Energi Energy	43.685	50.291	(13,14)
Pengangkutan Cargo	305.356	271.315	12,55
Kecelakaan diri dan tanggung gugat Personal Accident and Liability	111.509	58.310	91,23
Satelit Satellite	22.490	34.901	(35,56)
Rangka Pesawat Aviation Hull	66.717	38.662	72,56
Aneka Miscellaneous	376.074	319.938	17,55
Jiwa Life	1.253.446	1.195.791	4,82
Jumlah Total	**7.632.036**	**6.452.238**	**8,99**

Premi Retrosesi

Premi retrosesi atau premi yang kembali direasuransikan perusahaan reasuransi mengalami penurunan sebesar 44,25% dari Rp1,38 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp767,43 miliar pada tahun 2021.

Premi retrosesi mengalami penurunan dikarenakan adanya pengurangan *special agreement*.

Retrocession Premiums

Retrocession premiums or premiums reinsured by reinsurance companies decreased by 44.25% from Rp1.38 trillion in 2020 to Rp767.43 billion in 2021.

The retrocession premium decreased due to a reduction in the special agreement.

Kenaikan Cadangan Atas Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan kenaikan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sangat signifikan yakni 387,30% dari Rp245,93 miliar di tahun 2020 menjadi Rp1,20 triliun di tahun 2021.

Hal ini merupakan hasil dari penerapan PSAK 74- Kontrak Asuransi yang mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan pendapatan dari kegiatan investasi sehingga seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) dari laporan keuangan, termasuk pemegang polis maupun investor, mendapatkan informasi yang transparan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi untuk produk perlindungan asuransi dengan fitur investasi.

Increase in Unearned Premium Reserves

In 2021, the Company recorded an increase in unearned premium reserves significantly by 387.30% from Rp245.93 billion in 2020 to Rp1.20 trillion in 2021.

This is the result of the implementation of PSAK 74 - Insurance Contracts which requires a clear separation between income generated from the insurance business and income from investment activities so that all stakeholders (stakeholders) from financial statements, including policy holders and investors, obtain transparent information on financial statements of companies that have insurance contracts for insurance protection products with investment features.

Beban *Underwriting*

Beban *underwriting* pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp6,74 triliun, meningkat 21,61% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp5,5 triliun.

Kenaikan beban *underwriting* salah satunya disebabkan oleh kenaikan jumlah klaim dan komisi.

Underwriting Expenses

Underwriting expenses in 2021 were recorded at Rp6.74 trillion, an increase of 21.61% compared to 2020, which was recorded at Rp5.5 trillion.

One of the reasons for the increase in underwriting expenses was the increase in the number of claims and commissions.

Beban Klaim

Pada tahun 2021, beban klaim Perusahaan tercatat meningkat 20,73% dari Rp4,00 triliun di tahun 2020 menjadi Rp4,83 triliun.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya *Outstanding* Klaim yang sudah dibayarkan dan masuk ke dalam pembukuan 2021.

Claim Expenses

In 2021, the Company's claims expenses increased by 20.73% from Rp4.00 trillion in 2020 to Rp4.83 trillion.

This was due to the large number of Outstanding Claims that have been settled and entered into the 2021 books.

Hasil *Underwriting*

Hasil *underwriting* yang diperoleh di tahun 2021 tercatat sebesar Rp(1,08) triliun menurun 50,60% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp(716,33) miliar.

Underwriting Result

Underwriting results obtained in 2021 were recorded at Rp(1.08) trillion, a decrease of 50.60% from the previous year which was recorded at Rp(716.33) billion.

Penurunan hasil *underwriting* ini dikarenakan karena adanya tambahan OS Klaim *Intercompany* dan perubahan metode perhitungan cadangan klaim yang berdampak pada penurunan Hasil *Underwriting*.

The decrease in underwriting results was due to the addition of Intercompany's Claim OS and changes in the method of calculating claims reserves, which resulted in a decrease in Underwriting Results.

Hasil Investasi - Bersih

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan peningkatan hasil investasi bersih sebesar 36,00% dari Rp194,86 miliar di tahun 2020 menjadi Rp265,01 miliar.

Kenaikan hasil investasi-bersih terutama dikontribusikan oleh deposito dan obligasi.

Investment Income - Net

In 2021, the Company recorded an increase in net investment income of 36.00% from Rp194.86 billion in 2020 to Rp265.01 billion.

The increase in investment income-net was mainly contributed by deposits and bonds.

Beban Usaha

Beban Usaha antara lain terdiri dari Beban Pemasaran serta Beban Umum dan Administrasi. Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatat Beban Usaha sebesar Rp167,12 miliar, turun 1,16% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp169,09 miliar.

Penurunan Beban Usaha tersebut dikarenakan adanya penurunan di Beban Umum dan Administrasi ssebesar 1,31% menjadi Rp166,47 miliar dari Rp168,68 miliar di tahun 2020.

Operating Expenses

Operating Expenses, among others, consist of Marketing Expenses as well as General and Administrative Expenses. In 2021, the Company recorded Operating Expenses of Rp167.12 billion, a decrease of 1.16% from the previous year, which was recorded at Rp169.09 billion.

The decrease in Operating Expenses was due to a 1.31% decrease in General and Administrative Expenses to Rp166.47 billion from Rp168.68 billion in 2020.

Laba (Rugi) Usaha

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan rugi usaha dari Rp690,56 miliar di tahun 2020 menjadi Rp980,91 miliar. Kenaikan rugi usaha tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan signifkan pada hasil *underwriting*.

Operating Income (Loss)

In 2021, the Company recorded an operating loss from Rp690.56 billion in 2020 to Rp980.91 billion. The increase in operating losses was mainly due to a significant decrease in underwriting results.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan dan Zakat

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan dan zakat sebesar Rp997,02 miliar, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp670,12 miliar.

Profit (Loss) Before Income Tax and Zakat

In 2021, the Company recorded a loss before income tax and zakat of Rp997.02 billion, an increase compared to the previous year, which was recorded at Rp670.12 billion.

Pajak Penghasilan dan Zakat

Zakat Perusahaan tercatat sebesar Rp578,00 juta, menurun 38,71% dari tahun sebelumnya, yakni Rp943,00 juta. Sementara Pajak Penghasilan meningkat 44,19% dari Rp128,13 miliar di tahun 2020 menjadi Rp257,17 miliar di tahun 2021.

Income Tax and Zakat

The Company's zakat was recorded at Rp578.00 million, a decrease of 38.71% from the previous year, which was Rp943.00 million. Meanwhile Income Tax increased 44.19% from Rp128.13 billion in 2020 to Rp257.17 billion in 2021.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan dan Zakat, Perusahaan mencatat kerugian bersih tahun berjalan sebesar Rp740,43 miliar dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp542,93 miliar.

Net Profit For The Year

After deducting Income Tax and Zakat, the Company recorded a net loss for the year of Rp740.43 billion from the previous year, which was recorded at Rp542.93 billion.

Laporan Posisi Keuangan

Perusahaan mencatat pertumbuhan Aset sebesar 31,72% dari Rp7,99 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp10,52 triliun pada tahun 2021. Seiring dengan pertumbuhan Aset, Liabilitas juga meningkat sebesar 48,87% dari Rp7,49 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp11,15 triliun pada tahun 2021, sementara Ekuitas tercatat menurun 99,05% dari Rp717,82 miliar per 31 Desember 2020 menjadi Rp6,79 miliar per 31 Desember 2021.

Statement of Financial Position

The Company recorded asset growth of 31.72% from Rp7.99 trillion in 2020 to Rp10.52 trillion in 2021. Along with the growth of Assets, Liabilities also increased by 48.87% from Rp7.49 trillion in 2020 to Rp11,15 trillion in 2021, while Equities recorded a decline of 99.05% from Rp717.82 billion as of December 31, 2020 to Rp6.79 billion as of December 31, 2021.

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Keterangan Description	2021	2020	Pertumbuhan Growth (%)
Total Aset Total Assets	10.521.525	7.987.733	31,72
Total Liabilitas Total Liabilities	11.148.994	7.489.242	48,87
Total Ekuitas Total Equity	6.790	717.821	(99,05)

Aset

Perusahaan membukukan Total Aset sebesar Rp10,52 triliun pada tahun 2021, meningkat 31,72% dari Rp7,99 triliun. Pertumbuhan aset tersebut terutama dikontribusikan oleh kenaikan Efek-efek dari sisi nominal, sementara dari sisi persentase, yang mengalami peningkatan adalah Piutang Lain-lain.

Assets

The Company recorded Total Assets of Rp10.52 trillion in 2021, an increase of 31.72% from Rp7.99 trillion. The growth in assets was mainly contributed by the increase in Marketable Securities in terms of the amount, while in terms of percentage, the increase was from Other Receivables.

Aset

Assets

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Keterangan Description	2021	2020	Perubahan Change	Persentase Percentage (%)
Kas dan Kas di Bank Cash on hand and Cash in Banks	110.855	61.225	49.630	81,06
Investasi Investments				
Deposito Berjangka Time Deposits	1.508.394	2.171.970	(663.576)	(30,55)
Efek-efek Marketable Securities	4.391.998	2.042.099	2.349.899	115,07
Piutang Reasuransi – Bersih Reinsurance receivables – Net	1.076.204	1.034.108	42.096	4,07
Piutang Retrosesi – Bersih Retrocession Receivables – Net	254.820	236.983	17.837	7,53
Piutang Hasil Investasi Investment Income Receivables	47.154	25.361	21.793	85,93
Piutang Lain-lain Other Receivables	47.408	5.993	41.415	691,06
Biaya Dibayar Di Muka Prepaid Expenses	9	167	(158)	(94,61)
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	116.566	100.125	16.441	16,42
Aset Tetap – Bersih Fixed Assets – Net	180.588	181.518	(930)	(0,51)
Aset Retrosesi Retrocession Assets	1.825.641	1.474.762	350.879	23,79
Biaya Akuisisi Tangguhan Deferred Acquisition Cost	524.852	470.201	54.651	11,62
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	427.851	176.924	250.927	141,83
Aset Lain-lain Other Assets	9.185	6.267	2.918	46,56
Jumlah Aset **Total Assets**	**10.521.525**	**7.987.733**	**2.533.792**	**31,72**

Kas dan Kas di Bank

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan Kas dan Kas di Bank sebesar Rp110,86 miliar, meningkat 81,06% dari tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp61,23 miliar.

Cash on Hand and Cash in Banks

In 2021, the Company recorded Cash on Hand and Cash in Banks amounting to Rp110.86 billion, an increase of 81.06% from 2020 which was recorded at Rp61.23 billion.

Deposito Berjangka

Perusahaan mencatatkan penurunan deposito berjangka sebesar 30,55% dari Rp2,17 triliun di tahun 2020 menjadi Rp1,51 triliun di tahun 2021.

Penurunan ini disebabkan oleh penarikan investasi pada deposito berjangka.

Time Deposits

The Company recorded a decrease in time deposits of 30.55% from Rp2.17 trillion in 2020 to Rp1.51 trillion in 2021.

This decrease was due to the withdrawal of investment in time deposits.

Efek-efek

Efek-efek Perusahaan tercatat meningkat sangat signifikan yakni sebesar 115,07% dari Rp2,04 triliun di tahun 2020 menjadi Rp4,39 triliun di tahun 2021.

Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan penempatan pada Obligasi.

Marketable Securities

The Company's marketable securities increased significantly by 115.07% from Rp2.04 trillion in 2020 to Rp4.39 trillion in 2021.

The increase was driven by an increase in placements in Bonds.

Piutang Reasuransi-Bersih

Jumlah Piutang Reasuransi – Bersih pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp1,08 triliun, naik 4,07% dari Rp1,03 triliun di tahun sebelumnya. Hal ini utamanya didorong oleh menurunnya pembayaran premi.

Reinsurance Receivables-Net

Total Reinsurance Receivables – Net in 2021 was recorded at Rp1.08 trillion, up 4.07% from Rp1.03 trillion in the previous year. This was mainly driven by lower premium payments.

Piutang Retrosesi-Bersih

Jumlah Piutang Retrosesi – Bersih pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp254,82 miliar atau meningkat 7,53% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp236,98 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan adanya kontrak-kontrak baru yang terjadi pada akhir tahun.

Retrocession Receivables-Net

Total Retrocession Receivables - Net in 2021 was recorded at Rp254.82 billion, an increase of 7.53% from the previous year, which was recorded at Rp236.98 billion. This increase was in line with the new contracts that occurred at the end of the year.

Piutang Hasil Investasi

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan Piutang Hasil Investasi sebesar Rp47,15 miliar, meningkat 85,93% dari Rp25,36 miliar di tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya dana kelola investasi.

Investment Income Receivables

In 2021, the Company recorded Investment Income Receivables of Rp47.15 billion, an increase of 85.93% from Rp25.36 billion in 2020. The increase was mainly driven by the increase in investment management funds.

Piutang Lain-Lain

Piutang Lain-lain di tahun 2021 tercatat mengalami peningkatan yang paling signifikan yaitu 691,06% dari Rp5,99 miliar di tahun 2020 menjadi Rp47,41 miliar.

Other Receivables

Other Receivables in 2021 recorded the most significant increase of 691.06% from Rp5.99 billion in 2020 to Rp47.41 billion.

Biaya Dibayar di Muka

Perusahaan mencatatkan Biaya Dibayar di Muka sebesar Rp9,00 juta di tahun 2021, menurun 94,61% dari Rp167,00 juta di tahun 2020.

Prepaid Expenses

The Company recorded Prepaid Expenses of Rp9.00 million in 2021, a 94.61% decrease from Rp167.00 million in 2020.

Pajak Dibayar di Muka

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan Pajak Dibayar di Muka sebesar Rp116,57 miliar, naik 16,42% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp100,13 miliar.

Prepaid Taxes

In 2021, the Company recorded Prepaid Taxes of Rp116.57 billion, an increase of 16.42% from the previous year, which was recorded at Rp100.13 billion.

Aset Tetap

Perusahaan mencatatkan adanya sedikit penurunan pada Aset Tetap sebesar 0,51% dari Rp181,52 miliar di tahun 2020 menjadi Rp180,59 miliar di tahun 2021.

Fixed Assets

The Company recorded a slight decrease in Fixed Assets by 0.51% from Rp181.52 billion in 2020 to Rp180.59 billion in 2021.

Aset Retrosesi

Aset Retrosesi adalah nilai hak kontraktual neto retrosesioner dalam perjanjian retrosesi. Jumlah tersebut menggambarkan bagian dari premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim yang menjadi hak kontraktual neto retrosesioner.

Retrocession Assets

Retrocession assets are the net retrocessional contractual rights value in the retrocession agreement. This amount represents the portion of the premium that has not yet been income and the estimated claims that become the net retrosessionary contractual rights.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Aset Retrosesi tercatat sebesar Rp1,83 triliun, meningkat 23,79% dari tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp1,47 triliun.

Until the end of 2021, Retrocession Assets was recorded at Rp1.83 trillion, an increase of 23.79% from 2020, which was recorded at Rp1.47 trillion.

Biaya Akuisisi Tangguhan

Pada tahun 2021, Biaya Akuisisi Tangguhan Perusahaan tercatat sebesar Rp524,85 miliar atau naik 11,62% dari Rp470,20 miliar di tahun 2020.

Deferred Acquisition Cost

In 2021, the Company's Deferred Acquisition Cost was recorded at Rp524.85 billion, an increase of 11.62% from Rp470.20 billion in 2020.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan Perusahaan di tahun 2021 tercatat meningkat 141,83% dari Rp176,92 miliar di tahun 2020 menjadi Rp427,85 miliar di tahun 2021.

Deferred Tax Assets

The Company's Deferred Tax Assets in 2021 recorded an increase of 141.83% from Rp176.92 billion in 2020 to Rp427.85 billion in 2021.

Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lain-lain pada tahun 2021 tercatat meningkat 46,56% dari Rp6,27 miliar di tahun 2020 menjadi Rp9,19 miliar di tahun 2021.

Other Assets

Total Other Assets in 2021 recorded an increase of 46.56% from Rp6.27 billion in 2020 to Rp9.19 billion in 2021.

Liabilitas

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan jumlah Liabilitas sebesar Rp11,15 triliun, meningkat sebesar 48,87% atau Rp3,66 triliun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7,49 triliun.

Kenaikan liabilitas terutama didorong oleh kenaikan Utang Pajak sebesar 713,17% dari Rp1,43 miliar di tahun 2020 menjadi Rp11,61 miliar dan adanya Pinjaman Subordinasi di tahun 2021.

Liabilities

In 2021, the Company recorded total liabilities of Rp11.15 trillion, an increase of 48.87% or Rp3.66 trillion from the previous year, which was recorded at Rp7.49 trillion.

The increase in liabilities was mainly driven by an increase in Tax Payables by 713.17% from Rp1.43 billion in 2020 to Rp11.61 billion and the existence of Subordinated Loans in 2021.

Liabilitas

Liabilities

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Keterangan Description	2021	2020	Perubahan Change	Persentase Percentage (%)
Utang Reasuransi Reinsurance Payables	313.620	222.360	91.260	41,04
Utang Retrosesi Retrocession Payables	83.514	153.095	(69.581)	(45,45)
Akrual dan Utang Lain-lain Accruals and Other Payables	579.713	508.100	71.613	14,09
Utang Pajak Taxes Payables	11.612	1.428	10.184	713,17
Cadangan atas Premi yang Belum Merupakan Pendapatan Unearned Premium Reserves	4.047.600	2.661.250	1.386.350	52,09
Estimasi Liabilitas Klaim Estimated Claim Liabilities	4.965.700	3.844.812	1.120.888	29,15
Cadangan Ujrah Ujrah Reserves	55.663	37.913	17.750	46,82
Pinjaman Subordinasi Subordianted Loan	1.020.000	-	1.020.000	100,00
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	71.572	60.284	11.288	18,72
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**11.148.994**	**7.489.242**	**3.659.752**	**48,87**

Utang Reasuransi

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan Utang Reasuransi sebesar Rp313,62 miliar, meningkat 41,04% atau Rp91,26 miliar dari Rp222,36 miliar di tahun 2020. Kenaikan utang reasuransi terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi klaim.

Reinsurance Payables

In 2021, the Company recorded Reinsurance Payables of Rp313.62 billion, an increase of 41.04% or Rp91.26 billion from Rp222.36 billion in 2020. The increase in reinsurance payables was mainly due to increased production of claims.

Utang Retrosesi

Perusahaan mencatat Utang Retrosesi sebesar Rp83,51 miliar di tahun 2021, menurun 45,45% atau Rp69,58 miliar dari Rp153,10 miliar di tahun sebelumnya. Penurunan utang retrosesi terutama disebabkan oleh turunnya produksi premi retrosesi pada tahun 2021.

Retrocession Payables

The Company recorded Retrocession Payables of Rp83.51 billion in 2021, a decrease of 45.45% or Rp69.58 billion from Rp153.10 billion in the previous year. The decline in retrocession payables was mainly due to the decline in retrocession premium production in 2021.

Akrual dan Utang Lain-lain

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan Akrual dan Utang Lain-lain sebesar Rp579,71 miliar, meningkat 14,09% atau Rp71,61 miliar dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp508,10 miliar. Peningkatan akrual dan utang lain-lain terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan titipan premi.

Accruals and Other Payables

In 2021, the Company recorded Accruals and Other Payables amounting to Rp579.71 billion, an increase of 14.09% or Rp71.61 billion from the previous year which was recorded at Rp508.10 billion. The increase in accruals and other payables was mainly due to the increase in premium deposit receipts.

Utang Pajak

Perusahaan mencatat Utang Pajak sebesar Rp11,61 miliar di tahun 2021, meningkat 713,17% atau Rp10,18 miliar dari Rp1,43 miliar di tahun 2020. Peningkatan utang pajak terutama disebabkan oleh meningkatnya pajak penghasilan badan dan pajak lain-lain di tahun 2021.

Tax Payables

The Company recorded Taxes Payable of Rp11.61 billion in 2021, an increase of 713.17% or Rp10.18 billion from Rp1.43 billion in 2020. The increase in tax payable was mainly due to the increase in corporate income tax and other taxes in 2021.

Cadangan atas Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan Cadangan atas Premi yang Belum Merupakan Pendapatan sebesar Rp4,05 triliun, meningkat 52,09% atau Rp1,39 triliun dari tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp2,66 triliun. Peningkatan pada cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan terutama didorong oleh meningkatnya cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan pada kredit dan jaminan di tahun 2021.

Unearned Premium Reserves

In 2021, the Company recorded Unearned Premium Reserves of Rp4.05 trillion, an increase of 52.09% or Rp1.39 trillion from 2020, which was recorded at Rp2.66 trillion. The increase in unearned premium reserves was mainly driven by an increase in unearned premium reserves on loans and guarantees in 2021.

Estimasi Biaya Klaim

Perusahaan mencatat Estimasi Biaya Klaim sebesar Rp4,97 triliun di tahun 2021, meningkat 29,15% atau Rp1,12 triliun dari Rp3,84 triliun di tahun 2020.

Estimated Claim Liabilities

The Company recorded an Estimated Claim Liabilities of Rp4.97 trillion in 2021, an increase of 29.15% or Rp1.12 trillion from Rp3.84 trillion in 2020.

Cadangan Ujrah

Perusahaan mencatat Cadangan Ujrah sebesar Rp55,66 miliar di tahun 2021, meningkat 46,82% atau Rp17,75 miliar dari Rp37,91 miliar di tahun 2020.

Ujrah Reserves

The Company recorded Ujrah Reserves of Rp55.66 billion in 2021, an increase of 46.82% or Rp17.75 billion from Rp37.91 billion in 2020.

Pinjaman Subordinasi

Pada tanggal 9 Juni 2021, Perusahaan menandatangani fasilitas pinjaman subordinasi dengan PT Asuransi Kredit Indonesia sebesar Rp1,02 triliun dikenakan suku bunga sebesar 0,7% per tahun. Tidak terdapat penjaminan atas seluruh pinjaman subordinasi.

Pinjaman ini ditujukan untuk memenuhi target tingkat solvabilitas Perusahaan sesuai POJK Nomor 71/POJK.05/2016.

Subordinated Loan

On 9 June 2021, the Company signed subordinated loan facility agreements with PT Asuransi Kredit Indonesia amounting to Rp1,02 trillion with interest rate of 0.7% per annum. Subordinated loan are unsecured.

This loan is intended to meet the target of the Company's solvency level in accordance with POJK Number 71/POJK.05/2016.

Liabilitas Imbalan Kerja

Perusahaan mencatat Liabilitas Imbalan Kerja sebesar Rp71,57 miliar di tahun 2021, meningkat 18,72% atau Rp11,29 miliar dari tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp60,28 miliar.

Employee Benefit Liabilities

The Company recorded Employee Benefits Liabilities of Rp71.57 billion in 2021, an increase of 18.72% or Rp11.29 billion from 2020, which was recorded at Rp60.28 billion.

Ekuitas

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan jumlah Ekuitas sebesar Rp6,79 miliar, menurun sebesar 99,05% atau Rp711,03 miliar dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp717,82 miliar.

Penurunan ekuitas terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi kerugian di tahun 2021.

Equities

In 2021, the Company recorded total Equity of Rp6.79 billion, a decrease of 99.05% or Rp711.03 billion from the previous year, which was recorded at Rp717.82 billion.

The decrease in equity was mainly due to an increase in accumulated losses in 2021.

Ekuitas

Equities

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Keterangan Description	2021	2020	Perubahan Change	Persentase Percentage (%)
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham. Modal dasar 538.000 lembar saham masing-masing pada tahun 2021 dan 2020, modal ditempatkan dan disetor penuh 538.000 lembar saham per 538.000 lembar saham per 31 Desember 2021 dan 2020 Share capital - nominal amount Rp1,000,000 (full amount) at par per share. Authorised capital 538,000 shares in year 2021 and 2020, respectively, issued and fully paid capital 538,000 shares as at December 31, 2021 and 2020	538.000	538.000	0	0,00
Surplus Revaluasi Aset Tetap Revaluation Surplus of Fixed Assets	122.857	122.857	0	0,00
Akumulasi Keuntungan Perubahan Nilai Wajar Investasi Tersedia untuk Dijual Accumulated Gain for Change in Fair Value of Available-for-Sale Investments	43.709	14.022	29.687	211,72
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Remeasurement of Employment Benefits	3.614	3.899	(285)	(7,31)
Cadangan Umum General Reserve	1.013.261	1.013.261	0	0,00
Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated Retained Earnings	5.799	5.799	0	0,00
Akumulasi Kerugian Accumulated Losses	(1.720.450)	(980.017)	740.433	75,55
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	**6.790**	**717.821**	**(711.031)**	**(99,05)**

Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flows

Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Keterangan Description	2021	2020	Perubahan Change	Persentase Percentage (%)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi Cash Flows Provided from Operating Activities	372.174	469.091	(96.917)	(20,66)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Cash Flows Used in Investing Activities	(1.342.574)	(429.117)	913.457	212,87
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows Provided from Financing Activities	1.020.000	-	1.020.000	100,00
Kenaikan Bersih Kas dan Kas di Bank Net Increase Cash on Hand and In Banks	49.600	39.974	9.626	24,08
Kas dan Kas di Bank pada Awal Tahun Cash on Hand and In Banks at Beginning of the Year	61.255	21.281	39.974	187,84
Kas dan Kas di Bank pada Akhir Tahun Cash on Hand and In Banks at End of the Year	110.855	61.255	49.600	80,97

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2021 tercatat sebesar Rp372,17 miliar, turun sebesar 20,66% atau Rp96,92 miliar dari tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp469,09 miliar.

Penurunan tersebut dikarenakan peningkatan pembayaran kepada asuradur dan retrosesioner.

Cash Flow from Operating Activities

Cash Flow from Operating Activities in 2021 was recorded at Rp372.17 billion, decreased by 20.66% or Rp96.92 billion from 2020, which was recorded at Rp469.09 billion.

The decrease was due to an increase in payments to insured and retrocessionaries.

Arus Kas yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus Kas yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi tahun 2021 tercatat sebesar Rp1,34 triliun, meningkat signifikan sebesar 212,87% atau Rp913,46 miliar dari Rp429,12 miliar di tahun 2020.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penempatan investasi di tahun 2021.

Cash Flow Used in Investing Activities

Cash Flow Used for Investment Activities in 2021 was recorded at Rp1.34 trillion, a significant increase of 212.87% or Rp913.46 billion from Rp429.12 billion in 2020.

The increase was mainly due to an increase in investment placements in 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2021 tercatat sebesar Rp1,02 triliun dari tahun sebelumnya yang tidak ada seiring adanya penerimaan pinjaman subordinasi di tahun 2021.

Cash Flow From Financing Activities

Cash Flow from Funding Activities in 2021 was recorded at Rp1.02 trillion from the previous year, which did not exist in line with the receipt of subordinated loans in 2021.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektabilitas

Solvency and Collectability

Solvabilitas

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016, tingkat solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas. Hal ini mencerminkan kemampuan membayar utang suatu perusahaan asuransi, atau dengan kata lain tingkat kesehatan perusahaan.

Sesuai peraturan, setiap perusahaan wajib menetapkan target tingkat solvabilitas paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko. Modal minimum berbasis risiko merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko keuangan yang mungkin timbul sebagai akibat dan deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.

Per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rasio pencapaian solvabilitas yang dihitung sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/P0JK.05/2016 masing-masing sebesar 11,18% dan 7,18%.

Solvency

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 71/POJK.05/2016 dated December 28, 2016, the solvency level is the difference between the number of Allowable Assets minus the total Liability. This reflects the ability to pay the debt of an insurance company, or in other words the level of health of the company.

According to regulations, every company is required to set a target solvency level of at least 120% from a minimum risk-based capital. Risk-based minimum capital is the amount of funds needed to anticipate financial risks that may arise as a result of deviations in asset and liability management.

As of December 31, 2021 and 2020, the solvency achievement ratio calculated in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 71/P0JK.05/2016 amounted to 11.18% and 7.18%, respectively.

Kolektibilitas

Pencapaian kolektibilitas piutang premi Perusahaan di tahun 2021 termasuk dalam kategori Baik. Angka kolektibilitas tersebut sudah termasuk *installment key customers* dan penutupan besar yang dilakukan di akhir tahun (yang cenderung memperbesar piutang premi).

Collectability

The achievement of collectibility of the Company's premium receivables in 2021 is in the Good category. The collectibility figure includes installment key customers and major closings at the end of the year (which tends to increase premium receivables).

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Accounts Receivable Collectability

Keterangan Description	2021	2020
Piutang Reasuransi Reinsurance Receivable		
Konvensional Conventional	85,33%	84,95%
Syariah Sharia	82,53%	64,99%
Piutang Retrosesi Retrocession Receivable		
Konvensional Conventional	68,71%	74,88%
Syariah Sharia	89,11%	94,13%

Struktur Modal

1. Modal dasar NASIONAL RE adalah sebesar Rp1.800.000.000.000 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah).
2. Modal telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 538.000 (lima ratus tiga puluh delapan ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp538.000.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan miliar rupiah), yang berasal dari PT Asuransi Kredit Indonesia, sebanyak 537.999 lembar saham dan Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo, sebanyak 1 (satu) lembar saham.

Capital Structure

1. The authorized capital of NASIONAL RE is Rp1,800,000,000,000,000 (one trillion eight hundred billion rupiah).
2. The issued and fully paid-up capital is 538,000 (five hundred thirty eight thousand) shares with a total nominal value of Rp538,000,000,000 (five hundred thirty eight billion rupiah), originating from PT Asuransi Kredit Indonesia, totaling 537,999 shares and Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo, totaling 1 (one) share.

Kebijakan Struktur Modal

Tujuan Perusahaan dalam mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2021, maka pada tahun yang dilaporkan ini tidak ada pembagian deviden tunai dan pembentukan cadangan umum, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Perusahaan.

Capital Structure Policy

The Company's objective in managing capital is to maintain the continuity of the Company's business and maximize benefits for shareholders and other stakeholders.

Based on the 2021 General Meeting of Shareholders (GMS), in the year reported for this there was no cash dividend distribution and the formation of general reserves, taking into account the situation and condition of the Company.

Aset yang Dijaminkan

Per 31 Desember 2021, Perusahaan sama sekali tidak memiliki aset yang dijaminkan.

Collateralized Assets

As of December 31, 2021, the Company does not have any assets as collateral.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Per 31 Desember 2021, Perusahaan belum melakukan penawaran umum dalam bentuk apapun sehingga informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak tersedia.

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

As of December 31, 2021, the Company has not made a public offering in any form so that information regarding the realization of the use of proceeds from the public offering is not available.

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Siaran pers - Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia ("DSAK-IAI") mengeluarkan siaran pers mengenai Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa (PSAK 24 "Imbalan Kerja").

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan siaran pers tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Subsequenct Material Information and Facts After The Accountant's Reporting Date

Press release - Attributing Benefit to Periods of Service

In April 2022, Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) issued a press release regarding Attributing Benefit to Periods of Service (PSAK 24, "Employee Benefits").

As at the authorisation date of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of the implementation of these new, amended standards and press release to the Company's financial statements.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

Per 31 Desember 2021, Perusahaan tidak mencatat adanya transaksi investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, maupun restrukturisasi utang/modal.

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring

As of December 31, 2021, the Company did not record any investment, expansion, divestment, business mergers/joint, acquisitions, or debt/capital restructuring transactions.

Transaksi Dengan Pihak Afiliasi & Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transactions With Affiliated Parties & Transactions Containing Conflicts of Interest

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yang dilakukan pada harga dan persyaratan sebagaimana telah disepakati bersama sebagai berikut:

In the normal course of business, the Company conducts transactions with related parties, which are carried out at prices and terms as mutually agreed as follows:

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat dari Hubungan Nature of Relation	Sifat dari Transaksi Nature of Transaction
Pemerintah Republik Indonesia	Pihak-pihak berelasi adalah perusahaanperusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan dalam Perusahaan atau memiliki manajemen kunci yang sama.	Transaksi Usaha
Government of the Republic of Indonesia	Related parties are State-Owned Enterprises (BUMN) companies and companies within the Company or have the same key management.	Business Transaction
Perusahaan Milik Negara dan Anak Perusahaan	Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Perusahaan Milik Negara. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan unit syariahnya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT BNI Life Insurance, PT PLN Insurance Pratama, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera dan unit syariahnya, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, PT BRI Asuransi Indonesia, PT PLN Insurance Pratama, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Jiwa Taspen, adalah entitas-entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta memiliki transaksi signifikan dengan Perusahaan.	Perusahaan memiliki penempatan rekening giro, investasi, piutang premi reasuransi, piutang retrosesi, utang klaim reasuransi, utang retrosesi, premi retrosesi, beban akuisisi, klaim retrosesi dan klaim reasuransi bruto.
State-Owned Enterprises and Subsidiaries	The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of State-Owned Enterprises. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and its sharia unit, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT BNI Life Insurance, PT PLN Insurance Pratama, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasaraharja Putera and its sharia unit, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, PT BRI Asuransi Indonesia, PT PLN Insurance Pratama, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Jasindo Syariah and PT Asuransi Jiwa Taspen are entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia, which have significant transactions with the Company.	The Company has placement in current account, investments, reinsurance receivables, due from retrocessionaire, reinsurance payables, due to retrocessionaire, retrocession premiums, acquisition costs, retrocession claims and gross reinsurance claim.
Manajemen Kunci Key Management	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Remunerasi Remuneration

Informasi lengkap mengenai transaksi dengan pihak berelasi telah tersedia di dalam Laporan Keuangan dalam laporan ini pada Catatan No. 31.

Perseroan memastikan seluruh transaksi dilakukan ssecara wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Complete information regarding the transactions with related parties is available in the Financial Statements in this report on Notes No. 31.

The Company ensures that all transactions are taken in fairly manner and do not violate any prevailing rules and regulations.

Program Kepemilikan Saham Karyawan/Manajemen (ESOP/MSOP)

Hingga tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan tidak memiliki program kepemilikan saham karyawan/manajemen (ESOP/MSOP).

Employee/Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)

As of December 31, 2021, the Company does not have employee/management share ownership program (ESOP/MSOP).

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdampak Signifikan

Pada tahun 2021 tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi kinerja atau arah Perusahaan.

Changes In Regulations With Significant Impact

In 2021 there were no changes to laws and regulations that could affect the performance or direction of the Company.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan beberapa standar baru, revisi dan interpretasi, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis";
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK 69 "Agrikultur";
- Penyesuaian tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- Penyesuaian tahunan PSAK 73 "Sewa".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

Changes in Accounting Policies

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants (DSAK-IAI) issued several new standards, amendments and interpretations but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2021 are as follows:

- Amendment to SFAS 22 "Business Combination";
- Amendment to SFAS 57 "Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets regarding Onerous Contracts-The Cost of Fulfilling";
- Annual improvements SFAS 69 "Agriculture";
- Annual improvements SFAS 71 "Financial Instruments";
- Annual improvements SFAS 73 "Leases".

The above standards will be effective on January 1, 2022 and early adoption is permitted.

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan”;
- Amendemen PSAK 16 “Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan”;
- PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”;
- Amendemen PSAK 46 “Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal”; dan
- Revisi PSAK 107 “Akuntansi Ijarah”.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: Kontrak asuransi;
- Amendemen PSAK 74 “Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif”.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

- Amendment to SFAS 1 “Presentation of Financial Statement”;
- Amendment to SFAS 16 “Fixed Assets, regarding proceeds before intended use";
- SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- Amendment to SFAS 46 “Deferred Tax on Assets and Liabilities arising from a Single Transaction”; and
- Revision of SFAS 107 "Accounting for Ijarah".

The above standards will be effective on January 1, 2023 and early adoption is permitted.

- SFAS 74: Insurance contract;
- Amendment to SFAS 74 “Insurance Contracts on Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information”.

The above standards will be effective on January 1, 2023.

Kontribusi Kepada Negara

Sebagai wajib pajak, Perusahaan senantiasa mematuhi kewajibannya dengan baik, antara lain dengan memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPN, dan Pajak Daerah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, serta melakukan pemotongan dan pemungutan terhadap setiap objek kena pajak.

Contribution to the State

As taxpayer, the Company always complies with its obligations properly, among others by paying Corporate Income Tax (PPh), VAT, and Regional Taxes in accordance with applicable tax provisions, as well as withholding and collecting taxable objects.

Aspek Pemasaran

Untuk menyikapi kondisi pasar dan persaingan saat ini, NASIONAL RE harus selalu menyesuaikan upaya-upaya pemasaran agar dapat menjaga pertumbuhan usaha seperti yang diharapkan. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha reasuransi, maka NASIONAL RE tidak menyediakan produk atau layanan secara langsung kepada konsumen, atau dalam hal ini adalah Tertanggung. Produk atau layanan yang disediakan oleh NASIONAL RE melalui perusahaan-perusahaan asuransi mitranya. Oleh sebab itu, NASIONAL RE berkontribusi kepada perusahaan-perusahaan asuransi mitranya dengan cara menawarkan

Marketing Aspect

To deal with the current market conditions and with the competition, NASIONAL RE always adjust its marketing strategy in order to maintain business growth as expected. Engaging in the reinsurance business, NASIONAL RE does not provide products or services directly to consumers, or in this case to the Insured. Instead, NASIONAL RE provides its products or services through its partner insurance companies. NASIONAL RE supports its partner insurance companies by offering product schemes that can be combined with other products to become a customized package. This is in accordance with one of

skema produk yang sudah ada untuk dikombinasikan dengan produk lainnya sehingga menjadi suatu produk gabungan atau suatu paket yang bersifat menyesuaikan kebutuhan pelanggan *(customized)*. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip reasuransi, yaitu *"follow the fortune"*, di mana perusahaan reasuransi hanya mengikuti produk-produk yang dijual oleh perusahaan asuransi.

Strategi Pemasaran

Sebagai Perusahaan Reasuransi, NASIONAL RE memberikan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Dengan kata lain, NASIONAL RE membantu perusahaan Asuransi dengan jalan:

1. Memperbesar kapasitas penerimaan risiko dari *ceding company*;
2. Penyebaran risiko yang ditanggung perusahaan *ceding company*;
3. Membantu menjaga profitabilitas *ceding company*; dan
4. Meminimalisasi cadangan teknis yang dibutuhkan *ceding company*.

Sasaran dari upaya pemasaran NASIONAL RE adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, baik perusahaan lokal dengan struktur permodalan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), gabungan antara perusahaan lokal dengan perusahaan asing *(joint venture)*. Selain itu, NASIONAL RE juga sudah memiliki portofolio dari salah satu negara di Asia Tenggara, yakni Myanmar, dan terus menjajaki upaya-upaya pemasaran dalam rangka melakukan penetrasi ke pasar asuransi internasional.

NASIONAL RE melakukan strategi pemasarannya dengan cara:

1. Menyediakan konsultasi teknis asuransi/ reasuransi;
2. Menyelenggaraan *gathering* dengan para mitra usaha;
3. Memberikan tutorial;
4. Menyelenggarakan seminar atau *workshop*; dan
5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan formal dan non-formal lainnya yang bersifat menjalin hubungan yang sudah berjalan, baik hubungan bisnis maupun hubungan non-bisnis.

the reinsurance principles, namely "follow the fortune", where reinsurance companies only follow the products sold by insurance companies.

Marketing Strategies

As a reinsurance company, NASIONAL RE provides reinsurance services for the risks faced by insurance companies. In other words, NASIONAL RE helps insurance companies by:

1. Increasing the risk acceptance capacity of the ceding company;
2. Spread of risk borne by the ceding company;
3. Help maintain the profitability of the ceding company; and
4. Minimize the technical reserves required by the ceding company.

The target of NASIONAL RE's marketing efforts are insurance companies in Indonesia, both local companies with Domestic Investment (PMDN), or combination of local companies and foreign companies (joint ventures). In addition, NASIONAL RE also has a portfolio from one of the countries in Southeast Asia, namely Myanmar, and continues to explore marketing efforts in order to penetrate the international insurance market.

NASIONAL RE carries out its marketing strategy by:

1. Providing insurance/reinsurance technical consultation;
2. Organizing gatherings with business partners;
3. Providing tutorials;
4. Organizing seminars or workshops; and
5. Organizing other formal and non-formal activities that are in the nature of establishing ongoing relationships, both business and nonbusiness relationships.

Prospek Usaha

Seiring dengan terus membaiknya pertumbuhan ekonomi global dan nasional meskipun berjalan lebih lambat, industri asuransi pada umumnya memiliki prospek usaha yang cukup baik. Pemulihan dan tumbuhnya perekonomian akan mendorong masyarakat untuk membeli asuransi dan memproteksi aset-asetnya, sehingga akan memengaruhi aset industri asuransi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pertumbuhan aset asuransi jiwa 4,66% serta aset asuransi umum dan reasuransi 3,14% pada tahun 2022, sehingga total penambahan aset industri tersebut mencapai Rp34,14 triliun dengan asumsi dasar ekonomi makro pada 2022 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 di angka 5,02%, tingkat inflasi 3%, dan nilai tukar rupiah Rp14.350 per dolar AS. Asumsi pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi dari kinerja 2021 senilai 3,69%. Sehingga secara keseluruhan sektor jasa keuangan akan turut mencatatkan pertumbuhan, di antaranya asuransi.

Menyikapi kondisi tersebut, Perusahaan telah mencanangkan pembenahan internal melalui upaya yang berfokus pada 3 (tiga) aspek yang dianggap signifikan sesuai RKAP 2022 yaitu:

1. Pembenahan Internal
   Sebagaimana layaknya organisasi yang terus bertumbuh dan berkembang tentu mengalami perubahan-perubahan sebagai suatu dinamika yang wajar, khususnya terkait dengan perubahan metode perhitungan cadangan teknis dan perbaikan atas *class of business* yang memberikan hasil negatif. Hal ini niscaya memerlukan pembenahan internal dari semua aspek, baik dari sisi kapabilitas sumber daya manusia, teknologi dan informasi serta peningkatan raso tingkat solvabilitas keuangan.
2. Pembenahan proses bisnis melalui transformasi Digital
   Dalam rangka terus berupaya menjadi yang terdepan dalam pelayanan kepada mitra bisnis dan menyambut hadirnya *The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0)*, perusahaan merasa perlu untuk memiliki andil yang besar dalam pemanfaatan teknologi pada industri asuransi dan bertanggung jawab untuk terus mengembangkan transformasi digital yang sudah berjalan di perusahaan. Selaras dengan hal tersebut

Business Prospect

Along with the continued improvement in global and national economic growth, although at a slower pace, the insurance industry in general has quite good business prospects. The recovery and growth of the economy will encourage people to buy insurance and protect their assets, which will affect the assets of the insurance industry. The Financial Services Authority (OJK) targets a 4.66% growth in life insurance assets and 3.14% general insurance and reinsurance assets in 2022, bringing the total additional industrial assets to Rp34.14 trillion with basic macroeconomic assumptions in 2022 targeting growth economy in 2022 at 5.02%, an inflation rate of 3%, and the rupiah exchange rate of Rp. 14,350 per US dollar. The assumption of economic growth is higher than the 2021 performance of 3.69%. So that the overall financial services sector will also record growth, including insurance.

In response to these conditions, the Company has launched internal improvements through efforts that focus on 3 (three) aspects that are considered significant based on RKAP 2022, namely:

1. Internal Improvement
   Just as an organization that continues to grow and develop, it certainly undergoes changes as a natural dynamic, especially related to changes in the method of calculating technical reserves and improvements to the class of business that give negative results. This certainly requires internal improvements from all aspects, both in terms of human resource capabilities, technology and information as well as increasing the ratio of financial solvency levels.

2. Improving business processes through Digital transformation
   In order to continue to strive to be at the forefront of service to business partners and welcome the presence of The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0), the company feels the need to have a big share in the use of technology in the insurance industry and is responsible for continuing to develop the digital transformation that is already underway in the insurance industry. company. In line with this, digital transformation in all lines and

maka transformasi digital di segala lini dan proses bisnis perusahaan menjadi suatu hal yang harus dilakukan guna mengakselerasi pertumbuhan bisnis perusahaan dan perbaikan adminitrasi.

3. Pembenahan Portofolio Bisnis
   Sebagai perusahaan yang senantiasa berupaya memberikan nilai lebih bagi Pemegang Saham dan para pemegang kepentingan, adalah suatu hal yang utama bagi Perusahaan untuk memberikan hasil yang positif dan terus bertumbuh. Upaya yang harus dilakukan antara lain adalah senantiasa memperbaiki portofolio bisnis antara lain dengan membangun kemitraan yang saling menguntungkan baik bagi Perusahaan maupun para cedant melalui penerapan *terms & conditions* yang lebih baik. Perbaikan portofolio dilakukan di semua lini bisnis baik di Reasuransi Umum dan Reasuransi Jiwa pada sisi Konvensional maupun Syariah.

Strategi Utama Perusahaan untuk tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penguatan *research and development* untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi bisnis
2. Pemberdayaan kapasitas akseptasi dengan menjadi *strategic Reinsurance* dari IFG
3. Melakukan evaluasi atas portofolio bisnis yang memberikan hasil negatif
4. Penempatan portofolio investasi yang disesuaikan dengan *Liability Driven Investment*.
5. Peningkatan kapabilitas SDM
6. Pemanfaatan ICT sebagai salah satu *tools* bisnis *(business enabler)*

Dengan menerapkan pembenahan internal dan strategi tersebut di atas, Perusahaan diharapkan dapat terus mencatatkan perbaikan dan pertumbuhan kinerja di masa mendatang.

business processes of the company is something that must be done in order to accelerate the company's business growth and improve administration.

3. Business Portfolio Improvement
   As a company that always strives to provide more value for Shareholders and stakeholders, it is the main thing for the Company to provide positive results and continue to grow. Efforts that must be made include continuously improving the business portfolio, among others, by building mutually beneficial partnerships for both the Company and the cedants through the implementation of better terms & conditions. Portfolio improvement was carried out in all business lines, both in General Reinsurance and Life Reinsurance on the Conventional and Sharia side.

The Company's Main Strategy for 2022 is as follows:

1. Strengthening research and development to support business intensification and extensification
2. Empowerment of acceptance capacity by becoming a strategic reinsurance from IFG
3. Evaluating business portfolios that give negative results
4. Investment portfolio placement that is adjusted to Liability Driven Investment.
5. HR capability improvement
6. Utilization of ICT as a business tool (business enabler)

By implementing the internal improvements and strategies mentioned above, the Company is expected to continue to record improvements and performance growth in the future.

NASIONAL RE
Reinsurance

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT OVERVIEW

Sumber Daya Manusia

HUMAN RESOURCES

Pandemi yang terjadi dalam 2 (dua) tahun terakhir menuntut NASIONAL RE untuk selalu gesit dalam mengikuti dinamika perubahan yang sangat cepat dengan berkembangnya era digital, ditambah lagi dengan persaingan industri asuransi yang kian kompetitif. Untuk itu, NASIONAL RE terus melakukan pengelolaan faktor-faktor penunjang bisnis, termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia (SDM) agar dapat dengan cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang ada dan memiliki kompetensi yang unggul untuk meningkatkan nilai tambah Perusahaan.

The pandemic that occurred in the last 2 (two) years requires NASIONAL RE to always be agile in following the dynamics of very fast change with the development of the digital era, coupled with increasingly competitive insurance industry competition. For this reason, NASIONAL RE continues to manage business supporting factors, including human resources (HR) so that they can quickly adapt to all changes that exist and have superior competencies to increase the added value of the Company.

Selama ini, NASIONAL RE senantiasa menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset utama yang menjadi motor penggerak bisnis dan peningkatan kinerja perusahaan. Sebagai perusahaan yang mengelola risiko finansial dari mitra usaha, Perusahaan akan terus berupaya sebaik mungkin menjaga kepercayaan dari mitra usaha, dalam hal ini *ceding company*. Selain itu, Perusahaan juga senantiasa menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

So far, NASIONAL RE has always placed Human Resources (HR) as the main asset that becomes the driving force for its business growth and in improving company performance. As a company that manages the financial risks of business partners, the Company will continue to do its best to maintain the trust of business partners, in this case the ceding company. In addition, the Company also always maintains the trust of all stakeholders.

Perusahaan menyadari peran penting SDM dalam mewujudkan visinya. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk terus memperkuat aspek pengelolaan SDM guna menciptakan barisan pekerja yang profesional dan terandalkan untuk mendukung daya saing Perusahaan di masa depan. Untuk itu, pengelolaan SDM di Perusahaan dirancang berdasarkan Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis Kompetensi di mana SDM ditempatkan sebagai aset dan Perusahaan berkomitmen untuk terus mengembangkan seluruh pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi individu dan unit kerja masing-masing.

The Company recognizes the important role of HR in realizing its vision. To that end, the Company is committed to continuously strengthening aspects of HR management in order to create a professional and reliable line of workers to support the Company's competitiveness in the future. For this reason, HR management in the Company is designed based on Competency based Human Resource Management where HR is placed as an asset and the Company is committed to continuously developing all employees in accordance with the competency needs of individuals and their respective work units.

Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis Kompetensi yang diambil oleh Perusahaan ini diterapkan sejak awal tahap rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja skema remunerasi dan kesejahteraan hingga tahap persiapan pensiun pegawai. Kegiatan rekrutmen di Perusahaan dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan SDM perusahaan dari sisi kuantitas. Selanjutnya, Perusahaan juga melakukan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai untuk memastikan pemenuhan kebutuhan SDM dari sisi kualitas.

The Competency-based Human Resource Management approach adopted by the Company is applied from the initial stages of recruitment, placement, competency development, performance appraisal of remuneration and welfare schemes to the preparation stage for employee retirement. Recruitment activities in the Company are designed to meet the company's HR needs in terms of quantity. Furthermore, the Company also carries out activities to increase employee competence to ensure the fulfilment of HR needs in terms of quality.

Dalam implementasi Manajemen SDM, Perusahaan menerapkan asas keadilan dan kesetaraan serta tidak mengakui diskriminasi dalam bentuk apapun. Perusahaan memberlakukan kesempatan yang adil dan setara sejak tahap rekrutmen, pengembangan, penilaian kinerja hingga tahap persiapan masa pensiun. Seluruh pegawai di evaluasi berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) secara obyektif yang disusun berdasarkan kamus kompetensi dan analisis beban kerja di tiap unit kerja. Selain itu, Perusahaan juga berkomitmen kuat untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia secara terencana dan berkelanjutan. Komitmen ini antara lain direalisasikan dengan mempertahankan dan memelihara SDM berkualitas yang ada di Perusahaan. Fungsi *Retaining and Maintaining* berhubungan dengan pengelolaan imbalan, benefit, perlindungan kerja, serta hubungan industrial antara karyawan dengan Perusahaan.

In the implementation of HR Management, the Company applies the principles of justice and equality and does not recognize discrimination in any form. The Company enforces fair and equal opportunities from the recruitment, development, performance appraisal stages to the retirement preparation stage. All employees are evaluated based on Key Performance Indicators (KPI) objectively compiled based on the competency dictionary and workload analysis in each work unit. In addition, the Company is also strongly committed to improving the standard of living and quality of human resources in a planned and sustainable manner. This commitment is realized, among others, by maintaining and maintaining quality human resources in the Company. The Retaining and Maintaining function relates to the management of rewards, benefits, job protection, and industrial relations between employees and the Company.

Komposisi SDM

HR Composition

Hingga akhir tahun 2021, NASIONAL RE memiliki 220 (dua ratus dua puluh) karyawan, dengan perincian sebagai berikut:

Until the end of 2021, NASIONAL RE has 211 (two hundred and twenty) employees, with the following details:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition by Gender

(dalam orang/in people)

Keterangan Description	Tahun Year			
	2021	Persentase Percentage (%)	2020	Persentase Percentage (%)
Laki-laki Male	139	63,18	135	63,98
Perempuan Female	81	36,82	76	36,02
Jumlah Total	**220**	**100,00**	**211**	**100,00**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin — Employee Composition by Gender

(dalam orang/in people)

Jabatan Position	2021			2020		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Kepala Divisi Division Head	16	1	17	15	1	16
Kepala Bagian Unit Head	26	4	30	22	4	26
Kepala Seksi Section Head	27	30	57	25	27	52
Pelaksana Staff	53	39	92	62	43	105
Karyawan Dasar Basic Employee	9	0	9	9	0	9
Karyawan Kontrak Contract Employee	8	7	15	2	1	3
Jumlah Total	**139**	**81**	**220**	**135**	**76**	**211**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan — Employee Composition by Education

(dalam orang/in people)

Jabatan Position	S2 Master's Degree		S1 Bachelor's Degree		D3 Diploma		SLTA Senior High School		Jumlah Total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Kepala Divisi Division Head	7	5	10	11	0	0	0	0	17	16
Kepala Bagian Unit Head	4	5	26	21	0	0	0	0	30	26
Kepala Seksi Section Head	4	3	50	46	3	3	0	0	57	52
Pelaksana Staff	7	8	84	94	1	1	0	2	92	105
Karyawan Dasar Basic Employee	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9
Karyawan Kontrak Contract Employee	0	0	14	2	1	1	0	0	15	3
Jumlah Total	**22**	**21**	**184**	**174**	**5**	**5**	**9**	**11**	**220**	**211**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

(dalam orang/in people)

Keterangan Description	Tahun Year			
	2021	Persentase Percentage (%)	2020	Persentase Percentage (%)
Karyawan Tetap Permanent Employees	203	92,27	207	98,58
Karyawan Kontrak Contract Employees	17	7,73	4	1,42
Jumlah **Total**	**220**	**100,00**	**211**	**100,00**

Kebijakan Rekrutmen

Proses perekrutan yang efektif akan mampu menghadirkan sumber daya manusia terbaik dan mampu menarik perhatian dari orang-orang yang punya kemampuan dan keterampilannya khusus untuk memenuhi spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, Perusahaan menerapkan strategi rekrutmen yang tepat, akurat dan cepat, dengan tetap memperhatikan kualitas serta kompetensi dasar para calon pegawai.

Di Perusahaan, pelaksanaan proses rekrutmen senantiasa dimulai dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kebutuhan penambahan pegawai, baik kebutuhan saat ini maupun prediksi kebutuhan masa depan. Dengan demikian diharapkan Perusahaan mampu memiliki *pool* calon-calon pegawai dengan potensi dan kompetensi dasar yang sesuai dengan perencanaan Perusahaan.

Strategi rekrutmen yang dilaksanakan oleh Perusahaan antara lain melalui media, sebagai berikut:
1. Pemasangan Iklan lowongan kerja di internet melalui JobStreet;
2. Kunjungan ke kampus-kampus untuk pemasangan iklan lowongan kerja di majalah dinding kampus dan di *website* kampus.

Recruitment Policy

Adopting effective recruitment process will proved the Company with the best human resources while being able to attract the attention of people who have the special abilities and skills to meet the job specifications needed. Therefore, the Company implements an appropriate, accurate and fast recruitment strategy, while still paying attention to the quality and basic competencies of prospective employees.

In the Company, recruitment process always begins by first conducting an analysis of the need for additional employees, both current needs and predictions of future needs. Thus, the Company is expected to be able to have a pool of prospective employees with potential and basic competencies in accordance with the Company's plans.

The recruitment strategy implemented by the Company, among others, through the media, is as follows:
1. Posting job vacancies on the internet through JobStreet;
2. Visits to campuses for posting job advertisements on campus walls and on campus websites.

Tahapan Proses Rekrutmen di NASIONAL RE antara lain terdiri dari:

1. *Pretest* yang dilakukan oleh lembaga/konsultan yang ditunjuk oleh Perusahaan;
2. TOEFL, atau test kemampuan Bahasa Inggris, yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Bahasa Inggris yang ditunjuk oleh Perusahaan;
3. Wawancara yang dilakukan oleh:
   a. Kepala Bagian SDM/ Kepala Divisi SDM & Umum dan atau Kepala Bagian/Kepala Divisi Unit Pengguna *(User)*;
   b. Tim *Assesor* (yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang Pejabat setingkat Kepala Divisi yang ditunjuk oleh Perusahaan);
   c. Direksi (bila diperlukan).
4. Psikotest yang dilakukan oleh lembaga/konsultan yang ditunjuk oleh Perusahaan;
5. Tes Kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit/Instansi yang ditunjuk oleh Perusahaan;
6. Laporan ke Direksi.

The stages of the recruitment process at NASIONAL RE include:

1. Pretest conducted by the institution/consultant appointed by the Company;
2. TOEFL, or English language proficiency test, conducted by an English language educational institution appointed by the Company;
3. Interviews conducted by:
   a. Head of HR Division/Head of HR & General Division and/or Head of Division/Head of User Unit Division (User);
   b. Assessor Team (consisting of at least 2 (two) Officers at the Division Head level appointed by the Company);
   c. Board of Directors (if required).
4. Psychotest conducted by the institution/consultant appointed by the Company;
5. Medical tests conducted by the Hospital/Agency appointed by the Company;
6. Report to the Board of Directors.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Perusahaan telah merancang program pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai dan unit kerja. Selain itu, program pelatihan dan pengembangan kompetensi juga disesuaikan dengan strategi jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan untuk memperkuat daya saing Perusahaan.

Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai selama tahun 2021 dilakukan baik secara internal maupun bekerja sama dengan pihak eksternal yang kompeten.

Competency Development and Training Program

The Company has designed training and competency development programs according to the needs of each employee and work unit. In addition, training and competency development programs are also adapted to the Company's short-term and long-term strategies to strengthen the company's competitiveness.

The implementation of employee competency training and development programs during 2021 was carried out both internally and in collaboration with competent external parties.

Data Pelatihan di Tahun 2021

Training Data in 2021

No.	Program Pelatihan Training Program	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participant
1.	*12th ASEAN School For Young Insurance Managers (AYIM)* 12th ASEAN School For Young Insurance Managers (AYIM)	Singapore Collage Institute (SCI)	1
2.	*4"ASEAN INSURANCE SUMMIT* Tahun 2021 4"ASEAN INSURANCE SUMMIT Year 2021	ASEAN Insurance Council	2

No.	Program Pelatihan Training Program	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participant
3.	AAJI *Brand Transformation Launching* "Semangat Untuk Melangkah Maju" AAJI Brand Transformation Launching "Spirit to Move Forward"	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	6
4.	*Actuarial System and Modeling* Actuarial System and Modeling	Persatuan Aktuaria Indonesia	2
5.	Akankah IFRS 17 merontokkan Kinerja Perusahaan Asuransi? Tantangan dalam implementasi IFRS 17 dan Pengendalian Risikonya Will IFRS 17 undermine the performance of insurance companies? Challenges in the implementation of IFRS 17 and its Risk Control	LPMA STMA Trisakti & LOMA Society Indonesia	10
6.	Analisis Penutupan Operasional dan Konstruksi Jalan Jembatan Termasuk Analisis Klaim dan Solusi Reasuransi Analysis of Operational Closure and Bridge Road Construction Including Claim Analysis and Reinsurance Solutions	Widya Dharma Arta (WDA)	4
7.	Aplikasi penerapan kontrak PSAK 74 (Kontrak Asuransi) serta perbedaannya dengan PSAK 28, 36, dan 62 Applications for the application of PSAK 74 contracts (Insurance Contracts) and their differences with PSAK 28, 36, and 62	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	2
8.	Aspek Hukum dan Manajemen Risiko dalam Penerapan *Spin Off* Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Legal Aspects and Risk Management in the Implementation of Spin Offs for Insurance and Reinsurance Companies	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	3
9.	*Awarding Ceremony* dan Seminar Karisma (Karya Riset Ilmiah) OJKI 2021 dengan tema Penguatan Manajemen Risiko, Pengembangan *Regtech and Suptech*, dalam menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan OJKI 2021 Awarding Ceremony and Karisma Seminar (Scientific Research Works) with the theme Strengthening Risk Management, Development of Regtech and Suptech, in maintaining the Stability of the Financial Services Sector	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	4
10.	*Basic AFZ Online Class-Batch 3* Basic AFZ Online Class-Batch 3	PT Nityasa Niscita Solusi	2
11.	*Basic Reinsurance* Basic Reinsurance	Ahli Asuransi Learning Center	5
12.	Bedah Buku dengan Judul Ekosistem Fintech di Indonesia Book Review with the Title of Fintech Ecosystem in Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	1
13.	Bijak Berinvestasi di Pasar Modal bagi Investor Pemula Investing Wisely in the Capital Market for Beginner Investors	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	2
14.	Bimbingan Teknis dan Ujian Nasional Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai PERPRES 16 Tahun 2018 Technical Guidance and National Examination for Certification of Government Goods/Services Procurement Experts in accordance with PERPRES 16 of 2018	Diponegoro Smart Solution	1
15.	*Certified Human Resource Professional (CHRP) Batch 60* Certified Human Resource Professional (CHRP) Batch 60	Atma Jaya	2

No.	Program Pelatihan Training Program	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participant
16.	*Certified Professional in General Affair (CPGA)* Certified Professional in General Affair (CPGA)	IEEEL Institute	1
17.	*Certified Professional Training Needs Analyst* Certified Professional Training Needs Analyst	IEEEL Institute	1
18.	*Claims Risk Management*: Mengidentifikasi dan Mencegah Kerugian Perusahaan Asuransi Akibat Kejahatan dan Mafia Asuransi, serta Meminimalkan Kerugian Akibat Klaim yang Tidak Benar! Claims Risk Management: Identifying and Preventing Insurance Company Losses Due to Crime and Insurance Mafia, and Minimizing Losses Due to False Claims!	Itikad Academy	3
19.	*Digital Signature* dalam Proses Bisnis Digital Signature in Business Process	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	3
20.	*Effective Selling Skills: Improve Insurance Selling Skills With Features, Advantages & Benefits Techniques* Effective Selling Skills: Improve Insurance Selling Skills With Features, Advantages & Benefits Techniques	Ahli Asuransi Learning Center	1
21.	Evaluasi Manajemen Risiko dan Dasar Teknis Aktuaria pada Perusahaan Asuransi Evaluation of Risk Management and Actuarial Technical Basis in Insurance Companies	Itikad Academy	4
22.	*Fund Manager Training* Fund Manager Training	Binainsan	1
23.	*Fundamental IT Audit for Internal Auditor: Planning, Performing and Presenting* Fundamental IT Audit for Internal Auditor: Planning, Performing and Presenting	PT Andalan Teknologi Informasi	2
24.	Fungsi Aktuaria di Asuransi Umum Actuarial Function in General Insurance	Persatuan Aktuaria Indonesia	2
25.	*Graphic Design with Photoshop dan Exam* Graphic Design with Photoshop and Exam	PT Inixindo Amiete Mandiri	1
26.	*GRC Webinar Series - Best Practices on Risk Aggregation* GRC Webinar Series - Best Practices on Risk Aggregation	GRC Management	1
27.	*Grup Health/Actuary Role in Health Insurance* Grup Health/Actuary Role in Health Insurance	Persatuan Aktuaria Indonesia	2
28.	*How to Become a Smart Manager?* How to Become a Smart Manager?	Ahli Asuransi Learning Center	6
29.	*HR Gathering* Asuransi Jiwa dan Pialang 2021 HR Gathering Life Insurance and Brokers 2021	STIMRA	5
30.	*IFRS 17 – A practical conversation on the Current State of Implementation and Best Way to Prepare* IFRS 17 – A practical conversation on the Current State of Implementation and Best Way to Prepare	CCH Tagetik	10
31.	*IFRS 17 Challenges (Implementation & Risk management)* IFRS 17 Challenges (Implementation & Risk management)	Indonesian Senior Executives Association (ISEA)	3
32.	*IFRS 17: Liability for Incurred Claim (LIC)* IFRS 17: Liability for Incurred Claim (LIC)	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	5

No.	Program Pelatihan Training Program	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participant
33.	*In House Training Insurtech "Memahami Insurtech* sebagai Model Bisnis" In House Training Insurtech "Understanding Insurtech as a Business Model"	LPMA Trisakti	20
34.	*Indonesia Insurance 2022: Risk & Opportunity from Macroeconomics, Pandemic COVID-19, and Insurance 4.0* Indonesia Insurance 2022: Risk & Opportunity from Macroeconomics, Pandemic COVID-19, and Insurance 4.0	Itikad Academy bekerjasama dengan IRMAPA	1
35.	Inhouse Webinar: Marine Cargo (Basic) Inhouse Webinar: Marine Cargo (Basic)	PT Reasuransi Nasional Indonesia	20
36.	*Insurance Seminar Board and Executives Development Program Batch XVII* Insurance Seminar Board and Executives Development Program Batch XVII	ISEA	3
37.	*Intermediate AFZ Online Class-Batch 2* Intermediate AFZ Online Class-Batch 2	PT Nityasa Niscita Solusi	2
38.	*Introduction to Energy Insurance* Introduction to Energy Insurance	Ahli Asuransi Learning Center	1
39.	*Investment Outlook 2022* Investment Outlook 2022	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	3
40.	*Join* Regional Seminar 2021 Join Regional Seminar 2021	Persatuan Aktuaria Indonesia	3
41.	Kajian Risiko Kegempaan DKI Jakarta Tahap 2 – Segmen Karawang DKI Jakarta Seismic Risk Study Phase 2 – Karawang Segment	Maipark	1
42.	Kebijakan Strategis OJK di Masa Pandemi untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional OJK's Strategic Policies During the Pandemic to Accelerate National Economic Recovery	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	1
43.	Langkah Mitigasi Menghadapi Tuntutan Nasabah Mitigation Steps to Face Customer Demands	Peruji	16
44.	*Loss Prevention In Marine Insurance* Loss Prevention In Marine Insurance	Swiss Re	4
45.	*Master Class series XX* Master Class series XX	LSPMR	1
46.	Memahami 50 Klausul-klausul Polis Asuransi *Marine Cargo Open Cover* dari Brokers Understanding 50 Clauses of Marine Cargo Open Cover Insurance Policy from Brokers	Ahli Asuransi Learning Center	1
47.	Memahami Jaminan Polis dan Klaim Asuransi *Builders Risks and Ship Repairers Liability* Understanding Policy Guarantees and Insurance Claims Builders Risks and Ship Repairers Liability	Ahli Asuransi Learning Center	2
48.	Menapaki Perekonomian Indonesia yang Lebih Baik Melalui Penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik Reaching a Better Indonesian Economy Through the Implementation of Public Sector Risk Management	The Way Academy	2

No.	Program Pelatihan Training Program	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participant
49.	*Oil and Gas Insurance (Basic 1)* Oil and Gas Insurance (Basic 1)	SMS Consultants	2
50.	*OKR: Objective & Key Results* OKR: Objective & Key Results	ISEA	3
51.	*Pathway Certified Risk Management Officer Level II* Pathway Certified Risk Management Officer Level II	PT RAP Asia Consulting	15
52.	*Pathway Sertifikasi CRMO (Certified Risk Management Officer Level II)* Pathway CRMO (Certified Risk Management Officer Level II) Certification	PT RAP Asia Consulting	16
53.	Pelatihan Bagaimana Menulis *Job Description* dan KPI dengan Benar Training on How to Write Job Descriptions and KPIs Correctly	Sahala P. Sinurat	9
54.	Pelatihan dan Uji kompetensi *Recognition Current Competency (RCC) Certified Securities Analyst (CSA)* Recognition Current Competency (RCC) Certified Securities Analyst (CSA) Certified Securities Analyst (CSA) training and competency test	PT Citra Sukses Analis (CSA)	1
55.	Pelatihan PSAK 74 SFAS 74 training	NASIONAL RE & Ersa	11
56.	Pelatihan Sertifikasi *Certified Financial Planner (CFP) Batch 25* Certified Financial Planner (CFP) Batch 25 Certification Training	MM FEB UGM Kampus Jakarta	1
57.	Pelatihan Sertifikasi *Certified Securities Analyst (CSA) Batch 45* Certified Securities Analyst (CSA) Batch 45 Certification Training	PT Citra Sukses Analis	1
58.	Pembuatan Analisis Kesenjangan *(Gap Analysis)* dalam rangka Implementasi PSAK 74 (IFRS 17) Tentang Kontrak Asuransi Making a Gap Analysis for the Implementation of PSAK 74 (IFRS 17) Regarding Insurance Contracts	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	10
59.	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau *Continuing Professional Development* (CPD) Seri 2 dengan Tema Implementasi Penyelenggaraan JKN dan Tata Hubungannya dengan Para Pemangku Kepentingan Continuing Professional Development (CPD) Series 2 with the theme of JKN Implementation and Relationship Management with Stakeholders	PAMJAKI	1
60.	Penunjukan Webinar CEAR (CAR & EAR) *Coverage, Exclusion, Endorsements and Claim Adjustment (Section I, II and III)* Webinar CEAR (CAR & EAR) Coverage, Exclusion, Endorsements and Claim Adjustment (Section I, II and III) Assignment	Ahli Asuransi Learning Center	1
61.	Perpajakan Tahun 2021 Taxation in 2021	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	3
62.	Persiapan Perusahaan Asuransi Sebagai Pengusaha Kena Pajak" dan "Kepatuhan PPh Pasal 26 Bagi Industri Jasa Asuransi Preparation of Insurance Companies as Taxable Entrepreneurs" and "Compliance with Article 26 Income Tax for the Insurance Service Industry	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	5

No.	Program Pelatihan Training Program	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participant
63.	PPL *Online* dengan tema Implikasi Pajak Atas Penggunaan Nilai Wajar *(Fair Value)* Dalam Laporan Keuangan PPL Online with the theme of Tax Implications on the Use of Fair Value in Financial Statements	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	2
64.	*Pricing* Pricing	Actuary From Zero	4
65.	*Professional Secretary Skills* Professional Secretary Skills	PT Samudra Karya Mustika	3
66.	Program *Making Digital Talent* BUMN Making Digital Talent BUMN Program	Kementerian BUMN bekerjasama dengan Indonesia Digital Learning Institute (IDLI)	2
67.	Program Pelatihan Cadangan Teknis Asuransi Insurance Technical Reserve Training Program	PT Duage Manajemen Indonesia	2
68.	*Programme for Insurance Executives Development (PIED)* Programme for Insurance Executives Development (PIED)	Malaysian Re	1
69.	*Property All Risk (PAR) Underwriting & Claim* Property All Risk (PAR) Underwriting & Claim	Ahli Asuransi Learning Center	1
70.	*PSAK 74 Ready, Steady, Go* SFAS 74 Ready, Steady, Go	MBE Consulting	1
71.	Refleksi Setahun AKHLAK BUMN dan Penganugerahan AKHLAK Award A Year's Reflection on SOEs' Morals and the Awarding of AKHLAK Awards	ACT Consulting	3
72.	*Retrocession Market Updates* Retrocession Market Updates	Guy Carpenter Reach	1
73.	*Risk and Insurance of Machinery Breakdown* Risk and Insurance of Machinery Breakdown	Ahli Asuransi Learning Center	7
74.	*Salary Survey* di Industri Asuransi Umum Salary Survey in General Insurance Industry	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	2
75.	Seputar Dampak UU Cipta Kerja Kepada Perencanaan Program Pensiun Perusahaan dan Perhitungan PSAK24 Regarding the Impact of the Job Creation Law on Corporate Pension Program Planning and Calculation of PSAK24	Matana	3
76.	*Sharing Session* Perpajakan Tahun 2021 Sharing Session Taxation in 2021	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	2
77.	Sosialisasi LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan) Socialization of SJK LAPS (Alternative Dispute Resolution Institution in the Financial Services Sector)	Dewan Asuransi Indonesia (DAI)	1
78.	*Study* Biaya Cost Study	Actuary From Zero	2
79.	*Swiss Re: Spotlight on secondary perils webinar* Swiss Re: Spotlight on secondary perils webinar	Swiss Re	1
80.	*The Touchstone Re Cat Modeling and Underwriting* The Touchstone Re Cat Modeling and Underwriting	AJG Brokers	31

No.	Program Pelatihan Training Program	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participant
81.	Tema Audit Berbasis Resiko dan Praktek - Praktek kecurangan yang memicu tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa pada korporasi BUMN, BLU/D. Kementrian Lembaga SKPD. Tahun 2021. Berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Risk-Based Audit Themes and Practices - Fraudulent practices that trigger criminal acts in the procurement of goods and services at BUMN, BLU/D corporations. Ministry of SKPD Institutions. 2021. Based on Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning the Implementation of Government Goods/Services	DPP Pusdiklatnas	2
82.	*Touchstone Re Cat Modeling and Underwriting (AIR)* Touchstone Re Cat Modeling and Underwriting (AIR)	PT AIR WORLDWIDE by Gallagher (AJG)	10
83.	*Training* & Sertifikasi BNSP – Ahli Perawatan Bangunan Gedung BNSP Training & Certification – Building Maintenance Expert	PT Expertindo	1
84.	*Training: The "Nuts & Bolts" of Treaty and Facultative Reinsurances* Training: The "Nuts & Bolts" of Treaty and Facultative Reinsurances	Ahli Asuransi Learning Center	1
85.	Training Bedah Polis dan Klaim Asuransi Kapal *(Marine Hull)* Ship Insurance Policy and Claim Surgery Training (Marine Hull)	Ahli Asuransi Learning Center	1
86.	*Training General Insurance Products* Training General Insurance Products	Ahli Asuransi Learning Center	2
87.	*Training Laravel* Training Laravel	Berjasa Consulting	5
88.	*Training Leadership Batch I* Training Leadership Batch I	Econand	12
89.	*Training Leadership Batch II* Training Leadership Batch II	Econand	13
90.	*Training Leadership Pelaksana Batch 1* Training Leadership Pelaksana Batch 1	Econand	22
91.	*Training Leadership Pelaksana Batch 2* Training Leadership Pelaksana Batch 2	Econand	24
92.	Training Manajemen Portofolio Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Penjaminan Portfolio Management Training for Sharia Insurance Companies and Guarantee Companies	Ahli Asuransi Learning Center	4
93.	*Training Online Corporate Culture Specialist* Training Online Corporate Culture Specialist	ACT Consulting	1
94.	*Training Property All Risks Insurance Clauses* Training Property All Risks Insurance Clauses	Ahli Asuransi Learning Center	1
95.	*Training/Workshop* Asuransi Kredit & Asuransi Jiwa Kredit Credit Insurance Training/Workshop & Credit Life Insurance	Ahli Asuransi Learning Center	16
96.	Training/Workshop Personal Accident, Money and Fidelity Training/Workshop Personal Accident, Money and Fidelity	Ahli Asuransi Learning Center	1
97.	Undangan *Member Gathering* Rangkaian Milad ke-18 AASI "Bersama Memajukan Industri Asuransi Syariah di Indonesia" AASI 18th Anniversary Gathering Member Invitation "Together Advancing the Sharia Insurance Industry in Indonesia"	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia	1

No.	Program Pelatihan Training Program	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participant
98.	Undangan Peluncuran Infrastruktur Literasi Keuangan Invitation to Launch Financial Literacy Infrastructure	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	1
99.	*Using Artificial Intelligence (AI) to Detect and Prevent Claims Fraud* Using Artificial Intelligence (AI) to Detect and Prevent Claims Fraud	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	3
100.	*Virtual Seminar* Internasional: *Digital Transformation in Financial Industry* Virtual Seminar Internasional: Digital Transformation in Financial Industry	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)	2
101.	*Virtual Tutorial* Ujian Aktuaris (PIA) Modul F 33 Aspek Aktuaria dalam Asuransi Umum Virtual Tutorial on Actuary Exam (PIA) Module F 33 Actuarial Aspects in General Insurance	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	1
102.	*Webinar AAI Economic Outlook 2021* Webinar AAI Economic Outlook 2021	Asosiasi Auditor Internal	3
103.	*Webinar* AAUI: Implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dalam Era Digitalisasi AAUI Webinar: Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of the Financing of Terrorism (APU PPT) in the Era of Digitalization	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	2
104.	*Webinar CEAR (CAR & EAR) Coverage, Exclusion, Endorsements and Claim Adjustment (Section I, II and III)* Webinar CEAR (CAR & EAR) COVERAGE, EXCLUSION, ENDORSEMENTS AND CLAIM ADJUSTMENT (SECTION I, II AND III)	Ahli Asuransi Learning Center	3
105.	*Webinar Customs Bond* Webinar Customs Bond	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	1
106.	*Webinar* DRiM 2021 dengan tema *Waves of Change: Entering New Dynamics of Life Insurance* Webinar DRiM 2021 with the theme of Waves of Change: Entering New Dynamics of Life Insurance	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	3
107.	*Webinar Driving Effective Risk Management: From Strategy to Process* Webinar Driving Effective Risk Management: From Strategy to Process	GRC Management	6
108.	*Webinar GRC Series: Creating Opportunities Through Risk Management* Webinar GRC Series: Creating Opportunities Through Risk Management	GRC Management	1
109.	Webinar Kajian Risiko Kegempaan DKI Jakarta Tahap 2 – Segmen Karawang Webinar of DKI Jakarta Seismic Risk Assessment Phase 2 – Karawang Segment	PT Reasuransi MAIPARK Indonesia	2
110.	*Webinar Offshore Construction & Well Control Insurance (Oil & Gas) Intermediate to Advance Level* Webinar Offshore Construction & Well Control Insurance (Oil & Gas) Intermediate to Advance Level	Ahli Asuransi Learning Center	3
111.	*Webinar* Perkembangan Produk *Surety Bond* di Indonesia Webinar of Surety Bond Product Development ini Indonesia	Trinity Re	2
112.	*Webinar Series: Integrating Risk Management and Compliance* Webinar Series: Integrating Risk Management and Compliance	GRC Management	4
113.	*Webinar Stress Test and Impact For C-Level* Webinar Stress Test and Impact For C-Level	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	7
114.	*Why is it so difficult talking to people?* Why is it so difficult talking to people?	Persatuan Aktuaria Indonesia	1

No.	Program Pelatihan Training Program	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Total Participant
115.	Wisuda Gelar Profesional Asuransi XXIX XXIX Insurance Professional Degree Graduation	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)	3
116.	*Workshop "Indonesia National Anti Fraud Conference 2021"* Workshop "Indonesia National Anti Fraud Conference 2021"	Asia Anti Fraud	1
117.	*Workshop* Asuransi Kredit dan Penjaminan Kredit Credit Insurance and Credit Guarantee Workshop	Ahli Asuransi Learning Center	24
118.	*Workshop Business Intelligence Tableau* Workshop on Business Intelligence Tableau	PT Visidata Anugrah Mitra	1
119.	*Workshop Enterprise Risk Management (ERM)* Workshop Enterprise Risk Management (ERM)	PT RAP Asia Consulting	30
120.	*Workshop* Perhitungan Cadangan Teknis Asuransi Umum General Insurance Technical Reserve Calculation Workshop	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	1

Total investasi untuk pengembangan SDM pada tahun 2021 sebesar Rp2.612.350.837 atau sekitar 2,31% dari Beban Karyawan yang sebesar Rp112.901.354.718. Jumlah ini menurun 35,93% dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp4.077.266.530.

Rincian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, termasuk kursus dan seminar asuransi ataupun bidang lainnya yang diikuti oleh karyawan selama tahun 2021, sebagai berikut:

The total investment for HR development in 2021 is Rp2,612,350,837 or around 2.31% of the Employee Expenses which is Rp112,901,354,718. This amount decreased by 35.93% compared to the previous year, which was Rp4,077,266,530.

Details of Education and Training activities, including insurance courses and seminars or other fields attended by employees during 2021, are as follows:

Tabel Investasi Pengembangan SDM Tahun 2021

Table of HR Development Investment in 2021

Keterangan Description	2021	2020
Beban Pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris Employee, Board of Directors and Board of Commissioners Expenses	112.901.354.718	103.847.585.958
Beban Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Expenses	2.612.350.837	4.077.266.530
Jumlah **Total**	**115.513.705.555**	**107.924.852.488**
Persentase Realisasi **Realization Percentage**	**2,31%**	**3,93%**

Aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) dan Ketenagakerjaan

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3) AND EMPLOYMENT ASPECTS

Perusahaan menempatkan karyawan sebagai salah satu *stakeholders* utama di mana seiring tumbuh kembang usaha, Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman untuk seluruh karyawan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Perusahaan senantiasa menjaga terpenuhinya aspek-aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) dan Ketenagakerjaan di tempat kerja.

Inisiatif K3 meliputi antara lain pengelolaan SDM yang memperhatikan hak-hak karyawan seperti kebijakan SDM yang menjamin kesetaraan dan tidak adanya diskriminasi mulai dari proses rekrutmen, pengembangan hingga promosi dan paket kesejahteraan karyawan serta mekanisme hubungan industrial untuk mengakomodasi aspirasi seluruh karyawan.

The Company places employees as one of the main stakeholders where as the business grows and develops, the Company is committed to creating a conducive, safe and comfortable work environment for all employees. To realize this goal, the Company always maintains the fulfillment of aspects of Health, Safety (K3) and Employment in the workplace.

K3 initiatives include, among others, HR management that pays attention to employee rights such as HR policies that ensure equality and non-discrimination starting from the recruitment process, development to promotion and employee welfare packages as well as industrial relations mechanisms to accommodate the aspirations of all employees.

Pengembangan Karir dan Kesetaraan Kesempatan

Perusahaan mendukung pengembangan karir bagi seluruh karyawannya melalui pelaksanaan pelatihan khusus yang terencana. Selain itu, Perusahaan juga memberikan kesempatan dan kesamaan hak kepada seluruh karyawan, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik, sejak proses rekrutmen, maupun dalam program pengembangan kompetensi dan keahlian, serta penetapan jenjang karir dan remunerasi.

Proses evaluasi kinerja karyawan melalui beberapa tahapan yang antara lain terdiri dari:

1. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) perusahaan yang kemudian diturunkan masing-masing unit kerja untuk kemudian dibuat dalam *Performance Appraisal* (PA) masing-masing karyawan.

Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja adalah melakukan evaluasi terhadap pencapaian seluruh karyawan dan unit kerja untuk melakukan atau menyusun target-target di tahun selanjutnya.

Career Development and Equal Opportunity

The Company supports career development for all its employees through the implementation of planned special training. In addition, the Company also provides opportunities and equal rights to all employees, regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition, since the recruitment process, as well as in competency and skill development programs, as well as determining career paths and remuneration.

The employee performance evaluation process goes through several stages, which include:

1. Prepare the Company's Long Term Plan (RJPP) for a period of 5 (five) years.
2. Prepare the Company's Budget Work Plan (RKAP) for a period of 1 (one) year.
3. Develop the company's Key Performance Indicators (KPI), which are then derived by each work unit to be then made into the Performance Appraisal (PA) of each employee.

The follow-up to the results of the performance evaluation is to evaluate the achievements of all employees and work units to carry out or set targets for the following year.

Pada tahun 2021, terdapat mutasi serta promosi sebagai berikut:

In 2021, there were mutations and promotions as follows:

Tabel Promosi Rotasi/Mutasi Pegawai Tahun 2021

Table of Employee Rotation/Mutation Promotion for 2021

No.	Keterangan Description	2021
1.	Promosi Promotion	19
2.	Mutasi Mutation	30
3.	Rotasi Rotation	6
TOTAL		**55**

Strategi Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

Dalam menyusun strategi remunerasi, Perusahaan mempertimbangkan berbagai hal di antaranya kinerja karyawan. Dengan menerapkan strategi remunerasi berbasis kinerja, Perusahaan mampu meningkatkan produktivitas, menjaga pertumbuhan, dan memperkuat posisinya di tengah persaingan usaha. Strategi ini juga diterapkan untuk mempertahankan karyawan-karyawan terbaik yang dimiliki Perusahaan.

Remunerasi di Perusahaan dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, dan lain sebagainya. Remunerasi juga terkait dengan kesejahteraan karyawan dan bagi Perusahaan ini merupakan hal yang esensial dalam pengembangan SDM. Perusahaan memberikan perhatian khusus dalam masalah kesejahteraan karyawan serta terus melakukan peningkatan dari tahun ke tahun.

Peningkatan terhadap fasilitas kesehatan yang diterima oleh seluruh karyawan maupun Direksi yaitu:

1. Mengikutsertakan pada Asuransi Kesehatan Program BPJS Kesehatan dari Pemerintah
2. Mengikutsertakan pada Asuransi Kesehatan Komersial yaitu, AXA Financial Indonesia baik program rawat inap maupun rawat jalan

Employee Remunerationand Welfare Strategy

In preparing the remuneration strategy, the Company considers various things, including employee performance. By implementing a performance-based remuneration strategy, the Company is able to increase productivity, maintain growth, and strengthen its position in the midst of business competition. This strategy is also applied to retain the best employees of the Company.

Remuneration in the Company can be in the form of salary, fixed allowances, honorarium, and so on. Remuneration is also related to employee welfare and for the Company this is an essential thing in HR development. The Company pays special attention to employee welfare issues and continues to make improvements from year to year.

Improvements to health facilities received by all employees and the Board of Directors, namely:

1. Participate in Health Insurance BPJS Health Program from the Government
2. Participate in Commercial Health Insurance, namely, AXA Financial Indonesia, both inpatient and outpatient programs

3. Mengikutsertakan pada Asuransi Jiwa BNI untuk program *General Term Life*. Selain itu, hak yang diterima oleh karyawan tetap dan kontrak Perseroan dapat dilihat melalui tabel berikut:

3. Participating in BNI Life Insurance for the General Term Life program. In addition, the rights received by permanent and contract employees of the Company can be seen in the following table:

Tunjangan Pegawai Tetap Permanent Employee Benefits	Tunjangan Pegawai Kontrak Contract Employee Benefits
■ Tunjangan Kesehatan / Health Allowance ■ Tunjangan Asuransi Jiwa / Life Insurance Benefits ■ Tunjangan Hari Raya / Religious Feast Allowance ■ Tunjangan Hari Tua (THT) / Pensiun / Retirement / Pension Benefit (THT) ■ Tunjangan Cuti / Leaves Allowance ■ Tunjangan Pakaian / Uniform Allowance ■ Tunjangan Pendidikan / Education Allowances ■ Tunjangan Merit Prestasi / Merit Achievement Allowances ■ Jasa Produksi dan Insentif / Production Bonus and Incentives	■ Tunjangan Kesehatan / Health Allowance ■ Tunjangan Asuransi Jiwa / Life Insurance Benefits ■ Tunjangan Cuti (setelah masa kerja 1 (satu) tahun) / Leaves Allowance (after 1 (one) year work period) ■ Tunjangan Hari Raya / Religious Feast Allowance

Turnover Karyawan

Dalam beberapa tahun terakhir, NASIONAL RE terus mencatat tingkat *turnover* karyawan yang rendah, mencerminkan tingginya tingkat kepuasan karyawan.

Pada tahun 2021, Perseroan mencatat hanya ada 4 karyawan yang berhenti bekerja, setara dengan tingkat *turnover* sebesar 1,82%.

Perbandingan tingkat *turnover* karyawan tahun 2020 dan 2021, sebagai berikut:

Employee Turnover

In the last few years, NASIONAL RE continues to record a low employee turnover rate, reflecting a high level of employee satisfaction.

In 2021, the Company recorded that there were only 4 employees who resigned, equivalent to a turnover rate of 1.82%.

Below is the comparison of employee turnover rates in 2020 and 2021:

Keterangan Description	2021	2020
Jumlah Karyawan Keluar Number of Employee Resigned	4 orang I people	2 orang I people
Tingkat *Turnover* Turnover Rate	1,82%	0,94%

Pengelolaan Hubungan Industrial

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa NASIONAL RE mendukung pembentukan Serikat Pekerja sebagai organisasi yang fungsinya menjembatani antara karyawan

Industrial Relations Management

In accordance with the provisions of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, that NASIONAL RE supports the formation of Labor Unions as an organization whose function is to bridge between employees and the Company. The

dengan Perseroan. Kepengurusan Serikat Pekerja NASIONAL RE adalah sebagai berikut:

Nama Serikat Pekerja:
SP NASIONAL RE

Alamat Serikat Pekerja:
Jl. Cikini Raya No.99 Menteng, Jakarta Pusat

Ketua Serikat Pekerja:
Anggoro Budi Santoso

Sekretaris:
Sapto Dewo

Pertemuan antara wakil manajemen dan Serikat Pekerja (SP) pada tahun 2021 dilaksanakan di gedung NASIONAL RE dengan agenda perubahan atau *update* Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta hal-hal lain yang relevan dengan isu ketenagakerjaan. Tidak tercatat ada perselisihan ketenagakerjaan pada tahun 2021.

management of the NASIONAL RE Trade Union is as follows:

Trade Union Name :
SP NASIONAL RE

Trade Union Address :
Jl. Cikini Raya No.99 Menteng, Central Jakarta

Chairman of the Trade Union:
Anggoro Budi Santoso

Secretary :
Sapto Dewo

The meeting between management representatives and the Labor Union (SP) in 2021 was held at the NASIONAL RE building with an agenda for changing or updating the Collective Labor Agreement (PKB), as well as other matters relevant to employment issues. There were no recorded employment disputes occurred in 2021.

Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

Dewasa ini, berbagai perusahaan papan atas, di level global dan Indonesia, telah bergeser menuju *Digital Enterprise*. Sementara itu, terjadi perubahan perilaku nasabah, baik nasabah individual maupun korporasi, dimana pergeseran *knowledge* dan berbagai layanan menuju bentuk *online*, mengakibatkan *"The Death of Expertise"*. Secara mudahnya, *the Death of Expertise* dapat digambarkan sebagai situasi dimana masyarakat atau nasabah memiliki bias konfirmasi, yaitu cenderung hanya menerima bukti yang mendukung hal yang sudah mereka percayai. Mereka lebih mencari konfirmasi ketimbang informasi.

Today, various top companies, at the global and Indonesian levels, have shifted towards Digital Enterprise. Meanwhile, there has been a change in customer behavior, both individual and corporate customers, where the shift in knowledge and various services to an online form has resulted in "The Death of Expertise". Simply put, the Death of Expertise can be described as a situation where the public or customers have a confirmation bias, which tends to only accept evidence that supports what they already believe. They seek confirmation rather than information.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi semakin cepat dan menimbulkan disrupsi yang berpotensi mengganggu jalannya perusahaan bila tidak diantisipasi atau dikelola dengan baik. Terlebih, di saat industri memasuki era revolusi industri 4.0 dimana semua perusahaan dituntut memiliki kesiapan teknologi dan juga sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sebagai bagian dari upaya mendorong daya saing perusahaan.

In addition, the development of information and communication technology is happening so fast that it creates potential disruption to the running of the Company unless it has been anticipated or managed properly. Moreover, as the industry enters the era of the industrial revolution 4.0, all companies are required to have technological readiness as well as competent human resources (HR) as part of efforts to encourage company competitiveness.

Oleh sebab itu, seiring dengan perkembangan zaman, NASIONAL RE harus terus mengembangkan dan memperkuat infrastruktur Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang dimilikinya.

Therefore, along with the course of times, NASIONAL RE has to continuously developing and strengthen its Information & Communication Technology (ICT) infrastructure.

Fokus bisnis PT Reasuransi Nasional Indonesia saat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh sebab itu, Divisi TIK diharapkan menjadi tulang punggung dalam mendukung proses bisnis. Selain itu, penerapan *Data Analytic* diharapkan menjadi penunjang penyediaan informasi untuk perencanaan, pengambilan keputusan strategis, dan inovasi bisnis ke depan.

The current business focus of PT Reasuransi Nasional Indonesia is to meet domestic needs. For this reason, the ICT Division is expected to be the backbone in supporting business processes. In addition, the implementation of Data Analytic is expected to support the provision of information for planning, strategic decision making, and future business innovation.

Ketergantungan pada pihak ketiga harus dihindari dalam penerapan teknologi. Penggunaan teknologi *cloud* dimungkinkan untuk diterapkan di perusahaan, dengan mempertimbangkan *cost-benefit analysis.*

Reliance on three parties should be avoided in implementing the technology. The use of cloud technology is possible to be applied in the company, taking into account the cost-benefit analysis.

Perkembangan dan pertumbuhan PT Reasuransi Nasional Indonesia saat ini diikuti pula oleh pertumbuhan jumlah karyawan. Penerapan teknologi diharapkan mempermudah proses bisnis dan dapat mengoptimalkan SDM yang ada.

The development and growth of PT Reasuransi Nasional Indonesia is currently being followed by a growth in the number of employees. The application of technology is expected to simplify business processes and optimize existing human resources.

Pada tahun 2021, pengembangan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) di Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan strategi Perusahaan, *roadmap* Teknologi Informasi &

In 2021, the development of Information & Communication Technology (ICT) in the Company is carried out in accordance with the Company's strategy, Information & Communication

Komunikasi (TIK) serta arsitektur data, aplikasi dan jaringan yang dirancang untuk mendukung pencapaian target kinerja usaha dan operasional Perusahaan.

Technology (ICT) roadmap and data, application and network architecture designed to support the achievement of the Company's business and operational performance targets.

Strategi Pengelolaan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)

Di tengah *disruptive era*, Perusahaan telah merancang strategi yang berfokus pada digitalisasi Proses Bisnis perusahaan (e-nasionalre). Strategi digitalisasi proses bisnis perusahaan (e-nasionalre) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Integrated Financial Management System*, yakni sistem penganggaran dan akuntansi berbasis TI yang mengelola pengeluaran, pemrosesan pembayaran, penganggaran dan pelaporan untuk pemerintah dan entitas lainnya menjadi sistem terintegrasi.
2. *Digital Office Management System & Cloud Integration* yakni sistem digitalisasi yang memungkinkan proses alur kerja dilakukan secara digital *(paperless)* dan terintegrasi dengan teknologi *cloud*.
3. *Business Intelligent System (Big Data Analytic)* terintegrasi dengan *Customer Relationship Management*.
4. Pengembangan B2B *e-commerce platform*.

Information & Communication Technology (ICT) Management Strategy

In the midst of the disruptive era, the Company has designed a strategy that focuses on digitizing the company's Business Processes (e-nasionalre). The company's business process digitization strategy (e-nasionalre) can be explained as follows:

1. Integrated Financial Management System, namely an IT-based accounting and budgeting system that manages expenditures, payment processing, budgeting and reporting for the government and other entities into an integrated system.
2. Digital Office Management System & Cloud Integration, namely a digitization system that allows workflow processes to be carried out digitally (paperless) and integrated with cloud technology.
3. Business Intelligent System (Big Data Analytic) integrated with Customer Relationship Management.
4. Development of B2B e-commerce platforms

1st	2nd	3rd	4th
Mechanization, Water Power, Steam Power	*Mass Production, Assembly Line, Electricity*	*Computer and Automation*	*Cyber Physical Systems*

Roadmap Teknologi Informasi & Komunikasi

Roadmap Teknologi Informasi & Komunikasi sebagian besar mencakup kegiatan pengadaan. Kegiatan ini disesuaikan dengan rencana kerja anggaran perusahaan. Rincian *Roadmap* Teknologi Informasi & Komunikasi pada tahun 2021 dijelaskan dalam tabel berikut:

Information & Communication Technology Roadmap

The Information & Communication Technology Roadmap mostly covers procurement activities. This activity is adjusted to the company's budget work plan. Details of the Information & Communication Technology Roadmap in 2021 are described in the following table:

No	Kode	Item Investasi Investment Items	Road Map 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	HP1	Kajian Kebutuhan ICT terkait *spin-off* Divisi Reasuransi Syariah / Study on ICT Needs related to the spin-off of the Sharia Reinsurance Division					
2	SP20	Kajian Penggunaan *Corporate Email* untuk Seluruh Unit Bisnis / Study on the Use of Corporate Email for All Business Units					

No	Kode	Item Investasi Investment Items	Road Map 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	SP21	Kajian Persetujuan Digital Terkait Rekrutmen / Study on Digital Approval Regarding Recruitment					
4	HP2	Pembangunan Kompetensi *Big Data* menggunakan *Cloud Services* / Building Big Data Competency using Cloud Services					
5	HP3	Pembangunan *platform* penyimpanan *Big Data (Data Lake)* dan *Big Data Analytic* yang *scalable* / Building scalable Big Data (Data Lake) and Big Data Analytic storage platform					
6	HP4	Pengembangan skala *platform Big Data* sesuai kebutuhan / Big Data platform scale development as needed					
7	HP5	Penyempurnaan BI / BI Improvements					
8	KO1	Pengembangan Aplikasi Analisis Statistik / Statistical Analysis Application Development					
9	KO2	Pengembangan Aplikasi Valuasi dan *Pricing* / Valuation and Pricing Application Development					
10	KO3	Pengembangan Aplikasi Virtualiasasi Transaksi Investasi / Investment Transaction Virtualization Application Development					
11	KO4	Pengembangan Modul *Health Insurance* / Health Insurance Module Development					
12	KO5	Pengembangan *Tools Update Market Price* Investasi / Development of Investment Market Price Update Tools					
13	KO6	Penyempurnaan Modul Fakultatif / *Reengineering* fakultatif / Completion of the Facultative Module / Facultative Reengineering					
14	KO7	Penyempurnaan Modul Syariah / Completion of the Sharia Module					
15	KO8	Penyempurnaan SIAK / Completion of SIAK					
16	KO9	Penyempurnaan SKT / SKT Refinement					
17	KO10	Pengembangan Aplikasi *Mobile* / Mobile Application Development					
18	ST4	Pengembangan H2H/ H2H Development					
19	ST1	Pengembangan *E-Claim* / E-Claim Development					
20	ST2	Pengembangan *E-Golf* / E-Golf Development					
21	ST3	Pengembangan Layanan Portal / Portal Service Development					
22	SP1	Pengembangan Aplikasi Divisi Keuangan dan Akuntansi / Application Development for Finance and Accounting Division					
23	SP2	Pengembangan Aplikasi Divisi Sekretariat Perusahaan / Corporate Secretariat Division Application Development					
24	SP3	Pengembangan *Dashboard / Monitoring System* / Dashboard / Monitoring System Development					
25	SP4	Pengembangan *Early Warning System* / Early Warning System Development					
26	SP5	Pengembangan *E-Learning* / E-Learning Development					
27	SP6	Pengembangan *E-Proc* / E-Proc Development					
28	SP7	Penyempurnaan Aplikasi HRIS / HRIS App Improvements					
29	SP8	Pengembangan HRIS *Mobile* / HRIS Mobile Development					

No	Kode	Item Investasi Investment Items	Road Map 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
30	SP9	Pengembangan SSO / SSO Development					
31	SP10	Pengembangan *Tools* Analisis/Penilaian *Maturity* Level Manajemen Risiko / Development of Analysis/Assessment Tools Maturity Level Risk Management					
32	SP11	Pengembangan *Tools Assessment* GCG dan KPKU / Development of GCG and KPKU Assessment Tools					
33	SP12	Pengembangan *Tools* Realisasi Anggaran / Development of Budget Realization Tools					
34	SP13	Pengembangan *Tools Risk Based Internal Audit* (RBIA) / Development of Risk Based Internal Audit (RBIA) Tools					
35	SP14	Penyempurnaan DMS / DMS improvements					
36	SP15	Penyempurnaan Layanan *Email* / Email Service Improvements					
37	SP16	Penyempurnaan Modul SDM / HR Module Improvements					
38	SP17	Penyempurnaan Modul TDSS / TDSS Module Improvements					
39	SP18	Penyempurnaan Upload Bordeaux / Bordeaux Upload Improvements					
40	SP19	Pelaksanaan Integrasi Database / Implementation of Database Integration					
41	ST14	Pengembangan Aplikasi CRM / CRM Application Development					
42	KO21	Kajian Penerapan IFRS / IFRS Application Study					
43	ST6	Penyusunan *IT Strategic Plan NASIONAL RE* / Preparation of the IT Strategic Plan of National Re					
44	ST7	Pembaharuan Tahunan ITEA *(IT Enterprise Architecture)* / ITEA Annual Update (IT Enterprise Architecture)					
45	KO11	Penyusunan *IT Process Framework* / Preparation of IT Process Framework					
46	ST8	Implementasi QMS / QMS Implementation					
47	ST9	Penyempurnaan Kebijakan *Change Management* / Change Management Policy Improvement					
48	ST10	Penyempurnaan Kebijakan Service *Level Aggreement* / Service Level Agreement Policy Improvement					
49	KO12	Penyusunan dan Implementasi *Project Management* / Preparation and Implementation of Project Management					
50	KO13	Penyusunan Data *Management* / Preparation of Data Management					
51	ST11	Penyusunan *IT Risk Management* / Preparation of IT Risk Management					
52	KO14	*Update* DRP / DRP updates					
53	SP22	Penyusunan Dokumen *Problem Management* / Preparation of Problem Management Document					
54	SP23	Penyusunan Dokumentasi Penyelesaian *Problem* / Preparation of Problem Solving Documentation					
55	KO15	Penyusunan Metodologi SDLC / SDLC Methodology Development					
56	SP24	Penyusunan *Business Specification Design* (BSD) dan *Technical Specification Design* (TSD) / Preparation of Business Specification Design (BSD) and Technical Specification Design (TSD)					
57	ST12	Penyusunan Kebijakan Standar Dokumentasi TI / IT Documentation Standard Policy Development					

No	Kode	Item Investasi Investment Items	Road Map 2019-2023				
			2019	2020	2021	2022	2023
58	SP25	Penyempurnaan Dokumen Teknis, Operasi dan Penggunaan / Technical Document Improvement, Operation and Usage	■	■	■	■	■
59	SP26	Penyempurnaan Dokumentasi Aplikasi / Improvement of App Documentation	■	■	■	■	■
60	SP27	Pelaksanaan *Review* Konfigurasi / Reviewing the Configuration	■	■	■	■	■
61	SP28	Peningkatan Infrastruktur DC / DC Infrastructure Upgrading			■		
62	ST13	Penyusunan Kebijakan terkait Pelatihan *User* / Policy Development related to User Training		■		■	
63	SP29	Pelaksanaan *Review* Materi Pelatihan / Reviewing Training Material		■	■	■	■
64	SP30	*IT Awareness* / IT Awareness		■	■	■	■
65	ST5	Penyusunan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (Personil) IT / Formulation of IT Personnel Management Policy			■		
66	KO16	Penyempurnaan *Jobdesk* Divisi TIK / Completion of Jobdesc ICT Division			■		
67	KO17	Penyempurnaan SOP TIK / Improvement of ICT SOP			■		
68	SP31	Penilaian Tahunan Kompetensi Personil Divisi TIK / Annual Assessment of Competency of ICT Division Personnel	■	■	■	■	■
69	SP32	Pelaksanaan Studi Banding / *Benchmarking* / Implementation of Benchmarking			■		■
70	SP33	Peningkatan Kompetensi SDM TIK / Improving the Competency of ICT HR	■	■	■	■	■
71	KO18	Pelaksanaan Pengukuran Tahunan Kinerja IT / Implementation of Annual IT Performance Measurement	■	■	■	■	■
72	KO19	Penyusunan dan *Update Capacity Planning* Perangkat IT / Preparation and Update of IT Device Capacity Planning	■	■	■	■	■
73	KO20	Pelaksanaan *Penetration Testing* / Implementation of Penetration Testing	■	■	■	■	■
74	SP34	Pelaksanaan Asessmen Tata Kelola IT / Implementation of IT Governance Assessment		■			■
75	SP35	Virtualisasi *Server* / Server Virtualization	■				■

ARSITEKTUR DATA *BASELINE*
DATA BASELINE ARCHITECTURE

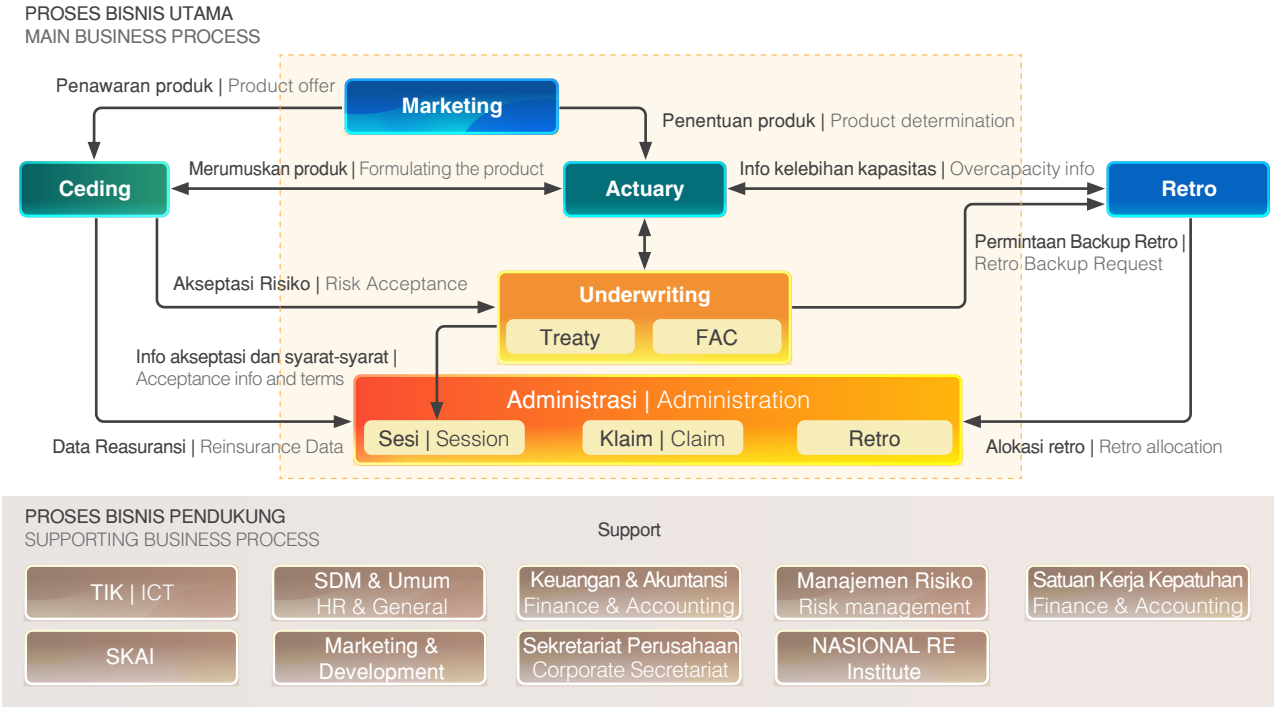

ARSITEKTUR DATA TARGET
TARGET DATA ARCHITECTURE

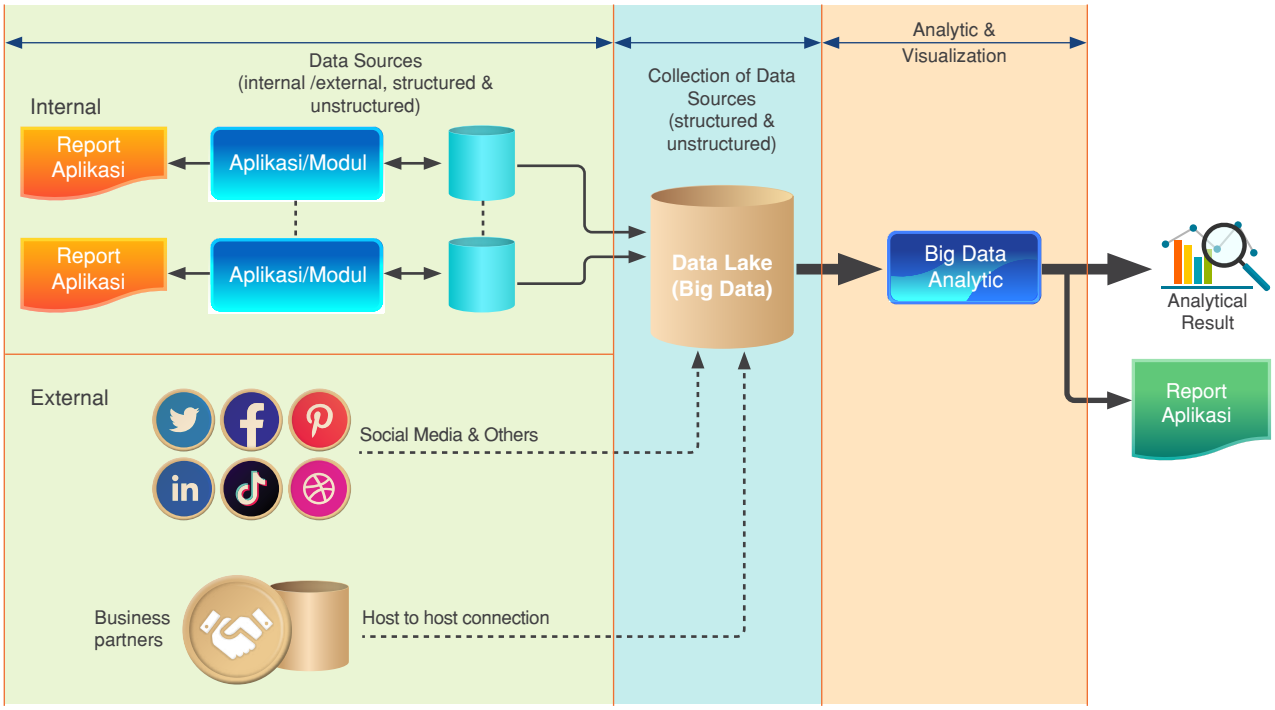

ARSITEKTUR APLIKASI *BASELINE*
BASELINE APPLICATION ARCHITECTURE

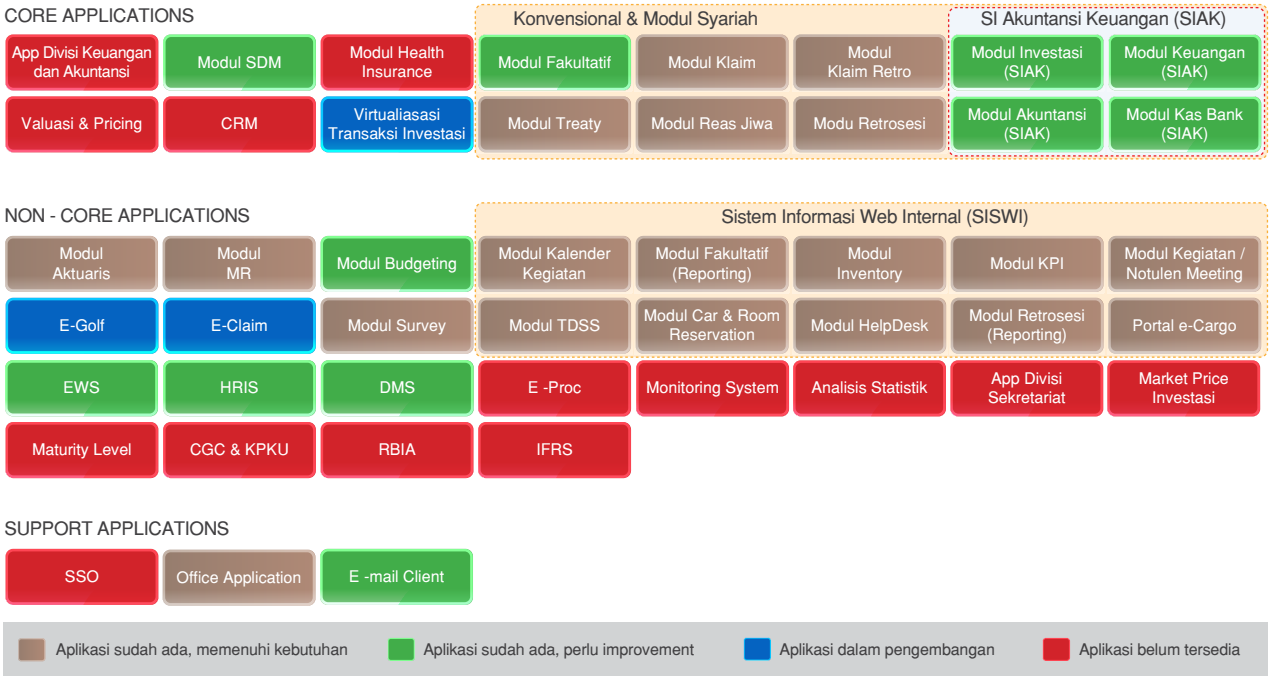

ARSITEKTUR APLIKASI TARGET
TARGET APPLICATION ARCHITECTURE

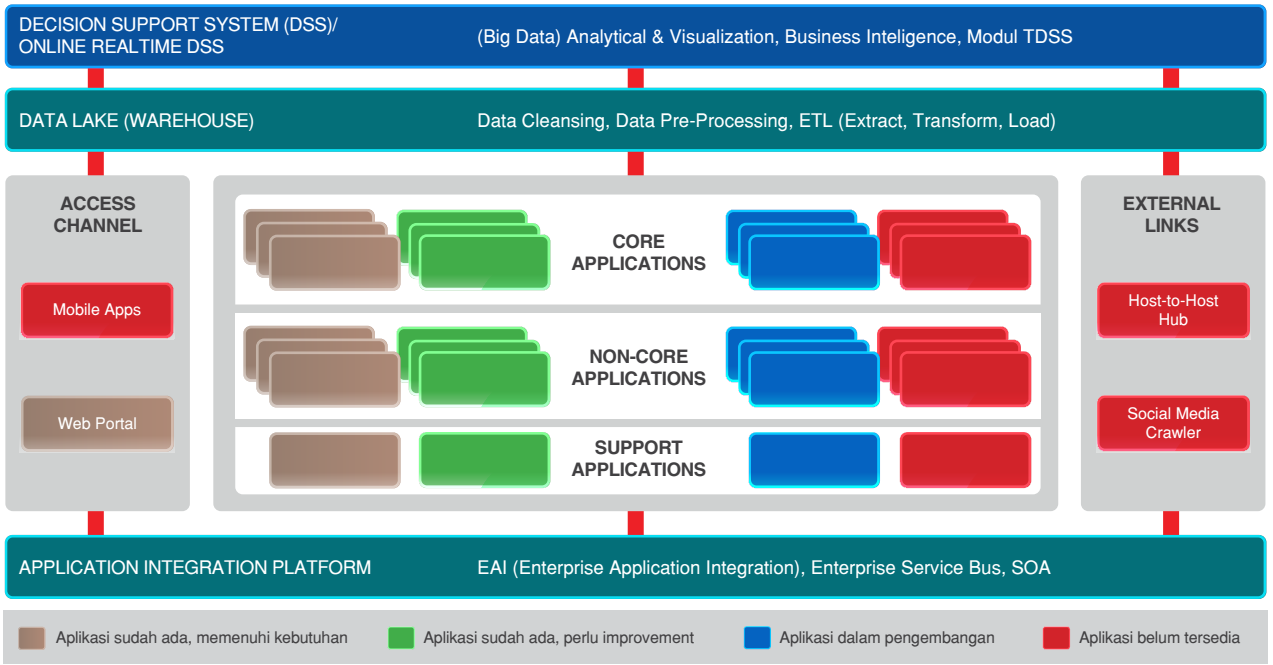

ARSITEKTUR DATA CENTER TARGET
TARGET DATA CENTER ARCHITECTURE

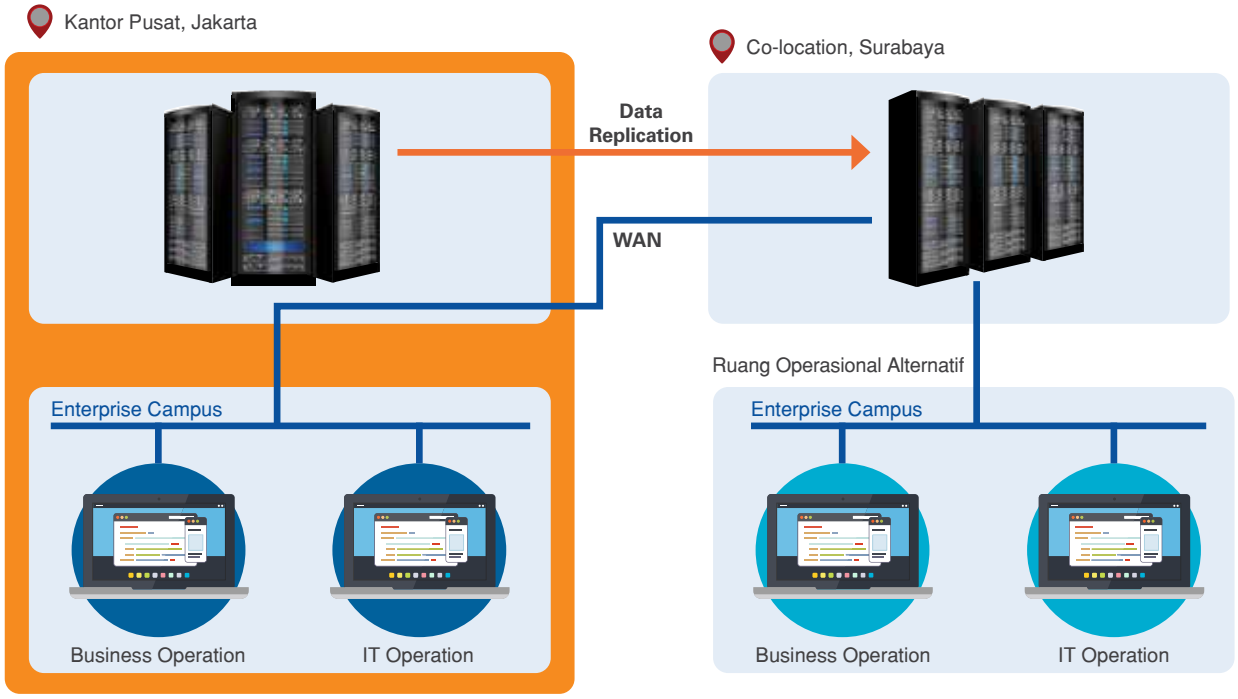

ARSITEKTUR NETWORK TARGET
TARGET NETWORK ARCHITECTURE

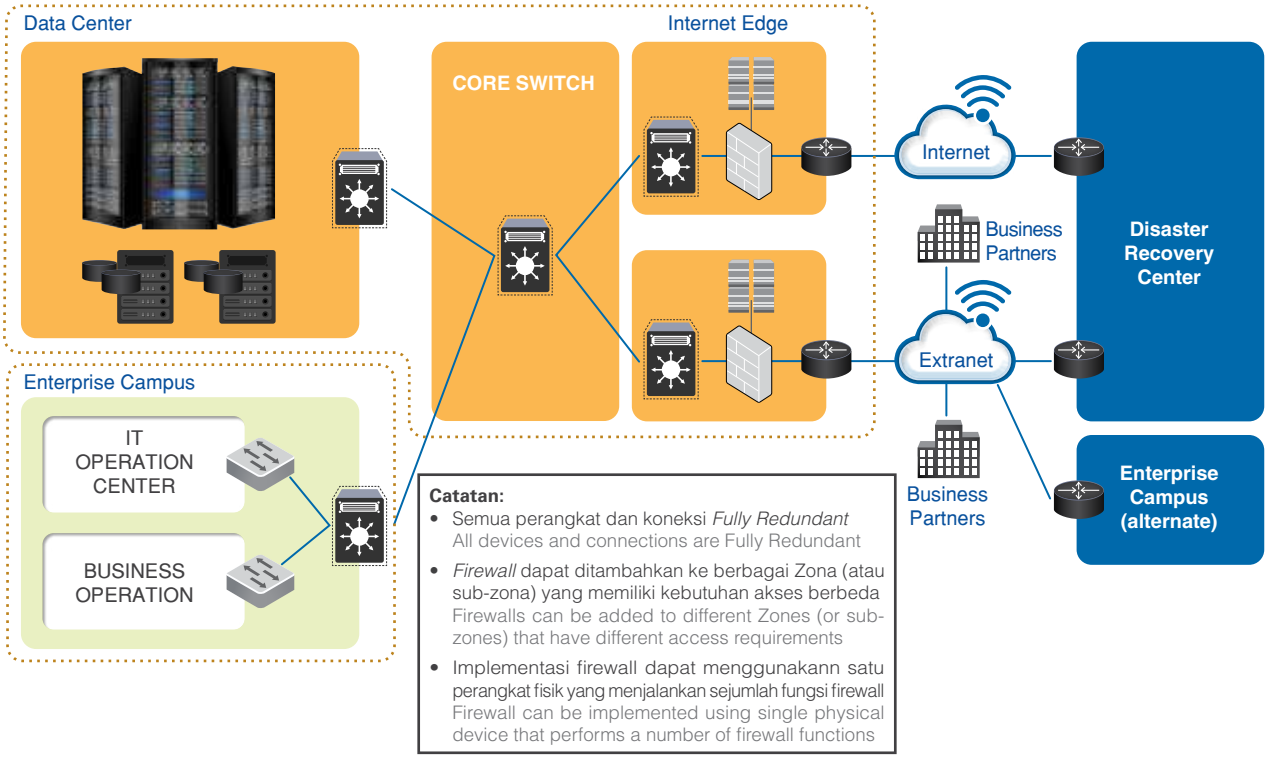

Catatan:
- Semua perangkat dan koneksi *Fully Redundant*
  All devices and connections are Fully Redundant
- *Firewall* dapat ditambahkan ke berbagai Zona (atau sub-zona) yang memiliki kebutuhan akses berbeda
  Firewalls can be added to different Zones (or sub-zones) that have different access requirements
- Implementasi firewall dapat menggunakann satu perangkat fisik yang menjalankan sejumlah fungsi firewall
  Firewall can be implemented using single physical device that performs a number of firewall functions

ARSITEKTUR SERVER DAN STORAGE TARGET 1
SERVER ARCHITECTURE AND STORAGE TARGET 1

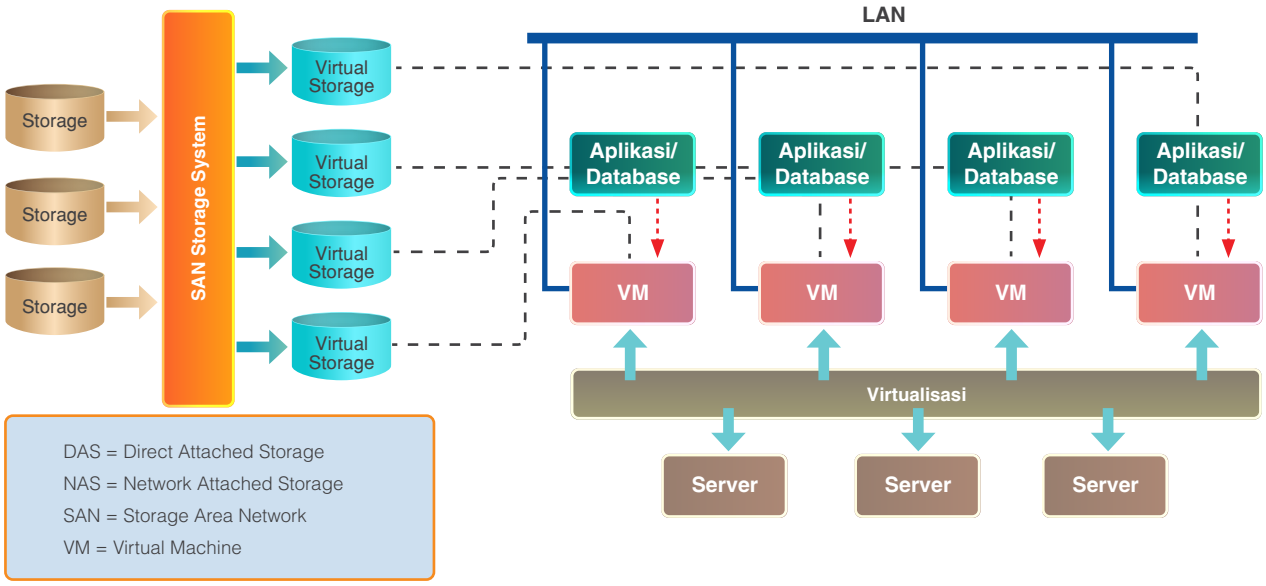

ARSITEKTUR SERVER DAN *STORAGE TARGET* 2
SERVER ARCHITECTURE AND STORAGE TARGET 2

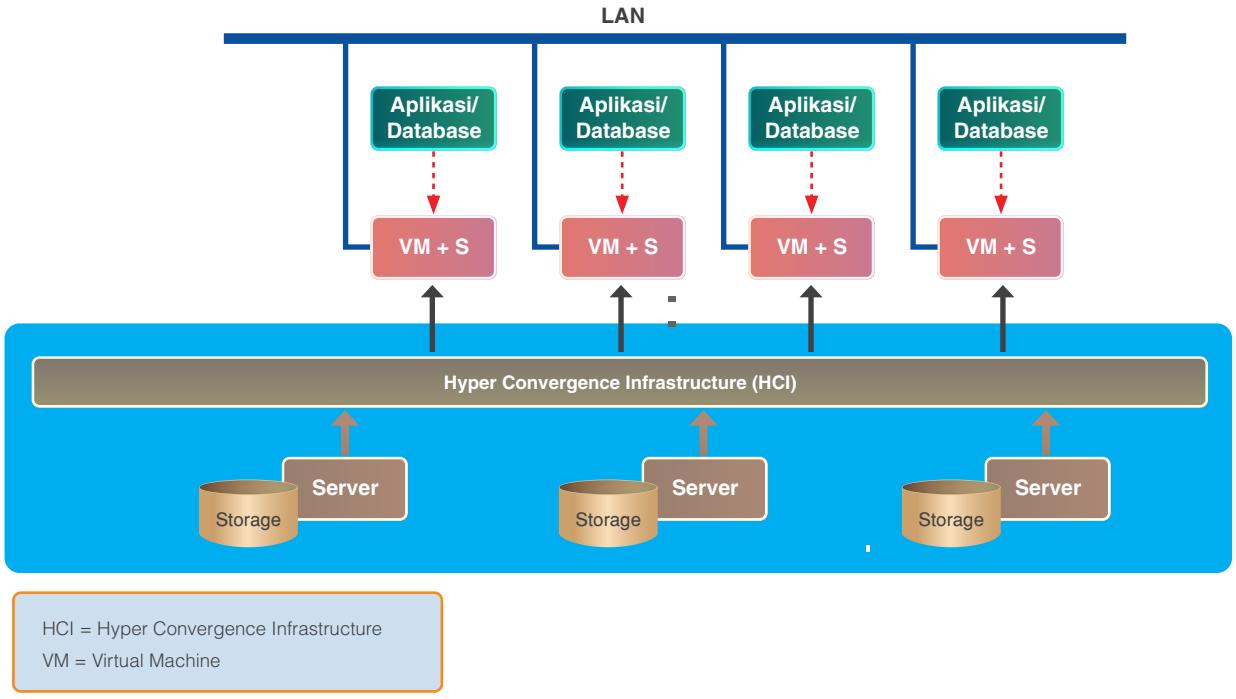

STRATEGI MIGRASI
MIGRATION STRATEGY

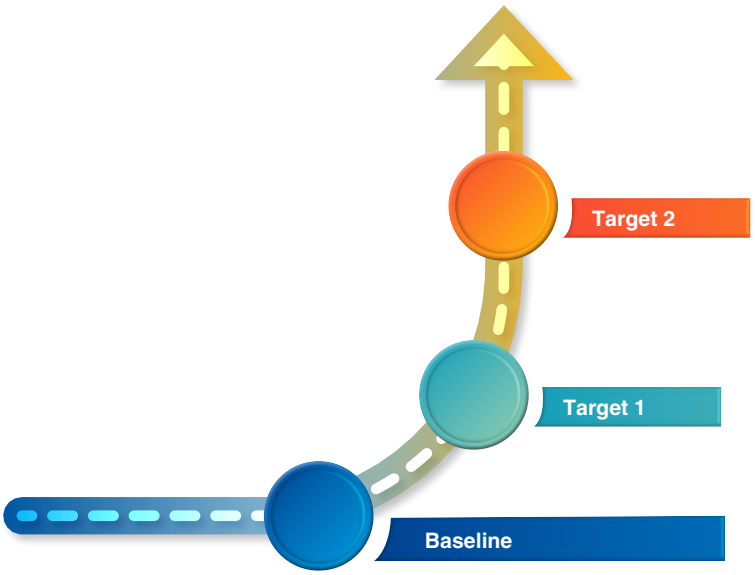

ARSITEKTUR DMBS TARGET
DBMS TARGET ARCHITECTURE

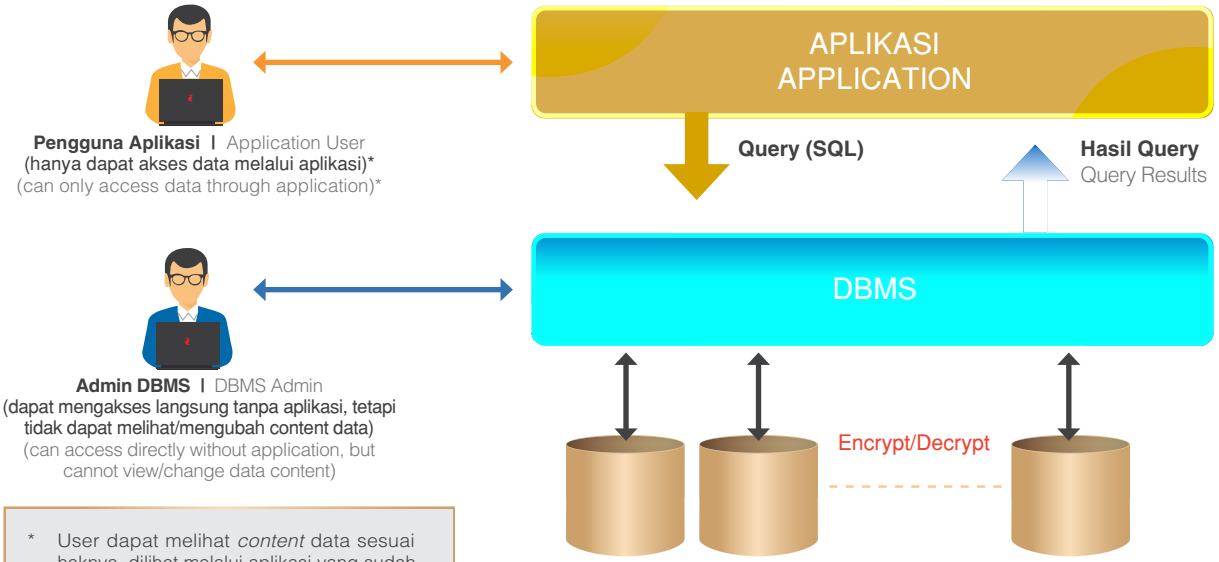

* User dapat melihat *content* data sesuai haknya, dilihat melalui aplikasi yang sudah diatur akses kontrolnya
* Users can view data content according to their rights, view through applications whose access control has been set

ARSITEKTUR KEAMANAN TI
IT SECURITY ARCHITECTURE

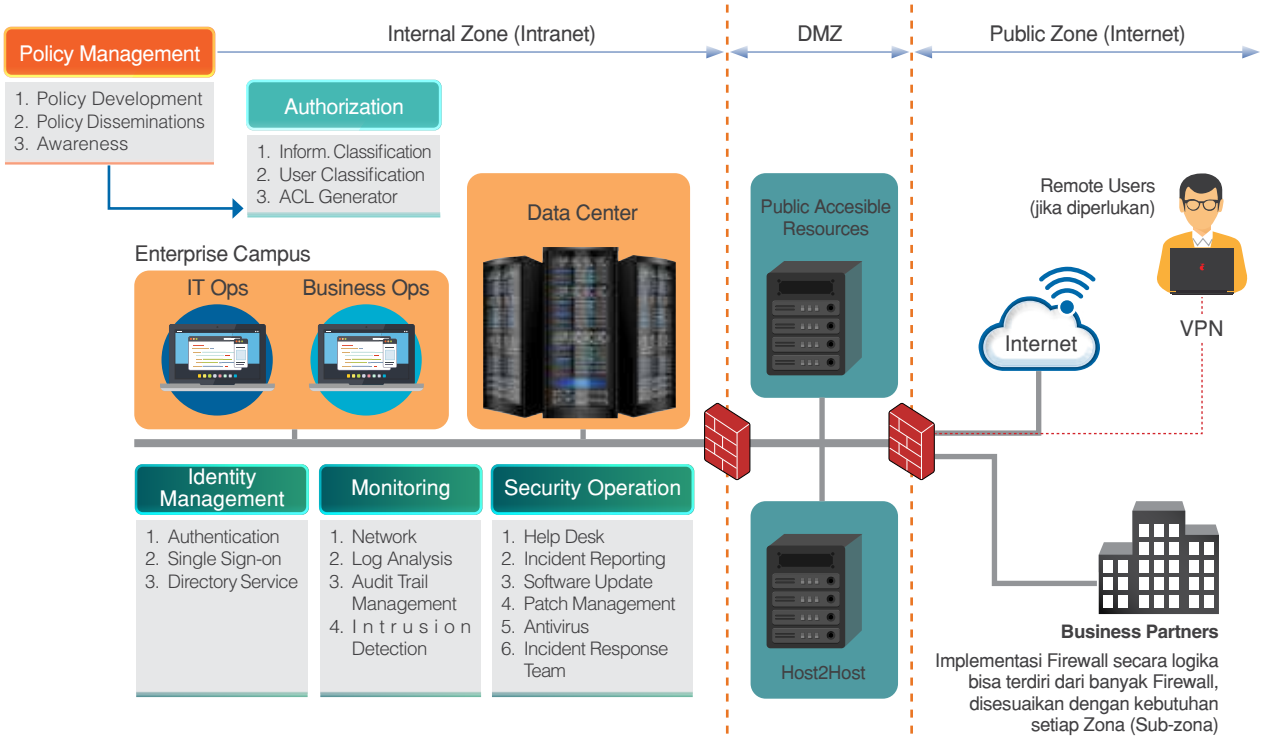

MANAJEMEN SISTEM KEAMANAN INFORMASI
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

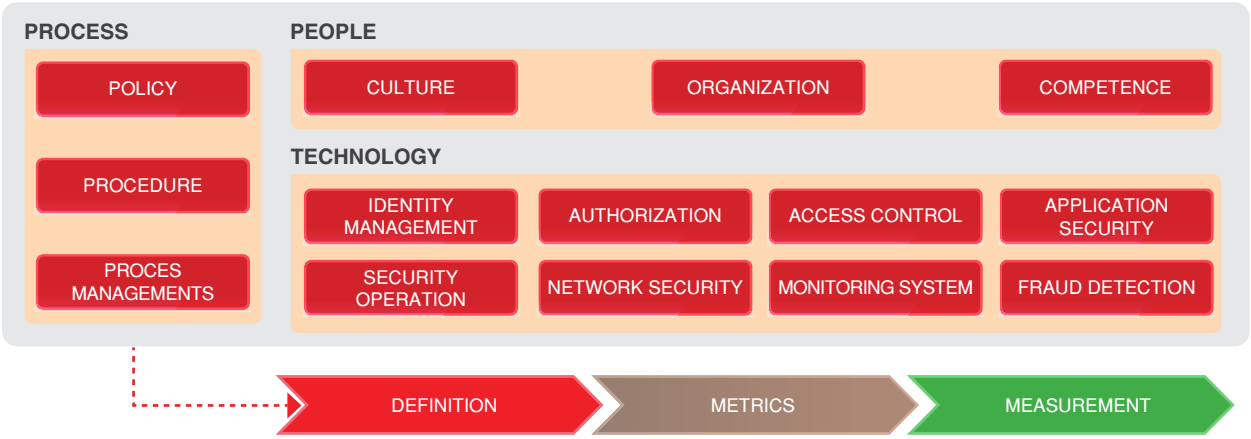

NASIONAL RE
Reinsurance

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komitmen Perusahaan

THE COMPANY'S COMMITMENT

Bagi Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berkomitmen untuk merancang dan menerapkan praktik tata kelola untuk memastikan bahwa Perusahaan dikelola dengan standar integritas tinggi untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang dan turut mengembangkan pasar asuransi yang sehat.

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi perusahaan reasuransi yang Tepercaya *(Trust)*, Tangguh *(Strength)* dan Terus Tumbuh *(Growth)*, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek usahanya, antara lain dengan jalan:

1. Melaksanakan setiap transaksional dan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
2. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Pedoman *Good Corporate Governance*, *Board Policy Manual*, Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja dan pedoman pendukung lainnya secara konsisten dan dengan penuh tanggung jawab;
4. Melaksanakan sosialisasi prinsip-prinsip GCG bagi seluruh karyawan;
5. Menerapkan Laporan Manajemen dan Laporan Keuangan perusahaan secara transparan, akurat dan tepat waktu;
6. Memastikan terpenuhinya kewajiban transparasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Memberikan keteladanan dalam penerapan etika bisnis yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Kecurangan *(Fraud)*.

For the Company, the implementation of good corporate governance is a form of its commitment to stakeholders. For this reason, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are committed to designing and implementing governance practices to ensure that the Company is managed with high integrity in order to maximize shareholder values in the long run and develop a sound the insurance market.

In order to realize the vision of becoming a reinsurance company that is Trusted, Resilient (Strength) and continues to grow (Growth), the Company is committed to implementing GCG principles in every aspect of its business, including by:

1. Carry out every transaction and decision making based on the principles of Good Corporate Governance (GCG);
2. Complying with the applicable laws and regulations;
3. Carrying out duties and responsibilities in accordance with the Good Corporate Governance Guidelines, Board Policy Manual, Business Ethics & Work Ethics Guidelines and other supporting guidelines consistently and with full responsibility;
4. Conducting socialization of GCG principles for all employees;
5. Implementing the Company's Management reports and Financial Statements in a transparent, accurate and timely manner;
6. Ensuring the fulfilment of other transparency obligations in accordance with applicable laws and regulations; and
7. Providing example in the application of business ethics that is free from the practice of Corruption, Collusion, Nepotism and Fraud.

Roadmap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

ROADMAP OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Bagi Perusahaan, penerapan GCG bukan hanya sekadar bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi Perusahaan demi mewujudkan keberlangsungan usaha. Untuk itu, Perusahaan telah menyusun *roadmap* penerapan GCG.

Penyusunan *roadmap* penerapan GCG ini diharapkan akan menguatkan komitmen Manajemen dalam penerapan GCG secara konsisten dan terukur. Selain itu, dengan adanya *roadmap* ini Perusahaan dapat terus menyempurnakan *soft structure* GCG sesuai dengan perkembangan usahanya. Penyempurnaan *soft structure* ini diyakini akan meningkatkan tanggung jawab manajemen dalam menjaga segenap kepentingan *stakeholders*.

At the Company, the implementation of GCG is not only a form of compliance with regulations, but also a requirement that must be met by the Company in order to realize business continuity. For this reason, the Company has prepared a roadmap for the implementation of GCG.

The preparation of the GCG implementation roadmap is expected to strengthen Management's commitment to have a consistent and measurable GCG implementation. In addition, with this roadmap, the Company can continue to improve the GCG soft structure in accordance with the Company's business development. The Company believes that the improvement of the soft structure will increase management's responsibility in safeguarding the interests of all stakeholders.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

Dalam industri reasuransi, tata kelola perusahaan yang baik merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan pemegang saham dan *ceding company*. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik kini semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri reasuransi. Dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance/GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Perusahaan berupaya untuk menjadi perusahaan yang sehat dan terus bertumbuh.

Penerapan GCG di Perusahaan tersebut berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas *(accountability)*, tanggung jawab *(responsibility)*, kemandirian *(independence)*, dan kewajaran *(fairness)*, atau disingkat TARIF, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

In the reinsurance industry, good corporate governance is an important factor in maintaining the trust of shareholders and the ceding company. The implementation of good corporate governance is now increasingly important in line with the increasing business risks and challenges faced by the reinsurance industry. By promoting good corporate governance (GCG) and good risk management, the Company strives to become a sound and continuously growing company.

The implementation of GCG in the Company is based on 5 (five) basic principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, or abbreviated as TARIF, which can be described as follows:

Prinsip GCG GCG Principle	Penerapan di Perusahaan Implementation in the Company
Tranparansi	Keterbukaan atau transparansi adalah kebijakan Perusahaan dalam mengemukakan informasi yang relevan kepada seluruh pemegang saham, maupun pemangku kepentingan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Perusahaan mewujudkan prinsip ini antara lain melalui laporan-laporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu dan juga melalui media cetak dan elektronik, serta media lain yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan Perusahaan.
Transparency	Openness or transparency is the Company's policy in disclosing relevant information to all shareholders and stakeholders, as well as transparency in carrying out the decisio-nmaking process. The Company realizes this principle, among others, through regularly published reports, and in a timely manner, both printed and through electronic media, as well as other media in accordance with the regulations and needs of the Company.
Akuntabilitas	Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban komponen Perusahaan. Akuntabilitas dalam Perusahaan diterapkan dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ Perusahaan untuk menyadari tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajibannya sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip akuntabilitas diterapkan antara lain melalui pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perusahaan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan.
Accountability	The clarity in functions, structure, system and responsibilities of the Company's components. Accountability within the Company is applied by encouraging all individuals and/or organs of the Company to comprehend their responsibilities, authorities, rights and obligations so that the management of the Company will transpire effectively. The principle of accountability is implemented, among others, through the steps of reporting the Board of Directors to the Board of Commissioners regarding the annual budget plan and joint evaluation of the Company's financial performance, submission of financial reports at the Annual GMS, the establishment of an Internal Audit and the appointment of an external auditor, as well as the implementation of business ethics and the Company's code of conduct.

Prinsip GCG GCG Principle	Penerapan di Perusahaan Implementation in the Company
Tanggung Jawab	Perusahaan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kepatuhan proses bisnis Perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pencegahan pelanggaran serta penerapan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan telah memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja organ Perusahaan.
Responsibility	The Company invariably monitors its business process compliance with the prevailing law and regulation as a form of violation deterrence as well as implementation of sound corporate principles. The Company already has a corporate management system that supports the creation of clarity of functions, implementation and accountability for the performance of the Company's organs.
Independensi	Pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam prinsip-prinsip korporasi tanpa ada paksaan.
Independency	Professional management of the Company without conflict of interest and influence or pressure from any party that is against the prevailing law and regulation and sound corporate principles. In carrying out its activities, the Company runs according to the rules that have been set and contained in the corporate principles without any coercion.
Kewajaran	Menjamin bahwa setiap pemegang saham dan pemangku kepentingan mendapatkan perlakuan yang wajar, setara serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan telah menerapkan prinsip kewajaran dalam setiap proses bisnisnya.
Fairness	Guarantee that every Shareholder and Stakeholder receives fair and equal treatment and is able to exercise their rights according to the prevailing law and regulation. The company has applied the principle of fairness in every business process.

Pedoman dan Kebijakan GCG

GCG GUIDELINES AND POLICIES

Perusahaan menyadari bahwa penerapan prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik perlu didukung oleh tekad, kebijakan, dan tindakan manajemen perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (GCG) telah diterapkan di seluruh level organisasi dan dalam setiap aspek usaha. Hal ini ditujukan untuk menjaga kepentingan para pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan.

The Company realizes that the application of the principles of good corporate governance needs to be supported by the determination, policies and actions of the company's management. Therefore, the Company ensures that good corporate governance (GCG) has been implemented at all levels of the organization and in every aspect of the business. This is intended to safeguard the interests of shareholders and increase the value of the company.

Agar dapat berjalan dengan baik dan terukur, maka penerapan GCG di Perusahaan telah didukung dengan pedoman-pedoman atau aturan tertulis yang memuat tentang kebijakan dan praktik GCG, atau biasa disebut sebagai *soft structure*, serta pengaturan-pengaturan lainnya agar Perusahaan dapat tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etis.

In order to run properly and measurably, the implementation of GCG in the Company has been supported by written guidelines or rules that contain GCG policies and practices, or commonly referred to as soft structures, as well as other arrangements so that the Company can remain in line with the applicable laws and regulations as well as sound and ethical corporate principles.

Undang-Undang Perusahaan Terbatas tidak membahas mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) secara eksplisit namun tetap mengakomodasi prinsip-prinsip GCG secara umum. Peraturan yang lebih eksplisit, terutama bagi perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, tercantum dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dikarenakan sifat dari perusahaan-perusahaan tersebut yang berdampak signifi kan terhadap ekonomi Indonesia.

The Limited Liability Company Law does not explicitly stipulate the Good Corporate Governance (GCG) but in general it accommodates the GCG principles. More explicit regulations, especially for public companies and companies engaged in financial services, are contained in the regulations of the Financial Services Authority (OJK). This is due to the nature of these companies, which have a significant impact on the Indonesian economy.

Dalam menyusun pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan, NASIONAL RE mengacu pada pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh berbagai institusi dan regulator, antara lain Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, serta Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

In compiling guidelines for the implementation of corporate governance, NASIONAL RE refers to the guidelines issued by various institutions and regulators, including the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-09/MBU/2012 concerning the amendment to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN), Financial Services Authority Regulation Number: 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, as well as Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesia by National Committee on Governance Policy (KNKG).

Pedoman tata kelola perusahaan NASIONAL RE telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam peraturan-perundangan lain yang terkait, yakni Undang-Undang No. 40 tentang Perusahaan Terbatas, peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Anggaran Dasar Perusahaan.

NASIONAL RE corporate governance guidelines are in accordance with the regulations contained in other relevant laws and regulations, namely the Law No. 40 concerning Limited Liability Companies, Financial Services Authority (OJK) regulations and the Company's Articles of Association.

Tujuan Penerapan GCG
OBJECTIVE OF GCG IMPLEMENTATION

Tujuan penerapan GCG di Perusahaan adalah:
1. Mencapai sasaran usaha Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan.
3. Menjadikan organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan kewenangannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
4. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat.
5. Optimalisasi nilai perusahaan bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya.
6. Peningkatan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional.

The objectives of implementing GCG in the Company are:
1. Achieving the Company's business targets through management that is based on the principles of Good Corporate Governance.
2. Empowering the functions and independence of each company organ.
3. Encouraging corporate organs in making decisions and exercising their authority based on high moral values and compliance with laws and regulations.
4. Implementing corporate social responsibility to the community.
5. Optimizing the value of the company for shareholders and other stakeholders.
6. Increasing the competitiveness of the Company on national and international levels.

Struktur GCG
GCG STRUCTURE

Organ utama perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola secara efektif. Masing-masing organ Perusahaan harus menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar ini, Perusahaan menyusun struktur GCG untuk memastikan implementasi GCG secara optimal di seluruh kegiatan operasional maupun strategis Perusahaan.

Struktur inti GCG Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ-organ ini berperan untuk memastikan pelaksanaan prinsip GCG yang baik dalam seluruh kegiatan operasional maupun strategis. Masing-masing komponen memiliki kewenangan tersendiri dan bekerja secara mandiri untuk memenuhi fungsi, peran dan tanggung jawabnya.

The main organs of the company have a very important role in the effective implementation of governance. Each organ of the Company must carry out its functions based on the principle of independence in carrying out its duties, functions and responsibilities for the benefit of the Company, in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. On this basis, the Company developed a GCG structure in order to ensure optimal implementation of GCG in all of the Company's operational and strategic activities.

The core structure of the Company's GCG organ consists of the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. These organs play a role in ensuring the implementation of good GCG principles in all operational and strategic activities. Each component has its own authority and works independently in fulfilling each functions, roles and responsibilities.

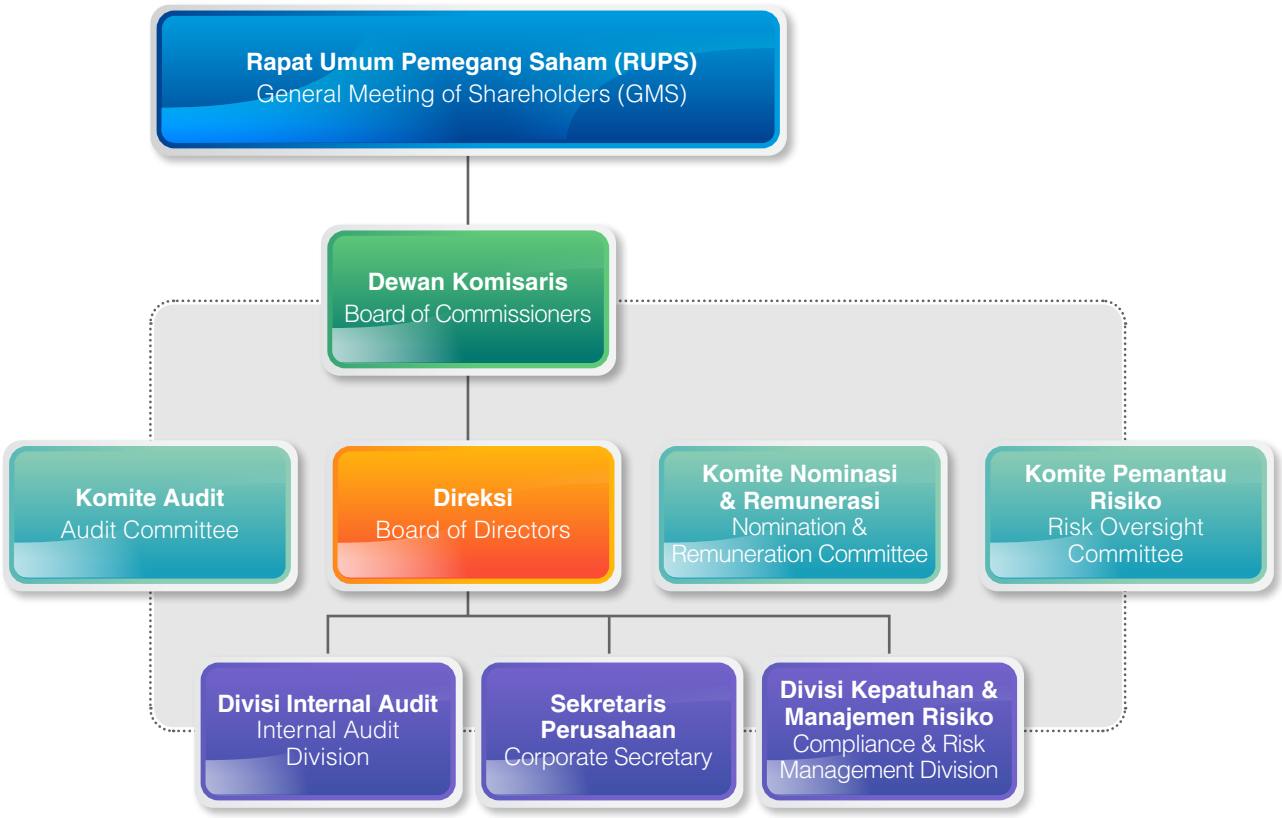
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Komite Audit
Audit Committee
Direksi
Board of Directors
Komite Nominasi & Remunerasi
Nomination & Remuneration Committee
Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee
Divisi Internal Audit
Internal Audit Division
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko
Compliance & Risk Management Division

Pemegang Saham
SHAREHOLDERS

Pemegang saham adalah seseorang, sebuah perusahaan atau sebuah institusi yang memiliki setidaknya selembar saham di perusahaan, atau dikenal sebagai ekuitas. Oleh karena itu, pada dasarnya pemegang saham adalah pemilik suatu perusahaan.

A shareholder is a person, company, or institution that owns at least one share of a company's stock, which is known as equity. Because of that, essentially shareholders are the owners of a company.

Hak-hak pemegang saham, antara lain:
1. Menghadiri RUPS.
2. Mengusulkan agenda RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memperoleh *release* materi RUPS selambatnya 28 hari sebelum RUPS.
4. Mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap agenda RUPS.
5. Memperoleh perlakuan yang sama dari Perusahaan.
6. Memberikan suara dalam RUPS.
7. Mencalonkan kandidat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
8. Mengangkat seorang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang ada atau menggantikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diberhentikan.
9. Memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum mengakhiri masa jabatannya melalui RUPS.
10. Menerima pembayaran dividen sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
11. Menjalankan hak dan/atau wewenang lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk ikut serta dalam hal pemberian kuasa penambahan modal, perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dan pengalihan seluruh atau sebagian harta kekayaan yang menyebabkan penjualan perusahaan.

The rights of the shareholders, among others:
1. Attend at the GMS.
2. Propose GMS agenda in accordance to prevailing regulations.
3. Obtain the release of the GMS material no later than 28 days prior to the GMS.
4. Receive the opportunity to raise questions and/or opinions on each GMS agenda.
5. Receive the equal treatment from the Company.
6. Voting at the GMS.
7. Nominates candidates for the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.
8. Appoint a member of the Board of Directors and/ or the Board of Commissioners or more to increase the number of existing members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or to replace members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who are dismissed.
9. Dismiss members of the Board of Directors and the Board of Commissioners at any time before ending term through GMS.
10. Receive dividend payments in accordance with applicable procedures and regulations.
11. Execute other rights and/or authorities pursuant to the Articles of Association and applicable laws and regulations, including the right to participate in case of authorizing the increase of capital, amend the Company's Articles of Association, and transfer all or part of assets that cause the sale of the company.

Hak, wewenang dan tanggung jawab Pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar NASIONAL RE.

The rights, authorities and responsibilities of the Shareholders are regulated in NASIONAL RE's Articles of Association.

Rapat Umum Pemegang Saham

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan. Berfungsi sebagai alat bagi pemegang saham Perusahaan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

RUPS mempunyai kewenangan tersendiri yang tidak dilimpahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (RUPS) adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPST diadakan tiap tahun meliputi: RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan dan RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sedangkan RUPSLB adalah RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Perusahaan.

Dalam setiap agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan setelah mendapatkan penjelasan, maupun menyampaikan usulan keputusan sesuai dengan tata tertib RUPS. Tata tertib RUPS dibagikan kepada peserta RUPS pada saat registrasi dan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir sebelum pembahasan agenda rapat dimulai. Dalam RUPS, keputusan-keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat maupun melalui perhitungan suara mayoritas yang hadir dalam rapat.

RUPS yang diselenggarakan Perusahaan meliputi pembahasan: Persetujuan atas Laporan Tahunan; Persetujuan atas Proyeksi Laporan Keuangan; Persetujuan atas Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP); serta Persetujuan atas Penggunaan Laba Bersih perusahaan. Pembahasan atas usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seseorang atau lebih Pemegang Saham, yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah, dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Company's Corporate Governance structure. It functions as a tool for the Company's shareholders to exercise their rights and obligations.

The GMS has its own authority, which is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits specified in the laws and/or the Company's Articles of Association.

In accordance with Article 10 of the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders (GMS) means the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The AGMS is held annually including: GMS regarding the approval of the annual report and the GMS regarding the Company's Work Plan and Budget (RKAP), while the EGMS is a GMS held at any time based on the needs and interests of the Company.

In each agenda of the General Meeting of Shareholders (GMS), shareholders are given the opportunity to raise questions after receiving an explanation, or to submit proposal of resolution in accordance with the rules of the GMS. The GMS rules are distributed to the GMS participants at the time of registration and approved by the shareholders present before the discussion of the meeting agenda begins. In the GMS, decisions are taken through deliberation for consensus or through counting the majority votes present at the meeting.

The GMS held by the Company includes discussion of: Approval of the Annual Report; Approval of Projected Financial Statements; Approval of the Company's Work Plan & Budget (RKAP); and Approval on the Use of the Company's Net Profit. Discussion of the proposals submitted by the Board of Commissioners and/or one or more Shareholders, representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights, provided that the proposals the proposal in question must be received by the Board of Directors before the date of the invitation to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

Ketentuan RUPS

1. RUPS dapat mengambil keputusan dengan suara bulat jika dihadiri dan/atau diwakili oleh semua Pemegang Saham dan semua Pemegang Saham menyetujui diadakannya RUPS.
2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan:
   a. Satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah;
   b. Dewan Komisaris.
3. Permintaan untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa diajukan melalui surat tercatat, disertai alasan-alasannya, di antaranya namun tidak terbatas pada:
   a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku;
   b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan berakhir;
   c. Dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perusahaan.
4. Surat tercatat sebagaimana butir 3 di atas disampaikan oleh Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
5. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:
   a. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atau;
   b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
8. RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi berdasarkan pemanggilan RUPS sesuai butir 5 di atas hanya membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana butir 3 di atas dan mata acara lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

GMS Procedure

1. GMS is lawful to make unanimous decisions if attended and/or represented by all Shareholders and all Shareholders approve the convening of a GMS.
2. The implementation of the Annual GMS and/or the Extraordinary GMS can be held upon request by:
   a. One or more Shareholders, representing at least 1/10 (one-tenth) part of the total shares issued by the Company with valid voting rights;
   b. Board of Commissioners.
3. Proposal to implement Annual and/or Extraordinary GMS can be submitted under registered letter, attached with the reasons, including but not limited on following conditions:
   a. The Board of Directors did not hold Annual GMS according to prevailing regulation;
   b. The terms of office of member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners will be expired soon;
   c. In the absence of the Board of Directors or having conflict of interest with the Company.
4. The registered letter as mentioned in point 3 shall be submitted by the Shareholders with a copy to the Board of Commissioners.
5. The Board of Directors announces GMS invitation in 15 (fifteen) days at the latest after the GMS implementation proposal is accepted.
6. In the event the Board of Directors failed to deliver GMS invitation:
   a. The Shareholders proposal for GMS shall be re-proposed to the Board of Commissioners, or;
   b. The Board of Commissioners announces the GMS invitation.
7. The Board of Commissioners shall announce GMS invitation in 15 (fifteen) days at the latest after the GMS proposal is received.
8. GMS held by the Board of Directors is based on GMS invitation as stated on point 5 that only discusses several issues related with the reason declared in point 3 as well as other agenda deemed necessary by the Board of Directors.

9. RUPS yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pemanggilan RUPS sesuai butir 6b dan butir 7 di atas hanya membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana butir 3 di atas.
10. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang 15 (lima belas) hari sebagaimana butir 5 dan butir 7, maka Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tempat kedudukan Perusahaan.
11. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
12. Pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
13. Dalam pemanggilan RUPS, dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibahas dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
14. Perusahaan wajib memberikan salinan bahan/materi sesuai butir 13 kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.
15. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan dalam butir 11, 12 dan 13, maka keputusan RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
16. Dalam setiap RUPS, risalah wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) oleh Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
17. Tanda tangan sebagaimana butir 16 tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.
18. Risalah RUPS memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan (termasuk perbedaan pendapat/*dissenting opinion* jika ada).
19. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar menentukan lain.

9. GMS held by the Board of Commissioners is based on the summon to the GMS according to items 6b and 7 above only to discuss the issues related to the reasons as stated in point 3.
10. In the event that the Board of Directors or Board of Commissioners fails to make a summon to the GMS, within a period of 15 (fifteen) days as in paragraphs 5 and 7, the Shareholders requesting the implementation of the GMS can summon to RUPS upon obtaining permission from the Chairman of DistrictCourt where the Company domicile.
11. The summons of the GMS is carried out within 14 (fourteen) days before the date of the GMS is held, by excluding the date of summons and the date of the GMS.
12. Summons of GMS are carried out under registered letters and/or with advertisements in newspapers.
13. Summoning for GMS must be accompanied by the date, time, place and agenda of the meeting, and notification that the material to be discussed at the GMS is available at the Company's office from the date the GMS is called until the date the GMS is held.
14. The Company is obliged to provide free copies of material in accordance with point 13 to the Shareholders if requested.
15. In the event that the summons are not in accordance with the provisions in points 11, 12 and 13, then the resolution of the GMS remains valid if all Shareholders with valid voting rights are present or represented at the GMS and the decision is unanimously approved.
16. In each GMS, minutes must be made and signed by the chairman of the meeting and at least 1 (one) by the Shareholders appointed from and by the participants of the GMS.
17. Signatures as in point 16 are not required if the minutes of the GMS are made with a notary deed.
18. Minutes of the GMS include the matters discussed and decided (including dissenting opinions if any).
19. GMS can be held if attended by at least 51% (fifty one percent) of the total shares with voting rights present or represented, unless the statutory regulations and/ or articles of association specify otherwise.

20. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
21. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
22. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1⁄2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
23. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari 1⁄2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1⁄2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

20. Shareholders either alone or represented by a power of attorney, have the right to attend the GMS and use their voting rights in accordance with the number of shares they have.
21. All decisions taken based on deliberation to reach consensus.
22. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is valid if it is approved more than 1⁄2 (one half) of the total votes issued, unless the articles of association stipulate otherwise.
23. In the case of proposals of more than 2 (two) alternatives and the results of voting not yet received 1 (one) alternative with a vote of more than 1⁄2 (one half) part of the number of votes issued, then a re-election of 2 (two) proposals that get the most votes so that one of the proposals obtains votes more than 1⁄2 (one-half) part of the number of votes issued by Shareholders can also make legitimate decisions without physically holding a GMS, provided all Shareholders are informed written and all Shareholders give approval regarding the proposal submitted in writing and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same legal force as the decisions taken legally at the GMS.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2021

Pada tahun 2021, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Sirkuler dengan keputusan RUPS sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Januari 2021
   a. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2022, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
   b. Menetapkan Kontrak Manajemen *(Key Performance Indicators)* antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Reasuransi Nasional Indonesia untuk tahun 2022.
   c. Menetapkan Kontrak Manajemen *(Key Performance Indicators)* antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Reasuransi Nasional Indonesia untuk tahun 2022.
   d. Memberikan arahan manajemen untuk tahun 2022.

Implementation of GMS in 2021

In 2021, the Company held 2 (two) Circular GMS with GMS resolutions as follows:

1. January 29, 2021
   a. Ratifying the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of PT Reasuransi Nasional Indonesia for 2022, including the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.
   b. Establishing the Management Contract (Key Performance Indicators) between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia for 2022.
   c. Establishing Management Contract (Key Performance Indicators) between the Board of Commissioners and the Shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia for 2022.
   d. Providing management direction for 2022.

2. Tanggal 29 November 2021 dengan keputusan RUPS sebagai berikut:
   a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,Rintis dan Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan.
   b. Melimpahkan kewenangan pada Dewan Komisaris untuk menetapkan ruang lingkup penugasan, besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
   c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti, termasuk besaran imbalan jasa audit dan menetapkan kondisi serta persyaratan penunjukannya.
   d. Dewan Komisaris bersama Direksi Perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian audit atas laporan keuangan tahun 2021 dengan baik, memenuhi seluruh ruang lingkup audit yang ditetapkan.
   e. Dewan Komisaris bersama Direksi harus secara konsisten menjalankan langkah-langkah mitigasi risiko agar Kantor Akuntan Publik dapat menyelesaian audit secara baik.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2021

Pada tahun 2021, Perusahaan menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPSLB Sirkuler, yaitu:

1. Tanggal 26 Januari 2021, dengan keputusan RUPSLB adalah Penyesuaian Anggaran Dasar PT Reasuransi Nasional Indonesia dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
2. Tanggal 16 Juni 2021 dengan keputusan RUPSLB sebagai berikut:
   a. Pemberhentian dengan hormat Sdr. Raymond Buisson sebagai Komisaris Independen PT Reasuransi Nasional Indonesia dan Pemberhentian dengan hormat Sdr. Dwi Agus Sumarsono sebagai Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia.
   b. Pengangkatan Sdri Yanti Parapat dan Sdr. Teddy Sastra sebagai Komisaris Independen PT Reasuransi Nasional Indonesia dan Pengangkatan Sdr. Vincentius Wilianto sebagai Komisaris PT Reasuransi

2. November 29, 2021 with GMS resolutions as follows:
   a. Appointing the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners as the Public Accounting Firm that will conduct an audit of the report.
   b. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the scope of the assignment, the amount of compensation for audit services and other terms of appointment that are reasonable for the Public Accounting Firm.
   c. To authorize the Company's Board of Commissioners to determine a replacement Public Accounting Firm, including the amount of fees for audit services and determine the conditions and requirements for its appointment.
   d. The Board of Commissioners together with the Board of Directors of the Company are fully responsible for the completion of the audit of the 2021 financial statements properly, fulfilling the entire scope of the audit set.
   e. The Board of Commissioners together with the Board of Directors must consistently carry out risk mitigation measures so that the Public Accounting Firm can complete audits properly.

Implementation of Extraordinary GMS in 2021

In 2021, the Company held 4 (four) Circular EGMS, as follows:

1. On January 26, 2021, the resolution of the EGMS was the Adjustment of the Articles of Association of PT Reasuransi Nasional Indonesia with the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2020.
2. On June 16, 2021 with the resolution of the EGMS as follows:
   a. The honorable dismissal of Mr. Raymond Buisson as Independent Commissioner of PT Reasuransi Nasional Indonesia and the honorable dismissal of Mr. Dwi Agus Sumarsono as Commissioner of PT Reasuransi Nasional Indonesia.
   b. The appointment of Ms. Yanti Parapat and Mr. Teddy Sastra as Independent Commissioner of PT Reasuransi Nasional Indonesia and Appointment of Mr. Vincentius Wilianto as Commissioner of PT Reasuransi Nasional

Nasional Indonesia dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Komisaris setelah penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan OJK.

3. Tanggal 12 Juli 2021 dengan keputusan RUPSLB sebagai berikut:
   a. Pemberhentian dengan hormat Sdr. Rusdianto selaku Direktur Keuangan & SDM PT Reasuransi Nasional Indonesia, yang dinyatakan dalam Risalah RUPSLB tanggl 3 September 2008 tentang pengangkatan Direksi terhitung sejak habis masa jabatannya selama 10 (sepuluh) tahun yaitu tanggal 4 September 2018.
   b. Pemberhentian dengan hormat Sdr. Edhie Mulyono selaku Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia yang dinyatakan dalam Risalah RUPSLB tanggal 9 Oktober 2017 tentang pengangkatan Anggota Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia terhitung sejak habis masa jabatannya selaku Direktur Utama, selama 2 tahun 9 bulan yaitu tanggal 2 Agustus 2020.
   c. Adapun berdasarkan surat Dewan Komisaris kepada Direktur Keuangan & SDM PT Reasuransi Nasional Indonesia No.18/DK/NR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia memutuskan bahwa Sdr. Sunarso yang menjabat sebagai Direktur Keuangan & SDM untuk merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama sampai pemegang saham menunjuk Direktur Utama secara definitif.

4. Tanggal 11 Oktober 2021 dengan keputusan RUPSLB sebagai berikut:
   a. Mengangkat Sdr. Achmad Sudiyar Dalimunthe sebagai Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
   b. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Sdr. Achmad Sudiyar Dalimunthe sebagai Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia diatur dalam

Indonesia with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, and with the implementation of duties, authorities and obligations as Commissioner after the determination of the passing results of the fit and proper test of the OJK.

3. July 12, 2021 with the resolution of the EGMS as follows:
   a. The honorable dismissal of Mr. Rusdianto as Director of Finance & Human Resources of PT Reasuransi Nasional Indonesia, which was stated in the Minutes of the EGMS dated September 3, 2008 regarding the appointment of the Board of Directors as of the end of his 10 (ten) year term of office, namely September 4, 2018.
   b. The honorable dismissal of Mr. Edhie Mulyono as President Director of PT Reasuransi Nasional Indonesia as stated in the Minutes of the EGMS dated October 9, 2017 regarding the appointment of members of the Board of Directors of PT Reasuransi Nasional Indonesia as of the end of his term of office as President Director, for 2 years and 9 months, namely August 2, 2020.
   c. Meanwhile, based on the letter from the Board of Commissioners to the Director of Finance & HR of PT Reasuransi Nasional Indonesia No.18/DK/NR/VII/2020 dated July 30, 2020 regarding the appointment as Acting Director (Act.) the President Director of PT Reasuransi Nasional Indonesia decided that Mr. Sunarso as Director of Finance & HR to concurrently serve as Acting (Act.) President Director until the shareholders appoint the President Director definitively.

4. October 11, 2021 with the resolution of the EGMS as follows:
   a. Appointing Mr. Achmad Sudiyar Dalimunthe as President Director of PT Reasuransi Nasional Indonesia with a term of office in accordance with the provisions of the company's articles of association, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
   b. Duties, authorities and responsibilities of Mr. Achmad Sudiyar Dalimunthe as President Director of PT Reasuransi Nasional Indonesia is regulated in the

anggaran dasar dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Direksi setelah penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan OJK.

c. RUPSLB memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
d. Keputusan perubahan pengurus ini dinyatakan dalam surat keputusan PT Asuransi Kredit Indonesia dan YDKKA selaku pemegang Saham PT Reasuransi Nasional Indonesia No.183/KEP/DIR/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang pengangkatan anggota Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia.

articles of association to carry out his duties, auhtorities and obligations as Board of Directors after the determination of the passing results of the fit and proper test of the OJK.

c. The EGMS grants power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of PT Reasuransi Nasional Indonesia to declare everything decided in this decision in authentic form before a notary or authorized official.
d. The decision to change the management is stated in the decision letter of PT Asuransi Kredit Indonesia and YDKKA as the shareholder of PT Reasuransi Nasional Indonesia No. 183/KEP/DIR/X/2021 dated October 11, 2021 regarding the appointment of members of the Board of Directors of PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Dewan Komisaris
BOARD OF COMMISSIONERS

Landasan Hukum

Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas ("UUPT"), sebagai perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, Perusahaan wajib memiliki Dewan Komisaris.

Tugas utama dari Dewan Komisaris di antaranya adalah:
1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, serta
2. Memberi nasihat kepada Direksi.

Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan Dewan Komisaris untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan dalam menjalankannya Dewan Komisaris wajib melakukannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab demi kepentingan Perusahaan.

Dewan Komisaris turut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Dewan Komisaris NASIONAL RE secara bertanggung jawab telah melakukan fungsi pengawasan dan fungsi konsultasi sesuai peraturan yang berlaku, untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan garis besar kebijakan perusahaan.

Legal Basis

According to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("UUPT"), as a company established under applicable law in Indonesia, the Company is required to have a Board of Commissioners.

The main duties of the Board of Commissioners include:
1. Supervise management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business, and
2. Provide advice to the Board of Directors.

The supervision and providing advice is carried out by the Board of Commissioners for the benefit of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company, and in carrying out this the Board of Commissioners must do so in good faith, prudence, and responsibility for the interests of the Company.

The Board of Commissioners is also personally responsible for the loss of the Company, if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties properly.

The NASIONAL RE Board of Commissioners has responsibly carried out its supervisory and consulting functions in accordance with applicable regulations, for the benefit of the company and in accordance with the company policies.

Masa Jabatan

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya Pasal 28 ayat (3), mensyaratkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Terms of Office

Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, specifically Article 28 paragraph (3), requires that the term of office of members of the Board of Commissioners is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris *(Board Manual)* sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kerja

Board of Commissioners' Manual (Board Manual)

Implementation of Board of Commissioners' duty and responsibility refers to Board of Commissioners Manual (Board Manual) as disclosed in Work Manual for Board of

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia. Pedoman Kerja Dewan Komisaris disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 54/KEP/DIR/XII/2017 bulan Desember 2017.

Dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dijabarkan antara lain:

1. Fungsi Dewan Komisaris;
2. Persyaratan, Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
   a. Persyaratan Dewan Komisaris
   b. Komposisi Dewan Komisaris
   c. Komisaris Independen
   d. Remunerasi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi
   a. Program Pengenalan
   b. Program Peningkatan Kompetensi
4. Prosedur Pencalonan dan Penetapan Dewan Komisaris
   a. Pembentukan Tim Evaluasi
   b. Penjaringan
   c. Penetapan
5. Etika Jabatan Dewan Komisaris
   a. Etika Berkaitan dengan Keteladanan
   b. Etika Berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
   c. Etika Berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
   d. Etika Berkaitan dengan Peluang Perusahaan dan Keuntungan Pribadi
   e. Etika Berkaitan dengan Benturan Kepentingan
   f. Etika Berusaha dan Anti Korupsi
6. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
   a. Kebijakan Umum
   b. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham
   c. Terkait Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Serta Pelaporan oleh Dewan Komisaris
   d. Terkait Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Sumber Daya Manusia
   e. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
   f. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal
   g. Terkait dengan Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko
   h. Terkait dengan Nominasi dan Remunerasi
   i. Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain

Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors of PT Reasuransi Nasional Indonesia. The Board of Commissioners Manual is ratified through Board of Directors Decree No. 54/KEP/DIR/XII/2017 in December 2017.

Board of Commissioners Manual describes the following guidelines:

1. Board of Commissioners' Function;
2. Board of Commissioners' Requirements, Composition and Terms of Office
   a. Board of Commissioners' Requirements
   b. Board of Commissioners Composition
   c. Independent Commissioner
   d. Board of Commissioners' Remuneration and Terms of Office
3. Orientation and Competency Development Programs
   a. Training Program
   b. Competency Development Program
4. Board of Commissioners Nomination and Appointment
   a. Establishment of Evaluation Team
   b. Selection
   c. Appointment
5. Board of Commissioners' Position Ethics
   a. Ethics Related to Exemplary (Role Model)
   b. Ethics Related to Compliance with the Law and Regulation
   c. Ethics Related to Information Disclosure and Confidentiality
   d. Ethics Related to Company's Opportunity and Personal Benefit
   e. Ethics Related to Conflict of Interest
   f. Business Ethics and Conflict of Interest
6. Board of Commissioners' Duty and Responsibility
   a. General Policy
   b. Related to General Meetings of Shareholders
   c. Related to Implementation of Supervisory and Advisory as well as Reporting by the Board of Commissioners
   d. Related to Board of Commissioners and Board of Directors' Performance Appraisal and Human Capital
   e. Related to Information Disclosure and Confidentiality
   f. Related to Internal Control System
   g. Related to Supervisory on Risk Management Implementation
   h. Related to Nomination and Remuneration
   i. Related to Other Duties and Obligations

7. Wewenang Dewan Komisaris;
8. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
   a. Kebijakan Umum
   b. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris;
9. Rapat Dewan Komisaris
   a. Kebijakan Umum
   b. Prosedur Rapat
   c. Mekanisme Kehadiran dan Keabsahan Rapat
   d. Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan
   e. Penyusunan Risalah Rapat
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris
    a. Komite-Komite Dewan Komisaris
    b. Sekretaris Dewan Komisaris

7. Board of Commissioners' Authority
8. Board of Commissioners' Performance Appraisal
   a. General Policy
   b. Board of Commissioners' Performance Appraisal Criteria
9. Board of Commissioners' Meetings
   a. General Policy
   b. Meeting Procedure
   c. Attendance Mechanism and Meeting Legality
   d. Agenda Discussion and Decision-Making Procedure
   e. Minutes of Meetings Preparation
10. Supporting Organs Under the Board of Commissioners
    a. Committees Under the Board of Commissioners
    b. Secretary to Board of Commissioners

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan tugas pengawasan atas manajemen yang dijalankan Direksi Perusahaan, serta memberi nasihat serta memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis serta memastikan bahwa GCG dan praktik pengelolaan risiko diimplementasi secara efektif di seluruh lingkup kegiatan operasional Perusahaan.

Kewenangan Dewan Komisaris adalah berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS yang meliputi tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RJP dan RKAP) yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RJP dan RKAP) mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Duties and Responsibilities

In accordance with the laws and regulations, the Board of Commissioners is responsible for carrying out supervisory duties on the management carried out by the Board of Directors, as well as providing advise and monitoring and evaluating the implementation of strategic policies and ensuring that GCG and risk management practices are implemented effectively throughout the Company's operational activities.

The authority of the Board of Commissioners is based on the Articles of Association of the Company and the resolutions of the GMS which include duties and responsibilities including:

1. Providing advice to the Directors regarding the management of the Company.
2. Research and review and sign the Company's Long Term Plan and Corporate Work Plan and Budget (RJP and RKAP) prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association.
3. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's Long-Term Plan and Corporate Work Plan and Budget (RJP and RKAP) and regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Corporate Budget.

4. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
9. Membentuk Komite Audit.
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
11. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
12. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain.
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Sebagai bagian dari bentuk akuntabilitas atas tugas dan kewenangannya, Dewan Komisaris menyiapkan laporan tugas pengawasan atas peran pengawasan yang dilakukan selama satu tahun buku untuk dilaporkan kepada pemegang saham untuk disahkan dalam RUPST. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, khususnya prinsip akuntabilitas. Selain itu, kinerja Dewan Komisaris harus dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang dituangkan dalam KPI Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dalam RUPS.

Wewenang

Setiap anggota Dewan Komisaris NASIONAL RE, baik secara individu maupun secara kolektif, memiliki kewenangan terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya, yakni:

4. Following the development of company activities, giving opinions and suggestions to the GMS regarding any issues that are considered important for the management of the company.
5. Report immediately to the GMS if the Company shows signs of declining performance.
6. Research and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign annual reports.
7. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested.
8. Prepare an annual work program and are included in the Company's Work Plan and Budget.
9. Establish an Audit Committee.
10. Propose a Public Accountant to the GMS.
11. Make minutes of the Board of Commissioners' Meeting and keep a copy.
12. Report to the Company regarding his and/or her families' shares of ownership in this or other companies.
13. Providing report to GMS regarding supervisory duty that has been done during the latest fiscal year.
14. Undertaking other responsibilities in relation with monitoring and advisory duties, as not violating Law, Articles of Association and/or GMS resolution.

As embodiment of accountability of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners prepares report on the implementation of its supervisory duties to be reported to shareholders and to be approved by the Annual GMS. This is also in line with GCG principles, mainly accountability principle. In addition, performance of the Board of Commissioners has to be evaluated based on performance appraisal elements stated in KPI of the Board of Commissioners to be later presented in the GMS.

Authorities

Every member of Board of Commissioners in NASIONAL RE, has an authority both individually and collegially regarding the duty and responsibility implementation, among others:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen penting perusahaan.
2. Memeriksa kas perusahaan untuk keperluan verifikasi dan keperluan lain terkait kegiatan pengawasan.
3. Memeriksa kekayaan atau inventaris perusahaan.
4. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dimiliki atau dipergunakan oleh Perusahaan.
5. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi, mengenai segala persoalan menyangkut pengelolaan perusahaan.
6. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
7. Meminta penjelasan mengenai segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
8. Memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Membentuk komite, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
10. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perusahaan, jika dianggap perlu.
11. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
13. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
15. Menunjuk dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris.

1. Checking books, letters and other corporate important documents.
2. Checking the Company's cash for verification and other assignments related with monitoring activity.
3. Checking the Company's assets or inventory.
4. Entering yard, building and office owned or occupied by the Company.
5. Proposing an explanation from the Board of Directors and/or other Executives under the Board of Directors regarding every issue mainly related with the Company's management.
6. Proposing the Board of Directors and/or other Executives with a consent from the Board of Directors to attend Board of Commissioners meeting.
7. Asking explanation on every policy and action done or to be implemented by the Board of Directors.
8. Dismissing member of BOD according to provision stated in Articles of Association.
9. Establishing committee, if considered necessary, by concerning the Company's capabilities.
10. Hiring the Expert for certain aspects and time period on Company's expenses, if considered necessary.
11. Performing management activity in certain condition and period according to provision stated in Articles of Association.
12. Exercising other authorities as long as not violating the Laws, Articles of Association and/or GMS Resolution.
13. Attending Board of Directors meetings and providing comment on matters discussed.
14. Executing other supervisory authority, provided that not in the contrary to prevailing rules and the Articles of Association and or Resolution from the GMS.
15. Appointing and dismissing Secretary of the Board of Commissioners.

Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2021, Anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan dan terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu 1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris dan 2 (dua) Komisaris Independen.

Composition of The Board of Commissioners

In 2021, the members of the Board of Commissioners will not change and consist of 4 (four) people, namely 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners.

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris NASIONAL RE telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 73/POJK.05/2016, yaitu:

1. Dewan Komisaris Perusahaan wajib memiliki anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.
2. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Komisaris Independen.

The number and composition of the Board of Commissioners of NASIONAL RE is in accordance with the provisions of Article 19 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 73/POJK.05/2016, namely:

1. The Company's Board of Commissioners shall consist of at least 3 (three) people.
2. At least half of the members of the Board of Commissioners of the Insurance Company and Sharia Insurance Company as referred to in paragraph (1) are Independent Commissioners.

Berikut ini susunan Dewan Komisaris Perusahaan:

The following is the composition fo the Company's Board of Commissioners;

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Terms of Office
1.	Dr. Toto Pranoto, CRGP	Komisaris Utama President Commissioner	Risalah RUPSLB, tanggal 19 Desember 2017 EGMS Minutes of Meeting, December 19, 2017	5 tahun 5 years
2.	Vincentius Wilianto, FSAI., AAIJ.	Komisaris Commissioner	Risalah RUPSLB, tanggal 16 Juni 2021 EGMS Minutes of Meeting, June 16, 2021	5 tahun 5 years
3.	A. Yanti F. Parapat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Risalah RUPSLB, tanggal 16 Juni 2021 EGMS Minutes of Meeting, June 16, 2021	5 tahun 5 years
4.	Teddy Sastra, SE, MM, AMRP	Komisaris Independen Independent Commissioner	Risalah RUPSLB, tanggal 16 Juni 2021 EGMS Minutes of Meeting, June 16, 2021	5 tahun 5 years

Pernyataan Integritas

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan memenuhi ketentuan dalam UU Perusahaan Terbatas serta prinsip GCG. NASIONAL RE mewajibkan Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik di Perusahaan maupun di perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris saat ini tidak memiliki saham di perusahaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Dewan Komisaris Perusahaan tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

Statement of Integrity

All members of the Board of Commissioners have adequate integrity, competence and financial reputation and fulfill the provisions of the Limited Liability Company Law and GCG principle. NASIONAL RE requires the Board of Commissioners to disclose their share ownership, both in the Company and other companies at home and abroad, in a report that must be renewed annually. All current members of the Board of Commissioners do not have shares in other companies that are contrary to the laws and regulations. The Board of Commissioners of the Company does not take and/or receive personal benefits from the Company other than the remuneration and other facilities determined by the GMS. All members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia.

Pernyataan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris NASIONAL RE telah mencerminkan keberagaman baik dari sisi kompetensi, edukasi, maupun pengalaman yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris sebaik mungkin.

Statement of Diversity in The Composition of The Board of Commissioners

The composition of the NASIONAL RE Board of Commissioners has reflected diversity both in terms of competence, education, and experience that can support the implementation of the functions and duties of the Board of Commissioners as well as possible.

Pernyataan Independensi Komisaris

Sebagai perwujudan dari upaya menjaga independensi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perusahaan telah menunjuk seorang Komisaris Independen, yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Selain itu, adanya Komisaris Independen dapat mendorong terciptanya hubungan kerja yang lebih objektif dan *fair*, yang mampu menjaga kesetimbangan antara kepentingan pemegang saham dan *Stakeholders* lainnya. Seorang Komisaris Independen harus mampu menghindari benturan kepentingan dan mampu bertindak independen, tidak mempunyai kepentingan lain yang berbenturan dan dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun hubungan terhadap Direksi.

Statement of Independence of The Commissioner

As an embodiment of efforts to maintain the independence of the Board of Commissioners' oversight function, the Company has appointed an Independent Commissioner, who does not have financial, management, share ownership and/or family relations up to the second degree with other Commissioners, Directors and or controlling shareholders or relationships others that can affect their ability to act independently. In addition, the existence of an Independent Commissioner can encourage the creation of a more objective and fair working relationship, which is able to maintain equilibrium between the interests of shareholders and other stakeholders. An Independent Commissioner must be able to avoid conflicts of interest and be able to act independently, have no other interests that conflict and can interfere with his ability to carry out tasks independently and critically, both in relations with fellow members of the Board of Commissioners and relations with the Board of Directors.

Rangkap Jabatan Komisaris

Tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris NASIONAL RE yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

Concurrent Position of Commissioner

No member of the NASIONAL RE's Board of Commissioners holds concurrent positions as Commissioner, Director, or Executive Officer in other companies that violate the laws and regulations.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Untuk tahun buku 2021, Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja dan *Key Performance Indicators* (KPI) sesuai amanah yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-01/MBU/2011.

Sesuai dengan Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris untuk Tahun 2021, pelaksanaan tugas Dewan Komisaris antara lain mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus, jalannya kepengurusan perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka panjang Perusahaan dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan.
- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi.
- Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan.

Selain tugas-tugas yang disebutkan di atas, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab atas fungsi Pengendalian Manajemen Risiko dan Implementasi GCG di Perusahaan. Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah menjalankan kedua fungsi tersebut dengan baik.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diadakan paling sedikit setiap bulan sekali. Dewan Komisaris berhak mengundang Direksi untuk hadir dalam rapat tersebut. Rapat Dewan Komisaris dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang

Duties Implementation of The Board of Commissioners

For the fiscal year of 2021, the Board of Commissioners has compiled a Work Plan and Key Performance Indicators (KPI) according to the mandate contained in the State Minister for State-Owned Enterprises (BUMN) Regulation Number: PER-01/MBU/2011.

In accordance with the Board of Commissioners' Work Plan and KPI for 2021, the duties of the Board of Commissioners include the following:

- To conduct supervision over the policy and management of the Company in general, both regarding the Company and the Company's business carried out by the Directors, and provide advice to the Board of Directors, including overseeing the implementation of the Company's Long Term Plan, Corporate Work Plan & Budget and provisions stated in the Articles of Association and GMS Resolutions, as well as applicable laws and regulations, in the interests of the Company and in accordance with the Company's goals and objectives.
- Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's Long Term Plan and Company Work Plan & Budget.
- To study and review periodic reports and annual reports prepared by the Directors.
- To prepare annual work programs to be included in the Corporate Budget Plan.

In addition to the duties mentioned above, the Board of Commissioners is also responsible for the functions of Risk Management Control and Implementation of GCG in the Company. In 2021, the Board of Commissioners carried out both functions well.

Board of Commissioners' Meeting

Board of Commissioners meetings are held at least once a month. The Board of Commissioners has the right to invite the Directors to attend the meeting. The Board of Commissioners' meeting is declared valid and has the right

mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris. Semua keputusan dalam rapat diupayakan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, dalam hal tidak tercapai mufakat melalui musyawarah, maka keputusan rapat dapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

to make binding decisions when attended or represented by more than half of the members of the Board of Commissioners. All decisions in the meeting are sought to be taken by deliberation to reach consensus. However, in the event that consensus is not reached through deliberation, then the decision of the meeting can be taken by a majority vote. All decisions of the Meeting are binding on all members of the Board of Commissioners.

Sesuai Panduan Kerja Dewan Komisaris, agenda dan materi rapat harus disampaikan kepada Dewan Komisaris selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat berlangsung. Hal ini agar Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi atau bila perlu untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat dilaksanakan.

In accordance with the Board of Commissioners' Work Guidelines, the agenda and meeting materials must be submitted to the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days before the meeting takes place. This is so that the Board of Commissioners has the opportunity to review information or if necessary to request additional information before the meeting is held.

Rapat Internal Dewan Komisaris dengan Komite Audit

Rapat Internal Dewan Komisaris atau dengan Komite Audit antara lain membahas evaluasi terhadap hasil kinerja Perusahaan, pengembangan usaha dan *review* atas Struktur Organisasi Perusahaan dan berbagai permasalahan yang lain. Selama tahun 2021 Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan dengan rata-rata kehadiran 100%.

Adapun rincian kehadirannya adalah sebagai berikut:

Internal Meeting of The Board of Commissioners With Audit Committee

Internal meetings of the Board of Commissioners or with the Audit Committee, among others, discuss the evaluation of the results of the Company's performance, business development and review of the Company's Organizational Structure and various other issues. During 2021 the Board of Commissioners held 2 (two) internal meetings with an average attendance of 100%.

The attendance details are as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
1.	Dr. Toto Pranoto, CRGP	Komisaris Utama President Commissioner	2	2	100%
2.	Vincentius Wilianto, FSAI., AAIJ.	Komisaris Commissioner	2	2	100%
3.	A. Yanti F. Parapat	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	2	100%
4.	Teddy Sastra, S.E., M.M., AMRP.	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	2	100%

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi antara lain membahas hasil kinerja Perusahaan, pengembangan usaha dan berbagai permasalahan yang lain.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali pertemuan dengan rincian tingkat kehadiran sebagai berikut:

Joint Meeting of The Board of Commissioners and The Board of Directors

The Board of Commissioners' meeting with the Board of Directors discussed various agenda, including results of the Company's performance, business development and various other issues.

In 2021, the Board of Commissioners held 13 (thirteen) joint meetings with the Board of Directors with details of attendance as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
1.	Dr. Toto Pranoto, CRGP	Komisaris Utama President Commissioner	13	13	100%
2.	Vincentius Wilianto, FSAI., AAIJ. *	Komisaris Commissioner	7	7	100%
3.	A. Yanti F. Parapat**	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	7	100%
4.	Teddy Sastra, S.E., M.M., AMRP.**	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	7	100%
5.	Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi., MBA., AAIK., AAK., AIIS.***	Direktur Utama President Director	3	3	100%
6.	Fitris Dinarwan, S.T., M.M., ACII., CRGP.	Direktur Teknik Technical Director	13	13	100%
7.	Sunarso, S.E., M.Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP.	Direktur Keuangan & SDM Finance & HR Director	13	13	100%
8.	Erlan Risdiyanto, S.E., AMII., ACII., CRMO., CRGP.	Direktur Operasi Operation Director	13	13	100%

* berdasarkan Risalah RUPSLB menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 16 Juni 2021
based on the EGMS Minutes of Meeting, he has served as Commissioner since June 16, 2021

** berdasarkaan Risalah RUPSLB menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 16 Juni 2021
based on the EGMS Minutes of Meeting, he has served as Independent Commissioner since June 16, 2021

*** berdasarkan Risalah RUPSLB menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 11 oktober 2021
based on the EGMS Minutes of Meeting, he has served as President Director since October 11, 2021

Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Secara ringkas, pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris selama tahun 2021 disajikan pada Matrik Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI).

Kinerja Dewan Komisaris dinilai baik secara kolegial maupun individu melalui mekanisme mandiri setiap tahunnya berdasarkan atas tingkat pencapaian dibandingkan dengan target *(Key Performance Indicator)* yang telah disepakati. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Performance Assessment of The Board of Commissioners

In brief, the implementation of the supervisory duties carried out by the Board of Commissioners in 2021 is presented in the Key Performance Indicators (KPI) Realization Matrix.

The performance of the Board of Commissioners is assessed, both collegially and individually, through independent mechanism every year based on the level of achievement compared to the agreed target (Key Performance Indicator). Performance evaluation of the Board of Commissioners is also carried out by considering the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and/or the Company's Articles of Association.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-06/MBU/06/2018 di mana selanjutnya diajukan dan diputuskan dalam RUPS, di mana untuk realisasinya dengan mempertimbangkan prestasi KPI Direksi dan Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris meliputi gaji, tunjangan pakaian, tunjangan hari raya, dan tantiem yang dibayarkan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Board of Commissioners Remuneration Policy

Determination of the Remuneration of the Board of Commissioners refers to the Minister of BUMN Regulation Number: PER-06/MBU/06/2018, and subsequently submitted and decided at the GMS, where it is realized by taking into consideration the attainment of KPI of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The remuneration of the Board of Commissioners includes salary, clothing allowances, holiday allowances and incentives paid in 2021 is as follows:

Keterangan **Description**	**Jumlah Orang** **Number of Person**	**Jumlah Nominal** **Total Amount**
Remunerasi (termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan *(benefit)*, kompensasi. Remuneration (including salaries and other fixed income, including benefits), compensation.	4	Rp2.000.000.000
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya). Other facilities in the form of in kind (housing, transportation, health insurance and other remunerations).		
Jumlah **Total**		**Rp2.000.000.000**

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama tahun 2021 Dewan Komisaris mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau *workshop*, sebagai berikut:

Competency Development Program For The Board of Commissioners

In 2021 the Board of Commissioners attended various training programs, conferences, seminars or workshops, as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	*Workshop / Training / Seminar*	Penyelenggara Organizer	Tempat & Tanggal Date & Venue
1.	Dr. Toto Pranoto, CRGP	Komisaris Utama President Commissioner	*Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday* Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday	AAUI	29 Juni 2021 June 29, 2021
			Webinar Series Enhancing Yor ERM - Bagaimana mewujudkan Model Penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi (ERM) dan Bagaimana Mengukur *"Creating Value" pd penerapan ERM ?* Webinar Series Enhancing Yor ERM - How to realize an integrated Risk Management Implementation Model (ERM) and How to Measure "Creating Value" in ERM implementation?	GRC Management	30 Agustus 2021 August 30, 2021
			Master Class Program Series XXI "Competitive Strategy in a Changing Business Environment (Surfing The Wave of Pandemic & Disruptions)" Master Class Program Series XXI "Competitive Strategy in a Changing Business Environment (Surfing The Wave of Pandemic & Disruptions)"	LSPMR	2-3 Desember 2021 December 2-3, 2021
2.	Vincentius Wilianto, FSAI., AAIJ.	Komisaris Commissioner	*Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday* Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday	AAUI	29 Juni 2021 June 29, 2021

No.	Nama Name	Jabatan Position	*Workshop / Training / Seminar*	Penyelenggara Organizer	Tempat & Tanggal Date & Venue
3.	A. Yanti F. Parapat	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday* Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday	AAUI	29 Juni 2021 June 29, 2021
			Virtual Seminar Internasional AAMAI: Global Talents Trends in Insurance Industry: The Future of Work Virtual International Seminar AAMAI: Global Talents Trends in Insurance Industry: The Future of Work	AAMAI	23 November 2021 November 23, 2021
4.	Teddy Sastra, S.E., M.M., AMRP.	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday* Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday	AAUI	29 Juni 2021 June 29, 2021
			Virtual Seminar Internasional AAMAI: Global Talents Trends in Insurance Industry: The Future of Work Virtual International Seminar AAMAI: Global Talents Trends in Insurance Industry: The Future of Work	AAMAI	23 November 2021 November 23, 2021

Sekretaris Dewan Komisaris

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya agar dapat berjalan lebih efektif, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris mempunyai tugas terutama dalam membantu proses administrasi dan koordinasi antara anggota Dewan Komisaris serta Dewan Komisaris dengan Direksi dan dengan pihak lainnya.

To assist the duties of the Board of Commissioners in carrying out their duties so that they can run more effectively, the Board of Commissioners is assisted by the Secretariat of the Board of Commissioners. The Secretariat of the Board of Commissioners has the main task of assisting the administrative process and coordination between members of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners with the Board of Directors and with other parties.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Zico Andreas Aripratama, S.Si., ASAI
Sekretaris Dewan Komisaris

Lahir di Jakarta, tanggal 27 Juni 1986. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 2009. Beliau mengawali karir di PT Asuransi Kredit Indonesia tahun 2009 dan saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bagian Manajemen Kinerja di PT Asuransi Kredit Indonesia. Pada tahun 2021 tidak ada pelatihan yang diikuti beliau.

Profile of The Secretary of The Board of Commissioners

Zico Andreas Aripratama, S.Si., ASAI
Secretary of the Board of Commissioner

Born in Jakarta on June 27, 1986. He earned his Bachelor's Degree from Padjadjaran University, Bandung in 2009. He started his career at PT Asuransi Kredit Indonesia in 2009 and currently also serves as Head of Performance Management at PT Asuransi Kredit Indonesia. In 2021, he did not attend any training.

Direksi
BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan hukum yang berlaku.

Board of Directors is organ of the company that is authorized and fully responsible for the management of the company, for the benefit of the company, in accordance with the purpose and objectives of the company and representing the company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable legal regulations.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan, Direksi bertanggung jawab secara kolektif kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Member of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. Each member of the Board of Directors carries out duties and makes decisions in accordance with the division of duties and authority of each. However, in carrying out corporate management tasks, the Directors are collectively responsible to the GMS. The accountability of the Board of Directors to the GMS is an embodiment of the accountability of corporate management in the context of implementing the principles of GCG.

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja Direksi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

The performance of the Board of Directors is evaluated by the Board of Commissioners both individually and collectively based on the elements of the Board of Directors' performance evaluation. The assessment is carried out at the end of each book-closing period. The results of the assessment of the performance of the Board of Directors by the Board of Commissioners are presented at the GMS.

Landasan Hukum

Selain Anggaran Dasar Perusahaan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi NASIONAL RE senantiasa mengacu pada UU dan peraturan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu tugas dan tanggung jawab Direksi juga mengacu pada berbagai kebijakan Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas berwenang lainnya yang terkait.

Legal Basis

In addition to the Company's Articles of Association, the implementation of the duties and responsibilities of the NASIONAL RE Board of Directors always refers to applicable laws and legal regulations, including:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
3. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises.

In addition, the duties and responsibilities of the Board of Directors also refer to various policies of the Ministry of SOE, the Financial Services Authority and other relevant authorities.

Sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang, Direksi Perusahaan wajib memenuhi persyaratan Integritas, kompetensi, dan dinyatakan lulus *Fit and Proper Test*, serta memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit atau membuat pailit suatu perusahaan pada saat menjabat sebagai Direksi atau Anggota Dewan Komisaris dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, Direksi juga tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum ditunjuk sebagai Direksi.

Seluruh anggota Direksi NASIONAL RE telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut di atas.

As required by law, Company Directors must fulfill the requirements of Integrity, competence, and be declared passing the Fit and Proper Test, and have good character and morals, have never been declared bankrupt or bankrupt a company while serving as Directors or Board Members Commissioner in the last 5 (five) years. In addition, the Directors have also never been convicted of a criminal offence in the financial sector within 5 (five) years before being appointed as Directors.

All members of the NASIONAL RE Board of Directors have fulfilled all of the above provisions.

Pedoman Kerja Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Direksi *(Board Manual)* sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia. Pedoman Kerja Direksi disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 54/KEP/ DIR/XII/2017 bulan Desember 2017.

Pedoman Kerja Direksi antara lain menjabarkan:
1. Fungsi Direksi;
2. Komposisi dan Persyaratan Direksi;
3. Prosedur Pencalonan dan Penunjukan Direksi
4. Pembentukan Tim Evaluasi
5. Proses Penjaringan
6. Proses Fit and Proper Test
7. Proses Penetapan;
8. Remunerasi dan Masa Jabatan;
9. Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Wewenang dan Kewajiban;
10. Pembagian Tugas Direksi;
11. Rapat Direksi dan Mekanisme Pengambilan Keputusan;
12. Pengukuran Kinerja Direksi;
13. Independensi (Kemandirian) Direksi;
14. Etika Jabatan Direksi
15. Komite/Satuan Kerja di Tingkat Direksi;
16. Program Pengenalan dan Peningkatan Pengetahuan/ Kompetensi.

Board of Directors' Manual (Board Manual)

Implementation of Board of Directors' duty and responsibility refers to Board of Directors Manual (Board Manual) as disclosed in Work Manual for Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors of PT Reasuransi Nasional Indonesia. The Board of Directors Manual is ratified through Board of Directors Decree No. 54/KEP/DIR/XII/2017 in December 2017.

Board of Directors Manual describes the following guidelines:
1. Board of Directors' Function
2. Board of Directors' Composition and Requirements
3. Board of Directors Nomination and Appointment Procedure
4. Establishment of Evaluation Team
5. Selection Process
6. Fit and Proper Test Process
7. Appointment Process
8. Remuneration and Terms of Office
9. Duty, Function, Responsibility, Authority and Obligation
10. Board of Directors Division of Duty
11. Board of Directors' Meetings and Decision- Making Mechanism
12. Board of Directors Performance Appraisal
13. Board of Directors' Independency
14. Board of Directors' Position Ethics
15. Committees/Unit under Board of Directors
16. Orientation and Training/Competency Development Program.

Wewenang dan Kewajiban Direksi Secara Kolegial

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau keputusan RUPS, dalam menjalankan tugasnya, Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain untuk mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak-pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Sedangkan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

Collegial Authority and Obligations of The Board of Directors

As stipulated in legislation, Articles of Association and/or GMS decisions, in carrying out their duties, the Board of Directors has the following authorities:

1. Establish the Company's management policy.
2. Regulates the delegation of authority of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company inside and outside the court.
3. Regulates the delegation of authority of the Board of Directors to one or several employees of the Company both individually or jointly or to other people to represent the Company inside and outside the court.
4. Regulates the provisions regarding the employment of the Company, including the stipulation of salaries, pensions or old age benefits and other income for workers who exceed the obligations stipulated by legislation, must obtain prior approval from the GMS.
5. To appoint and dismiss Company employees based on the Company's staffing regulations and applicable laws and regulations.
6. Appoint and dismiss the Corporate Secretary.
7. Carry out all other actions and actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the court regarding all matters and events, with restrictions as stipulated in legislation, articles of association and/or GMS decisions.

The Board of Directors' obligations are as follows:

1. To ensure that the Company's business and activities are in accordance with the purposes and objectives of the Company.
2. Preparing the Company's Long-Term Plan, Corporate Work Plan & Budget, and changes in a timely manner to be submitted to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain the approval of the GMS.

3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapus-bukuan piutang.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan.
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.

3. Provide an explanation to the GMS regarding the Company's Long-Term Plan and Company Work Plan & Budget.
4. Make a List of Shareholders, Special List of Minutes of GMS and Minutes of Board of Directors' Meetings.
5. Prepare the Annual Report as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as referred to in the Law concerning Company Documents.
6. Prepare Financial Reports based on the Financial Accounting Standards and submit to the Public Accountant for auditing.
7. Submitting the Annual Report including the Financial Report to the GMS to be approved and ratified as well as a report on the rights of the Company that is not recorded in the book, among others, as a result of the write-off of the accounts.
8. Give an explanation to the GMS regarding the Annual Report.
9. Delivering the Balance Sheet and Profit and Loss Report that has been ratified by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of the legislation.
10. Submitting reports of changes in the composition of Shareholders, Directors and Board of Commissioners to the Minister in charge of Law and Human Rights.
11. Maintain the List of Shareholders, Special Lists, Minutes of GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners, Minutes of Directors' Meetings, Annual Reports and Company financial documents.
12. Store at the Company's domicile: List of Shareholders, Special Lists, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings, Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports and Company financial documents and other Company documents.
13. Prepare the accounting system in accordance with the Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage, and supervision.
14. Provide periodic reports in a manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders.
15. Prepare the composition of the Company's organization complete with details and duties.

16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.

16. Provide an explanation of everything that is asked or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders.
17. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the articles of association and stipulated by the GMS in accordance with the laws and regulations.

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direktur

Jumlah anggota Direksi NASIONAL RE berjumlah 4 (empat) orang, yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan beranggotakan 3 (tiga) orang Direktur.

Sesuai struktur organisasi perusahaan pembagian tugas di antara anggota Direksi yang ditetapkan oleh RUPS, adalah sebagai berikut:

Scope and Responsibilities of Each Director

The number of members of the NASIONAL RE Directors is 4 (four) people, led by a President Director and consisting of 3 (three) Directors.

In accordance with the company's organizational structure, the division of duties between members of the Board of Directors determined by the GMS is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi., MBA., AAIK., AAK., AIIS.	Direktur Utama President Director	Mengkoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kebijakan kepengurusan perusahaan. Untuk tindakan tertentu, sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Selain itu, membawahi secara langsung unit kerja sebagai berikut: a. Divisi Manajemen Risiko b. Satuan Kerja Audit Internal c. Satuan Kerja Kepatuhan d. Divisi Sekretariat Perusahaan Coordinate the determination and implementation of company management policies. For certain actions, according to the Company's Articles of Association, the Board of Directors must obtain approval from the Board of Commissioners first. In addition, the Directors also directly oversees the following work units: a. Risk Management Division b. Internal Audit Unit c. Compliance Unit d. Corporate Secretariat Division
Fitris Dinarwan, S.T., M.M., ACII., CRGP.	Direktur Teknik Technical Director	Membawahi secara langsung beberapa unit kerja, yaitu: a. Divisi *Management Portfolio & Administration* Reasuransi Jiwa b. Divisi *Management Portfolio & Administration* Rasuransi Umum c. Klaim d. Aktuaria Directly oversees several work units, namely: a. Life Reinsurance Portfolio Management & Administration Division b. General Insurance Portfolio Management & Administration Division c. Claim d. Actuarial

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
Sunarso, S.E., M.M., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP.	Direktur Keuangan & SDM Finance & HR Director	Membawahi secara langsung beberapa unit kerja, yaitu: a. Divisi Keuangan & Akuntansi b. Divisi SDM & Umum c. Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) Directly oversees several work units, namely: a. Finance & Accounting Division b. HR & General Affairs Division c. Information & Communication Technology Division (ICT)
Erlan Risdiyanto, SE., AMII., ACII., CRGP.	Direktur Operasi Operation Director	Membawahi secara langsung beberapa unit kerja, yaitu: a. Divisi Syariah b. Divisi *Underwriting & Development* Reasuransi Jiwa c. Divisi Treaty d. Divisi Fakultatif Directly oversees several work units, namely: a. Sharia Division b. Life Reinsurance Underwriting & Development Division c. Treaty Division d. Facultative Division

Kebijakan Penunjukan Direktur Pengganti

Dalam hal salah satu Direktur berhalangan hadir karena menjalani tugas di dalam ataupun ke luar negeri, maka pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila Direktur Utama berhalangan hadir; maka Direktur Utama membuat Nota Dinas penunjukan salah satu Direktur pengganti, untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Pejabat Direktur Utama.
2. Apabila Direktur bidang berhalangan hadir; maka Direktur dimaksud membuat Nota Dinas pelimpahan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Direktur Utama ataupun Direktur bidang lainnya.

Policy on Alternate Director

In the absence of one of the Directors, due to carrying out duties inside or outside the country, then the arrangements are as follows:

1. In the absence of the President Director; then the President Director shall make an official note designating one of the Directors, to carry out the duties, authorities and responsibilities as Acting President Director.
2. In the absence of the Director; then the Director in question shall make an official note assigning duties, authority and responsibility to the President Director or other Director.

Pernyataan Independensi Direksi

Direksi NASIONAL RE diwajibkan untuk senantiasa menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas, dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun dan wajib bertindak independen demi kepentingan Perusahaan.

Direksi NASIONAL RE menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan pada saat pengangkatan Direksi secara resmi.

Untuk itu Perusahaan menyusun ketentuan berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun tidak diperkenankan untuk melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan.
2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
3. Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.
4. Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Direksi dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Independency Statement of The Board of Directors

The Board of Directors of NASIONAL RE is required to always maintain its independence in carrying out their duties, and must not be affected by pressure from any party and must act independently in the interest of the Company.

The Board of Directors of NASIONAL RE signed the Statement of Integrity and non-Dual Position when officially appointed as the Board of Directors.

For this reason, the Company composes the following provisions:

1. Aside of the Board of Directors, any other party is not permitted to conduct or to interfere in the management of the Company.
2. The Board of Directors must be able to make decisions objectively, without conflicts of interest and free from any pressure from any party.
3. The Board of Directors are prohibited from carrying out activities that can interfere with their independence in managing the Company.
4. The Board of Directors must sign the Integrity Pact as a form of commitment of the Board of Directors in carrying out the Company's activities which can lead to conflicts of interest.

Kebijakan Suksesi Direksi

Pada prinsipnya, Direksi menyampaikan kandidat untuk dicalonkan sebagai suksesornya, dengan berpendoman pada hasil *assessment* oleh konsultan eksternal dan penilaian Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya, Direksi mengajukannya kepada Pemegang Saham untuk menjalani *fit & proper test*. Namun demikian, pemegang saham mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan personel yang memenuhi kualifikasi, layak dan kredibel untuk diangkat menjadi Direksi.

Board of Directors' Succession Policy

In principle, the Board of Directors shall submit candidates to be nominated as successors, based on the assessment results by external consultants and the assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors. Furthermore, the Board of Directors submit it to Shareholders to pass a fi t & proper test. However, shareholders have full authority to decide which personnel fulfills the qualifications, feasible and credible to be appointed as the Board of Directors.

Komposisi Direksi

Saat ini Direksi Perusahaan berjumlah 4 (empat) orang yang seluruhnya telah lolos *fit and proper test*. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Berikut adalah susunan Direksi Perusahaan:

Composition of The Board of Directors

Currently, the Company's Board of Directors consists of 4 (four) Directors, all of whom have passed the fi t and proper test. Each member of the Board of Directors has sufficient competence and experience to carry out their respective duties.

The following is the composition of the Company's Board of Directors;

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode Jabatan Terms of Office
1.	Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi, MBA., AAIK., AAK., AIIS.	Direktur Utama President Director	Risalah RUPSLB tanggal 11 Oktober 2021 EGMS Minutes of Meeting, October 11,2021	5 tahun 5 Years
2.	Fitris Dinarwan, S.T., M.M., ACII., CRGP.	Direktur Teknik Technical Director	Risalah RUPSLB tanggal 9 Oktober 2017 EGMS Minutes of Meeting, October 9,2017	5 tahun 5 Years
3.	Sunarso, S.E.,M.M., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP.	Direktur Keuangan & SDM Finance & HR Director	Risalah RUPSLB tanggal 17 Januari 2019 EGMS Minutes of Meeting, January 17,2019	5 tahun 5 Years
4.	Erlan Risdiyanto, S.E., AMII., ACII., CRMO., CRGP.	Direktur Operasi Operational Director	Risalah RUPSLB tanggal 9 Oktober 2017 EGMS Minutes of Meeting, October 9,2017	5 tahun 5 Years

Rapat Direksi

Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam setahun, sebagaimana ketentuan POJK No. 73 Pasal 15 dan Peraturan Menteri BUMN No 01/2011 Pasal 24.

Direksi dapat mengundang staf perusahaan untuk hadir dalam Rapat Direksi. Rapat Direksi dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh dari jumlah Direksi. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

Board of Directors' Meeting

Board of Directors Meetings must be held at least 12 (twelve) times a year, as stipulated in the Financial Services Authorities Regulation POJK No. 73 Article 15 and the Regulation of the Minister of SOEs No. 01/2011 Article 24.

The Board of Directors can invite Company's staff to attend the Board of Directors Meeting. Board of Directors' meetings are declared lawful if attended by more than half of the Board of Directors. The Board of Directors' meeting is chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent or unavailable, the Board of Directors' Meeting shall be chaired by another member of the Board of Directors appointed by the President Director.

Rapat Internal Direksi

Selama tahun 2021 Direksi mengadakan Rapat Direksi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pertemuan dengan rata-rata tingkat kehadiran 99,25%. Adapun rincian kehadirannya adalah sebagai berikut:

Board of Directors' Internal Meeting

In 2021 the Board of Directors held 33 (thirty three) Board of Directors meetings with an average attendance rate of 99.25%. Details of the attendance are as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
1.	Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi, MBA., AAIK., AAK., AIIS.*	Direktur Utama President Director	6	6	100%
2.	Fitris Dinarwan, S.T., M.M., ACII., CRGP.	Direktur Teknik Technical Director	33	33	100%
3.	Sunarso, S.E.,M.M., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP.	Direktur Keuangan & SDM Finance & HR Director	33	33	100%
4.	Erlan Risdiyanto, S.E., AMII., ACII., CRMO., CRGP.	Direktur Operasi Operation Director	33	32	97%

* Sesuai jumlah rapat sejak pengangkatan sebagai Direktur Utama
In accordance with total meeting since the appointment as President Director

Program Orientasi dan Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Program Pengenalan informasi dasar perusahaan kepada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru menjabat, meliputi:

1. Informasi atau pengetahuan internal:
   a. Sejarah perusahaan.
   b. Visi, Misi, Nilai-Nilai perusahaan serta sasaran perusahaan.
   c. Struktur organisasi dan kerangka kerjanya, termasuk infrastruktur yang dimiliki perusahaan.
   d. Piagam Direksi dan Dewan Komisaris.
   e. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
   f. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berjalan.
   g. Perkembangan kinerja perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir.
   h. Proses bisnis dan jenis produk perusahaan.
   i. Manajemen risiko perusahaan.
   j. Kebijakan perusahaan.
   k. Fungsi audit internal dan eksternal.
   l. Informasi lainnya yang relevan.
2. Informasi atau pengetahuan eksternal berkaitan dengan kegiatan perusahaan:
   a. Pengembangan eksternal yang mencakup politik, ekonomi, sosial, teknologi, dll.
   b. Posisi perusahaan dibandingkan dengan kompetitor, pemasok, mitra usaha dan *stakeholders* lain.

Board of Directors' Orientationand Competency Development Program

Introduction on basic information of the Company to newly appointed members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners includes:

1. Internal Information or knowledge:
   a. Company history.
   b. Vision, Mission, Corporate Values and Company goals.
   c. The organizational structure and framework, including infrastructure owned by the Company.
   d. Charter of the Board of Directors and Board of Commissioners.
   e. The Company's Long-Term Budget Plan.
   f. The current year of Corporate Budget Plan.
   g. Development of the Company's performance for the past 5 (five) years.
   h. The business processes and types of the Company's products.
   i. Company's risk management.
   j. Company's policy.
   k. Internal and external audit functions.
   l. Other relevant information.
2. Information or external knowledge relating to company activities:
   a. External development which includes politics, economy, social, technology, etc.
   b. The position of the company is compared to competitors, suppliers, business partners and other stakeholders.

c. Hubungan dan kewajiban dengan *regulator* dan lembaga terkait lainnya.
d. Undang-undang dan peraturan terkait.
e. Informasi eksternal yang relevan.

3. Salinan dokumen yang disampaikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru menjabat adalah:
   a. Piagam Direksi dan Dewan Komisaris.
   b. Anggaran Dasar.
   c. Laporan Tahunan tahun terakhir.
   d. RJP dan kontrak manajemen terakhir.
   e. Jadwal dan agenda rapat.
   f. Risalah rapat.
   g. Struktur organisasi dan uraian kerja.
   h. Laporan audit internal dan eksternal.
   i. Undang-undang dan peraturan lainnya.

c. Relations and obligations with regulators and other relevant institutions.
d. Related laws and regulations.
e. Relevant external information.

3. Copies of documents submitted to the newly appointed Directors and/or Board of Commissioners are:
   a. Charter of the Board of Directors and Board of Commissioners.
   b. Articles of Association.
   c. Last year's Annual Report.
   d. Short-Term Budget Plan and the last management contract.
   e. Meeting schedule and agenda.
   f. Minutes of meetings.
   g. Organizational structure and job description.
   h. Internal and external audit reports.
   i. Other laws and regulations.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2021, Direksi mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau *workshop*, yang dapat disajikan sebagai berikut:

The Board of Directors' Competency Development Program

In 2021, the Board of Directors attended various training programs, conferences, seminars or workshops, as presented in the following table:

No.	Nama Name	Jabatan Position	*Workshop / Training / Seminar*	Penyelenggara Organizer	Tempat & Tanggal Date & Venue
1.	Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi., MBA., AAIK., AAK., AIIS	Direktur Utama President Director	*Indonesia Fintech Summit 2021* Indonesia Fintech Summit 2021	Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), AFTECH, AFSI dan AFPI	11-12 Desember 2021 December 11-12, 2021
			Pembicara FGD Digitalisasi di Asuransi Kesehatan: Transformasi Digital di Asuransi Kesehatan, Masalah & Pemecahannya FGD Speakers on Digitalization in Health Insurance: Digital Transformation in Health Insurance, Problems & Solutions	Media Asuransi	28 Oktober 2021 October 28, 2021
			FGD IFRS Insurance Contract/PSAK 74 Kontrak Asuransi FGD IFRS Insurance Contract/PSAK 74 Insurance Contract	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	17 Desember 2021 December 17, 2021

No.	Nama Name	Jabatan Position	*Workshop / Training / Seminar*	Penyelenggara Organizer	Tempat & Tanggal Date & Venue
2.	Fitris Dinarwan, S.T., MM., ACII., CRGP.	Direktur Teknik Technical Director	*Workshop Actuary From Zero* Workshop Actuary From Zero	Nityasa Niscita Solusi	20 Maret 2021 March 20, 2021
			Webinar Actuary: How to quickly perform data cleansing, How to calculate provision for adverse deviation, How to perform early identification of fraudulent claim Actuary Webinar: How to quickly perform data cleansing, How to calculate provision for adverse deviation, How to perform early identification of fraudulent claim	IFG - NASIONAL RE - Munich Re	18 Agustus 2021 August 18, 2021
			Webinar Leadership Dalam Masa Pandemi Leadership Webinar During a Pandemic	PT Kubik Kreasi Sisilain	20 Agustus 2021 August 20, 2021
			The Digital Consumers in Indonesia: What do we know The Digital Consumers in Indonesia: What do we know	Swiss Re	
			Webinar KSAK "Handling Surety Claims Recovery & Growth Strategy in Bank Guarantee Insurance" KSAK Webinar "Handling Surety Claims Recovery & Growth Strategy in Bank Guarantee Insurance"	KSAK	24 Agustus 2021 August 24, 2021
			CEO Gathering AAUI 2021 CEO Gathering AAUI 2021	AAUI	28 Agustus 2021 August 28, 2021
			Webinar Actuary: Techniques on How to do Optimal Clustering for premium pricing Actuary Webinar: Techniques on How to do Optimal Clustering for premium pricing	IFG - NASIONAL RE - ARB Singapore	3 September 2021 September 3, 2021
			Undangan mengajar, tema webinar: Pencegahan penyuapan melalui penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001 dan Pemaparan SE KPK tentang pengendalian Gratifikasi terkait industri Jasa Keuangan Invitation to teach, webinar theme: Prevention of bribery through the application of an ISO 37001-based anti-bribery management system (SMAP) and Presentation of SE KPK on Gratification control related to the Financial Services industry	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	9 September 2021 September 9, 2021

No.	Nama Name	Jabatan Position	*Workshop / Training / Seminar*	Penyelenggara Organizer	Tempat & Tanggal Date & Venue
			Webinar KABMN KABMN Webinar	Munich Re	21 September 2021 September 21, 2021
			Ruschlikon Webinar: Introduction to Ruschlikon - Asia Pacific Region Ruschlikon Webinar: Introduction to Ruschlikon - Asia Pacific Region	Swiss Re	5 Oktober 2021 October 5, 2021
			Webinar Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan waspada Investasi Ilegal di Indonesia Webinar Development of Digital Financial Innovation and Beware of Illegal Investments in Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	7 Oktober 2021 October 7, 2021
			OJK Virtual Innovation Day 2021 OJK Virtual Innovation Day 2021	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	11-12 Oktober 2021 October 11-12, 2021
			Webinar "Risk Awareness Dalam Rangka Peningkatan Kinerja" Webinar "Risk Awareness for Performance Improvement"	PT Askrindo	30 November 2021 November 30, 2021
			Workshop Review & Modify Cadangan Teknis Workshop Review & Modify Technical Reserve	AAUI	14 Desember 2021 December 14, 2021
			Webinar "Membangun Budaya Anti Suap Melalui Implementasi SMAP" Webinar "Building Anti-Bribery Culture Through SMAP Implementation"	IFG	22 Desember 2021 December 22, 2021
3.	Sunarso, S.E., M.M., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP.	Direktur Keuangan & SDM Finance & HR Director	Diskusi Manajemen dengan topik Menyelamatkan Garuda, secara *online* Management Discussion on the topic of Saving Garuda, online	Intipesan	8 Juni 2021 June 8, 2021
			Workshop Internal Control - COSO 2017 & Business Judgement Rule (BJR) Internal Control Workshop - COSO 2017 & Business Judgement Rule (BJR)	PT Asia Strategi Konsulting	24-25 Juni 2021 June 24-25, 2021

No.	Nama Name	Jabatan Position	*Workshop / Training / Seminar*	Penyelenggara Organizer	Tempat & Tanggal Date & Venue
			Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday Webinar: Indonesia Digital Insurance 2021 and Beyond - Exploring New Horizon through Innovation on Tuesday	AAUI	29 Juni 2021 June 29, 2021
			Undangan Refleksi Setahun AKHLAK BUMN dan Penganugerahan AKHLAK Award, secara *online* Invitation for a Year's Reflection of SOEs' AKHLAK and the AKHLAK Award, online	PT ACT Consulting	14 Juli 2021 July 14, 2021
			Webinar Leadership Dalam Masa Pandemi Leadership Webinar During a Pandemic	PT Kubik Kreasi Sisilain	20 Agustus 2021 August 20, 2021
4	Erlan Risdiyanto, S.E., AMII., ACII., CRMO., CRGP.	Direktur Operasi Operation Director	Sosialisasi POJK 28/2020 dan SE-OJK 1/2021 TKS Asuransi Socialization of POJK 28/2020 and SE-OJK 1/2021 TKS Insurance	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	9 Februari 2021 February 9, 2021
			CEO Gathering AAUI 2021 CEO Gathering AAUI 2021	AAUI	22 Februari 2021 February 22, 2021
			7th AAUI International Insurance (Virtual) Seminar - Catastrophe Management - Hanessing Local and Global Insurance Industry 7th AAUI International Insurance (Virtual) Seminar - Catastrophe Management - Hanessing Local and Global Insurance Industry	AAUI	30 April 2021 April 30, 2021
			Webinar Leadership Dalam Masa Pandemi Leadership Webinar During a Pandemic	PT Kubik Kreasi Sisilain	20 Agustus 2021 August 20, 2021
			Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Focus Group Discussion (FGD) Implementation of Aceh Qanun for Islamic Financial Institutions	AAUI	4 Oktober 2021 October 4, 2021
			CEO Gathering AAJI 2021 CEO Gathering AAJI 2021	AAJI	8 Oktober 2021 October 8, 2021

No.	Nama Name	Jabatan Position	*Workshop / Training / Seminar*	Penyelenggara Organizer	Tempat & Tanggal Date & Venue
			Master Class Program Series XXI "Competitive Strategy in a Changing Business Environment (Surfing The Wave of Pandemic & Disruptions)" Master Class Program Series XXI "Competitive Strategy in a Changing Business Environment (Surfing The Wave of Pandemic & Disruptions)"	LSPMR	2-3 Desember 2021 December 2-3, 2021
			Workshop Spin Off dan Manajemen Risiko dalam Penerapan *Spin-off* Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Workshop on Spin Off and Risk Management in the Implementation of Spin-off for Insurance and Reinsurance Companies	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	14 Desember 2021 December 14, 2021

Hubungan Afiliasi

Seluruh anggota Direksi beserta keluarganya tidak memiliki saham pada perusahaan yang terafiliasi dengan NASIONAL RE.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya atau dengan anggota Dewan Komisaris, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda.

Dengan demikian, Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, mandiri serta tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan Perusahaan.

Affiliated Relations

All members of the Board of Directors and their families do not own shares in companies affiliated with NASIONAL RE.

All members of the Board of Directors do not have family relations with other Directors or members of the Board of Commissioners, and do not have family ties to the third degree either in a straight line or sideways or seminal relationship.

Thus, the Board of Directors can carry out their duties and responsibilities independently, and do not have a conflict of interest between personal interests, family and relatives, other positions or groups with the interests of the Company.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Setiap tahun Direksi menandatangani kontrak Manajemen/ *Key Performance Indicator* dengan Pemegang Saham yang menyebutkan sasaran yang harus dicapai selama setahun.

Performance Assessment of The Board of Directors

Each year the Board of Directors signs a Management/Key Performance Indicator contract with Shareholders stating the goals to be achieved for a year.

Kebijakan Remunerasi Direksi

Penetapan Remunerasi Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 01/MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 dimana selanjutnya diajukan dan diputuskan dalam RUPS, dimana untuk realisasinya dengan mempertimbangkan prestasi KPI Direksi dan Dewan Komisaris.

Remunerasi Direksi meliputi gaji, tunjangan pakaian, tunjangan hari raya, dan tantiem yang telah dibayarkan pada tahun 2021, sebagai berikut:

Policy on The Remuneration of The Baord of Directors

Determination of the Remuneration of the Board of Directors refers to Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01/MBU/06 2017 concerning Second Amendment to Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 wherein it is subsequently submitted and decided at the GMS, where it is realized by considering the achievements of the Board of Directors and Board of Commissioners KPI.

The remuneration of the Board of Directors includes salaries, clothing allowances, holiday allowances and bonuses paid in 2021 is as follows:

Keterangan Description	Jumlah Orang Number of Person	Jumlah Nominal Total Amount
Remunerasi (termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan *(benefit)*, kompensasi. Remuneration (including salaries and other fixed income, including benefits), compensation.	4	Rp4.800.000.000
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya). Other facilities in the form of in kind (housing, transportation, health insurance and other remunerations).		
Jumlah **Total**		**Rp4.800.000.000**

Keberagaman Komposisi Direksi

Komposisi Direksi NASIONAL RE per 31 Desember 2021 telah mencerminkan keberagaman dalam hal pengalaman, latar belakang pendidikan, dan kompetensi sehingga seluruh anggota Direksi dapat saling mendukung dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebaik mungkin.

Diversity in The Composition of The Board of Directors

The composition of the Board of Directors of NASIONAL RE of December 31, 2021 has reflected diversity in terms of experience, educational background, and competence so that all members of the Board of Directors can support each other in carrying out their duties and obligations as well as possible.

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perusahaan.

Audit Committee

The establishment of the Audit Committee strengthens the supervisory function of the Board of Commissioners and can increase public trust in the management of the Company.

Piagam Komite Audit

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit, Perusahaan telah menyusun Piagam *(Charter)* Komite Audit sebagai program kerja atau landasan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit secara transparan, kompeten, objektif dan independent serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Piagam Komite Audit telah diperbarui dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 10 Februari 2020.

Piagam Komite Audit antara lain berisi:
1. Pendahuluan
2. Tujuan
3. Organisasi
4. Kualifikasi
5. Remunerasi dan Masa Jabatan
6. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab, Kewajiban
7. Rapat Komite
8. Independensi dan Etika Kerja
9. Administrasi dan Dokumentasi
10. Pelaporan
11. Penilaian Kinerja
12. Hubungan Kerja
13. Peningkatan Pengetahuan
14. Penutup

Audit Committee Charter

To support the implementation of the Audit Committee's duties, the Company has compiled the Audit Committee Charter as a work program or work foundation to support the implementation of the Audit Committee's duties in a transparent, competent, objective and independent manner and can be accountable to other parties in accordance with applicable regulations.

The Audit Committee Charter was updated and ratified by the Board of Commissioners on February 10, 2020.

The Audit Committee Charter includes:
1. Introduction
2. Purpose
3. Organization
4. Qualifications
5. Remuneration and Term of Office
6. Authority, Duties and Responsibilities, Obligations
7. Committee Meeting
8. Independence and Work Ethics
9. Administration and Documentation
10. Reporting
11. Performance Appraisal
12. Employment Relations
13. Knowledge Enhancement
14. Closing

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) maupun auditor ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan pengawas dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.

Duties and Responsibilities

The Audit Committee has duties and responsibilities:
1. Assessing the implementation of activities and the results of audits conducted by the Internal Audit Unit (SKAI) and external auditors so that the implementation of supervisors and reporting that cannot meet the standards can be prevented.

2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan PT Reasuransi Nasional Indonesia termasuk laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada Pemegang Saham.
4. Mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Provide recommendations on improving the management control system of the company and its implementation.
3. Ensure that there are satisfactory review procedures for information issued by PT Reasuransi Nasional Indonesia insurance including periodic financial statements, projections/forecasts and other financial information submitted to Shareholders.
4. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners.
5. Carrying out other duties given by the Board of Commissioners insofar as they are within the scope of the duties and obligations of the Board of Commissioners based on the provisions in the Company's Articles of Association and applicable laws.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Untuk dapat menduduki posisi sebagai anggota Komite Audit maka kandidat harus memenuhi prasyarat berikut ini:

1. Memiliki pengetahuan memadai mengenai industri asuransi termasuk segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pelaporan keuangan atau audit.
3. Mampu berkomunikasi efektif.
4. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
5. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
6. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.
7. Memiliki pemahaman tentang konsep *auditing*.
8. Menjadi anggota organisasi profesi Komite Audit.

Educational Qualifications and Work Experience of Audit Committee Members

To be able to hold a position as a member of the Audit Committee, the candidate must fulfill the following requirements:

1. Have adequate knowledge of the insurance industry including all applicable rules and regulations.
2. Having educational background and experience in the fi eld of financial reporting or auditing.
3. Able to communicate effectively.
4. Have high mental and ethical and professional responsibilities.
5. Having adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance (GCG).
6. Having adequate understanding of the concept of risk and risk control in business activities and internal control of the company.
7. Have an understanding of the concept of auditing.
8. Become a member of the Audit Committee's professional organization.

Independensi Komite Audit

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan NASIONAL RE.

Anggota Komite Audit tidak memiliki wewenang untuk merancang, memimpin maupun mengendalikan Perusahaan sebelum menjabat dan bukan merupakan mantan pimpinan maupun pegawai Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan Perusahaan.

Susunan Komite Audit

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Teddy Sastra
2. Anggota : Siti Asuroh
3. Anggota : Ai Supardini

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sedikitnya 12 (dua belas) kali dalam setahun sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit.

Pada tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas).

Independence of Audit Committee

To maintain and enhance independence in the implementation of duties and giving opinions, recommendations and suggestions to the Board of Commissioners, all members of the Audit Committee are prohibited from having financial or family relations up to the third degree with members of the Board of Directors, Board of Commissioners or controlling shareholders, nor shareholders company, or serving as Commissioner, Director or employee of a company that has affiliation or business with NASIONAL RE.

The Audit Committee members do not have the authority to design, lead or control the Company before serving and not being a former Head or employee of a Public Accountant Office that checks the Company's books.

Audit Committee Composition

The composition of the Audit Committee as of December 31, 2021 is as follows:

1. Chairman : Teddy Sastra
2. Member : Siti Asuroh
3. Member : Ai Supardini

Audit Committee Meeting

The Audit Committee meets in accordance with the needs of the Company at least 12 (twelve) times a year as stipulated in the Audit Committee Charter.

In 2021, the Audit Committee has held 13 (thirteen) meetings.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2021

Pada tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan tugas, sebagai berikut:

Pengawasan dan *Monitoring*

1. Melakukan *review* kepada masing-masing Bidang di dalam perusahaan melalui laporan hasil audit yang dilakukan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
2. Melakukan rekomendasi kepada Direksi untuk melakukan *"reward and punishment"* kepada karyawan.
3. Melakukan pengawasan atas laporan tindak lanjut atas pemeriksaan.
4. Melakukan *review* kinerja Bidang Operasional, Investasi, Akuntansi dan Keuangan, Organisasi dan SDM, Bidang lainnya.
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kepatuhan GCG.
6. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap peningkatan fungsi SKAI.
7. Melakukan rapat kerja dengan SKAI secara keberlanjutan.

Aspek Pelaporan

Menyampaikan laporan pendapat saran kepada Komisaris Perusahaan, berupa:

1. Laporan rutin kinerja bulanan (Januari - Desember 2021).
2. Laporan kinerja secara triwulan (Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, Triwulan IV).
3. Laporan kinerja kegiatan tahunan (Per 31 Desember 2021).

Brief Report of The Duties Implementation of The Audit Committee In 2021

In 2021, the Audit Committee has carried out the following duties:

Supervision and Monitoring

1. Conduct a review of each Sector in the company through an audit report conducted by the Internal Supervisory Unit (SPI).
2. Prepare recommendations to the Board of Directors to administer "reward and punishment" to employees.
3. Monitor the follow-up report on the inspection.
4. Review performance of the Operations, Investment, Accounting and Finance, Organizations and HC, other fields.
5. Evaluate the implementation of compliance with the prevailing laws and regulations as well as evaluate implementation of GCG compliance.
6. Evaluate and recommend improvement on SPI function.
7. Arrange work meetings with SPI in a sustainable manner.

Reporting Aspects

Submit a suggestion report to the Company's Commissioner.

1. Regular monthly performance reports (January - December 2021).
2. Quarterly performance reports (1st Quarter, 2nd Quarter, 3rd Quarter, 4th Quarter).
3. Annual activity performance report (As of December 31, 2021).

Aspek Dinamis

1. Memberikan usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
2. Evaluasi dan memberikan masukan konsultan manajemen dan lainnya serta evaluasi bidang lainnya.

Dynamic Aspects

1. Provide a proposal to appoint a Public Accountant Office.
2. Evaluate and provide input to management and other consultants and other fields of evaluation.

Garis Besar Rekomendasi Komite Audit

1. Rekomendasi kepada Divisi Klaim terkait percepatan penyelesaian Klaim.
2. Rekomendasi kepada Divisi Manajemen Risiko terkait penetapan *Risk Officer*.
3. Rekomendasi kepada SKAI terkait penerapan *Risk Based Internal Audit* (RBIA) kepada SKAI.
4. Rekomendasi kepada Divisi TIK tentang program kerja Divisi TIK.
5. Rekomendasi kepada SKAI terkait ketepatan pelaporan Laporan Hasil Audit (LHA).
6. Rekomendasi kepada Divisi Keuangan terkait Investasi Perusahaan.

Outline of The Audit Committee Recommendation

1. Recommendation to the Claims Division regarding the acceleration of Claim settlement.
2. Recommendation to the Risk Management Division regarding the determination of the Risk Officer.
3. Recommendation to IAU regarding the application of Risk-Based Internal Audit (RBIA) to IAU.
4. Recommendations to the ICT Division about the ICT Division's work program.
5. Recommendations to the IAU regarding the accuracy of Internal Audit Report.
6. Recommendations to the Finance & Accounting Division regarding Company Investments.

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Selama tahun 2021, Komite Audit mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau *workshop*, yang dapat disajikan sebagai berikut:

The Audit Committee's Competency Development Program

In 2021, the Audit Committee attended various training programs, conferences, seminars or workshops, as presented in the following table:

No.	Nama Name	Jabatan Position	*Workshop / Training / Seminar*	Penyelenggara Organizer	Tempat & Tanggal Date & Venue
1.	Ai Supardini	Anggota Member	Pelatihan dan Sertifikasi CRMO *(Certified Risk Management Officer)*, secara *online* CRMO (Certified Risk Management Officer) Training and Certification, online	PT RAP Asia Consulting - LSPMR	27-29 September dan 1 Oktober 2021 September 27-29 and October 1, 2021

Komite Nominasi dan Remunerasi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari upaya peningkatan GCG dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap kebijakan dan proses penetapan nominasi dan remunerasi Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif lainnya di dalam perusahaan, serta membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota dewan komisaris dan Direksi serta membantu menyusun sistem penggajian, memberikan tunjangan, fasilitas lainnya dan memantau pelaksanaannya.

Komite ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab mencari calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris, yang kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk dapat dipertimbangkan oleh Pemegang Saham.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota

Dalam penentuan anggota komite nominasi dan remunerasi, Perusahaan tidak mempunyai kualifikasi khusus terkait latar belakang pendidikan anggota komite, namun memprioritaskan pengalaman kerja dari kandidat.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan

Nomination and Remuneration Committee

The establishment of the Nomination and Remuneration Committee is part of efforts to improve GCG in order to improve the supervisory function of the Board of Commissioners on the policies and processes for determining the nomination and remuneration of the Company.

Duties and Responsibilities

The Nomination and Remuneration Committee has the duties and responsibilities of arranging selection criteria and nomination procedures for members of the Board of Commissioners, Directors and other executives in the company, as well as creating a valuation system and providing recommendations on the number of commissioners and directors and helping to arrange a payroll system, allowances, other facilities and monitor their implementation.

This committee also has the duties and responsibilities to look for candidates for the Board of Commissioners and Directors to be reported to the Board of Commissioners, which the Board of Commissioners then sends to Shareholders to be considered by the Shareholders.

Educational Qualification and Work Experience of Members of The Nomination and Remunerasion Committee

In determining the nomination and remuneration committee members, the Company does not have special qualifications related to the educational background of the committee members, but prioritizes the work experience of the candidates.

Independence of The Nomination and Remuneration Committee

To maintain and improve the independence in discharging duties and provide opinions, recommendations and suggestions to the Board of Commissioners, all members of the Nomination and Remuneration Committee shall not

ataupun keluarga sampai dengan derajat ke tiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan NASIONAL RE.

have financial or family relations up to the third degree with members of the Board of Directors, Board of Commissioners and controlling shareholders, nor holders company shares, or serving as Commissioners, Directors and employees of companies that are affiliated or business with NASIONAL RE.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia Nomor KEP-05/DK/NR/VIII/2021 tentang Komite Nominasi & Remunerasi PT Reasuransi Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Vinventius Wilianto
2. Anggota : Teddy Sastra
3. Anggota : Yanti Parapat

Nomination and Remuneration Committee Composition

The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2021 based on Decree Letter of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia Number KEP-05/DK/NR/VIII/2021 concerning Nomination & Remuneration Committee of PT Reasuransi Nasional Indonesia is as follows:

1. Chairman : Vinventius Wilianto
2. Member : Teddy Sastra
3. Member : Yanti Parapat

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Nomination and Remuneration Committee Meeting

The Nomination and Remuneration Committee meets in accordance with the needs of the Company stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem manajemen risiko yang dimiliki Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, serta menilai efektivitas manajemen risiko, termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil perusahaan.

Selain itu juga Komite Pemantau Risiko memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan, serta memantau pelaksanaannya.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko, Perusahaan telah menyusun Piagam *(Charter)* Komite Pemantau Risiko sebagai program kerja atau landasan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko secara transparan, kompeten, objektif dan independen serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Piagam Komite Pemantau Risiko telah diperbaharui dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 10 Februari 2019. Piagam Komite Pemantau Risiko antara lain berisi:

1. Pendahuluan
2. Kedudukan dan Organisasi
3. Tugas, Tanggung Jawab, Hak, Kewenangan dan Kode Etik
4. Rapat, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja
5. Penutup

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee was formed to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties and functions in monitoring and ensuring the effectiveness of the Company's risk management system.

Duties and Responsibilities

The Risk Monitoring Committee has the duties and responsibilities of assisting the Board of Commissioners in reviewing the risk management system prepared by the Board of Directors, and assessing the effectiveness of risk management, including assessing risk tolerance that can be taken by the company.

In addition, the Risk Monitoring Committee is also in charge to oversee the implementation of risk management prepared by the Board of Directors, and assesses the risk tolerance that can be taken by the Company, and monitors its implementation.

Risk Monitoring Committee Charter

To support implementation of Risk Monitoring Committee's duties, the Company has prepared Risk Monitoring Committee Charter as a working program or guideline to support implementation of Risk Monitoring Committees' duties transparently, competent, objectively, independently and with accountability to other parties according to the prevailing regulation.

The Risk Monitoring Committee Charter has been updated and ratified by the Board of Commissioners on February 10, 2019. The Risk Monitoring Committee Charter discloses the guidelines, as follows:

1. Introduction
2. Position and Organization
3. Duty, Responsibility, Rights, Authority and Ethical Code
4. Meetings, Reporting and Performance Evaluation
5. Closing

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki sertifikasi manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) dan mempunyai pengalaman yang memadai di bidang manajemen risiko.

Education Qualifications and Work Experience of Risk Monitoring Committee Members

Risk Monitoring Committee members have risk management certification from the Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR) and have adequate experience in the field of risk management.

Inependensi Komite Pemantau Risiko

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga sampai dengan derajat ke tiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan NASIONAL RE.

Independence of Risk Monitoring Committee

To maintain and improve the independence of the task and provide opinions, recommendations and suggestions to the Board of Commissioners, all members of the Risk Monitoring Committee do not have financial or family relations up to the third degree with members of the Board of Directors, Board of Commissioners or controlling shareholders, nor shareholders company, or serving as Commissioner, Director or employee of a company that has affiliation or business with NASIONAL RE.

Susunan Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia Nomor KEP-04/DK/NR/VIII/2021 tentang Komite Pemantau Risiko PT Reasuransi Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Yanti Parapat
2. Anggota : Raymond Buisson

Risk Monitoring Committee Composition

The composition of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2021 based on Decree Letter of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia Number KEP-04/DK/NR/VIII/2021 concerning Risk Monitoring Committee of PT Reasuransi Nasional Indonesia is as follows:

1. Chairman : Yanti Parapat
2. Member : Raymond Buisson

Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko selama tahun 2021 telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali.

Risk Monitoring Committee Meeting

Komite Pemantau Risiko selama tahun 2021 telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

Pada tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas, sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja & Program Kerja tahunan beserta *time schedule*.
2. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.
3. Rapat dengan Komite Manajemen Risiko bersama unit Manajemen Risiko.
4. Rapat internal Komite Pemantau Risiko.
5. Melakukan *review* Laporan Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan 2021 untuk ke OJK.
6. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.
7. Menyampaikan laporan atas penugasan khusus (jika ada).

Brief Report of The Duties Implementation of The Risk Monitoring Committee in 2021

In 2021, the Risk Monitoring Committee has carried out the following duties:

1. Arrange the annual Work Plan & Program along with time schedule.
2. Reviewing and providing recommendations on the effectiveness of the implementation of the company's risk management.
3. Meeting with the Risk Management Committee with the Risk Management unit.
4. Internal Risk Oversight Committee meetings.
5. Review the 2021 Company Risk Assessment Report for the OJK.
6. Submitting reports to the Board of Commissioners.
7. Submit reports on special assignments (if any).

Sekretaris Perusahaan

CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi korporat, hubungan kelembagaan, hubungan investor serta kesekretariatan Direksi.

The Corporate Secretary is responsible for policy formulation, planning and control of corporate communications, institutional relations, investor relations and the secretariat of the Board of Directors.

Dasar Hukum Penunjukan dan Periode Jabatan

Mengacu pada peraturan Bapepam IX.I.4 tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan serta Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, pada dasarnya tugas Sekretaris Perusahaan antara lain adalah:

1. Mengelola strategi komunikasi untuk membangun citra perusahaan.
2. Mewakili perusahaan dalam mengkomunikasikan kegiatan perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Menginformasikan kinerja perusahaan dan *corporate action* kepada pihak yang membutuhkan dan pemangku kepentingan lainnya
4. Mengelola mekanisme pengungkapan informasi secara internal maupun eksternal sesuai dengan kepentingan perusahaan.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Direksi dengan Komisaris, rapat kinerja perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham, serta keprotokolan Direksi dan administrasi kesekretariatan Direksi.

Legal Basis for The Appointment and Terms of Office

Referring to the Bapepam IX.I.4 concerning the formation of the Corporate Secretary and Decree of the Minister of SOE No. KEP-117/M-MBU/2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises, basically the duties of the Corporate Secretary include:

1. Manage communication strategies to build company image.
2. Representing the Company in communicating company activities to all stakeholders.
3. Informing the company's performance and corporate action to those who need it and other stakeholders.
4. Manage the mechanism for disclosing information internally and externally in accordance with the interests of the company.
5. Coordinating the implementation of board of Directors meetings, Board of Directors and Commissioners meetings, company performance meetings and General Meeting of Shareholders, as well as Directors 'protocols and the Directors' secretarial administration.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 56/KEP/DIR/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 mengenai Struktur Organisasi Perusahaan, Perusahaan telah membentuk unit Bagian Sekretariat Perusahaan, berkembang menjadi Divisi.

According to the Board of Directors Decree No. 56/KEP/DIR/XII/2013 dated December 18, 2013 concerning Organization Structure of the Company, the Company has established Corporate Secretariat Department, eventually become a division level.

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan saat ini dijabat oleh Sdr. Ignatius Nugroho Hardo berdasarkan SK Direksi No. 32A/KEP/DIR/V/2019 tanggal 01 Mei 2019, sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan.

In the day-to-day duty implementation, the Head of Corporate Secretariat Division is currently served by Mr. Ignatius Nugroho Hardo based on the Board of Directors Decree No. 32A/ KEP/DIR/V/2019 dated May 1, 2019, also acting Corporate Secretary.

Profil Sekretaris Perusahaan

Ignatius Nugroho Hardo, S.Pd, M.Si., CRMP.
Sekretaris Perusahaan

Lahir di Malang tanggal 29 Juli 1970, meraih gelar Sarjana (S1) bidang Bahasa Inggris dari Universitas Lampung pada tahun 1996 dan gelar magister (S2) bidang Psikologi Terapan SDM dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Karirnya di PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Pegawai Pelaksana Bagian Sekretariat & Umum (1997-2004), Kepala Seksi Pendidikan & Pelatihan (2004-2009), Kepala Bagian Sekretariat & Umum (2009-2014), Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan (2014-2017), Kepala Bagian Hukum & Kepatuhan (2017-2019), dan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, sekaligus sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 32.A/DIR/NR/V/2019 tanggal 1 Mei 2019 yang berlaku sejak 1 Mei 2019 sampai saat ini.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2021

1. Memberikan masukan dari aspek hukum dan kepatuhan kepada Direksi, berkaitan dengan operasionalisasi dan pengembangan usaha perusahaan;
2. Melakukan pengurusan izin-izin usaha perusahaan;
3. Mengakomodasi pembuatan Surat Perjanjian Kerja sama sesuai dengan Kebutuhan Unit terkait;
4. Melakukan pemeriksaan atas Surat Keputusan Direksi sebelum dilakukan penandatanganan oleh Direksi sesuai dengan kebutuhan unit terkait;
5. Menyelenggarakan database dan penyimpanan dokumen asli perusahaan;
6. Membina dan menjalin hubungan dengan *stakeholders*, seperti instansi pemerintah, BUMN, swasta, media masa, dan masyarakat dalam rangka mengumpulkan dan mempublikasikan informasi;
7. Pelaksanaan agenda rapat Direksi, rapat Direksi & Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan. Pelaksanaan meliputi penentuan

Profile of Corporate Secretary

Ignatius Nugroho Hardo, S.Pd, M.Si., CRMP.
Corporate Secretary

Born in Malang on July 29, 1970, earned Bachelor's degree in English from the University of Lampung in 1996 and a Master's degree in Human Resources Applied Psychology from Faculty of Psychology, the University of Indonesia in 2006.

His career at PT Reasuransi Nasional Indonesia was started as Staff at Secretariat & General Section (1997-2004), Head of Education & Training Section (2004-2009), Head of Secretariat & General Section (2009-2014), Head of Corporate Secretariat Section (2014-2017), Head of Legal & Compliance Section (2017- 2019), and the Head of Corporate Secretariat Division, as well as appointed as Corporate Secretary according to the Board of Directors Decree No. 32.A/DIR/NR/V/2019 dated May 1, 2019 which are valid from May 1, 2019 to the present.

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2021

1. Providing the Board of Directors with advices/ input regarding legal and compliance aspects, operations and development of the Company's business;
2. Obtaining business license for the Company;
3. Preparing Letter of Cooperation Agreement in accordance with the needs of the relevant Unit;
4. Checking the Board of Directors' Decree before being signed by the Directors in accordance with the needs of the relevant unit;
5. Organizing databases and storing original company documents;
6. Fostering and establishing relationships with stakeholders, such as government agencies, state-owned enterprises, private sectors, mass media, and communities in order to collect and publish information;
7. Organizing the Board of Directors meetings, Board of Directors & Board of Commissioners meetings, and General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance

jadwal rapat, acara rapat, risalah rapat serta kehadiran Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;

8. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan bahan-bahan laporan serta risalah untuk rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
9. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi perusahaan, dokumentasi, kearsipan dan *website* perusahaan;
10. Mengkoordinasikan unit-unit terkait dalam pelaporan kegiatan perusahaan;
11. Menangani daftar Pemegang Saham dan daftar Khusus kepemilikan saham di perusahaan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya;
12. Melaksanakan kesekretariatan Perusahaan;
13. Menyiapkan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan secara benar dan tepat waktu;
14. Mengkoordinasikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) baik yang dilakukan secara rutin maupun dalam rangka HUT perusahaan;
15. Mengikuti seminar dan *training* dalam rangka peningkatan kualitas SDM di divisi Sekretariat Perusahaan.

with the provisions, which includes determining the schedule and agenda, preparing minutes of meetings and the attendance of the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders;

8. Coordinating and distributing report materials as well as minutes for Board of Commissioners meetings and General Meeting of Shareholders (GMS);
9. Managing and developing the Company's information systems, documentation, archives and websites;
10. Coordinating related units in reporting company activities.
11. Handling the the Register of Shareholders and special register of ownership of shares in other companies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners and their families;
12. Administering the Company's secretariat;
13. Preparing reports on the activities of the Corporate Secretary in proper and timely manner;
14. Coordinating the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility program (CSR) both routinely and within the framework of the Company's anniversary;
15. Participating in seminars and training in order to improve the quality of human resources in the Corporate Secretariat Division.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau workshop, yang dapat disajikan sebagai berikut:

The Corporate Secretary's Competency Development Program

In 2021, the Corporate Secretary attended various training programs, conferences, seminars or workshops, as presented in the following table:

No.	Nama Name	Jabatan Position	*Workshop / Training / Seminar*	Penyelenggara Organizer	Tempat & Tanggal Date & Venue
1.	Ignatius Nugroho Hardo, S.Pd., M.Si., CRMP,	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	AAJI *Brand Transformation Launching* "Semangat Untuk Melangkah Maju" AAJI Brand Transformation Launching "Spirit to Move Forward"	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	9 Septmber 2021 September 9, 2021

Komite-Komite di Bawah Direksi
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Komite Manajemen Risiko

Dibentuk berdasarkan SK No. 27/KEP/DIR/V/2021 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Fungsi Komite

Fungsi Komite Manajemen Risiko perusahaan adalah membantu Manajemen dalam menangani risiko-risiko yang mungkin terjadi di perusahaan dan membuat laporan kegiatan yang dilakukan Komite Manajemen Risiko.

Susunan Anggota Komite

Susunan Anggota Komite Manajemen Resiko PT Reasuransi Nasional Indonesia:

Risk Management Committee

Established according to No. 27/KEP/DIR/V/2021 concerning the Establishment of the Risk Management Committee of PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Committee Functions

The function of the company's Risk Management Committee is to assist Management in dealing with risks that may occur in the company and make reports on the activities carried out by the Risk Management Committee.

Composition of Committee Members

Composition of Risk Management Committee at PT Reasuransi Nasional Indonesia is as follows:

Jabatan Komite Position at the Committee	Susunan Anggota Composition of the Members	
	Jabatan Position	Nama Name
Koordinator Coordinator	Direktur Utama President Director	Achmad Sudiyar Dalimunthe
Sekretaris Secretary	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division	Teguh Tjahjono
Anggota Member	1. Kepala Divisi Reasuransi Syariah Head of Sharia Reinsurance Division	R. Djoko S. Prasetiyo
	2. Kepala Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Head of Information Technology & Communication Division	Adam Kurniawan

Komite Penyelesaian Klaim

Dibentuk berdasarkan SK No. 15/KEP/DIR/IV/2021 tentang Pembentukan Komite Penyelesaian Klaim PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Fungsi Komite

Fungsi Komite Penyelesaian Klaim adalah membantu Direksi untuk menelaah dan mengevaluasi penyelesaian klaim-klaim bermasalah dari aspek hukum, legal, dan finansial serta

Claim Settlement Committee

Established according to No. 15/KEP/DIR/IV/2021 concerning the Establishment of PT Reasuransi Nasional Indonesia's Claims Settlement Committee.

Committee Functions

Function of the Claims Settlement Committee is to assist the Board of Directors to review and evaluate the settlement of non-performing claims from law, legal and financial aspects

aspek lainnya yang dapat menimbulkan risiko kepada perusahaan sesuai ketentuan dan kewenangan di dalam Standar Operasi dan Prosedur yang bersifat transaksional.

as well as other aspects that could arise any risks against the company in accordance with the provisions and authorities in Transactional Operational Standards and Procedures.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Penyelesaian Klaim ditetapkan sebagai berikut:

1. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi atas hasil analisis usulan penyelesaian klaim yang disampaikan oleh Divisi Reasuransi Jiwa, Divisi Reasuransi Syariah dan Divisi Klaim dalam rangka penyelesaian klaim;
2. Melakukan *review* terhadap setiap usulan penyelesaian klaim yang diterima sesuai kewenangan dan ketentuan penyelesaian klaim yang merupakan wewenang Direksi, berdasarkan batasan-batasan transaksi umum dan dengan tetap mengacu pada Standar Operasi dan Prosedur yang ditetapkan;
3. Komite dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah usulan diterima lengkap;
4. Dalam hal anggota Komite Penyelesaian Klaim tidak berada ditempat oleh karena dinas luar, cuti atau berhalangan hadir karena sebab apapun, maka sekurang-kurangnya 2 (dua) rekomendasi anggota Komite Penyelesaian Klaim dapat langsung disampaikan kepada Direksi;
5. Membuat laporan kegiatan yang dilakukan Komite Penyelesaian Klaim.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Claim Settlement Committee are determined as follows:

1. Provide input, consideration and recommendations to the Board of Directors on the results of the analysis of proposed settlement of claims submitted by the Life Reinsurance Division, Sharia Reinsurance Division and Claim Division in the context of claim settlement;
2. Conduct a review of each proposed settlement of claims received in accordance with the authority and provisions for claim settlement that are the authority of the Board of Directors, based on the limitations of general transactions and with reference to established Operating Standards and Procedures;
3. The Committee in carrying out its duties shall be given no later than 2 (two) working days after the proposal has been received in full;
4. In the event that a member of the Claim Settlement Committee is not in place due to external service, leave or absence due to any reason, then at least 2 (two) recommendations from the Claim Settlement Committee member can be directly submitted to the Directors;
5. Making a report on the activities carried out by the Claim Settlement Committee.

Susunan Anggota Komite

Susunan Anggota Komite Penyelesaian Klaim PT Reasuransi Nasional Indonesia:

Composition of Committee Members

Composition of PT Reasuransi Nasional Indonesia's Claims Settlement Committee Members:

Jabatan Komite **Position at the Committee**	**Susunan Anggota** **Composition of the Members**	
	Jabatan **Position**	**Nama** **Name**
Koordinator Coordinator	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division	Teguh Tjahjono
Sekretaris Secretary	Kepala Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Head of Information Technology & Communication Division	Adam Kurniawan
Anggota Member	Kepala Divisi *Treaty* Head of Treaty Division	Nyoman Anggara

Komite Akseptasi *Underwriting*

Dibentuk berdasarkan SK No. 16/KEP/DIR/IV/2021 tentang Pembentukan Komite Akseptasi *Underwriting* PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Fungsi Komite

Fungsi Komite Akseptasi *Underwriting* adalah membantu Direksi untuk menelaah suatu usulan akseptasi, memitigasi risiko akseptasi, menelaah dari aspek legal dan finansial serta aspek-aspek lainnya yang dapat menimbulkan risiko kepada perusahaan, memberikan masukan, saran, dan pendapat atas akseptasi khusus (baru maupun perpanjangan) yang diterima Komite Akseptasi *Underwriting* sesuai ketentuan dan kewenangan di dalam Standar Operasi dan Prosedur yang bersifat transaksional.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Akseptasi *Underwriting* ditetapkan sebagai berikut:

1. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi atas hasil analisa usulan akseptasi khusus yang disampaikan oleh Divisi *Underwriting Facultative*, Divisi *Underwriting Treaty* & Retrosesi, Divisi Reasuransi Jiwa dan Divisi Reasuransi Syariah dalam rangka memutuskan akseptasi *underwriting* yang akan dilakukan;
2. Melakukan *review* terhadap setiap usulan akseptasi yang diterima sesuai kewenangan dan ketentuan akseptasi *underwriting* yang merupakan wewenang Direksi, berdasarkan batasan-batasan transaksi umum dan dengan tetap mengacu pada Standar Operasi dan Prosedur yang ditetapkan;
3. Komite dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah usulan diterima lengkap;
4. Dalam hal anggota Komite Akseptasi *Underwriting* tidak berada ditempat oleh karena dinas luar, cuti atau berhalangan hadir karena sebab apapun, maka sekurang-kurangnya 2 (dua) rekomendasi anggota Komite Akseptasi *Underwriting* dapat langsung disampaikan kepada Direksi;
5. Membuat laporan kegiatan yang dilakukan Komite Akseptasi *Underwriting*.

Underwriting Acceptation Committee

Established according to No. 16/KEP/DIR/IV/2021 concerning the Establishment of PT Reasuransi Nasional Indonesia's Underwriting Acceptance Committee.

Committee Functions

The function of the Underwriting Acceptance Committee is to assist the Board of Directors to review a proposal for acceptance, mitigate the risk of acceptance, examine the legal and financial as well as other aspects that may pose risks to the company, provide input, advice, and opinions on specific acceptances (new and extended) received by the Underwriting Acceptance Committee in accordance with the provisions and authorities in the Transactional Operating Standards and Procedures.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Underwriting Acceptance Committee are set as follows:

1. Providing input, considerations and recommendations to the Board of Directors on the results of analysis of special acceptance proposals submitted by the Facultative Underwriting Division, Underwriting Treaty & Retrocession Division, Life Reinsurance Division and Sharia Reinsurance Division in order to decide on underwriting acceptance to be carried out;
2. Reviewing each acceptance proposal received in accordance with the authority and accepting underwriting provisions which are the authority of the Board of Directors, based on the limits of general transactions and by still referring to the Standard of Operations and Procedures specified;
3. In carrying out its duties, the Committee is given no later than 2 (two) working days after the proposal is received in full;
4. In the event that members of the Underwriting Acceptance Committee are not in place because of service, leave or absence due to any reason, then at least 2 (two) recommendations from the Underwriting Acceptance Committee members can be directly submitted to the Board of Directors;
5. Making a report on the activities carried out by the Underwriting Acceptance Committee.

Susunan Anggota Komite

Susunan Anggota Komite Akseptasi *Underwriting* PT Reasuransi Nasional Indonesia:

Composition of Committee Members

The composition of the PT Reasuransi Nasional Indonesia Underwriting Acceptance Committee:

Jabatan Komite Position at the Committee	Susunan Anggota Composition of the Members	
	Jabatan Position	Nama Name
Koordinator Coordinator	Kepala Divisi Klaim & Retrosesi Head of Claim & Retrocession Division	Ari Priasto
Sekretaris Secretary	Kepala Divisi Manajemen Portfolio & Administrasi Reasuransi Umum Head of Portfolio Management & General Reinsurance Administration Division	Christop Marhasak
Anggota Member	Kepala Bagian Tim *Business Continuity Management* (BCM) Unit Head of Team Business Continuity Management (BCM)	Mulkan Lubis

Komite Sumber Daya Manusia

Dibentuk berdasarkan SK No. 56/KEP/DIR/VI/2019 tentang Pembentukan Komite SDM PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Human Capital Committee

Established according to No.56/KEP/DIR/VI/2019 concerning the Establishment of HC Committee in PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite SDM ditetapkan sebagai berikut:

1. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direksi atas hasil analisis usulan terkait dengan promosi, mutasi/rotasi dan demosi karyawan PT Reasuransi Nasional Indonesia;
2. Melalui *review* terhadap setiap usulan dan memberikan rekomendasi dan saran kepada Direksi terkait dengan kebutuhan SDM ke depan;
3. Memberikan masukan atas usulan peningkatan status karyawan berdasarkan usulan dari pimpinan unit kerja;
4. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap kebijakan dan ketentuan lainnya terkait dengan pengembangan SDM yang ada di PT Reasuransi Nasional Indonesia;
5. Membuat laporan kegiatan yang dilakukan Komite SDM.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the HC Committee are determined as follows:

1. Provide input and consideration to the Board of Directors on the results of the analysis of proposals related to the promotion, transfer/rotation and demotion of employees of PT Reasuransi Nasional Indonesia;
2. Through a review of each proposal and providing recommendations and suggestions to the Board of Directors related to HC requirements going forward;
3. Provide input on proposals to improve employee status based on proposals from the head of the work unit;
4. Provide input and evaluation of policies and other provisions related to the development of human resources in PT Reasuransi Nasional Indonesia;
5. Prepare a report on the activities carried out by the HC Committee.

Susunan Anggota Komite

Susunan Anggota Komite SDM PT Reasuransi Nasional Indonesia:

Composition of Committee Members

Composition of HC Committee in PT Reasuransi Nasional Indonesia is as follows:

Jabatan Komite Position at the Committee	Susunan Anggota Composition of the Members	
	Jabatan Position	Nama Name
Koordinator Coordinator	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HC	Sunarso
Ketua Chairman	Kepala Divisi SDM & Umum Head of HC & General Affairs Division	Sukmo Prayogo
Sekretaris Secretary	Kepala Bagian SDM Operasional Unit Head of Operational HC Department	Angga Permadi
Anggota Member	1. Kepala Satuan Kerja Audit Internal Head of Internal Audit Unit	Setyo Aji N.
	2. Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division	Teguh Tjahjono
	3. Kepala Divisi Akutaria Head of Actuarial Division	Faried Susanto
	4. Kepala Divisi Reasuransi Syariah Head of Sharia Reinsurance Division	R. Djoko S. Prasetiyo
	5. Kepala Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Head of Information Technology & Communication Division	Adam Kurniawan
	6. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Head of Corporate Secretary Division	Ignatius Nugroho H.

Komite Investasi

Dibentuk berdasarkan SK No. 10/KEP/DIR/II/2021 tentang Pembentukan Komite Investasi PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Investment Committee

Established according to No. 10/KEP/DIR/II/2021 concerning the Establishment of the PT Reasuransi Nasional Indonesia Investment Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Investasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan arahan investasi perusahaan;
2. Membantu Direksi dalam memantau pelaksanaan kebijakan dan arahan investasi yang telah ditetapkan;
3. Melakukan kebijakan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan terhadap pelaksanaan kebijakan dan arahan investasi yang telah ditetapkan;

Duties and Responsibilities

The duties of the Investment Committee are as follows:

1. Assisting the Board of Directors in formulating policies and directives for corporate investment;
2. Assisting the Board of Directors in monitoring the implementation of policies and stipulated investment directives;
3. Conducting evaluation policies periodically every 3 (three) months against the implementation of designated policies and investment directives;

4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi atas hasil analisis usulan penempatan, perpanjangan atau pencairan investasi yang disampaikan oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi dalam rangka memutuskan pelaksanaan penempatan, perpanjangan atau pencairan investasi;
5. Atas permintaan Direksi melakukan *review* dan memberikan pendapat terhadap setiap usulan penempatan, perpanjangan atau pencairan investasi yang merupakan wewenang Direksi, berdasarkan batasan-batasan transaksi umum dan dengan tetap mengacu pada pedoman investasi yang ditetapkan;
6. Dalam hal Anggota Komite Investasi tidak berada di tempat oleh karena dinas luar, cuti atau berhalangan hadir karena sebab apapun maka sekurang-kurangnya 2 (dua) rekomendasi Anggota Komite Investasi dapat langsung disampaikan kepada Direksi.

4. Providing input, consideration and recommendations to the Board of Directors on the results of analysis of proposed investment placements, extensions or disbursements submitted by the Finance and Accounting Division in order to decide on the implementation of investment placements, extensions or disbursements;
5. Reviewing any proposed placement, extension or disbursement of investment which is the authority of the Board of Directors, based on the limits of general transactions and by still referring to the investment guidelines set;
6. In the event that the Investment Committee Member is not in place because of service, leave or absence due to any reason, at least 2 (two) recommendations from the Investment Committee Member can be directly submitted to the Board of Directors.

Susunan Anggota Komite

Susunan anggota Komite Investasi PT Reasuransi Nasional Indonesia:

Composition of Committee Members

Composition of Investment Committee in PT Reasuransi Nasional Indonesia is as follows:

Jabatan Komite Position at the Committee	Susunan Anggota Composition of the Members	
	Jabatan Position	Nama Name
Koordinator Coordinator	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HC	Sunarso
Anggota Member	1. Kepala Divisi Akutaria Head of Actuarial Division	Faried Susanto
	2. Kepala Satuan Kerja Audit Internal Head of Internal Audit Unit	Setyo Aji N.
	3. Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division	Teguh Tjahjono
	4. Kepala Seksi BCM Head of BCS Section	Yohanes Hermawan

Komite Pengarah Teknologi Informasi & Komunikasi

Dibentuk berdasarkan SK 81/KEP/DIR/X/2019 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi & Komunikasi PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TIK ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas Rencana Strategis Teknologi Informasi & Komunikasi agar sejalan dengan Rencana Bisnis Perusahaan;
2. Memastikan kesesuaian antara Pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi & Komunikasi dengan Rencana Proyek yang disepakati;
3. Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan Teknologi Informasi & Komunikasi pada kegiatan usaha Perusahaan;
4. Merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengupayakan investasi Teknologi Informasi & Komunikasi memberikan nilai tambah kepada Perusahaan;
5. Merekomendasikan langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Perusahaan pada sektor Teknologi Informasi & Komunikasi investasi tersebut memberikan kontribusi optimal terhadap tercapainya tujuan bisnis Perusahaan;
6. Menyinergikan dan mengintegritasikan Rencana Teknologi Informasi & Komunikasi yang mengakomodasi kepentingan seluruh tujuan kerja;
7. Menyinergikan rencana belanja/investasi untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih *(redudancy)* inisiatif Teknologi Informasi & Komunikasi;
8. Menyusun dan memelihara pemuktahiran Rencana Strategis Teknologi Informasi & Komunikasi agar selaras dengan Rencana Strategis Pemegang Saham & Regulasi Pemerintah.

Information Technology & Communication Steering Committee

Established according to Decree No. 81/KEP/DIR/X/2019 concerning the Establishment of the Information and Communication Technology Steering Committee of PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the ICT Steering Committee are determined as follows:

1. Review and provide recommendations on the Information & Communication Technology Strategic Plan to be in line with the Company's Business Plan;
2. Ensuring compatibility between the Implementation of Information & Communication Technology projects with the agreed Project Plan;
3. Conduct periodic evaluations of the support of Information & Communication Technology in the Company's business activities;
4. Recommend the steps needed to seek investment in Information & Communication Technology to provide added value to the Company;
5. Recommend measures to minimize the risks on the Company's investment in the Information Technology & Communication sector. The investment provides an optimal contribution to the achievement of the Company's business objectives;
6. Synergize and integrate Information & Communication Technology Plans that accommodate the interests of all work objectives;
7. Synergizing expenditure/investment plans to ensure there is no overlap in the Information & Communication Technology initiative;
8. Compile and maintain an updated Information & Communication Technology Strategic Plan to be aligned with the Government's Strategic Shareholders & Regulations.

Susunan Anggota Komite

Susunan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi & Komunikasi PT Reasuransi Nasional Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

Composition of Committee Members

Composition of Information & Communication Technology Steering Committee in PT Reasuransi Nasional Indonesia is as follows:

Jabatan Komite **Position at the Committee**	**Susunan Anggota** **Composition of the Members**	
	Jabatan **Position**	**Nama** **Name**
Ketua Chairman	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HC	Sunarso
Sekretaris Secretary	Kepala Satuan Kerja Audit Internal Head of Internal Audit Unit	Setyo Aji N.
Anggota Member	Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Bagian di Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi All Heads of Divisions and Heads of Departments under the Information Technology & Communication Division	

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

INTERNAL AUDIT UNIT (IAU)

Struktur dan Posisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), yang sebelumnya bernama Satuan Pengawas (SPI), dipimpin oleh seorang kepala setingkat kepala divisi dan strukturnya berada langsung di bawah Direktur Utama.

Sesuai Piagam SKAI juga disebutkan bahwa tujuan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) adalah meningkatkan nilai dan memperbaiki kinerja operasional, serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam struktur organisasi perusahaan, unit Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) digambarkan sebagai berikut:

Internal Audit Unit (IAU/SKAI) Position and Structure

The Internal Audit Unit (IAU/SKAI), previously known as the Supervisory Unit (SPI), is led by Head of Unit, at the level of division head, and structurally is directly under the President Director.

In accordance with the IAU Charter (Piagam SKAI), it is also stated that the objective of The Internal Audit Unit (IAU/SKAI) is to increase value and improve operational performance, and improve the effectiveness of risk management and good corporate governance.

In the company's organizational structure, the Internal Audit Unit (IAU SKAI) unit is described as follows:

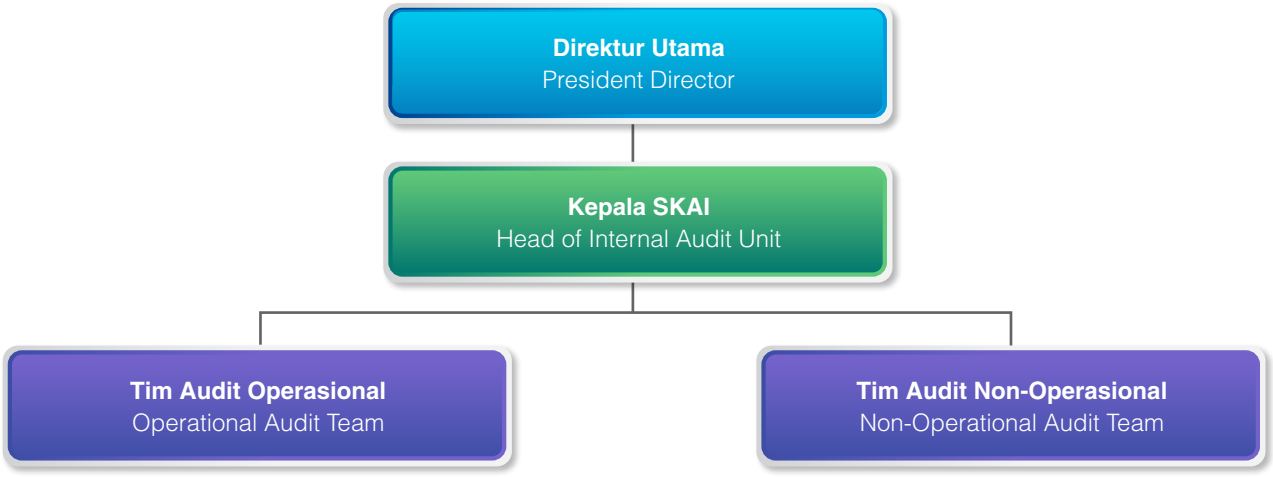

Jumlah anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) posisi per 31 Desember 2021 adalah 7 (tujuh) orang, termasuk Kepala SKAI, dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

The members of the Internal Audit Unit (IAU/SKAI) as of December 31, 2021 amounted to 7 (seven) people, including the Head of SKAI, with diverse educational backgrounds.

Kualifikasi/Sertifikasi Internal Auditor

Guna memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan audit, Satuan Kerja Audit Internal didukung dengan tenaga audit profesional yang telah dilengkapi dengan sertifi kasi audit dan program pelatihan eksternal yang memadai.

Qualifications/Certifications of Internal Auditor

In order to ensure the quality of audit activities, the Internal Audit Unit is supported by professional audit staff who have been equipped with audit certifications and adequate external training programs.

Pada tahun 2021, kualifikasi/sertifikasi profesi yang dimiliki oleh Internal Auditor NASIONAL RE yaitu:

- *Professional Internal Auditor* (PIA): 1 orang
- *Qualified Internal Auditor* (QIA): 1 orang

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala SKAI

Dalam Piagam SKAI butir II.2 tentang Organisasi disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Sesuai SK Direksi No. 641/KEP/DIR/XI/2017 tanggal 03 November 2017, Kepala SKAI dijabat oleh Setyo Aji Nugroho, S.E., Ak., AAAIJ., CSA., CRGP., PIA. Beliau telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai keputusan No.KEP-8/NB.11/2018 tanggal 3 Januari 2018.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Piagam SKAI *(Internal Audit Charter)* seorang Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) harus memenuhi kualifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 diutamakan jurusan akuntansi, memiliki sertifikasi gelar profesi dan/atau berpengalaman di bidang internal audit serta memiliki pengetahuan di bidang perasuransian.
2. Apabila kualifikasi di atas tidak terpenuhi, maka Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) harus memiliki pengalaman di bidang operasional perusahaan.

Setyo Aji Nugroho, S.E., Ak., AAAIJ., CSA., CRGP., PIA
Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Lahir di Jakarta, 23 Oktober 1971. Menyelesaikan pendidikan D3 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1994 dan S1 Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1999.

In 2021, the qualifications/professional certifications held by the NASIONAL RE Internal Auditor are:

- Professional Internal Auditor (PIA): 1 person
- Qualified Internal Auditor (QIA): 1 person

Party Who Appoints and Dimisses The Head of IAU

As stipulated in the IAU Charter item II.2 concerning the Organization it is stated that the Head of the Internal Audit Unit (IAU) is appointed and dismissed by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

Head of Internal Audit Unit (IAU)

According to the Board of Directors Decree No. 641/KEP/DIR/XI/2017 dated November 3, 2017, Head of IAU is held by Setyo Aji Nugroho, S.E., Ak., AAAIJ., CSA., CRGP., PIA. He has passed the fit and proper test by the Financial Services Authority (OJK) according to decision No. KEP-8/NB.11/ 2018 dated January 3, 2018.

In accordance with the provisions stipulated in the Internal Audit Charter, a Head of Internal Audit Unit (IAU) must meet the following qualifications:

1. Having a minimum S1 education background, prioritized in accounting majors, has a professional certification degree and/or is experienced in the internal audit field and has knowledge in the insurance field.
2. If the above qualifications are not met, then the Head of the Internal Audit Unit (IAU) must have experience in the operational fi eld of the company.

Setyo Aji Nugroho, S.E., Ak., AAAIJ., CSA., CRGP., PIA
Head of Internal Audit Unit (IAU/SKAI)

Born in Jakarta, October 23, 1971. He earned his Diploma 3 degree at the Indonesian State College of Accountancy in 1994 and Bachelor of Economics at the University of

Beliau bergabung dengan Perusahaan sejak tahun 2011 sebagai Kepala Bagian Akuntansi hingga tahun 2017 dan ditunjuk sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal berdasarkan SK Direksi No. No. 641/KEP/DIR/XI/2017 tanggal 3 November 2017, dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai keputusan No. KEP- 8/NB.11/2018 tanggal 3 Januari 2018.

Indonesia in 1999. He joined the Company in 2011 as Head of Accounting Department until 2017 and was appointed Head of the Internal Audit Unit based on the Board of Directors Decree No. 641/KEP/DIR/ XI/2017 dated November 3, 2017, and has passed the fi t and proper test by the Financial Services Authority (OJK) based on decision No. KEP-8/NB.11/2018 dated January 3, 2018.

Wewenang Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Untuk memenuhi tugas dan kewajibannya, Kepala dan Staf SKAI diberi wewenang penuh untuk:

1. Mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, memilih objek pemeriksaan, menetapkan ruang lingkup audit dan mengaplikasikan semua teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit.
2. Memiliki akses tanpa batas terhadap semua fungsi, catatan, harta milik (aset) dan pegawai.
3. Memiliki akses langsung untuk kapan saja berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik (KAP)/ *regulator*.
5. Memperoleh data dan penjelasan terkait dengan tugasnya dari semua satuan kerja yang diaudit, dan dapat meminta jasa bantuan lainnya dari narasumber profesional.

Authority of Internal Audit Unit (IAU/ SKAI)

In discharging their duties and obligations, the Head and Staff of Internal Audit Unit are fully authorized to:

1. Allocate resources, scheduling, choose the object of audit, define the scope of audit and apply all the techniques deemed necessary to achieve the objectives of the audit.
2. Have unlimited access to all functions, records, property (assets) and employee.
3. Have a direct access to communicate with the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the Audit Committee, at any time.
4. Coordinate its activities with the activities of the external auditors of Public Accounting Firm (KAP)/ regulator.
5. Obtain the data and explanations related to their duties from all units to be audited and may request other services from professional sources.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan (Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, manajemen risiko dan kegiatan perusahaan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua unit *(auditee)*.

Duties and Responsibilities

1. Prepare and implement an annual internal audit plan (Annual Audit Work Program).
2. Test and evaluate the implementation and internal control and risk management system in accordance with the Company's policy.
3. Conduct audits and assessments of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, risk management and other company activities.
4. Provide suggestions for improvements and objective information about activities audited on all units (auditee).

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut dari temuan-temuan dan perbaikan yang telah disarankan.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut dari temuan-temuan dan perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan SKAI.
9. Melakukan audit khusus apabila diperlukan.

5. Prepare an audit report and submit a follow-up report of suggested findings and improvements.
6. Monitor, analyze, and report on follow-up implementation of suggested findings and improvements.
7. Cooperate with Audit Committee.
8. Prepare a program to evaluate the quality of Internal Audit Unit activities.
9. Conduct a special audit if necessary.

Manajemen Risiko
RISK MANAGEMENT

Konsep Pengelolaan Risiko Perusahaan

Situasi lingkungan eksternal dan internal Perusahaan yang mengalami perubahan dengan pesat telah menimbulkan risiko yang semakin kompleks bagi kegiatan usaha Perusahaan sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola perusahaan yang sehat *(Good Corporate Governance)* dan penerapan manajemen risiko yang meliputi lingkungan pengendalian, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal.

Bagi Perusahaan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola Perusahaan mengenai kemungkinan kerugian Perusahaan di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja Perusahaan, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha Perusahaan serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Perusahaan.

Bagi regulator, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan yang dapat mempengaruhi permodalan Perusahaan dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan atas Perusahaan.

Esensi dan penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terkendali *(manageable)* pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Perusahaan. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran dan kompleksitas usaha perasuransian, maka tidak terdapat sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh perusahaan sehingga setiap perusahaan harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada masingmasing perusahaan.

Risiko dalam konteks Perusahaan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diantisipasi maupun yang tidak dapat diantisipasi yang berdampak negatif maupun positif

Corporate Risk Management Concept

The rapid changes that are taking place in the Company's external and internal environment lead to the increasing complexity in the Company's business risks, which as a consequence, also lead to the increasing need of good corporate governance practices and the application of risk management which includes risk control environment, policies, procedures and limits, process of identification, measurement, monitoring, information systems, and risk control, as well as internal control systems.

By applying risk management, the Company is be able to increase shareholders' values, to provide the Company's management with the big picture of the potential losses that may occur in the future, as well as improvement on the methods and the processes of a systematic decision making based on the availability of information, used as a basis for more accurate measurement of the Company's performance. It is also used to assess the risks inherent in the Company's instruments or business activities and to create a solid risk management infrastructure in order to improve the competitiveness of the Company.

The application of risk management will also help regulators to assess potential losses faced by the Company which can affect the Company's capital and as one of the bases for assessing the strategy and the focus of supervision on the Company.

The essence of the application of risk management is the adequacy of risk management procedures and methodologies so that the Company's business activities are manageable at the limits that can be accepted and be of benefit for the Company. However, given the diverse condition and structure of market, size and complexity of insurance business, there is no such a thing as a universal risk management system that can be applied to all companies, so that each company must establish its own risk management system in accordance with the functions and organization of risk management in each company.

In the context of the Company's business, risk is a potential event, both anticipated and unanticipated, which has a negative or positive impact on the Company's revenue and

terhadap pendapatan dan permodalan Perusahaan. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal Perusahaan harus dapat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada *(inherent risks)* maupun yang masih mungkin timbul dari kegiatan Perusahaan meskipun telah dikendalikan *(residual risks)*, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya.

capital. To be able to implement a risk management process, at an early stage the Company must be able to identify risks by recognizing and understanding all existing risks (inherent risks) and those that may still arise from the Company's activities even though they have been controlled (residual risks), including risks originating from from related companies and other affiliates.

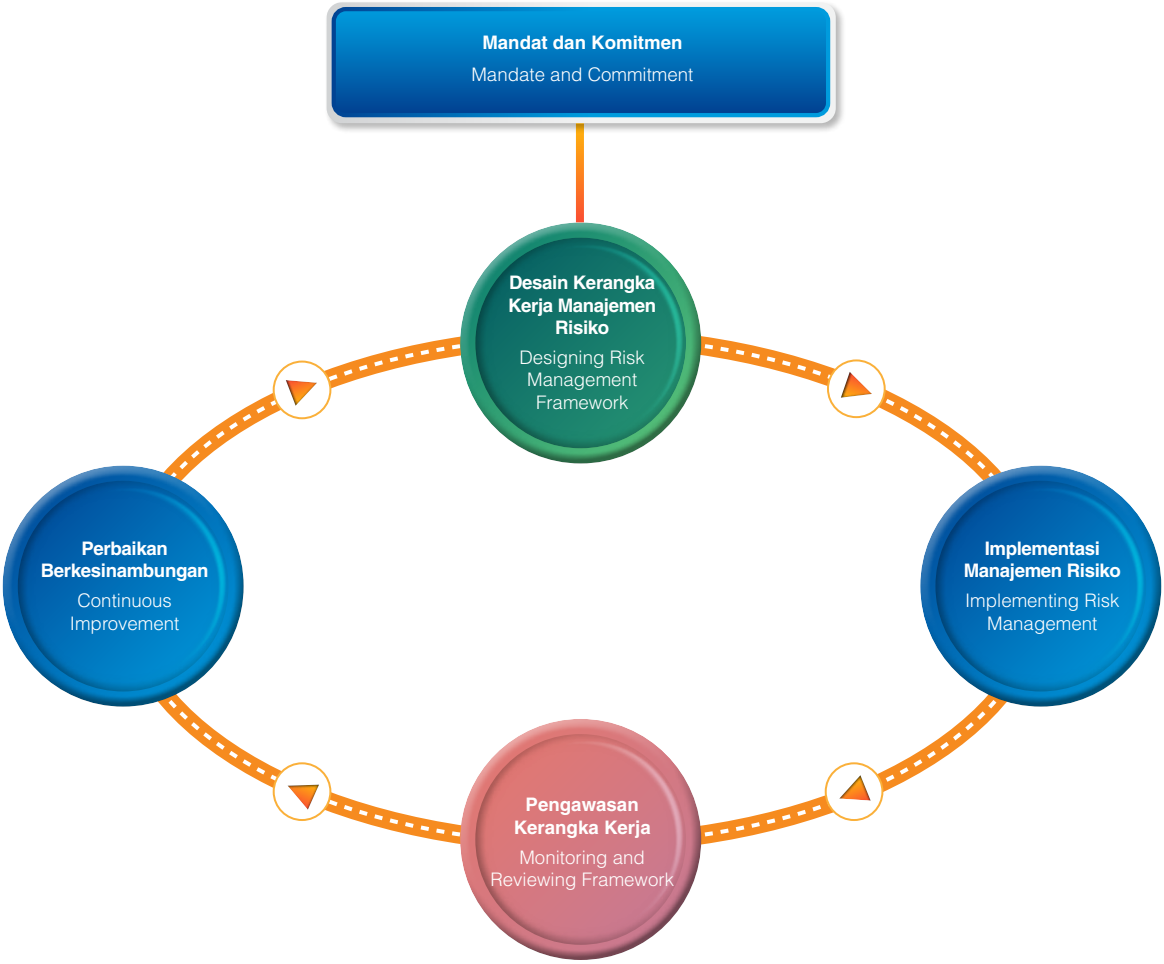

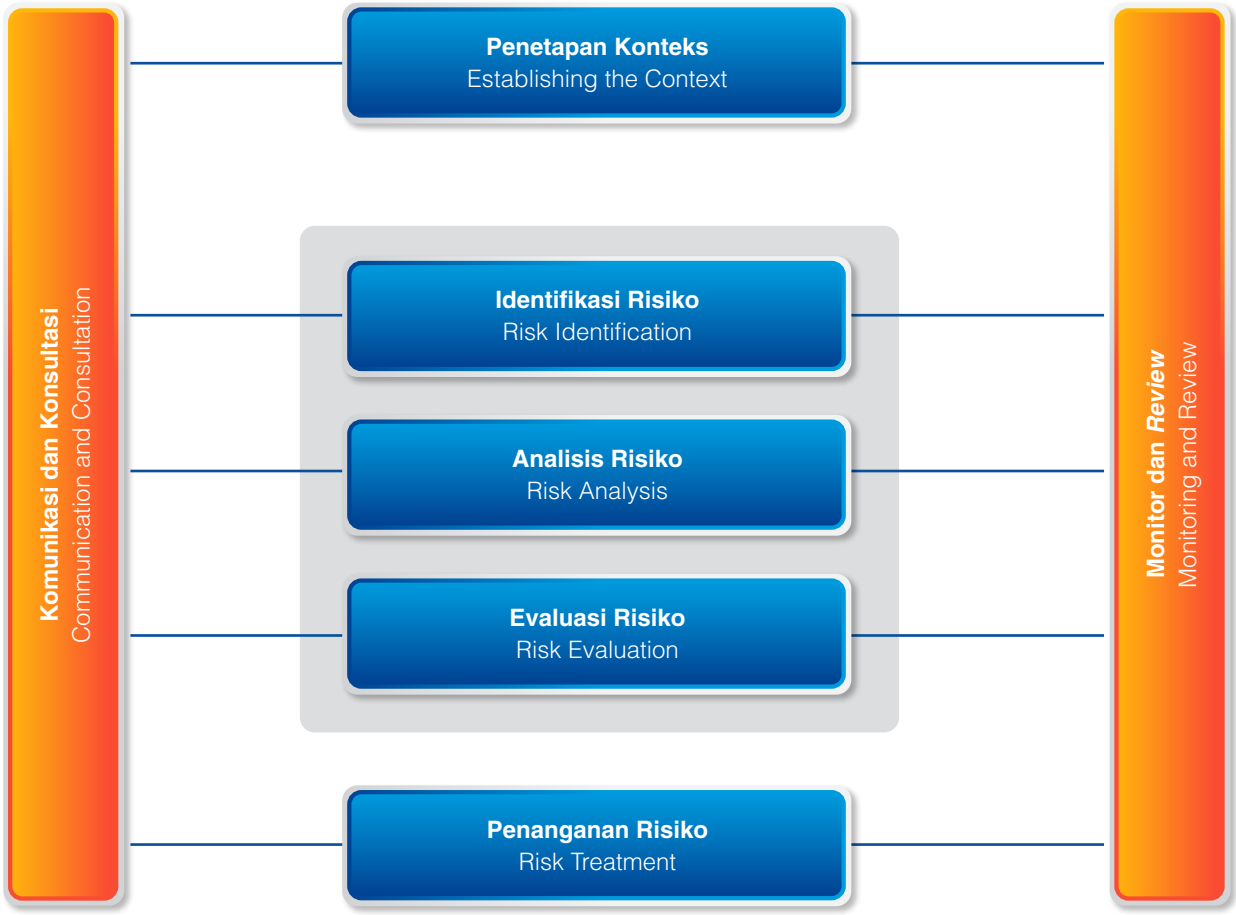

Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut Perusahaan perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar Perusahaan mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya sehingga Perusahaan dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha dimaksud.

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, Perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan/atau yang berdampak pada permodalan Perusahaan. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur

After accurate risk identification is carried out, the Company subsequently needs to take asses, monitor and control risks. The risk assessment is intended to enable the Company to calculate the risk exposures inherent in its business activities so that the Company can estimate the impact on capital to be maintained, in order to support its business activities.

Furthermore, in order to carry out risk monitoring, the Company must evaluate risk exposures, especially those that are material and/or have an impact on the Company's capital. The results of monitoring which includes an evaluation of the risk exposure are reported in a timely, accurate and

risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan oleh pihak pengambilan keputusan dalam Perusahaan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan. Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Perusahaan melakukan pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, lindung nilai, dan teknik mitigasi risiko lainnya.

Perusahaan berupaya memastikan bahwa semua potensi risiko Perusahaan sudah diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan dimitigasi dampaknya sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan stratejik yang dilakukan dalam suatu proses yang disebut proses *Enterprise Risk Management (ERM) System*.

Kerangka pengelolaan risiko di Perusahaan mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan Sistem Informasi Manajemen, pengukuran dan pemantauan risiko, dan berbagai kebijakan, prosedur, limit transaksi, acuan, serta beberapa perangkat bantu pengelolaan risiko lainnya. Kerangka pengelolaan risiko Perusahaan dalam jangka panjang yang tertuang di dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Penerapan *Enterprise Risk Management (ERM) System* yang dilakukan Perusahaan dipicu oleh kesadaran akan kebutuhan pengelolaan Perusahaan secara lebih baik.

Penyesuaian Kerangka Kerja Manajemen Risiko Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Sebagai salah satu perusahaan yang memiliki kompleksitas bisnis yang tinggi, dapat dipastikan perusahaan sangat mengenal proses dan mekanisme manajemen risiko dalam pengelolaan Perusahaan dengan baik, dan telah diintegrasikan dalam suatu prosedur yang utuh yang dikenal dengan *Enterprise Risk Management (ERM) System* dan ditunjang dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR).

informative manner to be used in the decision making process in the Company, including it follow-up action. Based on the results of the monitoring, the Company shall control risks, among others by adding capital, hedging, and other risk mitigation techniques.

The Company has ensured that all potential risks have been identified, analyzed, evaluated and mitigated so that they would not hinder the achievement of the strategic objectives, which are carried out under the Enterprise Risk Management (ERM) System process.

The risk management framework applied in the Company includes active oversight of the Board of Commissioners and Directors, the adequacy of the Management Information System, risk measurement and monitoring, and various policies, procedures, transaction limits, references, and several other risk management tools. The Company's long-term risk management framework as outlined in the Company's Long Term Plan (RJPP) currently is being developed, and is to be evaluated periodically to ensure its effectiveness in accordance with applicable standards. The implementation of the ERM System by the Company is started by recognizing the need to have a better corporate management.

Adjusting The Risk Management Framework With The Financial Services Authority (OJK) Regulations

As one of the companies that have high complexity business, the Company certainly understands the process and mechanism of risk management in managing the Company well, and has integrated it in a complete procedure, known as the Enterprise Risk Management (ERM) System and is supported by a System Risk Management Information (SIMR).

Semenjak diluncurkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank serta Nomor 10/POJK.05/2014 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank tanggal 27 Agustus 2014, Perusahaan mulai melakukan penyesuaian kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku walaupun dengan tatanan *framework* yang berbeda. Pembaharuan juga dilakukan pada Sistem Informasi Manajemen Risiko dengan penambahan pengelompokan jenis Risiko, teknik penilaian, dan pelaporan yang sesuai.

Sesuai Peraturan OJK, POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB), secara individual bagi perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor berikut:
a. Tata kelola perusahaan yang baik;
b. Profil risiko;
c. Rentabilitas; dan
d. Permodalan.

Following the issuance of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 1/POJK.05/2015 dated March 26, 2015 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions and Number 10/POJK.05/2014 concerning the Assessment of Risk Levels of Non-Bank Financial Services Institutions dated August 27, 2014, the Company began to adjust policies and guidelines for the implementation of Corporate Risk Management in accordance with applicable regulations, using a different framework. Updates are also carried out in the Risk Management Information System with the addition of risk grouping, assessment techniques, and appropriate reporting.

According to OJK Regulations, POJK No. 28/POJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness Level of Non-Bank Financial Services Institutions (LJKNB), individually for insurance companies and finance companies, are carried out by covering the following factors:
a. Good corporate governance;
b. Risk profile;
c. Profitability; and
d. Capital.

Penilaian Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, Perusahaan telah menyerahkan laporan *self assessment* Penilaian Tingkat Risiko untuk tahun buku 2021 kepada OJK.

Berdasarkan SEOJK No. 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor berikut:
a. Tata kelola perusahaan yang baik;
b. Profil risiko;
c. Rentabilitas; dan
d. Permodalan.

Assessment of Risk Maangement

Based on the Financial Services Authority Regulation number 10/POJK.05/2014 concerning the Assessment of the Risk Level of Non-Bank Financial Services Institutions, the Company has submitted a report on self-assessment of Risk Level for fiscal year 2021 to the FSA.

Based on SEOJK No. 1/SEOJK.05/2021 concerning Assessment of Health Level of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, Assessment of Health Levels on individual basis, are carried out by covering the following factors:
a. Good corporate governance;
b. Risk profile;
c. Profitability; and
d. Capital.

Langkah-Langkah Pengelolaan Risiko Perusahaan

Proses manajemen risiko di PT Reasuransi Nasional Indonesia mengadopsi standar ISO 31000:2009 *Risk Management-International Standard*.

Di dalam melakukan *assessment*, PT Reasuransi Nasional Indonesia menggunakan metode *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) di dalam penilaian risiko dan kontrol perusahaan. Beberapa keunggulan yang menjadi alasan penggunaan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan *risk awareness* di seluruh perusahaan, karena melibatkan seluruh fungsi dan seluruh level.
2. Meningkatkan *risk ownership* bagi mereka yang bertanggungjawab dalam melaksanakan operasional.
3. Mengintegrasikan sudut pandang dari sisi operasional dan *top management*.
4. Mampu mengeluarkan dan memanfaatkan pengetahuan dan wawasan kolektif.
5. Terstruktur dan terdokumentasi.
6. Merupakan sebuah metode yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengkaji seluruh risiko dan kontrol perusahaan.

Tahapan Penyusunan *ERM System* dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Identifikasi risiko.
b. Analisis risiko dan evaluasi risiko.
c. Melakukan penanganan risiko.
d. Melakukan pemantauan risiko dan pelaporan risiko.

Risiko *Underwriting*

Risiko *underwriting* adalah risiko kerugian yang timbul karena ketidaksesuaian antara pendapatan *underwriting* dengan beban *underwriting*. Tergolong dalam risiko ini adalah *underwriting*, penetapan cadangan *(reserve)*, klaim, dan retrosesi (tidak termasuk risiko *default*).

Eksposur risiko Perusahaan terkait risiko *underwriting* dapat disebabkan oleh penetapan harga *(pricing)* yang tidak optimal dan atau karena meningkatnya frekuensi klaim pada tingkat yang tidak wajar atau karena adanya bencana alam

Corporate Risk Management Steps

The risk management process adopted by PT Reasuransi Nasional Indonesia is based on ISO 31000:2009 Risk Management - International Standard.

In conducting the assessment, PT Reasuransi Nasional Indonesia uses the Risk and Control Self Assessment (RCSA) method in assessing the company's risk and control. Some of the advantages that are the reasons for using this method are as follows:

1. Improve risk awareness throughout the company by involving all functions at all levels.
2. Improve risk ownership for those in charge of carrying out operations.
3. Integrate the point of view from the operational and top management side.
4. Able to issue and utilize collective knowledge and insights.
5. Well structured and documented.
6. A comprehensive method for identifying and reviewing all risks and for company control.

The stages for preparing ERM System can be described as follow:

a. Risk identification.
b. Risk analysis and risk evaluation.
c. Risk management.
d. Risk monitoring and risk reporting.

Underwriting Risk

Underwriting risk is the risk of loss that may arise from mismatched underwriting income and underwriting expenses. Included in this risk are underwriting, reserves, claims, and retrosesion (default risk is excluded).

The Company's risk exposure, which related to underwriting risk, can be resulted from the non-optimal pricing and/ or due to the increasing claim frequency at an unnatural levels or due to extraordinary natural disasters, such as earthquakes,

luar biasa besar seperti gempa bumi, tsunami dan atau oleh adanya kejadian luar biasa seperti serangan teroris.

Mitigasi Risiko:
1. Melakukan perencanaan dan pemantauan proses *underwriting* yang cermat;
2. Menerapkan penetapan limit risiko maksimum dan eksposur katastropik maksimum (secara agregat);
3. Penetapan limit kewenangan *underwriting* per kontrak;
4. Pemilihan dan penilaian risiko dan penetapan harga yang tepat oleh *underwriters* dengan memperhatikan ketentuan regulator terkait;
5. Pengembangan pemodelan skenario kerugian *(loss scenario modelling)*;
6. *Review* aktuaria internal oleh tim yang independen;
7. Penetapan dan pemantauan program retrosesi secara optimum.

tsunamis and/or by the occurrence of extraordinary events such as attacks terrorist.

Risk Mitigation:
1. Planning and monitoring careful underwriting process;
2. Determining the maximum risk limits and maximum catastrophic exposure (in aggregate);
3. Determining the underwriting authority-limit per contract;
4. Selecting and assessing risks and determining appropriate pricing by underwriters by taking into account relevant regulatory provisions;
5. Developing loss scenario modelling;
6. Internal actuarial review by independent team;
7. Determination and monitoring of retrocessing programs optimally.

Risiko *Default*

Risiko *Default* adalah risiko kerugian jika pihak lain *(counterparty)* gagal memenuhi kewajibannya atau gagal melaksanakan kewajiban tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan. Pihak lain yang dimaksud adalah mitra retrosesi, *broker*, *ceding*, mitra kerja investasi dan lain-lain.

Mitigasi Risiko:
1. Proses seleksi dan pemeringkatan *ceding* dan mitra retrosesi;
2. Pengembangan profil risiko terkini dari *ceding* dan mitra retrosesi, dengan memahami tingkat sensitivitas mereka terhadap tekanan faktor-faktor luar biasa;
3. Pengendalian atas eksposur *default* dengan analisis kemampuan para *counterparty* untuk membayar (memenuhi kewajiban mereka), baik secara historis maupun di masa yang akan datang berdasarkan perkembangan keuangan historis dan proyeksi arus kas dengan berbagai skenario;
4. Setiap triwulanan, Direksi memperoleh hasil analisis kinerja kolektabilitas, profitabilitas dan transaksi dengan mitra kerja dalam bentuk laporan *collection ratio*. Apabila perlu, kerja sama dengan mitra kerja harus ditinjau kembali dan seluruh tindakan perbaikan yang diperlukan harus dilakukan untuk mencegah terganggunya kondisi keuangan Perusahaan.

Default Risk

Default risk is an exposure to loss due to the failure of the counterparty to make timely required payment as determined. Other parties in question are retrocession partners, brokers, ceding, investment partners and others.

Risk Mitigation:
1. Selecting and rating the ceding and retrocession partners;
2. Developing current risk profile of the ceding and retrocession partners, by understanding the level of their sensitivity towards the pressure from extraordinary factors;
3. Controlling default exposure by analyzing counterparty ability to pay (their obligations), both historically and in the future, based on historical financial growth and cashflow projections with various scenarios;
4. Each quarter, the Board of Directors obtain analytical results on the performance of collectability, profitability and transactions with partners in the form of collection ratio report. Whenever deemed necessary, the cooperation with partners shall be reviewed and all necessary corrective actions should be taken to prevent disruption of the Company's financial condition.

5. Satuan kerja bagian penagihan melakukan *review* secara triwulanan guna menetapkan atau memutakhirkan kolektibilitas atau kualitas transaksi yang meliputi klasifikasi eksposur risiko *default*, dan mencatat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari arsip dokumen terkait kinerja *ceding* dan mitra kerja.
6. Memiliki sistem informasi yang memungkinkan Direksi untuk mengidentifikasi terjadinya konsentrasi risiko dalam portofolio *ceding* dan transaksi lain berisiko *default*.
7. Pogram penjadwalan kembali pembayaran piutang.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang muncul karena adanya fluktuasi nilai atau pendapatan dari aset, suku bunga, dan valuta asing atau adanya pergerakan variabel pasar dan portofolio yang dimiliki Perusahaan, yang dapat merugikan Perusahaan *(adverse movement)*.

Risiko Pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perusahaan yakni kegiatan investasi dalam bentuk surat berharga termasuk saham/obligasi dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga lainnya.

Mitigasi Risiko:
1. Adanya kebijakan investasi yang jelas, termasuk limit dan prosedur pengambilan keputusan investasi;
2. Pemilihan dan pemeringkatan manajer investasi eksternal. Penerapan manajemen portofolio dengan diversifikasi instrumen investasi sesuai ketentuan regulasi dan dalam batas-batas *risk-appetite* perusahaan;
3. Pemantauan pergerakan pasar secara *realtime* dan penetapan limit *cut loss* atas aset-aset yang ditangani sendiri maupun yang ditangani manajer investasi eksternal;
4. Satuan kerja terkait mengkaji secara berkala kecenderungan perubahan nilai tukar atau kemungkinan terjadinya tekanan pasar;
5. Melakukan diversifikasi investasi dengan komposisi optimum dalam batas batas sesuai ketentuan regulasi.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko yang muncul karena ketidakcukupan sumber daya finansial Perusahaan untuk memenuhi kewajiban ketika jatuh tempo, antara lain adalah:

5. Collection Unit conducts review on a quarterly basis in order to establish or update the collectibility or quality of transactions, including the default risk exposure and recorded as an integral part of the archive of documents related to the performance of ceding and partners.
6. Possessing information systems that enables the Board of Directors to identify concentration of risk in the portfolio and other transactions ceding default risk.
7. Rescheduling debt payment program.

Market Risk

Market risk is the risk of experiencing losses due to the fluctuation of value or the revenues generated from the assets, interest rates, and foreign exchange, or the movement of market variables and portfolios owned by the Company, that may harm the Company (adverse movement).

Market Risk, among others, is included in the Company's functional activities, namely investment activities in the form of marketable securities, including stocks/bonds and money markets, and investments in other institutions.

Risk Mitigation:
1. Having a clear investment policy, including limits and investment decision-making procedures;
2. Selecting and rating the external investment managers (MI); Applying portfolio management with a diversified investment instruments in accordance with regulations and within the limits of the Company's risk appetite;
3. Monitoring market movements in real-time and deciding limit cut lost over assets internally and externally managed (MI);
4. Related work unit periodically assess the tendency of exchange rate changes or the possibility of occurrence of market pressures;
5. Diversifying investments with an optimum composition within the limits of appropriate regulatory provisions.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk arising from insufficient financial resources to meet the Company's obligations at maturity, among others are:

1. Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena Perusahaan sulit untuk menutup posisi tertentu dengan harga pasar sebelumnya karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memungkinkan;
2. Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena Perusahaan tidak memperoleh dana untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Risiko Likuiditas dapat melekat pada aktivitas *underwriting*, investasi dan penanaman dana lainnya, serta kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang (jika suatu waktu Perusahaan menerbitkannya).

Mitigasi Risiko:
1. Memiliki kebijakan yang jelas dan tertulis mengenai pengelolaan likuiditas. Kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh satuan kerja terkait atau yang berhubungan dengan pengeluaran/penerimaan kas baik dalam Rupiah maupun dalam valas dan satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia.
2. Memiliki kebijakan likuiditas dan pendanaan yang menetapkan kewenangan kepada satuan kerja yang bertanggung jawab atas investasi untuk menentukan pasar, instrumen serta transaksi dengan mitra kerja yang dapat dipercaya *(Eligible Counterpart)*.
3. Kebijakan likuiditas juga harus mencakup penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas dan harus mencegah ketergantungan Perusahaan terhadap satu atau beberapa instrumen, *counterparty*, atau segmen pasar tertentu.
4. Satuan kerja keuangan memberi perhatian terhadap arus kas yang tidak terduga dan tidak diharapkan.
5. Penerapan *cost-control* secara efektif di Perusahaan.
6. Sistem informasi manajemen risiko likuiditas harus dapat menghasilkan berbagai bentuk informasi dan laporan yang akurat dan tepat mengenai kondisi likuiditas, *maturity profile*, dan *projected cash flow* berdasarkan hasil analisis saat ini dan perkiraan yang akan datang.
7. Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan ketat terhadap atas pengelolaan likuiditas karena hal ini sangat penting. Kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya sisi operasional dan finansial Perusahaan namun terutama reputasi Perusahaan.

1. Market Liquidity Risk, the risk arising from the difficulty in closing a particular position with the previous market price due to the unfavourable market liquidity conditions;
2. Funding Liquidity Risk, the risk arising due to the failure of the Company to obtain certain amount of funds to meet obligations at maturity.

Liquidity risk can be inherent in the underwriting, investment and fund placement and financing activities and in the issuance of debt securities (In the case that the Company issuing such a thing).

Risk Mitigation:
1. Preparing a clear, written policy on the liquidity management. Such policy is then communicated to all units linked or associated with the expenditure/cash receipts either in Rupiah or foreign currency and unit that manages human resources.
2. Preparing a policy on liquidity and funding that authorized the work units responsible for the investment to determine the market, instruments and to conduct transactions with reliable partners (eligible counterpart).
3. Liquidity policy should handle the risks of liquidity concentration and should prevent the Company from being dependent on one or more instruments, counterparty, or a particular market segment.
4. The finance work unit shall pay attention to any unpredictable and unexpected cash flows.
5. Implementing cost-effective control in the Company.
6. The information system for liquidity risk management must be able to produce various forms of information and reports that are accurate and precise regarding liquidity, maturity profile and the projected cash flow based on the analysis of current situation and future estimation.
7. The Board of Commissioners and Board of Directors shall perform strict monitoring on liquidity management. Liquidity shortages can lead to a disruption on the Company's operations and financial sides, as well as the Company's reputation.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang muncul karena kegagalan dan kelemahan proses internal, orang, dan sistem di Perusahaan serta adanya peristiwa-peristiwa eksternal yang gagal diantisipasi oleh Perusahaan, termasuk tindak kriminal oleh pihak eksternal, perubahan regulasi yang tidak terantisipasi dengan baik.

Risiko Operasional yang dihadapi oleh NASIONAL RE pada setiap aktivitas fungsional Perusahaan, seperti kegiatan *underwriting*, investasi, operasional dan layanan pembayaran klaim, *trading*, pendanaan, teknologi informasi, dan manajemen sumber daya manusia.

Risiko Operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan karena rendahnya kemampuan Perusahaan untuk melakukan transaksi yang bernilai tambah.

Komponen penting Risiko Operasional antara lain:

1. Kemampuan kegiatan operasional dipengaruhi oleh adanya kerusakan infrastruktur, bencana alam, serta bentuk gangguan teknis lainnya yang dapat menurunkan kemampuan kegiatan operasional Perusahaan.
2. Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu komponen yang memberikan kontribusi terbesar atas kegagalan operasional. Risiko yang ditimbulkan antara lain berkaitan dengan *human error*, rendahnya integritas dan profesionalisme, rendahnya kerja sama dan konflik karyawan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta rendahnya budaya pengendalian.
3. Pelaksanaan Transaksi, Risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi terkait erat dengan risiko penyelesaian transaksi antara lain pembuatan kontrak dan administrasi yang berpotensi menimbulkan perselisihan *(dispute)*.
4. Rekonsiliasi data Akunting, proses rekonsiliasi data transaksi berperan penting dalam upaya melindungi Perusahaan terhadap risiko kerugian yang disebabkan eksposur keuangan yang tidak atau belum dibukukan.

Mitigasi Risiko:

1. Pelaksanaan *Control Self-Assessment* (CSA) secara teratur oleh para manajer dan karyawan serta tim kerja;

Operational Risk

Operational risk is the risk arising due to failures and weaknesses in internal processes, people and systems in the Company, as well as due to the Company's failure to anticipate external occurrence, including crime committed by external party, unanticipated regulatory changes.

NASIONAL RE faces operational risks in each activity conducted, such as underwriting, investment, operational and claims payment services, trading, finance, information technology and human resource management.

Operational risk may directly or indirectly lead to financial losses, and potential loss of opportunity to earn profit due to the incapability of the Company to perform value-added transactions.

The essential component of operational risk among others:

1. Operational capability. It is the component that can be affected by infrastructure breakdown, natural disaster and other forms of technical obstacle which may degrade the operational capability of the Company.
2. Human Resources. It is the component that hold the largest contribution to the operational failure. The risks among others are related to human error, lack of integrity and professionalism, lack of cooperation and conflict between employees, lack of knowledge and skills, as well as weak control culture.
3. Execution of transaction. The risk arising from the execution of transactions are closely related to the transaction settlement risk, among others include the contract and administration which are prone to dispute.
4. Accounting data reconciliation. The process of reconciliation of transaction data plays an important role in efforts to protect the Company against losses caused by the financial exposure that is not or has not been recorded.

Risk Mitigation:

1. Implementing Control Self-Assessment (CSA) on a regular basis, conducted by managers and employees and work teams;

2. Pengembangan kerja sama baik dalam bentuk kemitraan dan atau *outsourcing* dengan pihak lain guna meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam aspek aspek tertentu yang lemah atau yang bukan merupakan kompetensi utama Perusahaan;
3. Pengasuransian aset-aset Perusahaan dengan biaya yang paling *cost-effective*;
4. Pengembangan matriks kebutuhan dan peningkatan kompetensi karyawan dan manajer, sistem, dan proses secara menyeluruh;
5. Penerapan *rating* perusahaan dari lembaga pemeringkat yang diakui;
6. Peninjauan dan pemuktahiran prosedur (SOP) secara teratur;
7. Pencadangan dana talangan untuk kerugian operasional. Dana talangan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan dan selebihnya dialihkan ke pihak lain dalam bentuk asuransi.

2. Building cooperation in the form of partnerships and/or outsourcing with third parties in order to improve the Company's capability in certain aspects, which are not the Company's strength nor its core competencies;
3. Protecting the Company's assets with the most cost effective insurance;
4. Developing the matrix of training and improvement of competence of employees and managers, systems and processes as a whole;
5. Rating the Company by recognized rating agencies;
6. Reviewing and updating the procedures (SOP) on a regular basis;
7. Providing allowances for operational losses in accordance with the ability of the Company and the rest shall be transferred to other party in the form of insurance.

Risiko Strategis

Risiko Strategis yang dihadapi oleh NASIONAL RE adalah risiko yang terkait dengan ketepatan strategi bisnis dan kebijakan strategis perusahaan disebabkan adanya perubahan lingkungan eksternal Perusahaan baik saat ini maupun saat yang akan datang.

Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, teknologi, dan lingkungan alam *(nature)*.

Mitigasi Risiko:

1. Menetapkan rencana strategis *(corporate plan)* secara tertulis berjangka waktu 5 tahun, mencakup aspek-aspek seperti tujuan usaha, pertumbuhan usaha, pangsa pasar, pendapatan, produk dan aktivitas baru, termasuk alokasi sumber daya untuk melaksanakan kebijakan atau strategi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Rencana strategis ditetapkan oleh Direksi dan mendapat persetujuan Komisaris. Direksi yang membawahi beberapa aktivitas fungsional yang berbeda harus memastikan bahwa tidak terdapat benturan tujuan dan memastikan bahwa para pejabat dan pegawai Perusahaan pada setiap jenjang organisasi telah memahami dan melaksanakan rencana strategis tersebut.

Strategic Risk

The strategic risk faced by NASIONAL RE is the risk associated with the accuracy of the Company's business strategy and strategic policies, in coping with the changes in the external environment both now and in the future.

External environment encompasses the political environment, economic environment, social environment, technology and the natural environment (nature).

Risk Mitigation:

1. Set up a strategic plan (corporate plan) in writing for a term of 5 years, covering aspects such as business goals, business growth, market share, revenue, products and activities, including the allocation of resources to implement the policy or strategy to achieve those objectives.
2. The strategic plan is set by the Board of Directors and is approved by the Commissioner. The Board of Directors is in charge of several different functional activities to ensure that there is no conflicting goals and ensuring that the Company's officers and employees at every level of the organization are understand and implement the strategic plan.

3. Penetapan prosedur dan proses pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memantau kemajuan dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi.
4. Satuan kerja manajemen risiko atau satuan kerja lain yang diberi wewenang dan tanggung jawab mengelola risiko strategis melakukan analisis dan melaporkan laporan aktual dibandingkan dengan target kepada Direksi secara berkala sesuai kebutuhan Perusahaan. Dan apabila terjadi hambatan pencapaian target, Perusahaan melakukan Identifikasi faktor-faktor penyebab internal dan eksternal yang menghambat pencapaian tersebut.
5. Apabila terjadi hambatan karena masalah internal, Perusahaan harus melaksanakan penilaian faktor-faktor tersebut, menyusun rencana tindakan dan melakukan koordinasi secara internal mengenai pelaksanaan tindakan korektif atau penyesuaian target. Dalam hal ini, Direksi terlibat dalam proses penilaian kembali dan penyesuaian target tersebut.

3. Establishing procedures and financial control process that aims to monitor progress towards targets and to ensure that the risks taken are still within tolerable limits.
4. Risk management unit or other work units which are given the authority and is in charge of managing strategic risk shall perform analysis and report to the Board of Directors the realization compared with the target on a regular basis according to the needs of the Company. Should there be a hindrance in achieving targets, the Company shall identify the internal and external factors causing such hindrance.
5. In the event that there is resistance due to internal problems, the Company shall carry out an assessment of these factors, develop a plan of action and coordinate internally on the implementation of corrective action or adjustment of the target. In this case, the Board of Directors is engaged in a process of re-assessment and adjustment of the target.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya kegiatan operasional Perusahaan yang menimbulkan publikasi negatif atau persepsi negatif di antara para *stakeholders* terhadap Perusahaan. Risiko reputasi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan *volume* usaha atau peningkatan biaya kehumasan.

Mitigasi Risiko:
1. Adanya kebijakan tertulis dan transparan sejalan dengan ketentuan yang berlaku bagi kepentingan pihak *stakeholders* dan publik dengan cara mengungkapkan kinerja keuangan Perusahaan, serta jasa dan produk yang ditawarkan, profesionalisme serta etika usaha Perusahaan;
2. Menjaga hubungan baik dengan media dan melakukan pemantauan berita publikasi yang bersifat negatif di pasar termasuk arus dan jaringan informasi atau berita tersebut.

Reputation Risk

Reputation risk is the risk that is partly due to the negative publications or negative perceptions among stakeholders regarding the Company, as result of the Company's operational activities. Reputational risk can lead to the decrease in income and business volume or to the increase in public relations expenses.

Risk Mitigation:
1. Preparing written and transparent policies in line with the applicable provisions for the interests of stakeholders and public by revealing the Company's financial performance, as well as the services and products offered, the Company's professionalism and business ethics;
2. Maintaining good relations with the media and monitoring negative news publications on the market including the flow and information network or news.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Perusahaan gagal mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Perusahaan yang terkait pada peraturan perundangundangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk caused by the Company's failure to comply with or implement laws and regulations and other applicable regulations. In practice compliance risk is inherent in the Company's risk related to legislation and other applicable regulations.

Komitmen dan Peran Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Manajemen Risiko

Direksi NASIONAL RE dengan persetujuan Komisaris menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan yang tercantum di dalam pedoman Manajemen Risiko.

Peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain, meliputi:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskannya sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Peran dan tanggung jawab Direksi, meliputi:

1. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Perusahaan. Penyusunan kebijakan dan strategi

Commitment and Active Role of The Board of Commissioners and Board of Directors in Risk Management

Board of Directors of NASIONAL RE with the approval of the Board of Commissioners determines clear authority and responsibility at every level of position, related to risk management in the Company, as stipulated in the Risk Management guidelines.

Roles and responsibilities of the Board of Commissioners, include:

1. Approve and evaluate the risk management policies, conducted at least once a year or more in the event of changes in the factors affecting the Company's business activities significantly;
2. Evaluate the accountability of the Board of Directors in the implementation of risk management policies mentioned above, at least on a quarterly basis;
3. Evaluate and determine the request or suggestion coming from the Board of Directors relating to transactions or business activities that go beyond the authority of the Board of Directors to decide and hence require approval from the Board of Commissioners.

Roles and responsibilities of the Board of Directors include:

1. Formulate policies and strategies for risk management in writing and include the establishment and approval of a comprehensive overall risk limits, per type of risk and per functional activity (operations) of the Company. Formulation of policies and risk management strategies

manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Perusahaan satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku;
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;
5. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain dengan program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses Manajemen Risiko;
6. Memastikan bahwa satuan kerja Manajemen Risiko memiliki sumber daya, wibawa, kompetensi dan independensi yang memadai untuk memantau, mengevaluasi dan memvalidasi penerapan proses Manajemen Risiko oleh satuan-satuan kerja operasional di dalam Perusahaan yang melakukan dan menyelesaikan transaksi-transaksi usaha;
7. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi sesuai kebutuhan Perusahaan, untuk memastikan:
   a. Keakuratan metodologi penilaian risiko;
   b. Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
   c. Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

is performed at least once a year or more in the event of a change in the factors affecting the Company's business significantly;

2. Be responsible for the implementation of risk management policies and risk exposures taken by the Company as a whole, including evaluating and providing direction risk management strategies based on the report submitted by the risk management unit and delivery of accountability reports to the Board of Commissioners on a quarterly basis;
3. Evaluate and decide on transactions exceeding the authority of officials below the level of the Board of Directors or transactions that require approval in accordance with internal policies and procedures;
4. Develop risk management culture at all levels of the organization, among others, including adequate communication to all levels of the organization on the importance of effective internal controls;
5. Ensure competency enhancement of human resources related to the implementation of risk management, among others, with education and training programs that are sustainable, especially with regard to risk management systems and processes;
6. Ensure that the risk management unit has the resources, authority, competence and independence sufficient to monitor, evaluate and validate the application of risk management processes by operational units within the Company that undertake and complete business transactions;
7. Carry out periodic review of the Company's frequency as needed, to ensure:
   a. The accuracy of risk assessment methodology;
   b. Adequacy of risk management information system implementation; and
   c. Appropriateness of policies, procedures and risk limits.

Indikator Risiko Kunci

Indikator risiko kunci adalah suatu peristiwa atau hal tertentu yang memberikan indikasi terjadinya suatu peristiwa risiko.

Penggunaan indikator risiko kunci dalam aktivitas pemantauan risiko dapat memberikan peringatan atau informasi lebih dini kepada manajemen entitas bahwa kemungkinan terjadinya suatu peristiwa risiko semakin meningkat. Hal tersebut dapat terwujud karena pemantauan dilakukan untuk fokus terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi indikasi terjadinya suatu peristiwa risiko, bukan terhadap peristiwa risiko itu sendiri.

Berdasarkan peringatan atau informasi tersebut entitas dapat melakukan berbagai tindakan mitigasi lebih awal guna mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko maupun dampak yang mungkin ditimbulkan oleh risiko tersebut (jika terjadi).

Di dalam setiap masing-masing *risk description* yang teridentifikasi di dalam pengelolaan Manajemen Risiko di NASIONAL RE memiliki Indikator risiko kunci yang sesuai dengan masing-masing risiko tersebut. Sehingga indikator risiko kunci tersebut akan berperan sebagai suatu sistem peringatan dini *(early warning)*.

Key Risk Indicators

Key risk indicator is a particular event that indicates the occurrence of risk.

The use of key risk indicators in risk monitoring activities is to provide an early warning or information to the management about the increasing possibility of a risk event. This could be realized since the monitoring process is focused on events that indicate the occurrence of risk event, not the risk event itself.

Based on this warning or information, the entity could perform various mitigation measures in order to reduce the likelihood and impact of risk events posed by the risk (if it happens).

Each identified risk description in the risk management system applied at NASIONAL RE has the key risk indicators corresponding to each of these risks. Therefore, the key risks are applied as the early warning system.

Manajemen Kelangsungan Bisnis Perusahaan

Business Continuity Management

Latar Belakang dan Konsep Manajemen Kelangsungan Bisnis Perusahaan

Sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada saat ini, maka kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sudah merupakan suatu keharusan dan tidak dapat dipungkiri lagi. Berlatar belakang dari hal di atas, maka implementasi *Business Continuity Management* (BCM) merupakan suatu elemen yang sangat penting, sehingga perusahaan dapat memilki kemampuan untuk bertahan dan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya

Background and Concepts of Business Continuity Management

In accordance with the current business development, the company's ability to maintain its business continuity is a must and cannot be denied anymore. Based on the above, the implementation of Business Continuity Management (BCM) is a very important element, so that companies can have the ability to survive and continue to carry out their business activities despite experiencing various operational disturbances caused by internal and external factors. The

walaupun mengalami berbagai gangguan operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Implementasi BCM dapat meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* dalam suatu organisasi.

Penerapan BCM pada Perusahaan mendapat dukungan dari *Top Management*, dan dimulai dengan penetapan objektif, *identify* kebutuhan *resources* (minimum), dan target yang akan dicapai. Sesuai dengan objektif dan target yang sudah ditentukan, dan sejalan dengan hasil proses *risk assessment*, maka perusahaan dapat menentukan ancaman serta estimasi besarnya dampak yang mungkin akan terjadi, serta mitigasi risiko yang diperlukan.

Sesuai dengan hasil proses *risk assessment* tersebut, dalam metodologi BCM, proses *Business Impact Analysis* (BIA) merupakan suatu proses yang sangat penting. Berdasarkan hasil BIA suatu organisasi harus menentukan *Critical Business Function* (CBF) yang harus segera di- *Recover*, dan lamanya waktu CBF tersebut dapat berhenti melayani (tidak dilayani) yang biasa disebut dengan *Recovery Time Objective* (RTO), serta besarnya perbedaan data/kehilangan data yang dapat diterima *(Recovery Point Objective/RPO)* sampai CBF tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap organisasi tersebut.

Salah satu hasil atau *output* dari penerapan BCM pada perusahaan adalah *Business Continuity Plan* (BCP). BCP merupakan suatu dokumen tertulis yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinasi, tentang langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko, penanganan dampak gangguan operasional dan proses pemulihan agar kegiatan operasional perusahaan dan pelayanan kepada pelanggan tetap dapat berlangsung saat terjadi bencana.

Penyusunan *Business Continuity Plan* (BCP) dilakukan berdasarkan CBF, RTO, dan RPO yang sudah disetujui. BCP dibuat sesederhana mungkin dan dibuat dengan menggunakan kata-kata yang sangat mudah dimengerti, mengingat BCP akan digunakan dalam kondisi disaster. BCP yang sudah disiapkan dan telah diujicoba guna memastikan bahwa BCP tersebut dapat diimplementasikan/diterapkan dan telah disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Keberhasilan implementasi BCM pada perusahaan bukan hanya dilihat dari keberhasilan ujicoba BCP, namun juga

implementation of BCM can increase the need for good corporate governance practices in an organization.

The application of BCM in the Company is supported by Top Management, and shall be started with setting the objective, identifying minimum resource requirements, and targets to be achieved. In accordance with the objectives and targets that have been determined, and in line with the results of the risk assessment process, the Company can determine the threat and estimate the magnitude of the impact that might occur, as well as mitigate the risks needed.

In accordance with the results of the risk assessment process, in the BCM methodology, the Business Impact Analysis (BIA) process is a very important process. Based on the BIA results, an organization shall determine the Critical Business Function (CBF) that must be immediately recovered, and the length of time in which CBF stop serving, commonly referred to as Recovery Time Objective (RTO), as well as the amount of data difference/loss acceptable (Recovery Point Objective/RPO) until the CBF has a significant impact on the organization.

One result or output of the application of BCM to the Company is the Business Continuity Plan (BCP). BCP is a written document containing a series of planned and coordinated activities, measures to reduce the impact of risk, handling of the impact of operational disruptions and the recovery process so that the Company's operational activities and services to customers can still take place in the event of a disaster.

The preparation of the Business Continuity Plan (BCP) is based on the approved CBF, RTO and RPO. BCP is made as simple as possible and using words that are very easy to understand, considering that BCP will be used in disaster conditions. BCP that has been prepared and tested to ensure that the BCP can be implemented and has been adjusted to the conditions of the company. The success of BCM implementation in Company is not only seen from the success of the BCP trial, but also needs to know how high the level of concern/awareness of each company personnel

perlu diketahui seberapa tinggi tingkat kepedulian/*awareness* dari setiap personel perusahaan terhadap implementasi BCM. Untuk itu diperlukan aktivitas untuk meningkatkan *awareness* dari seluruh personel yang dilakukan secara berkala dalam bentuk sosialisasi, simulasi, *training*, ataupun aktivitas permainan/*games* lainnya yang dibuat semenarik mungkin.

towards BCM implementation. For this reason, activities are needed to increase awareness of all personnel carried out periodically in the form of socialization, simulation, training, or other game/activities that are made as attractive as possible.

Kesiapan setiap personel dalam menghadapi gangguan/*disaster* didukung oleh kebijakan dan prosedur yang dicantumkan dalam BCP yang sudah di ujicoba dan dipastikan dapat diimplementasikan, sehingga dapat meningkatkan tingkat layanan perusahaan kepada mitra usaha yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan profit perusahaan.

The readiness of each personnel in the face of disasters supported by the policies and procedures included in the BCP that have been tested and confirmed can be implemented, so as to increase the level of service of the company to business partners which is ultimately expected to increase company profits.

Pelaksanaan Sistem Kelangsungan Bisnis Perusahaan

Pada pelaksanaannya Perusahaan mengadopsi standar *ISO 22301:2012 Standard Business Continuity Management System*. ISO 22301:2012 mengidentifikasi dasar-dasar sistem manajemen kelangsungan bisnis, membangun proses, prinsip dan terminologi manajemen kontinuitas bisnis. Standar ini antara lain, bertujuan untuk dapat memberikan dasar acuan bagi perusahaan, agar dapat memahami, mengembangkan dan menerapkan manajemen kelangsungan bisnis, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa Perusahaan dapat terus beroperasi walaupun sedang mengalami keadaan bencana.

Implementation of Business Continuity Management System

In practice, PT Reasuransi Nasional Indonesia adopted ISO 22301: 2012 Standard Business Continuity Management System. ISO 22301: 2012 identifies the basics of business continuity management systems, builds processes, principles and terminology of business continuity management. This standard, among others, aims to provide a benchmark for the company, in order to understand, develop and implement business continuity management, so as to give confidence to all stakeholders of the company that the company could continue to operate despite the disaster.

Komponen penyusun BCMS pada ISO 22301:2012 antara lain:

1. *Policy* (Kebijakan).
2. *People* (Manusia) dengan tanggung jawab terdefinisi.
3. Proses Pengelolaan yang berkaitan dengan:
   a. *Policy*
   b. *Planning*
   c. *Implementation and Operation*
   d. *Performance Assessment*
   e. *Management Review*
   f. *Improvement*
4. Dokumentasi yang menyediakan bukti yang dapat diaudit.
5. Proses pengelolaan kelangsungan bisnis lain yang relevan untuk perusahaan.

Components constructing the BCMS at ISO22301:2012 are, among others, as follows:

1. Policy.
2. People with defined responsibilities.
3. Management Process related to:
   a. Policy
   b. Planning
   c. Implementation and Operation
   d. Performance Assessment
   e. Management Review
   f. Improvement
4. Documentation that provides auditable evidence.
5. Another business continuity management process that is relevant to the Company.

Standar ISO 22301 juga mengikuti pola PDCA *(Plan-Do-Check-Act)* yang merupakan standar pola ISO.

- *Plan (Establish)*
  Menetapkan kebijakan, tujuan, sasaran, kontrol, proses dan prosedur. Kelangsungan bisnis yang relevan untuk meningkatkan kelangsungan bisnis agar dapat memberikan hasil yang selaras dengan kebijakan organisasi secara keseluruhan dan tujuannya.
- *Do (Implement and Operate)*
  Menerapkan dan mengoperasikan kebijakan, kontrol, proses dan prosedur kelangsungan bisnis.
- *Check (Monitor and Review)*
  Memantau dan menilai kinerja terhadap kebijakan dan tujuan kelangsungan bisnis, melaporkan hasilnya kepada manajemen untuk ditinjau, dan menentukan serta mengotorisasi tindakan untuk remediasi dan perbaikan.
- *Act (Maintain and Improve)*
  Memelihara dan meningkatkan BCMS dengan mengambil tindakan korektif, berdasarkan hasil tinjauan manajemen dan menilai kembali lingkup BCMS serta kebijakan dan tujuan kelangsungan bisnis.

Manfaat dari penetapan *Business Continuity Management System ISO 22301* adalah:

- Mampu mengelola risiko terhadap potensi krisis bisnis organisasi.
- Mengembangkan kesadaran dan karyawan dalam kontribusi BCM kepedulian.
- Menjaga konsistensi kelangsungan bisnis ketika memasuki masa krisis.
- Menjaga produktivitas proses bisnis dari setiap lini manajemen.
- Meningkatkan wawasan dalam mengantisipasi potensi krisis bisnis.

The ISO 22301 standard also follows the PDCA pattern (Plan-Do-Check-Act) which is a standard ISO pattern.

- Plan (Establish)
  Establish policies, objectives, objectives, controls, processes and procedures; business continuity that is relevant to improving business continuity in order to deliver results that are aligned with the organization's overall policy and objectives.
- Do (Implement and Operate)
  Implement and operate business continuity policies, controls, processes, and procedures.
- Check (Monitor and Review)
  Monitor and assess performance against business continuity policies and objectives, report results to management for review, and determine and authorize actions for remediation and improvement.
- Act (Maintain and Improve)
  Maintain and enhance BCMS by taking corrective action, based on management review results and reassessing BCMS scope as well as business continuity policies and objectives.

The benefits of establishing the Business Continuity Management System ISO 22301 are:

- Able to manage the risks to potential business crisis of the organization.
- Developing awareness and employee awareness in BCM contributions.
- Maintaining the consistency of business continuity when entering a period of crisis.
- Maintaining the productivity of business processes from each line of management.
- Increasing insight in anticipating potential business crises.

Siklus PDCA Pada ISO 22301:2012
PDCA Cycle on ISO 22301:2012

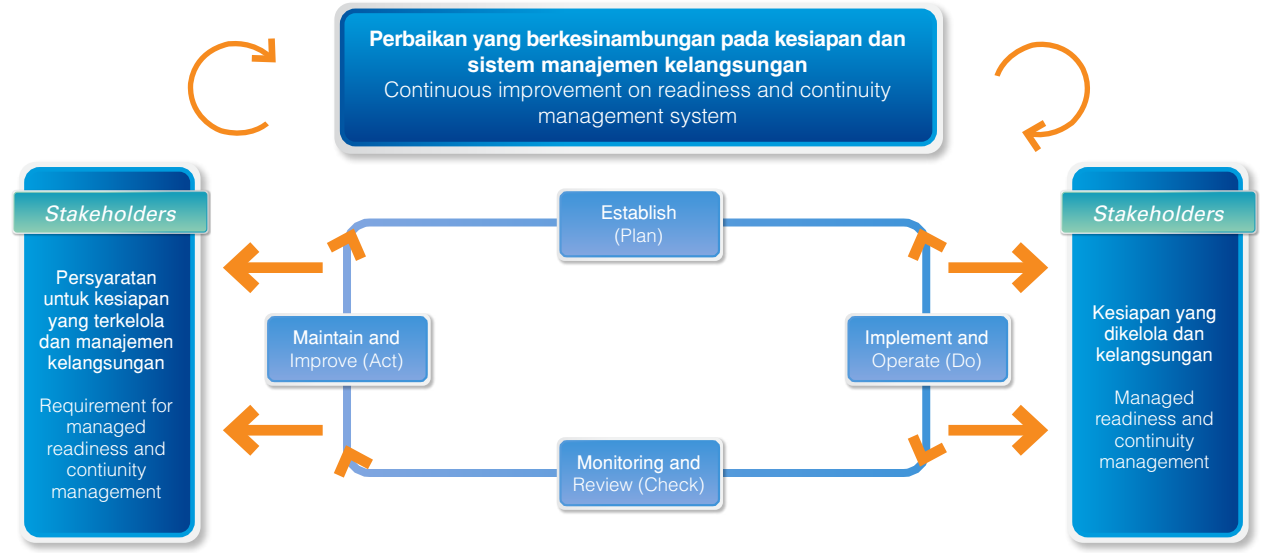

Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis
Business Continuity Management System

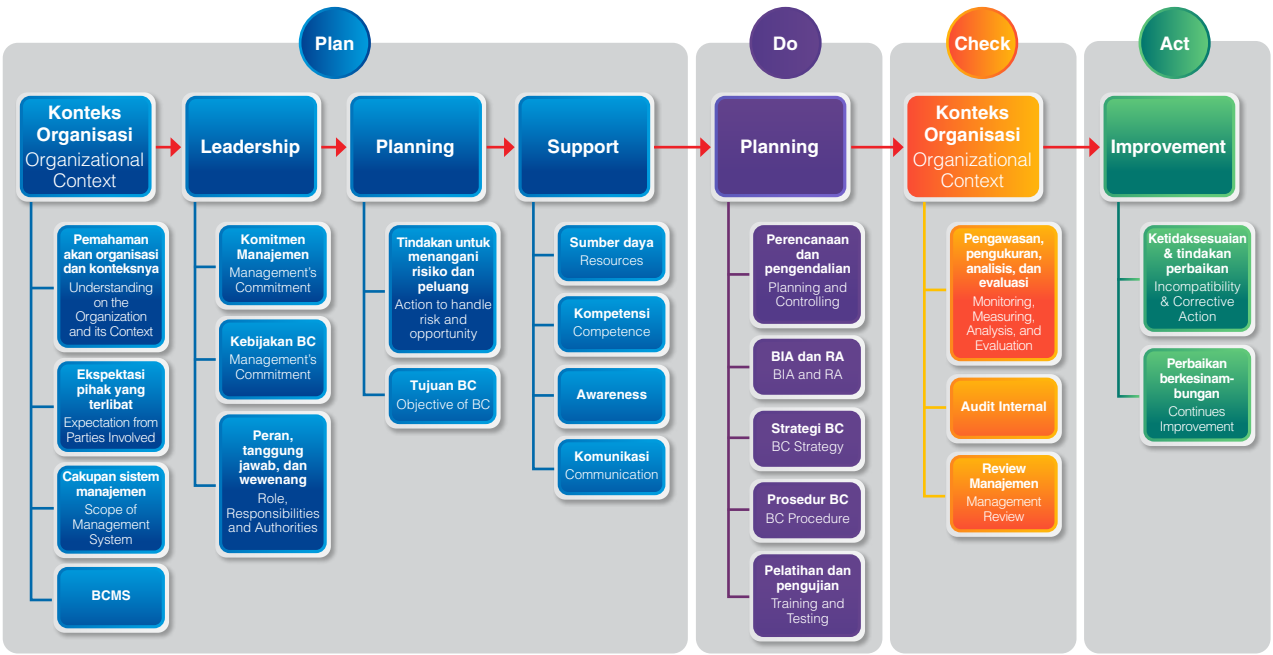

Sistem Pengendalian Internal

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Pengendalian internal yang dijalankan Perusahaan menggunakan metode COSO dimana sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain, yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional.
2. Keandalan informasi baik informasi yang bersifat keuangan maupun operasional.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Komitmen Perusahaan terhadap pentingnya pengendalian internal dapat dilihat pada:

1. Standar Profesional Auditor Internal mengenai keharusan menguji sistem pengendalian internal.
2. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di industri asuransi atau industri lain yang relevan.

Berdasarkan pengertian, tujuan dan komitmen di atas, pengendalian internal dinilai dari 3 (tiga) dimensi, yaitu:

1. Dimensi I yaitu pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian internal dapat dicapai.
2. Dimensi II yaitu pengendalian internal dievaluasi dalam dua tingkat yaitu:
   a. Tingkat entitas, dimana pengendalian internal berlaku terhadap keseluruhan unit kerja seperti kebijakan, *codes of conduct*.
   b. Tingkat aktivitas, dimana pengendalian dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti *Standard Operating Procedure* (SOP).
3. Dimensi III, yaitu lima komponen pengendalian intern sebagai batasan dan kerangka kerja dalam mengevaluasi dengan menyediakan kriteria penaksiran yang diklasifi kasikan dalam:
   a. Lingkungan pengendalian
      Auditor internal melakukan evaluasi kecukupan dan keefektifan atas tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan perilaku manajemen puncak, Direksi dan pemilik entitas atas pengendalian dan kepentingannya, seperti:
      I. Integritas dan nilai etis;
      II. Komitmen terhadap kompetensi;
      III. Filosofi manajemen dan gaya operasi;

The Company adopts the COSO method for it internal control, in which the internal control system is defined as a process undertaken by the Board of Commissioners, management, and other personnel, which is designed to provide reasonable assurance about achievement of 3 (three) objectives:

1. Effectiveness and efficiency of operations.
2. Reliability of information both financial and operational information.
3. Compliance with applicable laws and regulations including regulations applicable in the Company and operations.

The Company's commitment to the importance of internal control could be seen in:

1. Professional Standards of Internal Auditors on the need to test the internal control system.
2. Legislation and regulation applicable in the insurance industry or other relevant industries.

Based on the above understanding, objectives and commitments, internal control is assessed from 3 (three) dimensions, namely:

1. Dimension I is internal controls designed to provide reasonable assurance that internal control objectives could be achieved.
2. Dimension II is the internal control which is evaluated in two levels namely:
   a. Level of entity, where internal controls apply to the entire work unit such as policy, codes of conduct.
   b. Level of activity, where control is designed to achieve a specific goal such as Standard Operating Procedure (SOP).
3. Dimension III, which is the five components of internal control as a limitation and framework in evaluating by providing criteria for assessment classified in:
   a. Control Environment
      The internal auditor evaluates the adequacy and effectiveness of actions, policies and procedures that reflect the overall behavior of top management, the Board of Directors and entity owners of control and importance, such as:
      I. Integrity and ethical values;
      II. Commitment on competence;
      III. Management philosophy and operating style;

IV. Struktur organisasi;
V. Direksi atau komite audit;
VI. Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab;
VII. Kebijaksanaan dan praktik sumber daya manusia.

b. Penilaian risiko
Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dengan mengidentifikasi dan menganalisis tanggapan dan tindakan yang dilakukan manajemen atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini penilaian risiko dilihat dari asersi manajemen yang harus dipenuhi, yaitu:
I. Keberadaan dan kejadian;
II. Kelengkapan;
III. Penilaian dan alokasi;
IV. Hak dan kewajiban;
V. Penyajian dan pengungkapan.

c. Aktivitas Pengendalian
Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan, yakni:
I. Adanya pemisahan tugas;
II. Adanya otorisasi atas transaksi dan aktivitas;
III. Adanya dokumen dan pencatatan yang memadai;
IV. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan;
V. Pengujian independen atas kinerja.

d. Informasi dan Komunikasi
Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas terhadap metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menyusun, mengklasifikasikan, mencatat dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas atas aset-aset terkait. Aktivitas pengendaliannya dapat berupa:
I. Keberadaan;
II. Kelengkapan;
III. Akurasi;
IV. Klasifi kasi;
V. Ketetapan waktu;
VI. Posting dan pengikhtisaran.

e. Pemantauan
Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari penaksiran terus menerus dan periodik yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa efektivitas rancangan dan pelaksanaan struktur pengendalian sedang berjalan sesuai dengan tujuannya atau perlu dimodifikasi.

IV. The structure of the organization;
V. The Board of Directors or audit committee;
VI. Delegation of authority and responsibility;
VII. The policies and practices of human resources.

b. Risk assessment
Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness by identifying and analyzing the responses and actions taken over by the management of risks relevant to the financial statements in accordance with generally accepted accounting principles. In this case, the risk assessment from the management's assertions that shall be met, namely:
I. The existence and occurrence;
II. Completeness;
III. Assessment and allocation;
IV. The rights and obligations;
V. Presentation and disclosure.

c. Control Activity
Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of the policies and procedures established by the management to achieve financial reporting purposes, namely:
I. Separation of duties;
II. Authorization of transactions and activities;
III. Adequate documents and records;
IV. Physical control over assets and records;
V. Independent testing for performance.

d. Information and Communication
Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of the method used to identify, organize, classify, record, and report entity transactions and to maintain accountability for related assets. Control activities can be in the form of:

I. Existence;
II. Completeness;
III. Accuracy;
IV. Classification;
V. Timeliness;
VI. Posting and summarizing.

e. Monitoring
Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of continuous and periodic assessment carried out by the management to ensure whether the effectiveness of the design and implementation of the control structure is in accordance with the objectives or needs to be modified.

Ciri-ciri pengendalian internal yang efektif:
1. Tujuannya jelas;
2. Dibangun untuk tanggung jawab bersama;
3. Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan;
4. Didokumentasikan;
5. Dapat diuji dan di*review*;
6. Dapat dikelola.

Pada perusahaan reasuransi, lima komponen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Lingkungan pengendalian seperti:
   a. Memahami lingkungan bisnis reasuransi;
   b. Supervisi dan pemantauan seperti kontrol atas kebijakan penerbitan polis dokumen, batas (limit) persetujuan klaim.
2. Penilaian risiko berupa:
   a. Peningkatan solvabilitas sebagai persyaratan dari *regulator* (pemerintah);
   b. Belum adanya kebijakan terkait dengan pengawasan dan *update* data polis/ peserta;
   c. Kegagalan untuk memperbaharui data peserta yang mengakibatkan salah penilaian dalam menentukan premi.
3. Aktivitas pengendalian
   Aktivitas pengendalian ini terkait pada siklus yang ada, seperti:
   a. Siklus pendapatan yaitu cara perusahaan reasuransi dalam memelihara keandalan *master* data pemegang polis/peserta.
   b. Siklus biaya yaitu kebijakan mengenai persetujuan pembayaran/pengajuan klaim, audit pengajuan klaim peserta.
4. Informasi dan Komunikasi
   Pada tahap ini, Auditor internal memastikan apakah sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan, diinformasikan dan dikomunikasikan ke semua unit kerja.
5. Pemantauan
   Auditor internal melakukan kegiatan pengawasan yang sedang berjalan, evaluasi secara terpisah dan pelaporan atas manajemen risiko.

Ada tiga cara yang dapat digunakan untuk dapat menghasilkan dan melakukan evaluasi pengendalian intern yakni:

The characteristics of an effective internal control:
1. Having clear objectives;
2. Built for shared responsibility;
3. The cost is justified to achieve the goal;
4. Documented;
5. Could be tested and reviewed;
6. Manageable.

In the reinsurance industry, the above five components could be described as follows:
1. The control environment, such as:
   a. Understanding the reinsurance business environment.
   b. Supervision and monitoring, such control over policy issuance/document, the limit of claim approval.
2. Risk assessment, such as:
   a. Increase in solvency as requirements from the regulator (government);
   b. The absence of policies related to surveillance and policy/participants data update;
   c. Failure to renew the participant data resulting in incorrect assessments in determining the premium.
3. Control activities
   The control activities are related to the following cycle:
   a. Revenue cycle, how reinsurers in maintaining the reliability of the data master of policyholder/ participant.
   b. Cost cycle, the policy regarding approval of payment/ submission of claims, claims submission audit.
4. Information and Communication
   At this stage, the internal auditor ensures whether the systems and procedures have been defined, shared and communicated to all work units.
5. Monitoring
   Internal auditors conduct ongoing monitoring, evaluation, and reporting separately on risk management.

There are three ways that could be used to prepare and evaluate the internal control:

1. *Internal Control Questionaires*
   Merupakan cara yang paling sederhana dan praktis. Hal ini dengan memberikan pertanyaan yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern di suatu unit kerja.
2. *Flowchart*
   Flowchart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit kerja/divisi, misalnya penerbitan polis, penerbitan *invoice* (faktur), kelayakan penerimaan *Principal*, sistem dan prosedur akseptasi, utang dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan akseptasi *(offer)*, persetujuan akseptasi *(Reinsurance Slip)* sampai dengan pembayaran premi yang berasal dari *offer* tersebut.
3. *Narrative*
   Hal ini dilakukan auditor internal dengan cara menceritakan dalam bentuk memo, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas, prosedur penerbitan polis.

1. Internal Control Questionaires
   It is the most simple and practical. It is performed by asking questions that can be used to understand and evaluate the internal control in a work unit.

2. Flowchart
   Flowchart depicts the fl ow of documents in the system and procedures in a work unit/division, for example, policy issuance, invoice issuance, the feasibility of principal acceptance, system and procedures of acceptance, debt and cash disbursements, described as the fl ow of documents ranging from acceptance request (offer), approval acceptances (Reinsurance slip) to the premium payment from the offer.
3. Narrative
   It is brought about by the internal auditors by describing using memo, accounting systems, and procedures applied in the company, such as cash disbursements procedures, policy issuance procedures.

Review dan Penilaian Sistem Pengendalian Internal

Pada setiap kali akan dimulai suatu audit, auditor wajib me*review* dan menilai keadaan sistem pengendalian internal objek yang diaudit (unit kerja) sebagai dasar:

1. Untuk menentukan luasnya prosedur audit dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan dilakukan serta penyusunan prosedur audit.
2. Untuk memberikan saran-saran perbaikan/rekomendasi kepada manajemen.
3. Sistem pengendalian internal seperti telah dijelaskan sebelumnya meliputi *review* atas hal-hal yang menyangkut:
   a. Lingkungan Pengendalian
   b. Penilaian Risiko Aktivitas Pengendalian
   c. Informasi dan Komunikasi
   d. Pemantauan

Review and Assessment on Internal Control System

In the beginning of every audit, the auditor shall review and assess the state of the internal control system of the audit object (unit) as a basis:

1. To determine the scope of the audit procedures and the depth of the audit to be performed, as well as the preparation of audit procedures.
2. To provide suggestions for improvement/recommendations to management.
3. The system of internal control, as previously described, includes a review of matters relating to:
   a. Control Environment
   b. Risk Assessment Control Activity
   c. Information and Communication
   d. Monitoring

Tahap-Tahap *Review* dan Penilaian Sistem Pengendalian Internal

1. Pengumpulan data dan informasi kumpulkan data mengenai sistem pengendalian intern antara lain dengan jalan mempelajari manual yang ada, mempelajari operasi yang sesungguhnya dan mengadakan wawancara *(interview)* dengan pejabat yang berkepentingan.

Stages of Review and Assessment on Internal Control System

1. Collecting data and information Collecting data on the internal control system, among others, by studying the existing manual, learning the actual operations and conducting interview with the officials concerned.

2. Penelaahan siapkan catatan tertulis mengenai sistem pengendalian internal melalui media sebagai berikut:
   1) Daftar pertanyaan tentang pengendalian internal.
   2) Bagan Arus *(Flow-Chart)*.

Daftar dilengkapi dengan uraian tertulis *(narrative)*. Untuk auditor yang belum biasa menggunakan bagan arus dapat dijalankan sebaliknya, yaitu membuat gambaran garis besar secara tertulis dan kemudian dilengkapi dengan bagan arus.

2. Preparing a written record of the internal control system through the media as follows:
   1) List the question of internal control.
   2) Flow-Chart.

The list is completed with a narrative. Auditors who have not been accustomed to using the flow chart could use the other way around, by preparing a written outline and then fitted with a flow chart.

Auditor Eksternal
EXTERNAL AUDITORS

Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang ditunjuk oleh Perusahaan telah menyampaikan laporan keuangan tahun 2021 pada tanggal 9 September 2022. Dengan opini "wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan PT Reasuransi Nasional Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, which was appointed by the Company, has submitted its 2021 financial report on September 9, 2022 with an opinion that "the financial position of PT Reasuransi Nasional Indonesia as of December 31, 2021, as well as financial performance and cash flow for the year ended on that date, are presented fairly in all material respects, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".

Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan juga telah bekerja secara independen dan memenuhi kriteria yang telah diperjanjikan sebelumnya.

The KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners have also worked independently and met the criteria that had been previously agreed upon.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tidak memberikan jasa lain selain jasa audit laporan keuangan.

The KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners did not provide other services other than financial statement audit services.

Kriteria Penunjukan

Penunjukan KAP dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku dan telah melalui tahapan proses seleksi yang berdasarkan kriteria berikut:

1. Berpengalaman sebagai auditor lembaga keuangan non-bank.
2. Memahami regulasi lembaga keuangan nonbank di Indonesia, serta peraturan lainnya yang relevan.
3. Memahami produk asuransi/reasuransi.
4. Berpengalaman dan paham mengenai manajemen risiko.

Criteria of Appointment

The appointment of KAP is carried out based on applicable legal regulations and has gone through the selection process based on the following criteria:

1. Having experience as auditor for non-bank financial institutions.
2. Understand the regulations of non-bank financial institutions in Indonesia, as well as other relevant regulations.
3. Having the understanding on insurance/reinsurance products.
4. Experienced and understand about risk management.

Perkara Penting
LITIGATION

Pada tahun 2021, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Perusahaan maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi NASIONAL RE yang dapat menimbulkan dampak yang material terhadap kinerja Perusahaan.

In 2021, there were no litigation faced by the Company and members of the Board of Commissioners and Board of Directors of NASIONAL RE which could have a material impact on the Company's performance.

Kode Etik
CODE OF CONDUCT

Pedoman Etika dan Perilaku *(Code of Conduct)* merupakan bagian dari Pedoman GCG Perusahaan yang disusun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mengelola Perusahaan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Komitmen untuk menegakkan kode etik di Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

Code of Conduct is part of the Company's GCG Guidelines drawn up on the consideration that, in managing the organization, not only must the Company comply with the laws and regulations, but also uphold ethical norms and values. The commitment to uphold the code of conduct in the Company is expected to increase and strengthen the reputation of the Company.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dasar Hukum

Pedoman dan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran *(whistleblowing)* di NASIONAL RE ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06/KEP/DIR/II/2014 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*. *Whistleblowing System* ini merupakan suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi dalam Perusahaan.

Secara internal, pelaporan pelanggaran menjadi cara untuk mendorong karyawan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor dan Perusahaan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta praktik terbaik yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem perlindungan pelapor.

Legal Basis

The guidelines and procedures for handling report of violations (whistleblowing) at NASIONAL RE re stipulated by the Decree of the Board of Directors No. 06/KEP/DIR/II/2014 on Guidelines for Reporting Violations System (Whistleblowing System). Whistleblowing System is a system that serves as a medium for a witness, to convey information regarding the indication of violations that occur in the Company.

Internally, reporting violations is a way to encourage employees to be more willing to act to prevent fraud and corruption by reporting it to parties assigned to handle it. The Company is committed to protecting the Whistleblower and the Company adheres to all relevant legislation and best practices applicable in the implementation of the Whistleblower protection.

Tim Pengelola *Whistleblowing*

Perusahaan telah menetapkan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang terdiri dari Bagian SKAI, Bagian SDM dan unit kerja lain yang berada di bawah kewenangan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi.

Whistleblowing Management Team

The Company has established a Violation Reporting Management Team consisting of the Internal Audit Unit, HR Division and other work units under the authority of the Board of Directors based on the Board of Directors' Decree.

Mekanisme *Whistleblowing*

Mekanisme pelaporan pelanggaran telah disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari implementasi GCG di NASIONAL RE.

Dalam mekanisme *whistleblowing* ini, Perusahaan wajib menerima setiap pelaporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal. Perusahaan telah menyediakan 2 (dua) jalur alternatif dalam pengelolaan pelaporan *whistleblowing*, yaitu melalui jalur Direksi dan jalur Dewan Komisaris, sesuai dengan level pelaku pelanggaran.

Para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelaporan/penyingkapan berdasarkan kategori Pelapor seperti:

- Direksi, jika Terlapor adalah Insan Perusahaan selain Tim Kepatuhan GCG, Dewan Komisaris dan Direksi.
- Dewan Komisaris, jika Terlapor adalah Direksi.
- Direktur Utama, jika Terlapor adalah Dewan Komisaris, Tim Kepatuhan GCG.

Penyampaian Pelaporan:

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi/Direktur Utama Dewan Komisaris NASIONAL RE u.p. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta 10330.
2. Pelaporan pelanggaran secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
3. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi fotokopi dokumen pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.

Penerimaan Pelaporan:

1. Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh pemangku kepentingan dan/atau perwakilan pemangku kepentingan baik secara lisan maupun tertulis.

Whistleblowing Mechanism

The mechanism for reporting violations has been socialized to all stakeholders as part of the implementation of GCG in NASIONAL RE.

In this whistleblowing mechanism, the Company is required to accept any reports of violations from internal and external parties. The Company has provided 2 (two) alternative channels in managing whistleblowing reporting, namely through the Board of Directors and the Board of Commissioners, according to the level of the perpetrator of the violation.

The parties that have the authority to follow up on reporting/disclosure based on the Reporting category are:

- Board of Directors, if the Reported Party is a Company Person other than the GCG Compliance Team, Board of Commissioners and Directors.
- Board of Commissioners, if the Reported Party is the Board of Directors.
- President Director, if the Reported Party is the Board of Commissioners, the GCG Compliance Team.

Submission of Report:

1. Submitting an official letter addressed to theBoard of Directors/President Director/Board of Commissioners of NASIONAL RE, Attn: The Violation Reporting Management Team, by sending directly or by post to the Company, with the address Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta 10330.
2. Reporting violations in writing must be accompanied by photocopies of identity and supporting evidence such as documents relating to transactions conducted and/or reporting of violations that will be submitted.
3. Reporting violations in writing without identity must be accompanied by photocopies of supporting documents such as documents relating to transactions conducted and/or reporting of violations that will be submitted.

Receipt of Report:

1. The Company receives every report of violations submitted by stakeholders and/or its representatives, both verbally and in writing.

2. Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian Pelaporan Pelanggaran pada saat pemangku kepentingan dan/atau perwakilan pemangku kepentingan mengajukan Pelaporan Pelanggaran.
3. Perusahaan wajib memberikan tanda terima, jika pelaporan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
4. Apabila pelaporan pelanggaran diajukan oleh perwakilan pemangku kepentingan, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu fotokopi buku identitas pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentingan dan surat kuasa dari pemangku kepentingan.
5. Jika perwakilan pemangku kepentingan adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
6. Penerima Pelaporan Pelanggaran adalah Direksi/Direktur Utama/Dewan Komisaris u.p. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran.

2. The Company provides an explanation of the policies and procedures for resolving the Violation Report when stakeholders and/or representatives filing the Violation Report.
3. The Company is required to provide a receipt, if reporting violations is submitted in writing with an identity.
4. If the reporting of violations is submitted by a representative, then in addition to the above documents, the whistleblower must also submit other documents, namely photocopies of the identity of stakeholders and representatives, as well as a power of attorney from stakeholders.
5. If the stakeholder representative is an institution or legal entity, it must be accompanied by a document stating that the party submitting the Violation Report is authorized to represent the institution or legal entity.
6. Violation Report Recipients are Directors/President Director/Board of Commissioners, Attn: Violation Reporting Management Team.

Perlindungan Pelapor

Perusahaan memberikan jaminan perlindungan kepada pihak pelapor selama proses investigasi atas laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan meliputi perlindungan atas adanya perilaku balasan atau perilaku yang tidak adil maupun penurunan karir yang mungkin diakibatkan oleh laporan yang disampaikan.

Protection for Whistleblower

The Company provides protection to the whistleblower during the violation indication report investigation process according to prevailing regulation. The protection provided by the Company includes protection for any retaliation or unfair treatment or demotion that may occur due to the submitted report.

Laporan Pelaporan Pelanggaran Tahun 2021

Sejak dilakukannya sosialisasi atas mekanisme *whistleblowing* pada Februari 2014 sampai dengan akhir Desember 2021 tidak ada pengaduan pelanggaran yang diterima oleh Perusahaan.

Whistleblowing Implementation Report in 2021

Following the dissemination of the whistleblowing mechanism in February 2014 until the end of December 2021 there were no complaints of violations received by the Company.

Keterbukaan Informasi
INFORMATION DISCLOSURE

Untuk mendukung penerapan prinsip GCG, terutama transparansi, Perusahaan telah memiliki situs resmi (www.nasionalre.co.id) dimana semua informasi penting mengenai Perusahaan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Selain itu, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut masyarakat dapat mengirimkan surat elektronik yang ditujukan kepada:
nasionalre@nasionalre.co.id

To support the implementation of GCG principles, especially on transparency, the Company has an official website (www.nasionalre.co.id) where all material information about the Company can be accessed by the public.

In addition, for further explanation, the public can also send e-mails addressed to:

nasionalre@nasionalre.co.id

NASIONAL RE
Reinsurance

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Komitmen dan Penerapan TJSL

CSR COMMITMENT AND IMPLEMENTATION

Perusahaan meyakini bahwa keberadaannya harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitar agar terjalin sinergi yang kuat sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang bagi Perusahaan. Hal ini sejalan dengan visi Perusahaan untuk tumbuh menjadi sebuah perusahaan reasuransi yang tepercaya, tangguh dan terus tumbuh.

Untuk itu, Perusahaan senantiasa berkomitmen dan berupaya menyeimbangkan aspek keberlanjutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbasa. Salah satu bentuk penerapannya adalah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) yang secara konsisten dilaksanakan oleh Perusahaan dan mencakup 4 (empat) pilar TJSL, yakni:

1. Pilar Sosial,
2. Pilar Ekonomi,
3. Pilar Lingkungan,
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola (Stabilitas Keamanan).

Meskipun kegiatan usaha dan operasional Perusahaan tidak secara langsung melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam, Perusahaan tetap mengedepankan pelaksanaan kegiatan TJSL sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan insiatif yang dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs).* Perusahaan telah menempatkan aktivitas TJSL sebagai elemen tidak terpisahkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan TJSL yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Pada tahun 2021, realisasi total biaya CSR Perusahaan mencapai Rp415.231.800.

The Company believes that its existence must be able to provide benefits to the community and the surrounding environment in order to establish a strong synergy so as to encourage sustainable growth in the long term for the Company. This is in line with the Company's vision to grow into a reinsurance company that is reliable, resilient and continues to grow.

To that end, the Company is always committed and strives to balance sustainability aspects in accordance with Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Best Companies. One form of implementation is through the Corporate Social and Environmental Responsibility program (CSR) program which is consistently implemented by the Company and covers 4 (four) CSR pillars, namely:

1. Social,
2. Econnomic,
3. Environment,
4. Legal and Governance.

Although the Company's business and operational activities do not directly exploit and explore natural resources, the Company still prioritizes the implementation of CSR activities in accordance with the basis of applicable laws and regulations and takes initiatives that can support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The Company has placed CSR activities as an integral element in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and continues to strive to improve the quality of CSR activities carried out every year.

In 2021, the realization of the Company's total CSR costs reached Rp415,231,800.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Aspek Lingkungan Hidup

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENTAL ASPECT

Terkait inisiatif pelestarian lingkungan hidup, ada beragam kebijakan yang diterapkan Perusahaan, termasuk di antaranya adalah efisiensi penggunaan energi dan sumber daya dalam kegiatan usaha dan operasional sehari-hari.

Pada tahun 2021, Perusahaan terus melanjutkan dan memperkuat implementasi kebijakan *paperless office* melalui penggunaan saluran elektronik untuk komunikasi internal di Perusahaan, serta terus mendorong penerapan 3R (*Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*) antara lain melalui penggunaan kertas bekas dan penggunaan kertas secara bolak balik. Selain itu, Perusahaan juga telah menetapkan pemanfaatan *Information Communication & Technology* (ICT) sebagai salah satu *tools* bisnis *(business enabler)* dalam strategi utamanya sesuai RKAP tahun 2022. Perusahaan selanjutnya menetapkan kebijakan utama untuk melakukan *upgrading IT core system* dan *supporting* sebagai upaya digitalisasi proses bisnis.

Perusahaan juga memperhatikan kelestarian sumber daya air dan energi yang digunakan. Hal ini dilaksanakan melalui inisiatif penghematan air dan listrik melalui himbauan dan mekanisme kerja, antara lain penggunaan lampu hemat energi, mematikan pendingin ruangan serta peralatan elektronik ketika tidak digunakan.

Perusahaan juga telah memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai bekerja sama dengan pihak manajemen gedung lokasi kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan.

Regarding environmental conservation initiatives, the Company implements various policies, including efficient use of energy and resources in business activities and daily operations.

In 2021, the Company will continue and strengthen the implementation of the paperless office policy through the use of electronic channels for internal communication within the Company, as well as continue to encourage the implementation of 3R (Reduce, Reuse and Recycle), among others through the use of waste paper and the use of paper back and forth. In addition, the Company has also determined the use of Information Communication & Technology (ICT) as one of the business tools (business enabler) in its main strategy according to the 2022 RKAP. The Company has further established the main policy for upgrading IT core systems and supporting it as an effort to digitize business processes. .

The Company also pays attention to the sustainability of water and energy resources used. This is carried out through water and electricity saving initiatives through appeals and work mechanisms, including the use of energy-saving lamps, turning off air conditioners and electronic equipment when not in use.

The Company also has an adequate waste management system in collaboration with the building management for the Company's head office and branch offices.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Nasabah

SOCIAL RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS

Sebagai perusahaan yang memiliki kapasitas untuk menyediakan jasa reasuransi, baik konvensional maupun Syariah, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan edukasi mengenai produk dan jasa yang ditawarkan kepada seluruh nasabah sekaligus sebagai bentuk perlindungan nasabah di Sektor Jasa Keuangan. Selain melaksanakan edukasi dan kegiatan temu nasabah secara berkala, Perusahaan juga telah memiliki sarana pengaduan nasabah untuk menyampaikan masukan atau keluhan terhadap produk dan jasa Perusahaan.

As a company that has the capacity to provide reinsurance services, both conventional and Sharia, the Company is committed to providing education about the products and services offered to all customers as well as a form of customer protection in the Financial Services Sector. In addition to carrying out education and regular customer meeting activities, the Company also has a customer complaint facility to submit input or complaints about the Company's products and services.

Pengaduan Pelanggan

Untuk menyampaikan keluhan, masukan maupun kebutuhan lain terkait produk dan jasa Perusahaan, nasabah dapat menghubungi atau mengakses saluran sebagai berikut:

Customer Complaint

To submit complaints, inputs or other needs related to the Company's products and services, customers can contact or access the following channels:

Alamat / Address :

Gedung NASIONAL RE
Jl. Cikini Raya No. 99 PO BOX 1618 JKP 10016
Jakarta Indonesia 10330
Telepon/Phone : (+62-21) 80642500

E-mail : nasionalre@nasionalre.co.id
Website : www.nasionalre.id/ind/pengaduan

Pada tahun 2021, tidak terdapat pengaduan yang diterima oleh Perusahaan.

In 2021, there were no complaints received by the Company.

Survei Kepuasan Pelanggan

Perusahaan telah menetapkan sasaran dan program kerja perusahaan tahun 2022 untuk melakukan pengukuran *customer satisfaction* serta suara pelanggan. Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan telah memiliki saluran untuk menerima keluhan pelanggan dan sedang dalam tahap untuk menerapkan survei kepuasan pelanggan. Perusahaan berharap dengan melakukan pengurukuran terhadap kepuasan pelanggan, maka Perusahaan dapat terus meningkatkan kualitas layanannya untuk menjadi lebih baik lagi di masa mendatang sehingga dapat mencapai visi dan tujuannya serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Customer Satisfaction Survey

The Company has set targets and work programs for the company in 2022 to measure customer satisfaction and providing call center. Until the end of 2021, the Company has a channel to receive customer complaints and is in the stage of implementing a customer satisfaction survey. The Company expects that by measuring customer satisfaction, the Company can continue to improve the quality of its services to be even better in the future so that it can achieve its vision and goals and encourage sustainable growth.

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2021 PT Reasuransi Nasional Indonesia

STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT 2021 OF PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information in the 2021 Annual Report of PT Reasuransi Nasional Indonesia has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report of PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Thus this statement letter is made truthfully.

Dr. Toto Pranoto, CRGP
Komisaris Utama
President Commissioner

Vincentius Wilianto, FSAI., AAIJ.
Komisaris
Commissioner

A. Yanti F. Parapat
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Teddy Sastra, S.E., M.M., AMRP.
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2021 PT Reasuransi Nasional Indonesia

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT 2021 OF PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia.

We, the undersigned, declare that all information in the 2021 Annual Report of PT Reasuransi Nasional Indonesia has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report of PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement letter is made truthfully.

Achmad Sudiyar Dalimunthe, S.Pi., MBA., AAIK., AAK., AIIS.
Direktur Utama
President Director

Erlan Risdiyanto, S.E., ACII., AMII., CRMP., CRGP.
Direktur Operasi
Operations Director

Fitris Dinarwan, S.T., M.M., ACII., CRGP.
Direktur Teknik
Technical Director

Sunarso, S.E., M.M., Ak., AAAIK., AIIS., CSA®., CA., CFP®., CRMP., CIHRM., CHRP
Direktur Keuangan & SDM
Finance & HR Director

NASIONAL RE
Reinsurance

Laporan Keuangan

Financial report

NASIONAL RE
Reinsurance

2021 | LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

NASIONAL RE
Reinsurance

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA:
Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta Pusat, Jakarta - 10330 Indonesia. PO. Box 1618 JKP-10016
Telp: 62-21 3140009, 3149773 (Hunting) Fax: 62-21 33143716, 3904944, 31900430

www.nasionalre.id